

JURNAL ANALISIS SOSIAL

Tujuan

Jurnal Analisis Sosial AKATIGA terbit pertama kali pada 1995. Sejak itu, AKATIGA telah menerbitkan 19 volume jurnal yang setiap volumenya hadir 2 edisi per tahun secara rutin.

Sebagai terbitan ilmiah populer independen, Jurnal Analisis Sosial berupaya menyebarkan gagasan-gagasan kritis yang berorientasi pada perbaikan kehidupan masyarakat miskin dan marjinal di Indonesia, kepada masyarakat luas.

Jurnal Analisis Sosial menyajikan secara bergiliran tema tulisan dan gagasan sesuai fokus kegiatan penelitian AKATIGA, yakni perburuhan, usaha kecil, agraria, perempuan, kemiskinan, dan tata kelola pemerintahan.

Jurnal ini menawarkan studi dan analisa kritis yang mendalam sebagai rujukan bagi pembuat kebijakan, sektor swasta, akademisi, maupun organisasi masyarakat sipil.

Kebijakan Redaksional

Jurnal Analisis Sosial menerima naskah dalam Bahasa Indonesia maupun naskah Bahasa Inggris yang telah diterjemahkan ke dalam Bahasa Indonesia. Naskah terjemahan harus mencantumkan sumber naskah, penulis, tahun penerbitan, dan nama majalah diterbitkannya naskah yang bersangkutan. Naskah harus diketik dengan spasi 1,5 dan terdiri dari minimum 5.000 kata, termasuk teks dan daftar rujukan. Semua naskah yang masuk dan diterbitkan menjadi hak cipta AKATIGA.

JURNAL **ANALISIS SOSIAL**

Vol. 19 No. 1 Edisi Agustus 2015



AKATIGA
Pusat Analisis Sosial

JURNAL ANALISIS SOSIAL

Vol. 19 No. 1 Edisi Agustus 2015

ISSN 1411 - 0024

JURNAL ANALISIS SOSIAL

Vol. 19 No. 1, Edisi Agustus 2015

Penanggung Jawab:	Fauzan Djamal
Anggota Redaksi:	Santi Cahya Pratiwi Taufik Rahayu
Editor:	Ben White
Mitra Bestari:	Nurul Widyaningrum
Penyunting Bahasa:	Syailendra Prahaswara
Penerjemah:	An Nisaa Yovani
Penata Letak:	Syailendra Prahaswara
Perancang Sampul:	Indra Fauzi

ISSN 1411 – 0024

Terbit Sejak 1995

Alamat Penerbit dan Redaksi:

YAYASAN AKATIGA

Jalan Tubagus Ismail II/2

Bandung, 40134

Indonesia

Telp. 022 2502303

Faks. 022 2535824

E-mail: akatiga@indo.net.id

Situs: www.akatiga.org

JURNAL ANALISIS SOSIAL

Vol. 19 No. 1 Edisi Agustus 2015

ISSN 1411 - 0024

Dicetak di Bandung, Indonesia, Agustus 2015

This publication has been made possible through the support of Knowledge Sector Initiative (KSI). The articles in this publication do not necessarily reflect the views of KSI. Commercial use of all media published by the KSI is not permitted without the written consent of the KSI.

Publikasi ini dapat terlaksana berkat dukungan dari Knowledge Sector Initiative (KSI). Meskipun demikian, artikel yang dipublikasikan tidak mencerminkan pendapat dari KSI. Dilarang menggunakan materi publikasi untuk tujuan komersial tanpa persetujuan tertulis dari KSI.

PENGANTAR REDAKSI

Jurnal Analisis Sosial AKATIGA tahun ini genap terbit 19 volume, sejak pertama terbit Oktober tahun 1995. Gagasan awal diterbitkannya Jurnal Analisis Sosial sejalan dengan gagasan awal pendirian AKATIGA – Pusat Analisis Sosial 3 tahun sebelumnya, yaitu membuat sebuah terbitan ilmiah populer independen untuk menyebarluaskan gagasan-gagasan kritis yang berorientasi pada perbaikan kehidupan masyarakat miskin atau marjinal di Indonesia, kepada masyarakat luas.

Sejak pertama terbit tahun 1995, Jurnal Analisis Sosial menyajikan secara bergiliran tema tulisan dan gagasan sesuai dengan fokus kegiatan penelitian AKATIGA yakni perburuhan, usaha kecil, agraria, perempuan, kemiskinan dan penatakelolaan (*governance*).

Tulisan-tulisan dalam Jurnal Analisis Sosial merupakan gagasan, uraian maupun analisis dari para akademisi dari dalam dan luar negeri, aktivis LSM, mahasiswa dan pejabat pemerintah mengenai kondisi kaum miskin marjinal dan kebijakan-kebijakan makro maupun mikro yang berdampak terhadap kehidupan kaum marjinal yang dilengkapi dengan ide dan rekomendasi kebijakan maupun penelitian untuk perbaikan.

Pada awalnya Jurnal Analisis Sosial diterbitkan 3 kali setahun secara rutin, akan tetapi dengan berbagai kombinasi keadaan, pada tahun-tahun tertentu hanya dapat diterbitkan 1 kali. Meskipun demikian Jurnal Analisis Sosial selama 17 tahun berturut-turut tetap hadir, kecuali pada tahun 1998 ketika krisis keuangan Asia melanda dan tahun 2014 karena menghabiskan waktu cukup lama pematangan tema untuk edisi ini.

Dalam perjalanannya Jurnal Analisis Sosial telah menjadi salah satu penanda keberadaan AKATIGA yang terbitannya selalu dinantikan oleh para pembaca yang berasal dari lingkaran yang sama dengan para kontributor ditambah dengan kelompok pembaca dari organisasi masyarakat dan kelompok akar rumput.

Ke depan, Jurnal Analisis Sosial akan ditingkatkan mutu dan keteraturan penerbitannya, serta mempersiapkan untuk akreditasi jurnal dimulai dari edisi ini, agar salah satu misi AKATIGA untuk menyebarluaskan kepedulian terhadap kondisi kehidupan kaum miskin marjinal di Indonesia dapat terus terjaga.

Kami menghaturkan terima kasih kepada pihak-pihak terkait dan rekan-rekan jaringan AKATIGA yang telah membantu terlaksananya penerbitan jurnal edisi 19 ini. Terutama kepada Knowledge Sector Initiative (KSI), berkat dukungan dan kerjasama dari KSI publikasi ini dapat terlaksana. Meskipun demikian, artikel yang dipublikasikan tidak mencerminkan pendapat dari KSI. Jurnal Vol. 19 No. 1 Kemandirian Pangan mengantarkan anda kepada pemikiran yang lebih terbuka terhadap keadaan pangan di Indonesia.

Bandung, Agustus 2015

DAFTAR ISI

PENGANTAR REDAKSI	v
DAFTAR ISI	vii
DAFTAR TABEL	viii
DAFTAR GAMBAR	ix
DAFTAR GRAFIK	x
EDITORIAL	
Pertanian Pangan: Mitos dan Realita Pertanian Padi di Indonesia <i>Fauzan Djamal</i>	xi – xx
RUANG METODOLOGI	
Meneliti Masalah Petani dan Pangan pada Tingkat Lokal: Pengantar Studi Kemandirian Pangan Akatiga <i>Ben White</i>	1 – 10
BAHASAN UTAMA	
1. Tanah untuk Penggarap? Penguasaan Tanah dan Struktur Agraris di Beberapa Daerah Penghasil Padi <i>Aprilia Ambarwati & Ricky Ardian Harahap</i>	11 – 26
2. Menguak Realitas Pemuda di Sektor Pertanian Perdesaan <i>Yogaprasta A. Nugraha & Rina Herawati</i>	27 – 40
3. Sistem Pertanian Padi Indonesia dalam Perspektif Efisiensi Sosial <i>Herlina Wati & Charina Chazali</i>	41 – 56
4. Kebun Pangan Skala Luas di Ketapang: Menggambar Angan-Angan tentang Surplus Produksi <i>Laksmi A. Savitri & Khidir M. Prawirosusanto</i>	57 – 72
5. Mitos-Mitos dalam Pertanian Padi dan Rekomendasi dari Penelitian Kemandirian Pangan Akatiga <i>Isono Sadoko</i>	73 – 82
TINJAUAN BUKU	
Land's End: Capitalist Relations On An Indigenous Frontier <i>Ben White</i>	83 – 86
BERITA PERPUSTAKAAN	
Mengecap Secangkir Kopi dan Setangkup Pengetahuan di Perpustakaan <i>Santi Cahya Pratiwi</i>	87 – 94

DAFTAR TABEL

Meneliti Masalah Petani dan Pangan pada Tingkat Lokal: Pengantar Studi Kemandirian Pangan Akatiga

Ben White

Tabel 1. Kriteria Pemilihan Lokasi Penelitian.....	8
--	---

Tanah untuk Penggarap?

Penguasaan Tanah dan Struktur Agraris di Beberapa Daerah Penghasil Padi

Aprilia Ambarwati & Ricky Ardian Harahap

Tabel 1. Perubahan RTP yang Menguasai Tanah, tahun 1963-2003.....	14
Tabel 2. Jumlah RTP menurut Golongan Luas Tanah yang Dikuasai berdasarkan ST2003 dan ST2013.....	14
Tabel 3. Distribusi Petani Menggunakan Lahan dan Status Penggarapannya, 1963-2003.....	15
Tabel 4. Estimasi Penyebaran RTP menurut Jenis Penguasaan pada 12 Desa Penelitian (% dari Semua Rumah Tangga).....	15
Tabel 5. Persentase Sampel 30 RTP berdasarkan Strata Penggunaan Tanah pada 12 Desa Penelitian.....	16

Menguak Realitas Orang muda di Sektor Pertanian Perdesaan

Yogaprasta A. Nugraha & Rina Herawati

Tabel 1. Karakteristik Desa berdasarkan Ketersediaan Lapangan Kerja Bukan-Pertanian Padi (Lampiran).....	39
Tabel 2. Berbagai Jenis Pekerjaan Bukan-Pertanian dan Pendapatan yang Dihasilkan.....	29
Tabel 3. Keterlibatan Orang Muda di 12 Desa Penelitian dalam Tahapan Produksi Menurut Jenis Kelamin.....	32

Sistem Pertanian Padi Skala Kecil Indonesia dalam Perspektif Efisiensi Sosial

Herlina Wati & Charina Chazali

Tabel 1. Perbandingan Biaya, Tenaga Kerja, dan Waktu Kerja pada Tahapan Penanaman di Dua Belas Desa Penelitian (per Ha).....	46
Tabel 2. Perbandingan Upah Buruh Panen dengan Upah Bikan Pertanian/ Usaha Bermodal Relatif Kecil Per Hari Tahun 2012-2013 (dalam Ribuan Rupiah).....	50
Tabel 3. Rata-Rata Biaya Pestisida pada 12 Desa Penelitian Musim Kemarau 2013 (dalam Jutaan Rupiah).....	55
Tabel 4. Rata-Rata Biaya Pestisida pada 12 Desa Penelitian Musim Penghujan 2012- 2013 (dalam Jutaan Rupiah).....	56
Tabel 5. Persentase Penggunaan Biaya Pestisida terhadap Total Biaya Produksi pada 12 Desa Penelitian Musim Kemarau 2013.....	56
Tabel 6. Persentase Penggunaan Biaya Pestisida terhadap Total Biaya Produksi pada 12 Desa Penelitian Musim Penghujan 2012-2013.....	56

Kebun Pangan Skala Luas di Ketapang:

Menggambar Angan-Angan tentang Surplus Produksi

Laksmi A. Savitri & Khidir M. Prawirosusanto

Tabel 1. Luas Lokasi Kebun Pangan Ketapang (21 Agustus 2013).....	61
Tabel 2. Hasil Produksi Padi Percobaan dengan Luas Tanam 100 Hektar.....	67
Tabel 3. Analisis Potensi Kerugian PT Pupuk Indonesia (dalam Rp).....	67
Tabel 4. Program Kebun Pangan di Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat (Lampiran) ...	70
Tabel 5. Realisasi Anggaran Biaya Budidaya Padi Per Hektar Tahun 2014 (Lampiran).....	71

DAFTAR GAMBAR

Kebun Pangan Skala Luas di Ketapang:

Menggambar Angan-Angan tentang Surplus Produksi

Laksmi A. Savitri & Khidir M. Prawirosusanto

Gambar 1. Koridor Ekonomi Indonesia dalam MP3EI	58
Gambar 2. Lokasi Ketapang Food Estate	61
Gambar 3. Trial Plots of KFE in Sukamaju Village	65

DAFTAR GRAFIK

Meneliti Masalah Petani dan Pangan pada Tingkat Lokal:

Pengantar Studi Kemandirian Pangan Akatiga

Ben White

Grafik 1. Hasil Produksi dan Impor Beras di Indonesia Tahun 2005-2014	2
---	---

Tanah untuk Penggarap?

Penguasaan Tanah dan Struktur Agraris di Beberapa Daerah Penghasil Padi

Aprilia Ambarwati & Ricky Ardian Harahap

Grafik 1. Cisari.....	20
Grafik 2. Dawungan.....	21
Grafik 3. Mulyoharjo	21
Grafik 4. Sidosari	21
Grafik 5. Cempaka	22
Grafik 6. Walian.....	22
Grafik 7. Parangputih.....	22
Grafik 8. Sarimulyo.....	22
Grafik 9. Wetanan	23
Grafik 10. Wanakerta.....	23
Grafik 11. Karang	23
Grafik 12. Gadingan.....	23

Sistem Pertanian Padi Skala Kecil Indonesia dalam Perspektif Efisiensi Sosial

Herlina Wati & Charina Chazali

Grafik 1. Produktivitas Hasil Panen (Ton Gabah/Ha) menurut Luas Lahan yang Dusahakan di 12 Desa Penelitian, Musim Kemarau 2013	52
Grafik 2. Produktivitas Hasil Panen (Ton Gabah/Ha) menurut Luas Lahan yang Dusahakan di 12 Desa Penelitian, Musim Penghujan 2012-2013	52
Grafik 3. Produktivitas Hasil Panen (Ton Gabah/Ha) menurut Luas Lahan yang Dusahakan di Seluruh Desa Penelitian, Musim Kemarau 2013 dan Musim Penghujan 2012-13	53
Grafik 4. Produktivitas Hasil Panen (Ton Gabah/Ha) Menurut Luasan Lahan yang Dusahakan/Ditanami Berdasarkan Data IFLS Tahun 2007	53
Grafik 5. Produktivitas Hasil Panen (Ton/Ha) Menurut Status Penguasaan Lahan di 12 Desa Penelitian, Musim Kemarau 2013.....	54
Grafik 6. Produktivitas Hasil Panen (Ton/Ha) Menurut Status Penguasaan Lahan di 12 Desa Penelitian, Musim Penghujan 2012-2013	54
Grafik 7. Produktivitas Hasil Panen (Ton/Ha) Menurut Status Penguasaan Lahan di Seluruh Desa Penelitian, Musim Kemarau 2013 dan Musim Penghujan 2012-2013	55

PERTANIAN PANGAN: Mitos dan Realita Pertanian Padi di Indonesia

Fauzan Djamal¹

PENDAHULUAN

Sektor pangan sampai saat ini masih menjadi isu sentral untuk dibahas. Bagaimana tidak, pangan merupakan kebutuhan dasar dan hak azasi manusia yang perlu dipenuhi sebelum kebutuhan lainnya dalam mempertahankan hidup. Masalah pangan pun berkaitan erat dengan permasalahan ketahanan sosial, stabilitas ekonomi, politik, dan keamanan nasional secara keseluruhan.

Permasalahan pangan di Indonesia tidak terlepas dari komoditas beras. Beras merupakan bahan pangan pokok yang dikonsumsi oleh hampir seluruh rakyat Indonesia. Konsumsi beras Indonesia merupakan konsumsi beras tertinggi di Asia. Konsumsi beras per kapita memang mengalami penurunan sejak tahun 2008 dari sebesar 93,4 kg/kapita menjadi 87,23 kg/kapita pada tahun 2012.² Meskipun begitu, ketika dikalikan dengan jumlah penduduk Indonesia yang terus meningkat, jumlah kebutuhan beras nasional bisa terus meningkat. Karenanya, tidaklah keliru jika pemerintah menetapkan beras termasuk tanaman pangan yang menjadi target awal swasembada.

Prioritas pangan sebenarnya menjadi salah satu agenda utama setiap masa pemerintahan presiden. Pada tahun 2011, pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono meluncurkan desain ekonomi besar yang disebut sebagai Masterplan Perluasan dan Percepatan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI) untuk mengatur terbentuknya koridor-koridor ekonomi di setiap pulau-pulau besar di Indonesia sesuai dengan karakteristik komoditas global unggulannya.³ MP3EI membagi Indonesia ke dalam enam koridor ekonomi, salah satunya adalah koridor pusat pengembangan pangan, perikanan, energi dan pertambangan nasional di Sulawesi Selatan dan Papua. Salah satu program yang diluncurkan di dalam payung MP3EI itu adalah *Merauke Integrated Food and Energy Estate* (MIFEE).⁴

Pemerintahan era Jokowi pun kembali menancapkan prioritas pembangunannya pada sektor pangan dan infrastruktur, termasuk infrastruktur pendukung pertanian. Presiden Jokowi dan Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman, dalam berbagai media menyatakan memiliki target waktu tiga dan lima tahun untuk mencapai target swasembada.⁵ Hal ini sejalan dengan NAWA CITA yang mengarahkan pembangunan pertanian ke depan untuk mewujudkan kedaulatan pangan. Kedaulatan pangan diterjemahkan dalam bentuk kemampuan bangsa dalam hal: (1) mencukupi kebutuhan pangan dari produksi dalam negeri, (2) mengatur kebijakan pangan secara mandiri, serta (3) melindungi dan menyejahterakan petani sebagai pelaku utama usaha pertanian pangan. Kata lain, kedaulatan pangan harus dimulai dari swasembada pangan yang secara bertahap diikuti dengan peningkatan nilai tambah usaha pertanian secara luas untuk meningkatkan kesejahteraan petani.⁶ Akselerasi pembangunan pangan dilakukan dengan melakukan Upaya Khusus (Upsus). Upsus terdiri dari pengembangan jaringan irigasi, optimalisasi lahan, gerakan penerapan teknologi budidaya pengelola tanaman terpadu, bantuan fasilitas panen dan pascapanen, meningkatkan pendampingan dan pengawalan oleh petugas penyuluh pertanian dalam membantu masyarakat mengelola usaha pertaniannya.⁷

Respon terhadap pentingnya sektor pangan tersebut dilakukan AKATIGA melalui penelitian Kemandirian Pangan sejak tahun 2013, dengan dukungan dari *Knowledge Sector Initiative* (KSI). Tujuan penelitian adalah untuk mengeksplorasi masalah-masalah dan potensi-potensi pertanian padi skala kecil di Indonesia dalam memenuhi desakan kemandirian pangan, baik di tingkat nasional maupun di tingkat lokal.

¹ Direktur Eksekutif AKATIGA

² Publikasi Data Susenas, 2012

³ Lihat Dokumen MP3EI 2011

⁴ Lihat berbagai media massa yang merekam perkembangan MIFEE seperti

<http://www.thejakartapost.com/news/2015/04/16/govt-revive-food-estate-project-papua.html>,

<http://www.thejakartapost.com/news/2015/10/30/food-estate-project-may-turn-papua-forest-fire-hotbed.html>,

<http://news.mongabay.com/2015/07/indonesians-cite-miffee-project-at-un-meeting-on-corporate-abuses/>

⁵ Sebagai contoh dapat dilihat dari <http://bisniskeuangan.kompas.com/read/2014/12/10/121200526/Jokowi.Tiga.Tahun.Belum.Swasembada.Saya.Ganti.Menteri.Pertanian>

⁶ Lihat Renstra Kementerian Pertanian 2015-2019

⁷ Demi mencapai target kedaulatan pangan, Kementerian Pertanian masuk dalam sepuluh kementerian penerima anggaran terbesar dalam RAPBN 2016, sebesar Rp 31,5 triliun.

(<http://nasional.kompas.com/read/2015/11/02/20094921/Ini.10.Kementerian.dengan.Anggaran.Tertinggi.dalam.APBN.2016>)

AKATIGA merasa saat ini pertanian padi skala kecil masih lebih unggul dalam menjaga stabilitas pangan (terutama beras), karena turut membantu mengatasi persoalan kemiskinan, khususnya di perdesaan, serta berpotensi menyerap tenaga kerja perdesaan.

Akan tetapi, pertanian padi skala kecil di Indonesia masih menghadapi persoalan-persoalan struktural. Hal ini membutuhkan komitmen pemerintah dan institusi lain yang untuk memberikan solusi yang tepat. Hasil dari penelitian ini pun diharapkan memberikan gambaran jelas terhadap apa yang sebenarnya terjadi di desa dan menjadi rekomendasi kepada para pengambil kebijakan.

SISTEMATIKA PAPARAN

Ben White⁸ sebagai salah satu pengawas kualitas penelitian Kemandirian Pangan telah terlibat dari perencanaan awal sampai pada diseminasi penelitian ini. Kali ini terasa tepat bagi kami untuk meletakkan ruang metodologi di depan sebagai pengantar dari tulisan-tulisan lainnya. White telah merangkum rasionalisasi penelitian Kemandirian Pangan, proses penelitian, sampai melakukan refleksi yang bisa menjadi pembelajaran ke depan bagi AKATIGA dan lembaga lain yang melakukan penelitian mengenai pertanian.

Tulisannya memberikan penjelasan singkat mengenai pemilihan konsep Kemandirian Pangan dalam penelitian ini. Mulai dari kemunculan Badan Ketahanan sebagai strategi pemerintah dalam merespon masalah kerawanan pangan di Indonesia. Akan tetapi, ketahanan pangan masih dianggap belum tepat dalam menyelesaikan masalah pangan, terutama pada keterlibatan masyarakat dalam produksi pangan, sehingga muncullah konsep kedaulatan pangan yang diusung oleh *La Via Campesina*. AKATIGA akhirnya mengambil konsep Kemandirian Pangan untuk penelitian ini dengan memusatkan fokusnya pada petani sebagai pihak yang memproduksi pangan.

Pertanian menjadi sangat penting karena mayoritas penduduk Indonesia masih bergantung pada sektor pertanian di perdesaan, namun sayangnya perdesaan masih menjadi kantung kemiskinan di Indonesia. Padahal pertanian pangan masih memiliki fungsi sosial yang tinggi dan seharusnya mampu memberikan kontribusi (1) pemenuhan kebutuhan pangan nasional, (2) menyediakan lapangan pekerjaan dan penghasilan bagi masyarakat perdesaan, (3) menciptakan generasi baru petani yang pintar, (4) menggunakan teknik pengelolaan tanah yang efisien secara sosial dan berkelanjutan.

Oleh karena itu, tulisan ini akan diikuti dengan tiga kelompok topik, yaitu (1) penguasaan tanah dan struktur agraris, (2) sistem pertanian padi dan perubahannya, dalam perspektif efisiensi sosial, dan (3) generasi muda perdesaan, kesempatan kerja, dan keberlanjutan pertanian skala kecil. Penelitian Kemandirian Pangan ini menggunakan delapan konsep yang dijelaskan ke dalam tulisan White, seperti reproduksi sosial, akses dalam penelitian perdesaan, Diferensiasi Agraris, Rezim Ketenagakerjaan Agraris, Peralihan Nilai Antarpelaku dan Antargolongan, Hubungan Luas Usaha Tani dengan Produktivitas, Interaksi Akses dan Kegiatan Pertanian dan Bukan-Pertanian dalam Proses Akumulasi dan Diferensiasi Sosial-Ekonomi Masyarakat Desa, serta Efisiensi Sosial. Tulisan ini dilanjutkan dengan penjelasan pertanyaan penelitian dari ketiga topik di atas, metode penelitian, dan ditutup dengan refleksi, terutama pada kelanjutan dari penelitian Kemandirian Pangan.

Aprilia Ambarwati dan Ricky Ardian Harahap⁹ mencoba menjabarkan pola pengaturan lahan dan struktur agraris dari desa-desa penelitian. Keduanya menganalisis hubungan antara kepemilikan lahan dengan pendapatan pertanian dan bukan-pertanian. Tulisan ini menunjukkan bahwa masyarakat perdesaan atau masyarakat pertanian sebagai sesuatu yang sifatnya homogen, merata, dan statis, adalah suatu asumsi yang perlu kita ubah. Artikel ini secara gamblang menunjukkan adanya heterogenitas besar dalam pola pemilikan dan penguasaan tanah antardaerah, bahkan terjadi ketimpangan struktur penguasaan tanah. Saat ini, sistem bagi hasil merupakan sistem penguasaan tanah yang paling banyak ditemukan.

Artikel ini juga mengkritisi salah satu temuan Sensus Pertanian 2013 yang dilakukan Badan Pusat Statistik. Jumlah Rumah Tangga Pertanian petani gurem di Indonesia yang menurun secara drastis dalam waktu 10 tahun terakhir sempat menjadi polemik dan banyak dijadikan referensi tulisan. Temuan ini disebabkan oleh perubahan definisi RTP dan tujuan usaha pertanian yang digunakan Sensus Pertanian 2013, sedangkan penurunan jumlah petani pangan gurem cenderung tidak berubah.

Kebijakan revolusi hijau di masa Orde Baru telah mengesampingkan upaya untuk mengendalikan proses diferensiasi dalam penguasaan lahan sebagai dampak dari komersialisasi pertanian dengan target swasembada pangan. Terjadinya kecenderungan penguasaan tanah oleh sebagian kecil kelompok orang telah mengancam kemandirian pangan karena mengarah kepada penurunan produktivitas, distribusi pendapatan yang tidak merata, berkurangnya serapan tenaga kerja pertanian padi, rentan terhadap alih fungsi lahan. Hal-hal tersebut diyakini dapat meningkatkan kemiskinan di perdesaan.

⁸ Professor Emeritus Sosiologi Pedesaan, International Institute of Social Studies (ISS), The Hague.

⁹ Aprilia Ambarwati adalah peneliti AKATIGA dan Ricky Ardian Harahap adalah peneliti lepas AKATIGA yang banyak mengkaji isu pemberdayaan masyarakat miskin dan tata kelola pemerintahan.

Mengacu pada tulisan klasik mengenai struktur agraris, tulisan ini menunjukkan hubungan antara penguasaan tanah dengan akumulasi modal saat ini juga dipengaruhi oleh sektor bukan-pertanian. Dinamika ini terjadi di beberapa lokasi penelitian, buruh tani tak bertanah memiliki kesempatan lebih untuk menambah penghasilan dari sektor bukan-pertanian.

Meskipun begitu, kecenderungan monopoli tetap terlihat di beberapa desa lainnya, yaitu mereka yang menguasai tanah luas juga melakukan akumulasi modal pada sektor bukan-pertanian. Bahkan sejalan dengan data BPS tahun 1983-2003, jumlah buruh tani di sebagian besar desa penelitian cenderung mengalami peningkatan. Hal ini dikarenakan penguasaan tanah luas mulai bergeser kepada beberapa orang saja (juga termasuk *absentee* yang signifikan) tanpa diimbangi dengan kesempatan kerja di sektor pertanian dan bukan-pertanian.

Yogaprasta A. Nugraha dan Rina Herawati¹⁰ mengidentifikasi keterlibatan anak muda di sektor pertanian di lokasi penelitian. Tulisan ini mencoba menjawab kegelisahan banyak pihak seperti akademisi, media, dan pengambil kebijakan akan krisis regenerasi di dunia pertanian pangan Indonesia. Pemaparan faktor-faktor yang mendorong atau menarik anak muda untuk tetap bertahan, meninggalkan, atau meninggalkan sementara sektor pertanian pangan menjadi penting agar asumsi anak muda sudah meninggalkan dunia pertanian tidak ditelan begitu saja tanpa melihat akar masalahnya.

Dengan menggabungkan inti pemikiran dari kajian agraria dan kajian tentang kepemudaan, penulis menganalisis hambatan-hambatan struktural yang dihadapi oleh generasi muda, posisi mereka dalam mengakses sumber daya tanah dan kesempatan kerja, dinamika hubungan dan peralihan sumber daya antargenerasi, pola perilaku generasi muda, budaya generasi muda dan preferensi generasi muda.

Anak muda memang cenderung tidak tertarik untuk bekerja di bidang pertanian, namun bukan berarti sepenuhnya meninggalkan bidang pertanian. Keterlibatan anak muda di sawah antara lain adalah sebatas membantu orang tua mereka di sawah, secara mandiri mengelola sawah sebagai petani pemilik, dan bekerja sebagai buruh tani. Anak laki-laki lebih banyak terlibat pada pengolahan lahan dan panen, sedangkan anak perempuan terlibat dalam kegiatan panen. Sebelum menikah dan sudah punya pengalaman bertani, anak muda yang membantu orang tua di sawah pada umumnya belum memiliki kesempatan dalam mengambil keputusan terkait produksi pertanian. Mereka juga pada umumnya baru mendapatkan upah dari orang tuanya setelah menikah.

Terkait dengan artikel sebelumnya, tulisan ini menunjukkan struktur agraris mempengaruhi persepsi anak muda terhadap masa depannya di dunia pertanian pangan. Akses terhadap tanah merupakan salah satu faktor yang dianggap berpengaruh terhadap ketertarikan pemuda untuk tetap bekerja di bidang pertanian. Sebagai contoh, melihat orang tuanya yang menjadi petani penggarap, anak muda lebih cenderung merasa tidak memiliki masa depan di dunia pertanian, nantinya mereka tetap tidak akan memiliki tanah dan tidak akan pernah memperoleh keuntungan banyak karena hasil panen akan dibagi dua dengan pemilik tanah.

Bahkan pemuda yang berasal dari keluarga pemilik tanah tidak bisa langsung memperoleh sawah sebelum menikah, warisan orang tua yang meninggal, atau tidak kuat bertani lagi. Hal ini ditambah dengan preferensi anak muda dipengaruhi dengan *image* bertani yang kotor dan kurang bergengsi daripada pekerjaan di sektor lain. Kondisi ini yang mengakibatkan banyak anak muda mencari pekerjaan di luar sektor pertanian sampai ke luar desa. Namun, penelitian ini menemukan bahwa pola migrasi pemuda perdesaan sering kali bersifat sementara. Di beberapa desa, anak muda baik laki-laki dan perempuan memiliki impian untuk membeli tanah dengan cara mencari penghasilan dari sektor bukan-pertanian.

Oleh karena itu, artikel ini mendukung kesimpulan bahwa reproduksi sosial di sektor pertanian berdasarkan usaha tani kecil tetap terjadi. Meskipun ketertarikan pemuda relatif menurun di sektor pertanian pangan, jumlah petani kecil dan buruh tani kemungkinan besar masih stabil ke depan. Pemerintah selanjutnya menciptakan kebijakan yang memudahkan akses anak muda terhadap tanah, bukan menjauhkan keterlibatan mereka terhadap pengelolaan tanah.

Herlina Wati dan Charina Chazali¹¹ mencermati perubahan dalam sistem pertanian padi skala kecil di lokasi penelitian yang dikaitkan dengan kerangka efisiensi sosial. Kerangka efisiensi sosial menjadi fokus karena mendukung pemerataan sumber daya, menilai kebijakan dan hasilnya menuju kondisi dimana distribusi dan penggunaan sumber daya di dalam suatu masyarakat mencapai titik yang optimal, dan seberapa banyak pendapatan yang masuk untuk orang miskin.

Salah satu argumen dari tulisan ini memberikan sumbangan pada perdebatan dalam studi pertanian dan agraria terkait hubungan antara ukuran tanah dan hasil panen. Penulis menyatakan pertanian sangat kecil dapat menghasilkan hasil yang tinggi, malahan terdapat beberapa indikasi bahwa imbal hasil pertanian yang lebih kecil cenderung lebih tinggi dari pada pertanian yang lebih besar.

¹⁰ Yogaprasta Adinugraha adalah pengajar di Universitas Pakuan dan peneliti lepas AKATIGA, Rina Herawati adalah peneliti lepas AKATIGA yang banyak berkecimpung pada kajian perburuhan.

¹¹ Keduanya merupakan peneliti AKATIGA.

Tulisan ini juga menunjukkan analisis serapan tenaga kerja dan upah yang diterima petani dan buruh tani, sampai terjadinya beberapa inovasi teknologi dan teknik bertani yang berkembang. Sayangnya, inovasi – inovasi yang terkadang didukung pemerintah, menjauhkan pertanian skala kecil dari efisiensi sosial karena tidak meningkatkan hasil, mengurangi kesempatan kerja berburuh tani, mengalihkan sebagian nilai tambah dari golongan buruh tani yg berjumlah banyak ke kelompok petani tanah luas.

Pertanian skala kecil menghadapi banyak hambatan untuk mencapai target produktivitas. Pengorganisasian sistem produksi pertanian padi yang baik (seperti pola tanam serempak, ketersediaan air yang memadai, institusi sebagai wadah aspirasi petani, dll.) akan menghasilkan produksi yang tinggi. Kendala umum yang dihadapi adalah serangan hama dan penyakit tanaman dan banjir di beberapa tempat. Petani juga belum memiliki wadah yang nyata memberikan solusi atas ketergantungan yang mereka alami. Bahkan, organisasi yang seharusnya melayani petani kecil, banyak yang tidak berfungsi dan cenderung dimanfaatkan oleh segelintir orang untuk kepentingan mereka.

Selain itu, penulis juga menggambarkan praktik bertani ramah lingkungan yang berkelanjutan masih dilakukan secara individual dan belum menyebar secara kolektif. Dari hambatan nyata yang dialami petani padi, *elit capture*, sampai masih jauhnya praktik bertani ramah lingkungan, penulis berpendapat selayaknya pemerintah fokus pada membangun pengorganisasian sistem produksi pertanian padi yang baik.

Laksmi A. Savitri dan Khidir M. Prawirosusanto¹² memberikan gambaran yang berbeda dari dari artikel-artikel lainnya, yaitu mengkritisi kebijakan pemerintah Indonesia terkait *food estate*. Menurut kedua penulis, mimpi menaikkan produksi dan memenuhi ketahanan pangan dengan pertanian korporat skala besar perlu dikaji kembali. Penulis menggambarkan bagaimana mimpi besar pemerintah pada akhirnya memunculkan berbagai persoalan dan bukan mencapai target yang diharapkan dengan kasus di Ketapang Food Estate.

Penulis memulai dengan penelusuran bagaimana ide pertanian modern yang diadopsi pemerintah Indonesia ke dalam mekanisasi pertanian dan menumbuhkan investasi di bidang pertanian skala luas yang dituang ke dalam dokumen MP3EI. Proses ini dibandingkan dengan kenyataan yang ada di Ketapang, Kalimantan Barat.

Cerita yang runut ini menggambarkan bahwa pertanian skala besar menimbulkan berbagai persoalan terutama pada kualitas lahan yang bermasalah, hasil produksi yang tidak mencapai target, kemunculan buruh migran, kemunculan mandor-mandor yang juga menikmati rente, ketidakpastian upah dan terjadinya mekanisme penyediaan tenaga kerja dalam kondisi persaingan yang ketat, dan belum tentu memberikan kesejahteraan tinggi kepada orang miskin. Artikel ini ditutup dengan memberikan refleksi kepada pembaca, terutama pengambil kebijakan, untuk melihat realitas di lapangan dan mengaji kembali ide – ide modernisasi pertanian.

Isono Sadoko¹³ mencoba merangkum seluruh temuan penelitian Kemandirian Pangan yang dianalisis menjadi rekomendasi konkrit. Rekomendasi yang ditawarkan antara lain adalah (1) terkait subsidi yang tepat untuk pertanian padi, (2) insentif kepada aktor – aktor yang secara nyata memiliki inovasi yang baik dalam meningkatkan produktivitas tanpa melupakan efisiensi sosial, (3) dengan semangat UU Desa yang baru, mendorong desa mempunyai bank tanah bagi petani perempuan dan pemuda yang miskin yang mau bertani, (4) melakukan penelitian mendalam mengenai institusi yang berhasil di desa dan mendorongnya dengan pendanaan dan program agar semakin menjawab kebutuhan masyarakat perdesaan.

Selain keenam artikel di atas, Jurnal kali ini juga dilengkapi dengan Tinjauan Buku dan Berita Perpustakaan AKATIGA. **Ben White** dalam Tinjauan Buku, memberikan tanggapan yang kritis terhadap buku Tania Li yang berjudul *Land's End: Capitalist Relations on an Indigenous Frontier*. Buku ini bukanlah sebagai perwakilan dari satu desa saja, namun etnografi sebuah daerah yang sudah diteliti oleh Li dalam waktu yang panjang. White mencermati konsep utama yang digunakan Li dalam bukunya, yaitu pendekatan konjunktur, yang sangat menggambarkan proses kapitalisasi yang dihadapi masyarakat Lauje, namun terlalu sering digunakan sehingga terkadang mengaburkan maknanya. Tania Li memaparkan bagaimana seperangkat unsur, proses, hubungan, tempat, waktu, dan tantangan-tantangan politik yang muncul mewarnai kehidupan masyarakat Lauje. Buku ini sangat direkomendasikan untuk memahami proses transformasi daerah pedalaman Indonesia dan masalah-masalah agraria yang diakibatkan dari perubahan tersebut.

Berita Perpustakaan AKATIGA ditulis oleh **Santi Cahya Pratiwi**¹⁴. Artikel yang bernuansa populer ini menginformasikan pengalamannya dalam melihat perkembangan dan bermacam jenis perpustakaan berkonsep kedai kopi di Bandung Raya, dengan harapan mendorong pembaca untuk mulai melihat sekeliling dan mengunjungi perpustakaan terdekat.

Selamat Membaca.

¹² Laksmi Adriani Savitri adalah pengajar di Jurusan Antropologi Budaya, Fakultas Ilmu Budaya-Universitas Gajah Mada dan Khidir Marsanto Prawirosusanto adalah asisten pengajar pada institusi yang sama.

¹³ Peneliti senior di AKATIGA yang banyak melakukan penelitian terkait pembangunan perdesaan. Dia menjadi koordinator dan penanggung jawab atas kualitas penelitian Kemandirian Pangan.

¹⁴ Tim eksternal AKATIGA.

DAFTAR PUSTAKA

- Dokumen MP3EI 2011. <<http://bappenas.go.id/berita-dan-siaran-pers/kegiatan-utama/master-plan-percepatan-dan-perluasan-pembangunan-ekonomi-indonesia-mp3ei-2011-2025/>>
- <http://bisniskeuangan.kompas.com/read/2014/12/10/121200526/Jokowi.Tiga.Tahun.Belum.Swasembada.Saya.Ganti.Menteri.Pertanian> (22 November 2015).
- <http://nasional.kompas.com/read/2015/11/02/20094921/Ini.10.Kementerian.dengan.Anggaran.Tertinggi.dalam.APBN.2016> (2 Desember 2015).
- <http://news.mongabay.com/2015/07/indonesians-cite-miffee-project-at-un-meeting-on-corporate-abuses/> (2 Desember 2015).
- <http://www.thejakartapost.com/news/2015/10/30/food-estate-project-may-turn-papua-forest-fire-hotbed.html> (2 Desember 2015).
- <http://www.thejakartapost.com/news/2015/04/16/govt-revive-food-estate-project-papua.html> (2 Desember 2015).
- Publikasi Data Susenas 2012. <<http://microdata.bps.go.id/mikrodata/index.php/catalog/87/study-description>>
- Renstra Kementerian Pertanian 2015-2019. <http://www.pertanian.go.id/file/RENSTRA_2015-2019.pdf>

FOOD AGRICULTURE: Myth and Reality of Rice Agriculture in Indonesia

Fauzan Djamal¹⁵

INTRODUCTION

Food sector is an central issue to be discussed until this moment. How so, food is a basic need and human rights that need to be fulfilled before other needs in order to maintain our life. Food issues always related with social security issues, economic stability, politics, and national security in general.

Food issues in Indonesia can not be separated with rice commodity. Rice is the main food ingredient that consumed by almost every people in Indonesia. Indonesia is the highest consumer for rice consumption among another countries in Asia. Rice consumption is decreasing per capita since 2008, from 93,4 kg/capita to 87,32 kg/capita in 2012.¹⁶ Even so, when we multiply with the Indonesian people that keep on increasing with the needs of our national rice that also increase. Because of that, It is not wrong if the government set the rice as the first plant for self-sufficient plant.

Food priority is actually one of the main agenda in every governmental era. In 2011, Susilo Bambang Yudhoyono's era launched a big economic design that they called as "*Master Plan Perluasan dan Percepatan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI)*" (Master Plan for Expansion and Acceleration for Indonesian Economic Development) to arrange the form of economic corridors in every big islands in Indonesia that matched with the top characteristic commodity in those areas.¹⁷ MP3EI divided Indonesia into six economic corridors, one of it is the central corridor for food development, fishery, energy and national mining in South Sulawesi and Papua. One of the program that launched under MP3EI's umbrella is MIFEE (Merauke Integrated Food and Energy Estate).¹⁸

Jokowi's regime also set their development priority in food and infrastructure sector, that include infrastructure for agriculture support. President Jokowi and Minister of Agriculture Andi Amran Sulaiman, in many medias stated that they have targeted 3 and 5 years to reach the target of self-sufficiency.¹⁹ This is also going the same way with NAWA CITA which leads the agriculture development to embody food sovereignty. Food sovereignty could be translated as the nation's ability in: (1) suffice the need of the food from domestic rice production, (2) arrange the food policy independently, and (3) the farmers protection and welfare as the main actor of food agriculture business. In another words, food sovereignty has to start from food self-sufficiency and followed sequentially with enhancement the added value of agriculture area in wide-scale to improve farmers' welfare.²⁰ Food development acceleration is been doing by special efforts (*Upsus*). *Upsus* consists of the development of irrigation network, land optimization, movement of integrated food technology cultivation manager, help for harvest facility and post-harvest, increase assistance and guard by officer, farmers empowerment in order to help the society to manage their agriculture business.²¹

Respond towards the importance of food sector has been done by AKATIGA through researches of Food Self-Sufficiency in 2013, with the support from Knowledge Sector Initiative (KSI). The researches' purpose is to explore the problems and potentials in small-scale farmers in Indonesia to fulfill the urgent of food sovereignty, both national and local levels. AKATIGA believes small-scale farmers still held a better position at maintaining food stability (especially rice), because they also help solving the poverty issue, specifically in rural area, and also potentially absorb rural labor force.

¹⁵ Executive Director of AKATIGA

¹⁶ Susenas Data Publication, 2012

¹⁷ MP3EI's Document 2011

¹⁸ From many mass media sources that related to MIFEE development, such as
<http://www.thejakartapost.com/news/2015/04/16/govt-revive-food-estate-project-papua.html>,
<http://www.thejakartapost.com/news/2015/10/30/food-estate-project-may-turn-papua-forest-fire-hotbed.html>,
<http://news.mongabay.com/2015/07/indonesians-cite-miffee-project-at-un-meeting-on-corporate-abuses/>

¹⁹ For example
<http://bisniskeuangan.kompas.com/read/2014/12/10/121200526/Jokowi.Tiga.Tahun.Belum.Swasembada.Saya.Ganti.Menteri.Pertanian>

²⁰ Look at Strategic Plan of Ministry of Agriculture 2015-2019

²¹ To reach food sovereignty, Ministry of Agriculture includes in the ten most of ministry who get the biggest budget in RAPBN 2016, in total amount Rp. 31,5 trillion.
(<http://nasional.kompas.com/read/2015/11/02/20094921/Ini.10.Kementerian.dengan.Anggaran.Tertinggi.dalam.APBN.2016>)

However, small scale-farmers in Indonesia still facing structural problems. This needs a commitment from government and another institution to give a right solution. The outcome of this study will hopefully give a clearer picture towards the real condition that happen in rural area and become a recommendation for the policy maker.

Explanation Systematics

Ben White²² as one of the quality supervisor for food self-sufficiency research has involved since the very beginning until the research disseminate. It feels right for us to put the methodological view as the introduction of another writings. White has summarized the rationalization of Food Self-sufficiency research, the research process, and also did the reflection that could become a lesson for AKATIGA and another institution that interested in doing research in agriculture in the future.

This writing gives a short explanation on how to choose the concept of food self-sufficiency in this research. Started with the emergence of *Badan Ketahanan* as government strategy in responding the vulnerability of food problem in Indonesia. However, food security still does not consider as a right solution to solve food problems, especially society involvement in food production, that creates a food sovereignty concept which established by *La Via Campesina*. Finally AKATIGA choose food self-sufficiency concept for focusing this research on the farmer as the actor who produce food.

Agriculture become important because the majority of Indonesian people still depend on rural agriculture sector, but sadly rural area is a poverty pocket in Indonesia. Even though food agriculture still have a high social function and supposedly could contribute in (1) suffice the need of national food, (2) supplying work fields and income for rural society, (3) creating a new smart farmer generation, (4) using the soil management technic socially efficient and sustainable.

Because of that, this writing will follow by three groups of topics, those are (1) land tenure and agrarian structure, (2) Rice paddy agriculture system and its change, in social efficiency perspective, and (3) Rural youth generation, employment opportunity, and the sustainable of small-scale farmer. Food self-sufficiency's research use eight concept that explained in White's writing, such as social reproduction, access on rural research, agrarian differentiation, agrarian labor regime, intermediate value between actors and intergroup, wide-spread relation between farm and productivity, access interaction and farm and off-farm activities in accumulation process and social-economic differentiation in rural society, social efficiency. This writing will continue with the explanation of the research question from the three topics above, research method, and reflection as the closure, especially the continuation of food self-sufficiency research.

Aprilia Ambarwati and Ricky Ardian Harahap²³ try to explain the pattern of land settlement and agrarian structure of research rural area. Both analyze the relation between land ownership with the farm and off-farm income. This writing shows that rural society or agriculture society is homogenous, prevalent, and static, are an assumption that need to be changed. Generally this article will show a big heterogeneity in land tenure and ownership pattern among the area, even an overlapping among the ownership of the land. At this time, share profit system is the most common land tenure system that founded.

This article also criticize one of the founder from Agriculture Census in 2013 that has been done by *Badan Pusat Statistik*. The drastic decreasing numbers of smallholder farming households in Indonesia in the last 10 years had become a polemics and become a reference for many writings. This founder caused by a change in a definition of RTP and the agriculture purposed use by the Agriculture Census in 2013, meanwhile the decreasing number of farmers remain the same.

The green revolution policy in new order era has put aside the effort to control differentiation process in land tenure as an effect of agriculture commercialization with food self-sufficient target. Small group of people have the tendency to own a land has threatened food self-sufficiency because it leads to productivity reduction, uneven income distribution, reduce the uptake of agriculture labor force, and vulnerable towards land conversion. These things believe as the things that could increase the number of poverty in rural area.

Referring to classic writings about agrarian structure, this writing will show the relation between land ownership with capital accumulation that effected by off-farm sector. This dynamic happens in some of research area, landless farmer have more chance to get more income from off-farm sector.

However, the monopoly tendency could be seen in many others rural area, such as they who own the land also accumulate the capital from off-farm sector. In line with BPJS' data 1983-2003, the numbers of peasants in most of the research area tend to increase. The reason is the shifted of the land ownership by just a few people (this also include significant absentee) without balanced it with work opportunity in farm and off-farm sector.

²² Professor Emeritus in Rural Sociology, International Institute of Social Studies (ISS), The Hague.

²³ Aprilia Ambarwati is a researcher at AKATIGA and Ricky Ardian is a freelance researcher at AKATIGA that study poor empowerment and governance.

Yogaprasta A. Nugraha and Rina Herawati²⁴ identified the involvement of youth in agricultural sector in the research location. This writing tries to answer scholar, media, and policy maker concern towards agriculture regeneration in food agriculture in Indonesia. The elaboration of driving or interesting factors for young generation to stay, leave, or leave temporarily the food agriculture sector become important, so that assumption about the young people had left the world of agriculture is not swallowed up without looking the root of the problem.

Combining the main ideas of agrarian studies and youth studies, the writers could analyze the structural obstacles faced by young generation, their position in accessing land resources, and work opportunities, the dynamics of relations and the shifted of resources among generations, youth behavior pattern, youth culture, and youth preferences.

Youth has no tendency to work in agriculture sector, but It does not mean they totally left the agriculture sector. Youth involvement in the fields such as helping their parents in the fields, independently manage their fields as the land owner, and also work as the farm labor (peasants). The sons (boy/men) are more involved in managing the soil and crop, meanwhile the daughters (girls/women) involve in harvesting. Before they get married and have an experience in farming, the child whose help their parents in the fields has no chance to decide about the farm production. Generally, they also get salary after they get married.

Related with previous article, this writing will show the agrarian structure that affect youth perception about their future in food agriculture sector. The land access one of the most factor that influence their attraction to keep on working in the agriculture sector. As for example, seeing their parents as a crop farmer (peasants), they have the thought of not having any future in agriculture sector, they will still landless in the future, and never get any high profit because the income will be split into two with the land owner.

Even the young generations that come from land owner family can not directly get a land before they get married, they inherit the land after their parents passed away, or no longer able to do farm activities. The image of farmer that seen as dirty and not prestigious also add some preferences for the young generation for not doing farming anymore. This condition has made them to look for another job outside farming sector or even outside the village. However, this research shows that their migration only temporarily. In some villages, many young men and women have a dream to buy their own land by working at off-farm sector.

Because of that, this article supports the conclusion that social reproduction in agriculture based on small-scale agriculture business still happen. Even though their interest in agriculture are relatively decreasing, the numbers of small-scale farmer and peasant still stable in the near future. The government should make a policy that provides the young generation an easier access to land, not alienate their involvement in land management.

Herlina Wati and Charina Chazali²⁵ look at the change in small-scale agriculture system thoroughly in the research area and relate it with social efficiency framework. Social efficiency framework become the focus because it supports equal distribution of resources, grading the policy, and the result is heading towards the condition where the distribution and the usage of the resources in a society reach its optimal value, and the amount of income for the poor.

One of the argument from this writing give contribution on the debate of agriculture and agrarian study with the land measurement and harvest. Writers stated that small-scale farmer could produce an high yields, even there are some indications that the production of small-scale farmer could produce more rather than the big farm.

This writing also shows the absorbent of agriculture labor force and the amount of salary that the farmer and peasants get, until the development of technology innovation and farming technics. Sadly, these innovations rarely supported by the government, alienated small-scale farmer, decreasing work opportunities, peasants, shifted the added value of big numbers of peasants to wide-range land farmer.

Small-scale farmers face many obstacles to obtain the productivity target. Organizing a good agriculture system (like simultaneously cropping pattern, sufficient water supply, and institutions for farmers ideas, etc.) will lead to high production. The general obstacles are pests and plant disease and flood in some of areas. Even, the organization should serve small-scale farmer, many do not do their function, and tend to be used by people with special interest.

Besides that, writers also describe green sustainable development that is still been done individually rather than collectively. From the real obstacle that has been faced by peasants, elite capture, until the long way process to reach environmental friendly farmer, writers contend the government should focus on developing the organization system of a good rice farm production.

²⁴ Yogaprasta Adi Nugraha is a lecturer at Pakuan University and freelance researcher at AKATIGA, Rina Herawati is freelance researcher at AKATIGA whom studies labor issues.

²⁵ Both are researcher at AKATIGA

Laksmi A. Savitri and Khidir M. Prawirosusanto²⁶ describe a different picture from another articles, which criticize Indonesian government policy about food estate. According these both writers, we need to review the dream about increasing the number of production and fulfilling the food security with big-scale corporate farmer. Writers describe how the big dreams of the government creates another problems and not reaching the goals as we wished for, like Ketapang Food Estate case.

Writers start with the search of how the ideas of modern agriculture adopted by Indonesian government in agriculture mechanization and growing the investment in big-scale agriculture sector that has been written in MP3EI document. We compare this process with the reality that happened in Ketapang, West Borneo.

This story will describe the problem that emerge from big-scale farmer especially with the land quality problems, production that has not reached the target, the emergence of migrant labor, the emergence of foreman that savor the rents, the uncertainty of labor wage, and the competition of labor supply mechanism, and it does not guarantee the welfare for the poor. This article will be closed by giving the reflection to the reader, especially the policy maker, to see the reality in the fields and reviewed the ideas of agriculture modernization.

Isono Sadoko²⁷ tries to summarize the founding of food self-sufficiency research and analyze it to become a concrete recommendation. The recommendation to offer are (1) related with right subsidize for rice agriculture, (2) incentive for the actor that really has a good innovation to increase the productivity without neglecting social efficiency, (3) with the spirit of new Village Law, force the rural area to have bank of land for women farmer and poor young men to do farming, (4) doing deep research about a succeed institution in the village and support it with funding and program that will answer the need of rural society.

Besides those six articles above, this Journal also completed with Book Reviewed and Library News of AKATIGA. **Ben White** whom did the book review, will gave a critical response towards Tania Li's book that title Land's End: Capitalist Relations on and Indigenous Frontier. This book is not only representing one village, but an ethnography of an area where has been researched by Li in a long time. White seek the main concept that Li used in her book, that is the conjuncture approach, which really describes the capitalization process that has been faced by Lauje society, but it is been used for so many times that could make the definition blurry. Tania Li explained how a set of elements, process, relations, place, time, and the political challenge emerge to color the life of Lauje society. This book very recommended to understand the transformation process in Indonesia inland and agrarian problems that affected by those changes.

Library News of AKATIGA is written by **Santi Cahya Pratiwi**²⁸. This popular article will give you an information about her experience in seeing the development and various concept library in Bandung coffee shop, with the hope to encourage the reader to look around and visit the nearby library.

Happy Reading

LIST OF PREFERENCES

<http://bisniskeuangan.kompas.com/read/2014/12/10/121200526/Jokowi.Tiga.Tahun.Belum.Swasembada.Saya.Ganti.Menteri.Pertanian> (22 November 2015).

<http://nasional.kompas.com/read/2015/11/02/20094921/Ini.10.Kementerian.dengan.Anggaran.Tertinggi.dalam.APBN.2016> (2 December 2015).

<http://news.mongabay.com/2015/07/indonesians-cite-miffee-project-at-un-meeting-on-corporate-abuses/> (2 Desember 2015).

<http://www.thejakartapost.com/news/2015/10/30/food-estate-project-may-turn-papua-forest-fire-hotbed.html> (2 December 2015).

<http://www.thejakartapost.com/news/2015/04/16/govt-revive-food-estate-project-papua.html> (2 December 2015).

MP3EI 2011 documents. <<http://bappenas.go.id/berita-dan-siaran-pers/kegiatan-utama/master-plan-percepatan-dan-perluasan-pembangunan-ekonomi-indonesia-mp3ei-2011-2025/>>.

Strategic Planning Ministry of Agriculture. <http://www.pertanian.go.id/file/RENSTRA_2015-2019.pdf>.

Susenas Publication's Data 2012. <<http://microdata.bps.go.id/mikrodata/index.php/catalog/87/study-description>>.

²⁶ Laksmi Adriani Savitri is a lecturer at Cultural Anthropology Departmen, in Cultural Science Faculty – University of Gajah Mada and Khidir Marsanto Prawirosusanto is an lecturer assistance at the same institutions.

²⁷ Senior researcher at AKATIGA whom has so many research related to rural development. He becomes the coordinator and person in charge for the quality of food self-sufficiency research.

²⁸ External team of AKATIGA

MENELITI MASALAH PETANI DAN PANGAN PADA TINGKAT LOKAL: PENGANTAR STUDI KEMANDIRIAN PANGAN AKATIGA

INVESTIGATED THE PROBLEM FARMERS AND FOOD AT THE LOCAL LEVEL: AKATIGA'S INTRODUCTION STUDY FOOD SELF-SUFFICIENCY

Ben White

Institute of Social Studies
Kortenaerkade 12, 2518 AX Den Haag, Netherlands
E-mail: white@iss.nl

Abstrak

Dari tahun 2013 sampai dengan 2015, peneliti dari AKATIGA telah meneliti permasalahan mengenai akses lahan, produksi pangan, dan masalah lapangan kerja di 12 desa penghasil beras di Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Sulawesi Selatan. Kegiatan penelitian ini didasarkan pada gagasan longgar “Kemandirian” (swasembada), di luar ‘ketahanan pangan’ dan termasuk beberapa unsur dari ‘kedaulatan pangan’. Penelitian yang dilakukan berfokus pada mereka yang memproduksi pangan, orang-orang yang bergantung pada sektor produksi pangan sebagai mata pencaharian mereka, dan mereka (lembaga) yang (seharusnya) mendukung produsen penyedia pangan dalam skala kecil. Penelitian jenis ini berguna dalam mengungkap berbagai ‘mitos’ (asumsi umum yang mendasari kebijakan, tapi tidak mencerminkan realitas di lapangan). Artikel ini memberikan gambaran pemikiran, kerangka penelitian dan metode, sebagai pengantar tiga artikel yang merangkum temuan dari penelitian di tiga bidang: akses lahan dan struktur agraria, sistem pertanian padi dalam kaitannya dengan efisiensi sosial, dan pemuda di perdesaan serta lapangan pekerjaan di sektor pertanian.

Kata kunci: Kebijakan pangan, Pertanian skala kecil, Tenaga kerja, Distribusi pendapatan, Perubahan agraria, Indonesia

Abstract

From 2013 – 2015, researchers from AKATIGA have been studying issues of access to land, food production and employment in 12 rice-producing villages in West Java, Central Java and South Sulawesi. The study is based on loose idea of ‘kemandirian’ (self-sufficiency), which goes beyond ‘food security’ and includes some but not all the elements of ‘food sovereignty’. It focuses on those who produce food, those who depend on the food production sector for their livelihoods, and those (institutions) which (ought to) function to support small-scale food producers. Research of this type is useful in exposing various powerful ‘myths’ (common assumptions that underlie policies, but do not reflect the realities on the ground). This article provides an overview of the study’s rationale, framework and methods, as an introduction to the three following articles which summarize findings from the study in three areas: access to land and agrarian structure, systems of rice agriculture in relation to social efficiency, and rural youth and agricultural employment.

Keywords: Food policy, small-scale farming, employment, income distribution, agrarian change, Indonesia

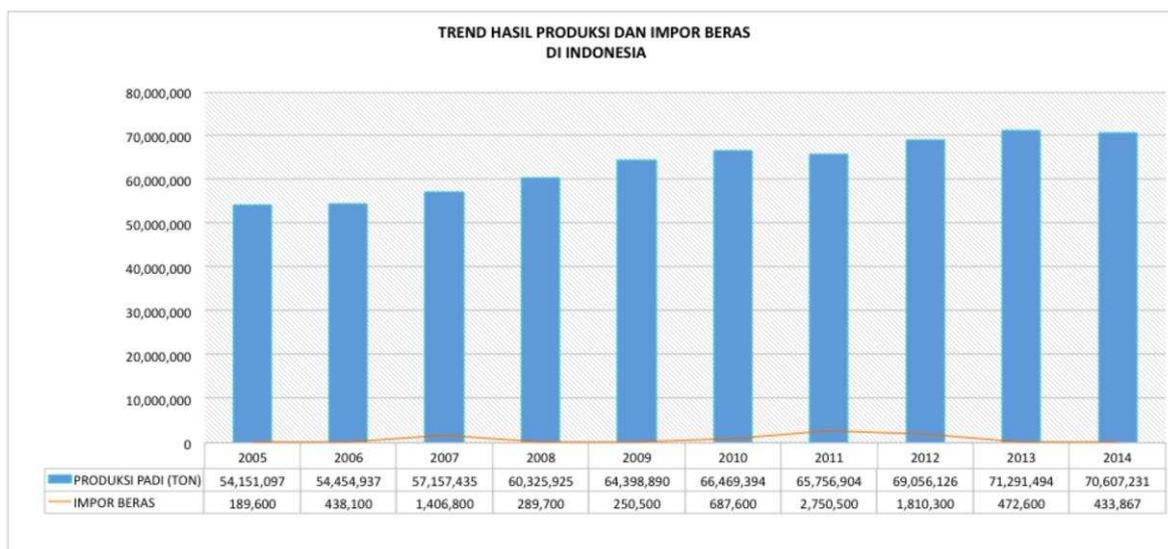
PENDAHULUAN

Ketahanan Pangan, Kemandirian Pangan, Kedaulatan Pangan

Artikel ini merupakan pengantar untuk tiga artikel berikutnya yang masing-masing mengangkat hasil studi Kemandirian Pangan yang dilakukan AKATIGA selama tahun 2013-2015. Tujuan studi Kemandirian Pangan adalah untuk mengeksplorasi masalah-masalah dan potensi-potensi pertanian padi skala kecil di Indonesia dalam memenuhi desakan kemandirian pangan, baik di tingkat nasional maupun di tingkat lokal.

Beras merupakan komoditas pangan yang sangat strategis karena merupakan makanan pokok utama bagi rakyat Indonesia. Sebagai upaya menjaga kestabilan ekonomi dan politik bangsa, beras harus tersedia secara memadai. Pertanian padi skala kecil dinilai lebih baik dalam menjaga stabilitas pangan karena turut pula membantu mengatasi persoalan kemiskinan, khususnya kemiskinan di perdesaan. Namun pertanian padi skala kecil di Indonesia masih menghadapi persoalan-persoalan struktural yang memerlukan pemecahan.

Saat ini muncul kesadaran mengenai krisis yang terjadi di Indonesia sehubungan dengan ketahanan pangan (*food security*). Untuk sebagian,



Sumber: BPS dan Pusdatin Kementerian Pertanian

Gambar 1. Hasil Produksi dan Impor Beras di Indonesia Tahun 2005-2014

hal ini disebabkan oleh fluktuasi harga beras internasional di mana Indonesia semakin lama semakin bergantung pada pasar beras dunia. Sementara itu, swasembada beras Indonesia sendiri saat ini masih dipertanyakan, setelah dari importer beras terbesar di dunia pada akhir tahun 1960an menjalankan ‘revolusi hijau’ dan mencapai status swasembada pada pertengahan tahun 1980an, kini Indonesia bergeser kembali menjadi pengimpor beras yang kronis. Selama kurun waktu 2005-2013, jumlah impor tertinggi terjadi pada tahun 2011, di mana pada tahun yang sama terjadi penurunan hasil produksi. Jumlah impor beras memiliki nilai yang relatif bervariasi. Berikut ini Tabel 1 memberi gambaran hasil produksi dan impor beras di Indonesia selama 2005-2014.

Meskipun jumlah impor relatif kecil jika dibandingkan dengan total produksi domestik, posisi Indonesia sebagai menjadi negara importir bisa menyebabkan rentan dalam upaya pemenuhan konsumsi beras domestik. Keadaan tersebut disebabkan pasar beras dunia relatif tipis. Negara-negara produsen beras terbesar, mengonsumsi hampir semua produksi berasnya di dalam negeri. Hanya sebagian kecil dari total produksi tersedia untuk diekspor. Perkembangan isu terkait perubahan iklim pun membuat pasar pangan terutama beras relatif lebih tipis lagi dan tidak menentu dalam tahun-tahun mendatang. Walaupun Indonesia saat ini secara teknis tergolong swasembada beras (mengimpor kurang dari 5% dari kebutuhan domestik), untuk masa depan produksi domestik harus tetap dijamin meningkat dari tahun ke tahun, mengingat kenaikan jumlah penduduk.

Kerawanan pangan di Indonesia relatif tinggi dan bagian timur wilayah Indonesia menghadapi krisis makanan akut. Menurut WFP, lebih dari 60% populasi Indonesia dihadapkan pada

berbagai tingkat rawan pangan, termasuk di Jawa dan Sumatera.¹ Di samping itu, sebanyak 100 kabupaten di Indonesia masuk ke dalam daerah dengan tingkat kerawanan pangan tinggi berdasarkan Index Gabungan Kerawanan Pangan² dan memerlukan penanganan khusus dari pemerintah.

Isu kerawanan pangan di Indonesia bukanlah hal baru. Hal ini ditunjukkan dengan banyaknya lembaga dan organisasi yang memiliki fokus dalam penyelesaian persoalan-persoalan kerawanan pangan. Pemerintah Indonesia sendiri sudah merespon dengan membentuk Badan Ketahanan Pangan. Namun berbagai respon yang muncul untuk mengatasi persoalan kerawanan pangan masih belum bisa menjawab persoalan-persoalan yang muncul dan malah menimbulkan pertanyaan lebih lanjut. Hal ini disebabkan oleh belum adanya pemahaman mendetail mengenai kondisi kerawanan pangan yang terjadi saat ini.

Masalah pangan sebenarnya jauh lebih rumit dari soal ‘ketahanan’ saja, jika ketahanan hanya diartikan sebagai masalah menjamin penyediaan pangan secukupnya di tingkat nasional ataupun untuk setiap warga, seperti dalam definisi yang diadopsi FAO: “Ketahanan pangan adalah keadaan di mana semua orang, pada setiap saat, secara fisik, sosial dan ekonomi memiliki jangkauan terhadap pangan yang cukup, yang aman dan bergizi”.³ Sebagai contoh, sekelompok budak, penghuni penjara atau warga negara totaliter bisa saja dijamin akan disediakan makan secukupnya,

¹ (WFP, 2007)

² (FSVA, 2009)

³ “Food security [is] a situation that exists when all people, at all times, have physical, social and economic access to sufficient, safe and nutritious food ...” (FAO 2001).

tetapi mereka tidak punya pilihan, tidak bisa memengaruhi apa yang mereka makan, dari mana datangnya, dsb.⁴ Mulai tahun 1990an organisasi petani sedunia *La Via Campesina* mencoba mengarahkan perhatian ke aspek pokok yang *missing* dalam konsep ketahanan pangan yaitu struktur sosial, ekonomi dan politik dari sistem pangan yang menghasilkan pangan, mengingat bahwa “ketahanan pangan jangka panjang bergantung pada mereka yang menghasilkan pangan dan memelihara lingkungan hidup.⁵ Makanya timbul gagasan ‘kemandirian’ dan ‘kedaulatan’ pangan yang lebih mengutamakan keterlibatan masyarakat dalam produksi pangan (juga keterlibatan para konsumen pangan dalam mendukung sistem pangan yang lebih baik, aspek yang tidak tercakup dalam studi kami).

Definisi ‘kedaulatan pangan’ yang paling lazim dipakai adalah definisi yang ditemukan dalam Deklarasi Nyeleni:

Kedaulatan pangan (KP) adalah hak masyarakat akan pangan yang sehat dan sesuai dengan kebudayaan setempat, yang dihasilkan secara berkelanjutan dan ramah lingkungan, serta hak mereka untuk mendefinisikan sendiri sistem pangan dan sistem pertanian mereka. KP menempatkan mereka yang menghasilkan, mendistribusikan dan mengonsumsi pangan pada inti sistem dan kebijakan pangan, bukan tuntutan pasar dan korporasi. KP juga memperjuangkan kepentingan dan keikutsertaan generasi mendatang. [...] KP mengutamakan perekonomian dan pasar lokal dan nasional dan memberdayakan pertanian skala kecil berdasarkan usaha tani keluarga [...] KP menjamin bahwa hak untuk menggunakan dan mengelola tanah, wilayah, air, benih, ternak dan *biodiversity* berada dalam tangan mereka yang menghasilkan pangan⁶.

⁴ (Patel, 2009).

⁵ Via Campesina 1996. The right to produce and access to land, dikutip dalam Patel, 2009.

⁶ “Food sovereignty is the right of peoples to healthy and culturally appropriate food produced through ecologically sound and sustainable methods, and their right to define their own food and agriculture systems. It puts those who produce, distribute and consume food at the heart of food systems and policies rather than the demands of markets and corporations. It defends the interests and inclusion of the next generation. [...]. Food sovereignty prioritises local and national economies and markets and empowers peasant and family farmer-driven agriculture [...] It ensures that the rights to use and manage our lands, territories, waters, seeds, livestock and biodiversity are in the hands of those of us who produce food”. (Via Campesina, 2007).

Dalam penelitian ini kami sengaja memilih istilah ‘kemandirian’ yang bernada netral, dan diposisikan sekitar baris tengah antara ‘ketahanan’ dan ‘kedaulatan’. Salah satu aspek pendekatan studi ini adalah penetapan petani skala kecil sebagai subyek utama, di mana masalah paling pokok menjadi: “Siapa yang akan menghasilkan pangan, dengan cara bagaimana, dan demi keuntungan siapa?”⁷

Penduduk Miskin di Indonesia: Mayoritas Berada di Perdesaan dan Bergantung pada Sektor Pertanian

Masyarakat miskin merupakan pihak yang paling rentan apabila terjadi kerawanan pangan. Ketidakstabilan harga dan inflasi yang terjadi menyebabkan masyarakat miskin menjadi pihak yang pertama kali akan mengambil tindakan dengan mengurangi tingkat asupan gizi keluarganya. Di perdesaan sebagai sumber penghasil pangan, tingkat kemiskinan dan pendapatan penduduknya cenderung stagnan, ketika pada saat yang bersamaan harga makanan merangkak naik.

Setting politik (*Political setting*) cenderung mendukung penyingkiran pertanian padi skala kecil dengan pertanian yang bersifat padat modal, swasta skala besar dan monokultur di saat mayoritas penduduk miskin di perdesaan tergantung pada pertanian padi skala kecil dan pekerjaan di sektor pertanian. Berdasarkan sejarah kegagalan terus menerus di hampir semua usaha produksi pangan skala besar dari masa kolonial hingga sekarang, banyak keraguan mengenai kelayakan dan gagasan untuk mengandalkan pada usaha pertanian padi skala besar untuk memenuhi kebutuhan terhadap makanan pokok.

Sejauh ini, pertanian padi kecil masih merupakan pilihan yang unggul bagi penyediaan pangan karena cenderung lebih stabil dan dapat membantu menyelesaikan persoalan kemiskinan lokal. Meskipun demikian, kondisi sektor pertanian nasional masih tidak bisa dibanggakan; (karena) pertanian skala kecil masih menghadapi berbagai masalah seperti meningkatnya kelangkaan lahan dan ketidakmerataan distribusi lahan, keterbatasan infrastruktur perdesaan, keterbatasan kesempatan kerja di perdesaan, tidak adanya dukungan yang memadai dari segi peremajaan teknologi dan metode pertanian modern, nilai tukar yang tidak mendukung pertanian, dll. Pergeseran struktur ketenagakerjaan akibat banyaknya pemuda dan tenaga kerja potensial yang memilih bekerja di perkotaan juga menjadi tantangan tersendiri bagi sektor pertanian di perdesaan.

Berdasarkan uraian di atas, muncul pertanyaan, apakah sistem pertanian padi skala kecil dan komunitas pertanian dapat terus memenuhi peran bersejarah mereka dalam:

⁷ (Patel, 2009)

- Menjamin pemenuhan kebutuhan Indonesia akan makanan pokok, khususnya beras;
- Menyediakan lapangan kerja dan penghasilan untuk mayoritas penduduk perdesaan;
- Menciptakan generasi baru petani yang pintar; dan
- Menggunakan tanah yang tersedia dengan cara yang efisien secara sosial dan berkelanjutan.

Sektor Pertanian Pangan dan Fungsi Sosialnya

Pertanian padi skala kecil memiliki peran ganda. Selain berperan sebagai penyedia utama pangan bagi rakyat Indonesia, sektor pertanian skala kecil juga merupakan penyedia kesempatan kerja yang paling besar. Sampai saat ini, pertanian terutama pertanian skala kecil masih merupakan sektor yang paling besar dalam penyedia kesempatan kerja. Menurut data sensus pertanian 2013, terdapat sekitar 26,13 juta rumah tangga usaha tani, sedangkan dari jumlah tersebut sebanyak 16 juta (61,5%) tidak memiliki tanah. Artinya, ada 61,5% rumah tangga usaha tani yang lebih tepat disebut rumah tangga buruh tani yang mengelola usaha tani di tanah-tanah petani lain/perusahaan pertanian.⁸ Data ketenagakerjaan pada bulan Februari 2014, pun mencatat bahwa terdapat lebih dari 40 juta penduduk Indonesia yang bekerja di sektor pertanian sebagai lapangan pekerjaan utama atau sekitar 34,5 % dari total tenaga kerja Indonesia secara keseluruhan yang bekerja pada sektor ini.⁹

Tenaga kerja pertanian tersebut tersebar ke dalam empat sub sektor pertanian, di mana penyerapan tenaga kerja terbesar adalah sub sektor tanaman pangan sebesar 53% dari total tenaga kerja di sektor pertanian.¹⁰ Sektor pertanian masih menjadi sumber penghidupan utama bagi rumah tangga di perdesaan.

Di sisi lain, sejak tahun 2011 Pemerintah memiliki Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI), di mana salah satu rencananya adalah membangun pertanian padi secara terpusat seperti di Sulawesi Selatan, sedangkan Jawa direncanakan akan lebih difokuskan kepada sektor industri dan jasa.¹¹ Padahal, Jawa masih menyumbang 53 %¹² produksi padi nasional dengan produktivitas per hektar yang paling tinggi dibanding wilayah lain. Selain itu, pemerintah juga memiliki gagasan mengenai *rice estates*¹³, dikendalikan oleh BUMN dan korporasi; yang justru dapat

mengancam ketahanan pangan dalam negeri. Kekhawatiran tersebut muncul karena keputusan-keputusan perberasan akan sangat dipengaruhi oleh pergerakan harga pangan dunia dan kepentingan untuk mengambil untung dalam masalah distribusi beras.

Kecenderungan lain yang saat ini sedang berjalan adalah menggeser generasi muda menjadi pekerja mandiri yaitu berwirausaha atau bergeser ke sektor jasa. Apakah pergeseran ini menjadi ancaman keberlanjutan pertanian terutama sektor pangan di masa datang?

Kebijakan-kebijakan yang diambil pemerintah, pada akhirnya akan memengaruhi produksi dan persediaan padi secara nasional, selain juga berpengaruh pada penyediaan kesempatan kerja sektor pertanian dan juga pemerataan distribusi pendapatan.

Studi Kemandirian Pangan AKATIGA bertujuan untuk memberikan pengetahuan baru mengenai perubahan yang terjadi pada sistem pertanian padi skala kecil saat ini, berdasarkan hasil penelitian AKATIGA di 12 desa terpilih di tiga propinsi penghasil beras (Jawa Barat, Jawa Tengah, Sulawesi Selatan).

Permasalahan yang disoroti dalam studi ini dapat dibagi ke dalam tiga kelompok besar: (A) Penguasaan tanah dan struktur agraris, (B) Sistem pertanian padi dan perubahannya, dalam perspektif efisiensi sosial, dan (C) Generasi muda perdesaan, kesempatan kerja, dan keberlanjutan pertanian skala kecil.

Tujuan, Kerangka, dan Metodologi

1. Tujuan

Indonesia memiliki tradisi panjang penelitian tingkat mikro tentang keadaan dan perubahan pertanian pangan, mulai dari akhir zaman kolonial sampai dengan penelitian Survey Agro-Ekonomi tahun 1960an-1980an.¹⁴ Namun sejak itu, sedikit ditemukan penelitian sistematis, pada tingkat mikro, yang melihat pola serta dinamika pertanian skala kecil dan keseriusan untuk memperbaiki sektor pertanian. Studi ini bertujuan sebagai langkah awal untuk sedikit mengisi kekurangan tersebut, dengan cara menguraikan perubahan-perubahan penting yang terjadi dalam sistem pertanian padi skala kecil pada tingkat desa di berbagai wilayah penghasil padi di Indonesia. Dengan penelitian ini diharapkan bisa menyoroti realitas yang terjadi dalam sektor pertanian padi Indonesia.

2. Kerangka

Studi ini menggunakan kerangka analitis yang mengandalkan enam konsep utama yaitu: konsep reproduksi sosial, konsep rezim ketenagakerjaan, konsep akses, konsep diferensiasi agraris, konsep peralihan nilai antarpelaku, serta

⁸ "Masih Relevankah Menyebut Indonesia Sebagai Negara Agraris?" oleh Lola Amelia, Peneliti Kebijakan Sosial The Indonesian Institute, diakses dari <http://theindonesianinstitute.com/masih-relevankah-menyebut-indonesia-sebagai-negara-agraris/>

⁹ Sumber data BPS

¹⁰ Pusdatin Kementerian Pertanian, 2014

¹¹ Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, 2013

¹² Olah data BPS, 2013

¹³ <http://www.setkab.go.id/pro-rakyat-8709-food-estate-ketapang-mendukung-surplus-10-juta-ton-beras.html>

¹⁴ Lihat Faisal Kasryno (ed), 1983

konsep dinamika interaksi sektor pertanian dan bukan-pertanian. Kemudian, konsep efisiensi sosial digunakan sebagai alat analitis untuk menilai perubahan-perubahan yang terjadi. Di bawah ini masing-masing konsep tersebut diuraikan secara singkat.

a. Reproduksi Sosial

Reproduksi sosial didefinisikan “praktik, perilaku maupun diskursus yang memungkinkan reproduksinya suatu formasi sosial dengan anggotanya dari waktu ke waktu (termasuk juga reproduksi hubungan antargolongan sosial di dalamnya)”.¹⁵ Konsep ini bisa diterapkan pada berbagai tingkat: mulai dari keluarga, rumah tangga atau usaha tani sampai komunitas lokal, golongan sosial/etnis tertentu, dan sebagainya. Selain itu, konsep reproduksi sosial bisa diterapkan untuk berbagai tenggang waktu, misalnya: reproduksi dari hari ke hari, dari musim ke musim, dari tahun ke tahun, dan dari generasi ke generasi.

Proses reproduksi sosial dapat dilihat dari perubahan dari waktu ke waktu dalam (1) ketersediaan akses petani terhadap sumber daya seperti tanah, modal, tenaga kerja, input pertanian, subsidi, serta hubungan antaraktor dalam hulu hilir pertanian padi; (2) praktik-praktik yang dilakukan dalam setiap tahapan pertanian padi; (3) produktivitas pertanian skala kecil dan hambatananya; (4) penyerapan tenaga kerja dalam pertanian skala kecil; dan (5) masa depan pertanian skala kecil.

b. Konsep ‘Akses’ dalam Konteks Studi Agraria/Pedesaan

Peluso dan Ribot (2003) mendefinisikan konsep akses sebagai “kemampuan untuk mengambil manfaat dari sesuatu” (*the ability to benefit from things*). Fokus pada “kemampuan” ini (bukan hanya pada “hak” seperti halnya dengan teori kepemilikan) memungkinkan kita untuk memperhatikan seperangkat hubungan yang lebih luas daripada hanya hubungan kepemilikan. Gagasan Peluso dan Ribot ini mempermudah analisis yang lebih nyata tentang siapa yang sebenarnya menguasai dan menikmati manfaat dari sumber daya, dan tentang dinamika proses yang memungkinkan hal itu terjadi.¹⁶

c. Diferensiasi Agraris

“Diferensiasi agraris” (*agrarian or rural differentiation*) adalah suatu proses dinamis yang menyangkut munculnya dan atau makin tajamnya perbedaan antargolongan dalam penduduk pedesaan. Perbedaan ini tidak hanya menyangkut perbedaan pendapatan antargolongan, tetapi lebih mementingkan perubahan dalam hubungan antargolongan (sesama petani maupun antara petani dan bukan petani) sejalan dengan proses komoditisasi pertanian dan ekonomi pedesaan. Diferensiasi berarti juga suatu proses perubahan dalam mekanisme peralihan surplus dari mereka yang bekerja di atas tanah, kepada mereka yang mengklaim sebagian dari hasil tanah tersebut, berdasarkan penguasaan mereka atas sumber daya produksi. Dalam menjelaskan struktur agraris, studi ini menggunakan enam kategori kasar untuk membedakan petani di desa penelitian, yaitu petani modal kuat, petani luas, petani menengah I, petani menengah II, petani sempit, dan buruh tani tak bertanah. Kriteria ‘penguasaan’ yang dipakai menggunakan indikator luas usaha tani.¹⁷

d. Rezim Ketenagakerjaan Agraris (Agrarian Labour Regime)

Konsep rezim ketenagakerjaan agraris adalah alat untuk menggambarkan struktur agraris, dilihat dari perspektif hubungan ketenagakerjaan. Sistem ketenagakerjaan disini memiliki arti luas, yaitu mobilisasi tenaga kerja dan pengorganisasian dalam sistem produksi, dalam kondisi sosial, ekonomi, dan politik yang spesifik. Dengan menyoroti ‘*methods of mobilizing labour and organizing it in production*’,¹⁸ misalnya hubungan ketenagakerjaan intra dan antarkeluarga, hubungan majikan-buruh, hubungan pemilik-penggarap, dapat dilihat pengaruh hubungan ketenagakerjaan terhadap arus nilai yang beralih antarpihak atas dasar hubungan tersebut.

Bernstein (2010) melihat struktur sosial sistem produksi dan sistem reproduksi dengan mengandalkan konsep diferensiasi agraris serta rezim ketenagakerjaan, secara empiris menfokuskan pada empat pertanyaan pokok, yaitu siapa yang memiliki apa? (penguasaan), siapa yang melakukan apa? dan siapa yang mendapatkan apa? (pola pembagian kerja, rezim ketenagakerjaan dan pola arus peralihan nilai), dan apa yang dilakukan dengan pendapatan tersebut? (pola reproduksi/akumulasi).

¹⁵ “the material and discursive practices which enable the reproduction of a social formation (including the relations between social groups) and its members over time” Wells, 2009

¹⁶ Peluso dan Ribot, 2003: 153-4

¹⁷ Untuk lebih jelasnya lihat Laporan Penguasaan Tanah Pertanian Dan Struktur Agraris Di Beberapa Desa Penghasil Padi (Harahap dan Ambarwati, 2014).

¹⁸ Bernstein, 2010: 127

e. Peralihan Nilai Antarpelaku dan Antargolongan

Konsep peralihan nilai (*surplus transfer, surplus capture*) sebagai alat untuk menggambarkan dinamika struktur agraris dan proses reproduksi usaha tani dan masyarakat tani pertama kali diuraikan secara rinci oleh Deere & de Janvry (1979). Penulis menggambarkan sembilan mekanisme yang (secara potensial) bisa mengakibatkan peralihan nilai dari petani kecil ke pihak lain yaitu: sistem sewa tanah (dalam bentuk hasil bumi), sewa tanah (dalam bentuk tenaga kerja), sewa tanah (dalam bentuk uang), sistem pengupahan (natura), pengupahan (uang), bunga pinjaman, pajak, dan nilai tukar petani. Selain itu, tentu akan ada kemungkinan muncul mekanisme lain, misalnya yang berdasarkan paksaan, penangkapan subsidi/dana lain oleh elit lokal, dan sebagainya.

f. Hubungan Luas Usaha Tani dengan Produktivitas

Dalam studi agraria telah terjadi perdebatan yang panjang terkait ada/tidaknya hubungan berbanding lurus atau balik antara luas usaha tani dan produktivitas usaha tani (dalam arti hasil per hektar). Pada banyak penelitian di negara lain ditemukan hubungan berbanding balik (*inverse relationship*).¹⁹ Perdebatan ini masih relevan untuk Indonesia masa kini, melihat banyak ekonom pertanian, teknokrat, dan pembuat kebijakan, juga golongan menengah, dan elit perkotaan, yang (sangat) yakin bahwa usaha pertanian skala besar tentunya adalah lebih 'efisien' dibanding petani skala kecil atau gurem.

g. Interaksi Akses dan Kegiatan Pertanian dan Non Pertanian dalam Proses Akumulasi dan Diferensiasi Sosial-Ekonomi Masyarakat Desa

Studi White dan Wiradi pada tahun 1989 yang menyoroti perubahan dalam 9 desa di Jawa selama periode 1971-1981, menunjukkan bahwa tanah merupakan sumber daya utama yang sangat memengaruhi akumulasi modal rumah tangga petani (RTP). Akumulasi modal di sektor bukan-pertanian berbanding lurus dengan kepemilikan tanah. RTP yang menguasai tanah yang luas juga memiliki kekuatan untuk melakukan akumulasi modal pada sektor bukan-pertanian. Akhir-akhir ini, peranan hubungan sektor pertanian dan bukan-pertanian dalam proses diferensiasi sosial dan pembentukan kelas di pedesaan menjadi bahan perdebatan. Misalnya, studi baru tentang proses perubahan pedesaan dalam 14 lokasi di Asia

Tenggara²⁰ menunjukkan beberapa kecenderungan umum yang memengaruhi sifat dan proses perubahan, di antaranya makin pentingnya kegiatan bukan-pertanian dan pola berpenghasilan ganda; fleksibilisasi dan "feminisasi" kerja di pedesaan; makin intensnya interaksi pedesaan-perkotaan, serta makin pentingnya migrasi domestik maupun internasional.²¹ Dalam studi yang sama, Rigg Hirsch dan Vandergeest mengusulkan suatu "politik ekonomi agraris yang baru" di mana para petani dilihat sebagai "kelas yang sedang dibentuk kembali dengan pengaruh kekuatan-kekuatan globalisasi". "Kelas" dalam visi ini tidak lagi ditentukan terutama oleh penguasaan tanah dan hubungan produksi agraris, tetapi bersifat "multidimensional". Hal ini membawa kita ke arah pengertian ketimpangan (*inequality*) pedesaan yang lebih bernuansa dan dinamis, tidak hanya berdasarkan penguasaan atas tanah.²² Meskipun porsi sektor pertanian menurun dengan adanya semua perkembangan ini,²³ namun pertanian masih merupakan sektor dan pemberi lapangan kerja yang paling besar, dan menjadi unsur penting dalam proses diferensiasi sosial ekonomi.

Pada saat ini, tanah bukan satu-satunya faktor penentu akumulasi modal dan diferensiasi sosial-ekonomi dalam masyarakat petani, meskipun di beberapa desa penelitian masih menunjukkan struktur yang sama dengan yang terjadi dalam studi White dan Wiradi.²⁴ Akumulasi modal pada RTP dipengaruhi juga oleh akses petani terhadap kesempatan di luar sektor pertanian.

h. Konsep Efisiensi Sosial

Seluruh penggambaran sistem reproduksi sosial pertanian tadi akan dianalisis dampaknya terhadap efisiensi sosial. Efisiensi sosial sebagai kerangka berfikir dalam penelitian ini dipilih karena merupakan kondisi di mana distribusi sumber daya di dalam suatu masyarakat mencapai titik yang optimal. Konsep 'efisiensi' di sini bukanlah merujuk pada produktivitas tenaga kerja atau keuntungan usaha, tetapi pada sumbangan terhadap pencapaian tujuan pembangunan untuk masyarakat. Dari itu, kita perlu memikirkan sistem pertanian yang paling baik dalam menggunakan sumber daya seperti tenaga kerja dan seberapa banyak pendapatan yang masuk untuk orang miskin. Hal-hal ini

¹⁹ Lihat antara lain Lipton (2009: Ch 2), Berry, 2011.

²⁰ Rigg dan Vandergeest eds (2012)

²¹ De Konincke et al, (2012)

²² *ibid*, p. 20-22

²³ *ibid*, p. 32

²⁴ White dan Wiradi, 1989

sangat relevan sebagai tujuan analisis kebijakan.²⁵

Kriteria yang tepat untuk menilai efisiensi sosial (dan bobot relatif yang kita berikan kepada masing-masing kriteria) juga dapat disesuaikan dengan kondisi, masalah, dan kebutuhan masyarakat, serta periode tertentu dalam pembangunan. Sebagai contoh, jika kita melihat kondisi Indonesia saat ini - di mana beras dan makanan pokok lainnya diimpor dalam skala besar, harga pangan tidak stabil dan tidak dapat diprediksi, terjadi ketimpangan distribusi pendapatan, pengangguran dan pekerjaan dengan imbalan yang tidak layak, serta masalah lingkungan menjadi serius - kita bisa mengatakan bahwa jenis dan bentuk sistem pertanian yang dinilai paling efisien dari segi sosial dan ekonomi akan memenuhi persyaratan sebagai berikut: (1) mendukung peningkatan produksi, (2) memaksimalkan penyerapan tenaga kerja dan menyediakan mata pencaharian, (3) mendukung distribusi pendapatan yang lebih baik, dan (4) mendukung keberlanjutan lingkungan (White, 2013). Sektor pertanian sebenarnya bisa menghidupi banyak orang dengan menyerap tenaga kerja yang tinggi dan membagi keuntungan yang lebih baik kepada lebih banyak orang. Oleh karena itu, analisis efisiensi sosial pada penelitian sektor pertanian padi sangat penting untuk ditelaah lebih lanjut.

Semangat efisiensi sosial di atas sebenarnya sudah didukung oleh beberapa kebijakan dan perhatian pemerintah Indonesia. Misalnya yang tertulis pada Undang-Undang (UU) Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani, pada Bab II Pasal 2 menyatakan bahwa salah satu asas yang melandasi perlindungan dan pemberdayaan petani adalah asas efisiensi-berkeadilan, kedaulatan, kebermanfaatannya, dan keberlanjutan. Beberapa asas yang disebutkan sejalan dengan efisiensi sosial, yaitu UU ini secara tegas menyatakan bahwa petani memiliki hak dan kesempatan yang sama untuk mengembangkan diri, dan penyelenggaraan UU ini harus secara konsisten mendukung kesejahteraan petani.

3. Pertanyaan-Pertanyaan Penelitian

Berdasar tujuan dan kerangka yang telah diuraikan di atas, maka studi Kemandirian Pangan AKATIGA bertujuan menjawab beberapa *cluster* pertanyaan pokok sebagai berikut:

a. Penguasaan tanah dan struktur agraris

1. Bagaimana pola dan dinamika penyebaran kepemilikan tanah, luas usaha tani, proporsi RTP bukan pemilik tanah (petani

penggarap) dan petani tidak bertanah (buruh tani) berdasarkan Sensus Pertanian 1963-2003? Perkembangan apa yang terlihat pada Sensus Pertanian terakhir (2013)?

2. Bagaimana pola kepemilikan dan penguasaan tanah di desa-desa penelitian? Bagaimana pemilikan skala luas atau *absentee*, luas usaha tani rata-rata serta penyebarannya, tingkat *landless*, proporsi petani penggarap (bukan-pemilik) dsb?
 3. Apa arti 'pemilikan luas' di Jawa Tengah, Jawa Barat, dan Sulawesi Selatan? Bagaimana profil dan latar belakang para pemilik tanah luas? Bagaimana pengelolaan tanahnya? Serta, sejauh mana dominasi mereka terhadap sektor-sektor bukan-pertanian di desa?
 4. Bagaimana mekanisme-mekanisme akses tanah pertanian untuk individu/rumah tangga yang tidak memiliki (cukup) tanah? Bagaimana hubungan kerja dan pembagian (biaya, resiko, hasil) pada masing-masing mekanisme tersebut, manakah yang paling dominan?
 5. Bagaimana perbandingan dan hubungan antara pola ketimpangan antarstrata petani dalam subsektor pangan, pertanian non pangan, dan sektor bukan-pertanian? Apakah saling mendukung/memperkuat (berbanding langsung) atautkah saling memperlemah/meniadakan (berbanding balik)?
- b. Sistem pertanian padi dan perubahannya, dalam perspektif efisiensi sosial
1. Bagaimana hubungan antara luas usaha tani dan produktivitas (hasil panen per hektar)?
 2. Bagaimana hubungan antara status kepemilikan tanah dan produktivitas?
 3. Sejauh mana status petani pemar memengaruhi ketahanan petani kecil, khususnya menghadapi panen dan musim/cuaca yang tidak menentu akhir-akhir ini?
 4. Hambatan-hambatan apa yang dihadapi petani padi dalam usaha menaikkan/mempertahankan produktivitas dan penghasilannya?
 5. Perubahan apa yang terjadi dalam teknologi dan praktik pertanian padi, dan apa akibatnya terhadap produktivitas, kesempatan kerja dan distribusi pendapatan?
 6. Bagaimana sistem perekrutan dan pembayaran tenaga kerja pertanian padi, dan bagaimana pentingnya peluang berburuh tani untuk golongan petani gurem dan tak bertanah di perdesaan?

²⁵ Berry, 2011: 641

Tabel 1. Kriteria Pemilihan Lokasi Penelitian

Propinsi	Kabupaten	Desa/Kelurahan	Kriteria Pemilihan Lokasi
Jawa Barat	• Karawang	1. Cisari 2. Dawungan	a. Lumbung padi nasional b. Tantangan alih fungsi sawah ke bukan-sawah c. Pergeseran struktur tenaga kerja muda dari pertanian ke sektor industri dan jasa
	• Indramayu	3. Karang 4. Wanakerta	
Jawa Tengah	• Kebumen	5. Sidosari 6. Mulyoharjo	a. Lumbung padi nasional b. Tantangan alih fungsi sawah ke bukan-sawah c. Ketersediaan pekerjaan bukan-pertanian di dalam desa
	• Cilacap	7. Sarimulyo 8. Wetanan	
Sulawesi Selatan	• Bone	9. Cempaka 10. Gadingan	a. Ditentukan sebagai lumbung padi nasional berdasarkan (MP3EI)
	• Wajo	11. Parangputih 12. Walian	

7. Apakah petani menghadapi masalah kekurangan tenaga kerja pertanian pada tahapan-tahapan penting, dan bagaimana cara mereka mengatasinya?
 8. Bagaimana kinerjanya berbagai institusi yang (seharusnya) berfungsi mendukung dan melayani petani kecil?
- c. Generasi muda perdesaan, kesempatan kerja dan keberlanjutan pertanian skala kecil
1. Bagaimana keterlibatan orang muda di 12 desa penelitian ini di sektor pertanian pangan?
 2. Apa saja faktor-faktor yang mendorong atau menahan orang muda untuk tetap bertahan di sektor pertanian (pangan), meninggalkan sektor pertanian, atau meninggalkan sementara sektor pertanian untuk kemudian kembali lagi?

METODE PENELITIAN²⁶

Penelitian studi ini mencakup 12 desa yang tersebar di 6 kabupaten dan 3 provinsi di Indonesia. Pemilihan lokasi didasarkan pada karakteristik khusus dari setiap lokasi sebagai lumbung padi nasional maupun lokal di daerahnya masing-masing. Jawa Barat dan Jawa Tengah terpilih karena termasuk provinsi dengan produksi beras paling tinggi di Indonesia. Sedangkan Sulawesi Selatan terpilih karena dicanangkan sebagai pusat lumbung padi nasional dalam MP3EI 2011-2025. Lokasi penelitian dipilih dengan mempertimbangkan karakter yang bertolak belakang dari setiap desa/kelurahan. Cara pemilihan sampel ini, sengaja

menghasilkan tingkat heterogenitas antardesa yang tinggi seperti dapat dilihat pada Tabel 2 di bawah.

Penelitian ini menggunakan *mixed method*, yaitu kuantitatif dan kualitatif. Data statistik dari Sensus Pertanian, Daerah dalam Angka, *Indonesia Family Life Survey* (IFLS) dan lainnya, dianalisis untuk mendapatkan gambaran makro dari kondisi pertanian dan petani di Indonesia, sekaligus menjadi gambaran awal dari wilayah yang diteliti. Selain itu, penelitian ini menganalisis data sekunder seperti dokumen kebijakan, data kabupaten, data desa, dan lainnya. Penelitian di lapangan dilakukan selama kurang lebih 14 hari untuk setiap desa dengan empat peneliti lapangan, sehingga menjadi sekitar 54 HOK di masing-masing desa.

Pada tingkat desa, studi ini menggunakan beberapa teknik pengumpulan data yaitu mengolah data sekunder, transek, diskusi kelompok, dan wawancara mendalam. Selain itu, dilakukan survey kepada 30 rumah tangga di setiap lokasi dengan sampel dipilih sedemikian rupa sehingga secara kasar mencerminkan struktur agraris di masing-masing lokasi.

Transek diperlukan pada awal penelitian sebagai cara peneliti untuk memetakan struktur sosial, yaitu hubungan antarindividu, kelompok, rumah tangga, dsb. Peneliti dapat memanfaatkan transek untuk mencari informasi awal yang bisa diperdalam pada diskusi kelompok dan wawancara mendalam. Selama melakukan transek, peneliti juga mencari 30 responden yang akan disurvei. Pengamatan dengan berjalan-jalan keliling desa untuk memahami konteks ruang di lokasi penelitian. Peneliti bisa melihat infrastruktur desa, akses penduduk desa terhadap pasar dan luar desa, kegiatan penduduk desa, dsb. Diskusi kelompok dilakukan dua kali, yaitu di awal dan di akhir masa penelitian di setiap desa. Diskusi kelompok awal dilakukan sebagai konfirmasi dan memperdalam

²⁶ Untuk penjelasan mengenai metode penelitian Studi Kemandirian Pangan, lihat www.akatiga.org

informasi yang berasal dari transek. Selain itu, peneliti yang menjadi fasilitator diskusi menggali informasi umum yang bisa diperdalam setelah diskusi melalui wawancara mendalam. Diskusi kelompok akhir dilakukan sebagai konfirmasi data yang sudah diperoleh selama dua minggu di desa.

Berbagai teknik ini dilakukan untuk saling melengkapi informasi, melakukan konfirmasi, dan triangulasi (verifikasi data). Misalnya, untuk mendapatkan gambaran kasar mengenai pembagian rumah tangga menurut jenis penguasaan atas tanah peneliti menggunakan data monografi desa, FGD dan data P3K. Rekonstruksi (estimasi) struktur agraris yang dihasilkan memberi gambaran cukup menarik, misalnya bahwa di kebanyakan desa (9 diantara 12 desa) jumlah petani yang tidak memiliki (sebagian atau seluruh) tanahnya melebihi jumlah petani pemilik.²⁷

Rekonstruksi struktur agraris tersebut pada gilirannya menjadi dasar untuk memilih sampel 30 rumah tangga, supaya mencerminkan heterogenitas penguasaan atas tanah yang dijumpai di masing-masing desa. Survey dilakukan kepada 30 rumah tangga untuk melihat produktivitas pertanian dan kerentanan rumah tangga. Survey ini didukung dengan wawancara lebih mendalam dengan beberapa responden agar peneliti dapat memahami alasan, perubahan, hubungan sebab akibat, kasus unik, serta informasi lain yang tidak dapat diperoleh melalui survey.

Hasil wawancara mendalam individu mengandung isu-isu menarik dan informan baru yang juga ditelusuri. Oleh karena itu, peneliti berusaha membangun hubungan yang baik dengan informan agar wawancara berjalan dengan lancar dan informan bisa lebih terbuka dalam menjawab pertanyaan peneliti.

Penelitian selama 54 HOK di masing-masing desa (berarti: 54 x 12 = hampir 650 HOK bisa dibayangkan telah menghasilkan segunung (virtual) data berupa observasi, kasus, ringkasan wawancara/diskusi dsb. Data asli dalam bentuk catatan lapangan maupun survey dirapihkan, kemudian untuk setiap desa, dua peneliti merangkum data tersebut dalam bentuk laporan desa (semacam monografi desa untuk penggunaan intern). Proses ini memakan waktu cukup lama sehingga tahap berikutnya yaitu penulisan empat macam laporan tematik tertunda juga, sehingga draft laporan tematik tersebut baru keluar hampir satu tahun setelah pulang dari lapangan, dan artikel yang disajikan dalam edisi *JAS* ini baru sempat terbit sekitar 14 bulan setelah penelitian lapangan selesai. Sebagai pelajaran yang bisa ditarik dari pengalaman ini, kami merasa perlu menciptakan cara merekam, merapihkan dan mengolah data lapangan yang lebih efisien.

REFLEKSI

Penelitian ini tidak sedalam penelitian etnografi mendalam, yang biasanya berlangsung berbulan-bulan di hanya satu atau dua desa. Tetapi dengan segala keterbatasannya studi kami diharapkan sudah bisa lebih dari hanya menggores permukaan realita. Salah satu fungsi penelitian di sejumlah desa seperti ini adalah untuk membongkar 'mitos' (asumsi yang berlaku umum di kalangan kebijakan, media, dsb), dengan menunjukkan bahwa asumsi-asumsi tersebut tidak berlaku. Artikelnya Isono Sadoko pada akhir edisi khusus ini memberikan beberapa contoh mitos yang tidak didukung oleh kenyataan, dan berimplikasi cukup erat untuk kebijakan.

Selain itu, penelitian semacam ini memungkinkan kita untuk menjadi terbuka untuk perkembangan-perkembangan baru yang tidak diduga akan dijumpai pada waktu mendesain penelitian. Salah satu contoh adalah munculnya alat panen *combine harvester* yang ditemukan di 2 desa sampel di Sulawesi Selatan, yang menjadi ancaman bagi buruh panen dan menurut hampir semua kriteria merupakan teknologi yang (sangat) tidak tepat guna untuk perdesaan Indonesia masa kini. Pengalaman ini kemudian menjadi alasan untuk merencanakan suatu studi baru khusus tentang masalah teknologi produksi pangan yang akan kami lakukan pada bulan-bulan awal 2015.

Dengan studi ini Tim Studi Pangan AKATIGA berharap bisa memberi kontribusi yang berguna dalam perdebatan demokratis yang berlangsung terus tentang kebijakan pangan.

DAFTAR PUSTAKA

- Bernstein, H. 2010. *Class Dynamics of Agrarian Change*. Halifax: Fernwood Publishing.
- Berry, Albert. 2011. Review Essay: The Case for Redistributive Land Reform in Developing Countries. *Development and Change* 42 (2): 637-648.
- BPS. 2013. *Laporan Bulanan Data Sosial Ekonomi, Edisi 40: September 2013*. Jakarta: Biro Pusat Statistik.
- de Konincke R., J. Rigg & P. Vandergeest. 2012. A half century of agrarian transformations in Southeast Asia. 1960-2010. in J. Rigg & P. Vandergeest, eds. *Revisiting Rural Places: Pathways to Poverty and Prosperity in Southeast Asia*. Singapore: NUS Press. pp. 25-37.
- Deere, Carmen Diana and Alain de Janvry. 1979. A Conceptual Framework for the Empirical Analysis of Peasants. *American Journal of Agricultural Economics* 61 (4).
- Faisal Kasryno ed. 1983. *Prosek Pembangunan Ekonomi Pedesaan Indonesia*. Yayasan Obor Indonesia.
- FAO. 2001. *The State of Food Insecurity in The World*

²⁷ Lihat Ambarwati dan Harahap, 2014

2001. Rome: Food and Agricultural Organization of the United Nations.
- Ambarwati, Aprilia dan R.A. Harahap. 2015. Penguasaan Tanah Pertanian dan Struktur Agraris di Beberapa Desa Penghasil Padi. *Jurnal Analisis Sosial* (edisi ini).
- Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. 2013. *Perkembangan Pelaksanaan MP3EI Koridor Ekonomi Sulawesi*. Jakarta: Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.
- Lipton, M. 2009. *Land Reform in Developing Countries: Property Rights and Property Wrongs*. New York: Routledge.
- Patel, Raj. 2009. What Does Food Sovereignty Look Like? *Journal of Peasant Studies* 36 (3), pp. 663-706.
- Rigg, J. and P. Vandergeest, eds. 2012. *Revisiting Rural Places. Pathways to Poverty and Prosperity in Southeast Asia*. Singapore: NUS Press.
- Via Campesina. 2007. Nyéléni Declaration. Sélingué, Mali: Forum for Food Sovereignty. <<http://www.nyeleni.org>> (4 February 2015)
- Wells, K. 2009. *Childhood in a Global Perspective*. Cambridge: Polity Press.
- White, B. 1989. Problems in The Empirical Analysis of Agrarian Differentiation, in G. Hart, A. Turton and B. White, eds. *Agrarian Transformations: Local Processes and the State in Southeast Asia*. Berkeley: University of California Press, pp. 15-30.
- White, Ben and Gunawan Wiradi. 1989. 'Agrarian and Bukan-Agrarian Bases on Inequality in Nine Javanese Villages' G. Hart, A. Turton and B. White, eds. *Agrarian Transformations: Local Processes and the State in Southeast Asia*. Berkeley: University of California Press, pp. 266-302.
- White, Ben. 2013. Does Indonesia Need Corporate Farms? Reflections on Modernization, Efficiency, and The Social Function of Land. *Journal of Rural Indonesia* 1 (1)
- Yogaprasta A. Nugraha dan Herawati, Rina. 2014. *Menguak Realitas Orang Muda Sektor Pertanian di Perdesaan*. Bandung: Seri Penelitian AKATIGA.

**TANAH UNTUK PENGGARAP?
PENGUASAAN TANAH DAN STRUKTUR AGRARIS
DI BEBERAPA DESA PENGHASIL PADI**

**LAND FOR THE TILLERS?
LAND TENURE AND AGRARIAN STRUCTURE
IN SOME RICE PRODUCING VILLAGES**

**Aprilia Ambarwati¹
Ricky Ardian Harahap²**

Yayasan Akatiga
Jalan Tubagus Ismail II No. 2, Bandung 40134
E-mail: apriliambarwati@gmail.com, ardianricky9@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini menjelaskan pola pengaturan lahan dan struktur agraris di 12 desa penghasil beras di Indonesia. Penelitian ini juga meneliti hubungan antara kepemilikan lahan dengan pendapatan pertanian dan non pertanian. Dalam Sensus Pertanian Tahun 2013 menunjukkan penurunan yang drastis dalam jumlah pertanian skala kecil yang kemungkinannya disebabkan oleh perubahan pengertian ‘pertanian’, dan tidak berlaku untuk sektor produksi pangan skala kecil. Ketimpangan pemilikan tanah di beberapa desa penelitian yang mengkhawatirkan dalam hal efisiensi sosial dan pendekatan polarisasi. Pemilikan lahan skala besar bukan berarti mengarah pada pertanian skala besar; pemilik lahan cenderung mengalokasikan sebagian kecil lahan mereka untuk disewakan dengan sistem bagi hasil. Investasi lahan yang sifatnya spekulatif menyebabkan cepatnya kenaikan harga lahan pertanian. Pemuda dan perempuan memiliki akses yang terbatas di lahan pertanian. Studi agraria klasik mengasumsikan bahwa kepemilikan tanah adalah penentu utama akumulasi modal dalam pengurusan lahan pertanian. Namun, dalam penelitian ini ditemukan banyak variasi dalam struktur agraria dikarenakan dinamika kerja pertanian dan non pertanian, serta pendapatan.

Kata kunci: Pertanian padi skala kecil, Struktur agraris, Penguasaan lahan, Kepemilikan tanah, Akumulasi modal, Indonesia

Abstract

This study describes the patterns of land control and agrarian structure in 12 rice-producing villages in Indonesia. It also explores the relationship between landholding, farm and non-farm incomes. The apparent drastic decline in numbers of small farms in the 2013 Agricultural Census is probably caused by changing definitions of ‘farm’, and does not apply to the small-scale food production sector. Inequality of landholding in some villages is alarming in terms of social efficiency and approaches polarization. Large-scale land ownership, however, does not lead to large-scale farming; large landowners tend to allocate their land in small parcels to tenants in share-cropping (or, less commonly, rental) arrangements. Speculative investment in land is one cause of rapidly rising prices of agricultural land. Young people and women have limited access to land. Classic agrarian studies assumes that land tenure is the main determinant of capital accumulation in farm households. However, this study found much variation in agrarian structures because of the dynamics of agricultural and non-agricultural employment and incomes

Keywords: Small-scale rice farming, Agrarian structure, Land tenure, Land ownership, Capital accumulation, Indonesia

¹ Peneliti Pusat Analisis Sosial AKATIGA

² Peneliti Pusat Analisis Sosial AKATIGA

PENDAHULUAN

Struktur agraris sektor pangan yang didominasi oleh ‘petani kecil’ bukan sesuatu yang homogen, merata, atau statis. Data makro (terutama Sensus Pertanian) dan berbagai studi mikro menunjukkan adanya heterogenitas besar dalam pola pemilikan dan penguasaan tanah antardaerah, sedangkan berbagai penelitian mikro menunjukkan adanya pola diferensiasi agraris (yaitu diferensiasi masyarakat tani antara petani pemilik tanah luas, petani pemilik sedang, petani bukan-pemilik, dan buruh tani yang tak bertanah). Dari berbagai sumber data makro maupun mikro terlihat juga dinamika perubahan pola penguasaan atas tanah dan diferensiasi dari waktu ke waktu.³

Ketimpangan struktur penguasaan tanah tidak sehat dari berbagai segi. Selain mengancam kelangsungan produksi pangan, terdapat kecenderungan buruk pada penyebaran kesempatan kerja, distribusi pendapatan dan aspek-aspek lain dari ‘efisiensi sosial’ sektor pertanian, serta ekonomi perdesaan.⁴

Berbagai negara penghasil padi di Asia, seperti Jepang, Korea Selatan, dan Taiwan berhasil melakukan *land reform* dengan hasil yang sangat nyata bagi produktivitas, pemerataan, maupun dinamika sektor pertanian dan non pertanian. Keberhasilan tersebut berciri positif pada tingginya kesejahteraan petani di negara-negara tersebut. Kebijakan redistribusi tanah pertanian di negara-negara ini telah berhasil menghancurkan hak monopoli dari para tuan tanah (*landlords*), membatasi luas pemilikan dengan ketat, dan membuat petani yang tadinya sebagai penyewa menjadi pemilik tanah.

Di Indonesia, pembatasan luas pemilikan tanah seperti termuat dalam Undang-undang Pokok Agraria (UUPA 1960)⁵ belum diterapkan hingga saat ini karena dinamika politik yang tidak memungkinkan. Masa pemerintahan Orde Baru lebih memprioritaskan pelaksanaan ‘Revolusi Hijau’ sebagai upaya untuk meningkatkan produksi beras,

tanpa usaha yang berarti untuk mengendalikan proses diferensiasi dalam penguasaan lahan yang lazim terjadi sejalan dengan komersialisasi pertanian.

Salah satu konsekuensi dari kebijakan agraria tersebut adalah produksi pangan Indonesia saat ini mengandalkan suatu struktur agraris yang belum terkena reformasi. Distribusi penguasaan tanah pada desa-desa di Indonesia berbeda satu sama lain dan memiliki polanya masing-masing. Berdasarkan permasalahan yang telah dikemukakan di atas, maka penelitian ini bertujuan untuk menjawab pertanyaan penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana pola dan dinamika penguasaan tanah di desa-desa penghasil padi?
2. Bagaimana hubungan kerja serta akses berdasar gender dan generasi dalam penguasaan tanah di desa-desa penghasil padi?
3. Bagaimana hubungan timbal-balik antara ketimpangan di sektor pertanian dan non pertanian di desa-desa penghasil padi?

Penelitian mengenai struktur agraris dan penguasaan tanah merupakan bagian dari penelitian utama AKATIGA dengan tema Kemandirian Pangan. Dinamika struktur penguasaan tanah pada desa-desa penghasil padi perlu dilihat dalam konteks kemandirian pangan di Indonesia. Selama ini pangan di Indonesia disediakan oleh pertanian skala kecil yang tersebar di berbagai desa penghasil padi. Namun, kecenderungan penguasaan tanah oleh sebagian kecil kelompok orang kuat telah mengancam kemandirian pangan karena mengarah kepada penurunan produktivitas, distribusi pendapatan yang tidak merata, dan berkurangnya serapan tenaga kerja pertanian padi⁶. Penguasaan tanah yang tidak merata juga rentan terhadap alih fungsi lahan sehingga dapat mempengaruhi produksi pangan. Dengan demikian penguasaan tanah yang tidak merata dapat meningkatkan kemiskinan di perdesaan.

Dalam mengurai masalah penguasaan tanah dan struktur agraris pada desa-desa penghasil padi, digunakan beberapa konsep untuk mempermudah analisis⁷:

1. **Konsep ‘akses’ dalam konteks studi penguasaan lahan**⁸, digunakan untuk memperhatikan seperangkat hubungan yang lebih luas daripada hanya hubungan

³ Bachriadi dan Wiradi, 2011; White dan Wiradi, 1989

⁴ Lipton, 2009

⁵ Memuat prinsip-prinsip bahwa tanah mempunyai fungsi sosial, berarti harus diperlakukan sebagai alat produksi untuk menciptakan keadilan sosial, tidak untuk kepentingan individu yang menyebabkan konsentrasi kepemilikan dan eksploitasi “kaum yang lemah oleh kaum yang kuat”. UUPA antara lain membatasi luas pemilikan (dengan luas maksimal disesuaikan dengan kondisi lokal), mengatur ketentuan bagi hasil antara pemilik dan penggarap, dan membatasi pemilikan tanah oleh *absentee*.

⁶ Analisis efisiensi sosial pada pertanian padi skala kecil dapat dibaca dalam artikel “*Sistem Pertanian Padi Indonesia dalam Perspektif Efisiensi Sosial*”, dalam edisi JAS ini (Herlinawati dan Chazali, 2015).

⁷ White, 2015

⁸ Peluso dan Ribot mendefinisikan konsep akses sebagai “kemampuan untuk menikmati manfaat dari sesuatu” (*the ability to benefit from things*).

- kepemilikan. Sesuai dengan pandangan ini, ‘penguasaan lahan’ dalam konteks studi ini dipahami sebagai jangkauan terhadap tanah untuk dikelola yang tidak hanya bisa diperoleh dengan jalan memiliki, namun dapat pula melalui cara sewa, gadai, atau bagi hasil
2. **Konsep diferensiasi agraris (*agrarian or rural differentiation*)**, digunakan untuk mempermudah melakukan analisis ‘kelas’ petani. Dalam menjelaskan struktur agraris, studi ini menggunakan enam kategori kasar untuk membedakan petani di desa penelitian, yaitu Petani Modal Kuat (CF), Petani Luas (LF), Petani Menengah I (MF1), Petani Menengah II (MF2), Petani Sempit (SF), dan Buruh Tani Tak Bertanah (LL).⁹
 3. **Konsep rejim ketenagakerjaan agraris (*agrarian labour regime*)**. Konsep ini menyangkut hubungan ketenagakerjaan dan jalur-jalur peralihan surplus dalam sistem produksi pertanian. Bernstein melihat struktur sosial sistem produksi dan sistem reproduksi dengan mengandalkan empat pertanyaan pokok, yaitu siapa yang memiliki apa “*who owns what?*” (penguasaan), siapa yang melakukan apa “*who does what?*” (pembagian kerja), dan siapa yang mendapatkan apa “*who gets what?*” (rejim ketenagakerjaan dan pola arus peralihan nilai), dan apa yang dilakukan dengan pendapatan tersebut “*what do they do with it?*” (pola reproduksi/akumulasi).¹⁰
 4. **Interaksi akses dan kegiatan pertanian dan non pertanian dalam proses akumulasi dan diferensiasi sosial-ekonomi masyarakat desa.** *Inequality* perdesaan saat ini lebih bernuansa dan lebih dinamis, tidak hanya berdasarkan penguasaan atas tanah.¹¹ Meskipun porsi sektor pertanian menurun dengan adanya semua perkembangan ini¹², namun pertanian masih merupakan sektor dan pemberi lapangan kerja yang paling besar, dan menjadi unsur penting dalam proses diferensiasi sosial ekonomi.
 5. Terakhir, **efisiensi sosial** digunakan untuk membantu menganalisis secara tajam bentuk-bentuk efisiensi ekonomi dan sosial pada

distribusi penguasaan lahan pertanian skala kecil. Dalam konteks Indonesia masa kini, tercapainya efisiensi sosial dalam sektor pertanian pangan memerlukan beberapa prasyarat, yaitu (1) mendukung peningkatan produksi, (2) memaksimalkan penyerapan tenaga kerja dan menyediakan mata pencaharian, (3) mendukung distribusi pendapatan yang lebih baik, (4) mendukung keberlanjutan lingkungan (White, 2013).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan pada 12 desa penelitian yang tersebar pada enam kabupaten di tiga provinsi dengan menggunakan *mixed methods*, kualitatif dan kuantitatif. Pengambilan data kualitatif dilakukan dengan cara observasi, transek, diskusi kelompok, *Focus Group Discussion* (FGD), dan wawancara mendalam. FGD dan wawancara mendalam dilakukan bersama aparat desa dan perwakilan petani dari masing-masing strata. Sementara transek digunakan untuk memberikan gambaran awal mengenai desa dan struktur pertanian di desa sebelum melakukan wawancara mendalam. Pengambilan data kuantitatif menggunakan data BPS (Sensus Pertanian), beberapa data statistik tingkat lokal, dan survei kecil dengan sampel 30 Rumah Tangga Pertanian (RTP) yang secara kasar mencerminkan keberagaman struktur agraris di masing-masing desa penelitian. Dasar analitik tulisan ini lebih banyak menggunakan survey terhadap 30 RTP pada 12 desa penelitian.

Penelitian di lapangan dilakukan selama kurang lebih 14 hari untuk setiap desa dengan empat peneliti lapangan, sehingga menjadi sekitar 54 HOK di masing-masing desa. Dalam penelitian di lapangan, cukup sulit untuk mendapatkan data luas kepemilikan tanah dan pendapatan RTP yang akurat. Beberapa pendekatan dilakukan seperti melakukan pemeriksaan salinan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) dan wawancara kepada aparat desa terkait.¹³ Sementara pencarian data terkait pendapatan RTP menggunakan pendekatan dengan melakukan perhitungan ulang pendapatan bersih setelah dikurangi biaya produksi masing-masing sektor.

Tulisan ini menyajikan 4 bagian, bagian pertama menjelaskan pendahuluan tulisan. Bagian kedua menjelaskan penguasaan tanah dan struktur agraris melalui perbandingan olahan data sekunder

⁹ Dalam pembahasan grafik total pendapatan RTP pada bagian akhir, strata petani ini juga ditulis sebagai berikut: Petani Modal Kuat = CF (Capital Farmer), Petani Luas > 2 ha (Large Farm), Petani Menengah I antara 1-2 ha (Medium Farm I), Petani Menengah II antara 0,25-0,99 ha (Medium Farm II), Petani Sempit < 0,25 ha (Small Farm), dan Buruh Tani tak Bertanah = LL (Landless).

¹⁰ Bernstein 2010: 22-25

¹¹ De Konincke et al 2012

¹² *ibid*, p. 32

¹³ Data kepemilikan tanah dari SPPT, walaupun tidak 100% akurat, menggambarkan kepemilikan tanah di dalam desa.

Tabel 1. Perubahan RTP yang Menguasai Tanah, tahun 1963-2003

Tahun Sensus	Jumlah RTP yang menguasai tanah (000.000)	Total tanah yang dikuasai (000.000 ha)	Rata-rata penguasaan tanah (ha)	% “petani gurem” (penguasaan <0.5ha)	% peningkatan jumlah RTP yang menguasai tanah antara dua sensus	% peningkatan luas tanah pertanian antara dua sensus
1963	12,2	12,9	1,05	44	-	-
1973	14,4	14,2	0,99	46	18	10
1983	18,8	16,8	0,89	45	31	18
1993	21,2	17,1	0,81	49	13	2
2003	24,3	21,5	0,89	51	15	26

Sumber: Bachriadi dan Wiradi (2011:22), berdasarkan data Sensus Pertanian 1963-2003

Tabel 2. Jumlah RTP menurut Golongan Luas Tanah yang Dikuasai berdasarkan ST2003 dan ST2013

Golongan Luas Tanah (ha)	ST2003 (dalam juta)	ST2013 (dalam juta)	Perubahan	
			Absolut	%
<0.1	9.38	4.34	-5.04	-53.75
0.10 – 0.19	3.60	3.55	-0.05	-1.45
0.20 – 0.49	6.82	6.73	-0.08	-1.23
0.5 – 0.99	4.78	4.55	-0.23	-4.76
1.0 – 1.9	3.66	3.73	0.7	1.76
2.0 – 2.9	1.68	1.62	-0.55	-3.27
≥3.0	1.31	1.61	0.30	22.81
Jumlah	31.23	26.14	- 5.10	-16.32

Sumber: Laporan Hasil Sensus Pertanian 2013

dan data primer. Bagian ketiga membahas mengenai pemilikan dan penguasaan lahan serta akses tanah berdasarkan generasi dan gender. Bagian keempat merupakan pembahasan mengenai hubungan timbal balik antara ketimpangan di sektor pertanian dan non pertanian. Tulisan ini akan ditutup dengan rangkuman.

HASIL DAN PEMBAHASAN

a. Penguasaan Tanah dan Struktur Agraris

Bagian ini terlebih dulu akan mengulas secara singkat data-data sekunder (olahan) Sensus Pertanian 2003-2013 yang berkaitan dengan penguasaan tanah dan struktur agraris. Pembahasan mengenai data sekunder bertujuan memberikan gambaran penguasaan tanah dan struktur agraris di Indonesia, sebelum dibandingkan dengan data temuan lapangan pada 12 desa penelitian.

b. Penguasaan Tanah dan Struktur Agraris menurut Data Sekunder

Perbandingan data Sensus Pertanian BPS dari tahun 1963-2003 menunjukkan jumlah RTP terus mengalami peningkatan seiring laju pertumbuhan penduduk. Jumlah petani gurem terus meningkat mulai dari periode 1983-1993 hingga

1993-2003, sebagaimana dapat dilihat pada Tabel 1¹⁴.

Berdasarkan Tabel 1 dapat dilihat bahwa jumlah RTP penguasa tanah yang meningkat tidak diimbangi dengan meningkatnya ketersediaan tanah, kecuali pada periode 1993-2003. Terjadi peningkatan total luas tanah yang dikuasai namun dalam periode 1973-1993 kenaikan tersebut lebih kecil dibandingkan kenaikan jumlah petani yang menguasai tanah. Dengan demikian, persentase petani yang menguasai tanah kurang dari 0,5 ha semakin meningkat (lihat kolom 5).

Bachriadi dan Wiradi (2011) menjelaskan bahwa fenomena tersebut berkaitan dengan pertumbuhan ekonomi yang tidak seimbang antara kota dengan desa serta proses industrialisasi yang tidak mengakar dan tumbuh di perdesaan sehingga menyebabkan penduduk di perdesaan meninggalkan sektor pertanian.

¹⁴ Wiradi dan Bachriadi 2011

Tabel 3. Distribusi Petani Pengguna Lahan dan Status Penggarapannya, 1963-2003

Status	1963 (%)	1973 (%)	1983 (%)	1993 (%)	2003 (%)
Petani Pemilik	64,1	74,7	69,3	71,7	70,5
Petani Pemilik dan Penggarap	29,1	22,1	25,3	24,5	26,1
Petani Penggarap Murni	6,8	3,2	5,4	3,8	3,4
Total	100	100	100	100	100

Sumber: Bachriadi dan Wiradi (2011: 30)

Tabel 4. Estimasi Penyebaran RTP menurut Jenis Penguasaan pada 12 Desa Penelitian (% dari Semua RumahTangga)

Desa	Jenis Penguasaan (%)			
	Petani Pemilik	Petani Pemilik Penggarap	Petani Penggarap	Buruh Tani
Cisari (Karawang)	9	15	36	40
Dawungan (Karawang)	10	25	27	38
Karang (Indramayu)	32	29	15	24
Wanakerta (Indramayu)	17	32	24	27
Sidosari (Kebumen)	40	20	30	10
Mulyoharjo (Kebumen)	30	20	20	30
Wetanan (Cilacap)	60	15	15	10
Sarimulyo (Cilacap)	35	25	20	20
Walian (Wajo)	15	25	59	1*
Parangputih (Wajo)	30	40	15	15
Cempaka (Bone)	75	15	5	5
Gadingan (Bone)	80	9	10	1

Sumber: Monografi Desa, estimasi FGD, data sekunder BP3K

*: angka 1 menunjukkan jumlah yang tidak signifikan

Sementara menurut ST2013, jumlah RTP terutama rumah tangga petani gurem di Indonesia menurun secara drastis dalam waktu 10 tahun terakhir, sehingga timbul pertanyaan apakah penurunan itu mencerminkan perubahan yang nyata, ataukah lebih mencerminkan perubahan dalam proses pengumpulan atau pengolahan data?

Dalam pandangan kami, banyak perubahan yang jelas mungkin dikarenakan oleh perubahan definisi dan kriteria yang digunakan oleh BPS. Dari berbagai publikasi sensus pada tahun 2003 dan 2013 sulit untuk melihat definisi yang sama persis, yang telah digunakan dalam pembuatan Tabel 2. Sangat penting bahwa hal ini perlu mendapatkan klarifikasi. Bachriadi dan Wiradi (2011) telah melihat dinamika ketakpunyaan tanah (tunakisma) dan penggarapan petani seperti dapat dilihat dari Tabel 3.

Berdasarkan Tabel 3, dapat diketahui bahwa jumlah petani bukan pemilik atau petani penggarap murni sangat kecil di bawah 5%. Persentase jumlah pemilik yang juga menggarap tanah milik orang lain cukup besar yaitu sekitar 25%. Penurunan jumlah petani penggarap murni dari tahun 1983-2003 menunjukkan ketidakmerataan distribusi penguasaan tanah bahkan terdapat kecenderungan semakin timpangnya distribusi penguasaan tanah. Penurunan jumlah petani penggarap murni dari tahun 1983-2003

menunjukkan kecenderungan meningkatnya jumlah buruh tani tak bertanah yang dianggap memberikan sumbangan terhadap makin tajamnya ketimpangan struktur penguasaan tanah.

Hal ini dimaksudkan untuk menghindari kemungkinan menarik kesimpulan yang menyesatkan untuk kebijakan. Namun, terjadi penurunan yang signifikan pada sektor hortikultura bukan pada sektor pertanian padi (yang tampaknya mengalami penurunan sebesar 6,34 juta atau 37 persen). Sementara, penurunan pada sektor pertanian padi hanya 0,4 persen atau 58 ribu rumah tangga di 10 tahun. Sektor pertanian padi tidak menyumbang jumlah penurunan RTP yang signifikan.¹⁵

c. Penguasaan Tanah dan Struktur Agraris Menurut Data Primer

Pola penguasaan dan kepemilikan tanah yang ada di 12 desa memiliki variasi yang menarik. Terdapat dua desa (Cisari di Karawang dan Walian di Sulawesi Selatan) yang memiliki kecenderungan

¹⁵ Laporan Hasil Sensus Pertanian 2013

Tabel 5. Persentase Sampel 30 RTP berdasarkan Strata Penguasaan Tanah pada 12 Desa Penelitian

Desa	Strata Penguasaan				
	Petani Luas	Petani Menengah I	Petani Menengah II	Petani Sempit	Buruh Tani tak Bertanah
Cisari	3	6	15	36	40
Dawungan	15	30	10	5	40
Karang	10	15	30	5	40
Wanakerta	5	10	10	15	60
Sidosari	3	7	30	46	10
Mulyoharjo	0	13	27	40	20
Wetanan	5	16	21	37	21
Sarimulyo	11	16	26	42	5
Walian	36	46	11	0	7
Parangputih	14	34	21	10	21
Cempaka	3	57	33	0	7
Gadingan	0	27	62	10	1

Sumber: Data Kuesioner dengan sampel 30 RTP. Sampel dipilih untuk mencerminkan struktur (menurut estimasi) penguasaan lahan di masing-masing desa.

polarisasi kepemilikan dan penguasaan. Berikut adalah tabel estimasi persentase status penguasaan tanah yang ada di 12 desa.

Berdasarkan Tabel 4 diketahui bahwa di kebanyakan desa (9 diantara 12 desa) jumlah petani yang tidak memiliki (sebagian atau seluruh) tanahnya melebihi jumlah petani pemilik murni. Penguasaan tanah di Cisari, Dawungan, dan Walian terpusat pada beberapa petani pemilik saja yaitu masing-masing sebesar 9%, 10%, dan 15%.

Sementara penguasaan lahan oleh petani pemilik di Gadingan mencapai 80%, Cempaka 75%, dan Wetanan mencapai 60%. Lebih dari separuh petani pemilik di Cisari merupakan *absentee* yang tinggal di luar kabupaten. Sisanya (30%) merupakan petani lokal keturunan tuan tanah. Strata buruh tani tak bertanah terbesar terdapat pada desa-desa di Jawa Barat.

Strata penguasaan tanah di antara 30 RTP sampel di 12 desa disajikan pada Tabel 5. Jumlah buruh tani tak bertanah paling besar terdapat di Wanakerta, yaitu sebanyak 60%. Pada tiga desa lainnya di Jawa Barat jumlah buruh tani sebanyak 40%. Berbeda dengan yang terjadi di Gadingan, jumlah buruh tani tak bertanah di desa ini tidak signifikan hanya sebesar 1%. Di Walian dan Cempaka jumlah buruh tani tak bertanah sebesar 7%, dan di Sarimulyo sebesar 5%. Sedangkan persentase buruh tak bertanah di Wetanan, Sidosari, Cempaka, dan Gadingan tidak besar jika dibandingkan dengan desa-desa lain karena mereka memiliki kesempatan mengelola usaha tani dengan cara menyewa atau bagi hasil.

Berdasarkan uraian Tabel 5¹⁶ tergambar bahwa rata-rata penguasaan tanah di seluruh desa berada pada sebagian kecil petani (polarisasi). Terutama Cisari dan Walian menunjukkan tingkat polarisasi yang relatif tinggi. Namun, pada umumnya tanah yang dimiliki oleh seorang pemilik luas dikerjakan oleh beberapa petani penggarap (pemaro). Dengan demikian, kepemilikan tanah luas tidak menimbulkan usaha tani luas. Berdasarkan struktur penguasaan, pengambilan keputusan mengenai keberlanjutan pengelolaan tanah garapan sangat tergantung pada pemilik lahan. Pemilik lahan sewaktu-waktu dapat mengambil alih pengelolaan tanah tersebut. Dampak lebih jauh dari kecenderungan konsentrasi penguasaan tanah adalah kecenderungan kemampuan "*value capture*" (peralihan nilai dari golongan satu ke golongan lain) yang terjadi pada segelintir orang saja yang menguasai tanah di desa.

Proporsi petani bukan pemilik di 12 desa jauh lebih tinggi dari apa yang ditangkap dalam data makro (bandingkan data BPS dalam Tabel 3). Hal penting lainnya adalah tingkat kepincangan dalam penguasaan tanah tidak berbanding lurus dengan sempit/luasnya lahan yang tersedia pada masing-masing desa. Luas lahan yang tersedia pada masing-

¹⁶ Dalam penelitian ini terdapat 6 strata petani, yaitu Petani Modal Kuat, Petani Luas, Petani Menengah I, Petani Menengah II, Petani Sempit, dan Buruh Tani tak Bertanah. Dalam penyajian tabel ini tidak menyertakan Petani Modal Kuat karena proporsinya tidak signifikan. Pada masing-masing desa, sampel Petani Modal Kuat hanya 1-3 orang saja.

masing desa bisa saja hanya dikuasai oleh sebagian kecil orang atau kelompok tertentu.

Pemilikan dan Penguasaan Lahan

a. Pemilik Lahan Luas: Lokal maupun

Absentee

Pemilikan lahan luas di Jawa Tengah, Jawa Barat, dan Sulawesi Selatan menunjukkan variasi. Tanah di Cisari (70%) banyak dimiliki oleh *absentee* yang tinggal di luar Karawang, seperti Jakarta, Bekasi, Tangerang, dan Bandung. Pemilikan lahan oleh *absentee* baik oleh perusahaan swasta maupun perorangan bukan merupakan gejala baru dan sudah terjadi sejak tahun 1980an.

Pengelolaan lahan milik *absentee* di Cisari diberikan kepada petani penggarap dengan sistem bagi hasil. Lebih dari 50% petani lokal di Cisari merupakan buruh tani tak bertanah dan petani penggarap.

Pemilikan Lahan oleh Absentee

Kasus I

PT. Xau memiliki lahan pertanian yang seluas 35 ha di Cisari sejak tahun 1982. Lahan tersebut dijadikan perkebunan buah lokal yang kemudian mengalami kerugian pada tahun 1997/1998. Saat ini digarap oleh petani lokal sebagai sawah pompanisasi.

Lahan perkebunan diubah menjadi sawah pompanisasi seluas 30 ha atas permintaan warga sekitar. Seluas 3 ha lainnya ditanami palawija berupa kacang-kacangan. Sawah ini mampu menghasilkan panen dua kali dalam satu tahun. Terdapat 40 orang warga sekitar yang menjadi petani penggarap pada lahan tersebut. Penggarap membayar sewa tanah pada saat panen tiba. Penggarap harus bersedia menghentikan usaha tani pada saat perusahaan akan mempergunakannya. Pihak perusahaan rencananya akan membangun perumahan pada lokasi tersebut.

Kasus II

PT. Sentral memiliki tanah seluas 20 ha di Dusun Cirejag II, Cisari yang dijadikan sawah pompanisasi. Pengelolaannya dengan sistem bagi hasil pada saat panen. Kedua perusahaan ini masih rutin membayar pajak per tahun kepada Pemerintah Desa (Iuran Rutin Tahunan Desa/IRTD) sebesar Rp 350.000 per ha.

Gejala pemilikan tanah oleh *absentee* tidak terjadi pada desa di Jawa Tengah dan sebagian desa di Jawa Barat (Karang, Wanakerta). Tanah pertanian di Jawa Tengah tergolong masih luas dibandingkan di Jawa Barat. Petani lokal rata-rata memiliki lahan kurang dari 0,5 ha. Pemilikan tanah ini tidak hanya oleh orang dari dalam desa saja karena maraknya pemekaran desa-desa di Jawa Tengah (pemekaran tersebut bisa membuat seorang menjadi *absentee* secara formal tetapi bukan dalam arti sebenarnya).

Pemerintah Desa Sidosari, Jawa Tengah telah berusaha membatasi akumulasi dan polarisasi pemilikan tanah melalui kesepakatan informal dengan warga desa (lihat kasus di Sidosari, di bawah ini).

Usaha Pemerintah Desa untuk Membatasi Konsentrasi Luas Pemilikan

Di Sidosari, Kabupaten Kebumen, terdapat salah seorang pemilik tanah luas mencapai hampir 5 ha. Lokasinya tersebar di dalam dan di luar desa. Pada tahun 1957, ia berhasil membeli sawah seluas 10 ubin (140 m²) dan bertambah luas pada tahun-tahun selanjutnya. Ia seorang rentenir yang memberikan jasa pinjaman uang dan sering memberikan pinjaman uang kepada petani lain dalam bentuk gadai sawah. Ia lebih banyak meminta surat tanah sebagai borag (jaminan). Banyak petani yang menggadaikan tanah kepadanya harus kehilangan tanah karena tidak mampu mengembalikan uang pinjaman. "Jadi warga banyak yang takut kalau borag itu nantinya jadi miliknya."

Warga desa menganggap bahwa tanah yang ia miliki sudah cukup luas sehingga perlu dibatasi kepemilikan dan merasa khawatir jika sebagian besar sawah di desa menjadi miliknya. Oleh karena itu, Pemdes dan warga sepakat untuk tidak menjual tanah kepadanya sehingga muncul istilah "susah membeli sawah di desa" sebagai julukan. Petani yang membutuhkan modal kemudian dapat mengakses pinjaman ke Bank Kredit Desa yang dikelola oleh Pemerintah Desa dengan pendampingan dari BRI sebagai salah satu alternatif. Terdapat skema pinjaman BKD dengan sistem pembayaran paska panen.

b. Penguasa Tanah Luas di Desa: Keturunan Tuan Tanah dan Orang Kaya Baru

Dawungan, tanah pertanian yang luas mayoritas dikuasai oleh para haji dan tuan tanah. Mereka mengakumulasi tanah dengan cara membeli atau gadai. Gadai yang tidak ditebus akan menjadi hak milik sesuai kesepakatan.

Penguasa lahan luas di Wanakerta dan Parangputih juga berasal dari kelompok ekonomi baru seperti dari keluarga Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Tenaga Kerja Indonesia/Wanita (TKI/W). Di Wanakerta, hampir separuh pemuda laki-laki dan perempuan bekerja sebagai TKW dan TKI. Pendapatan TKI/W biasanya digunakan untuk membangun dan merenovasi rumah tinggal mereka di desa dan membayar hutang. Setelah itu, sebagian mereka menggunakan pendapatan untuk menyewa atau membeli tanah di desa sehingga dapat menjadi sumber pendapatan bagi keluarga di desa. Pembelian tanah oleh para TKI/W banyak dilakukan pada saat krisis moneter karena nilai tukar rupiah terhadap mata uang dolar pada saat itu sedang menurun. Saat ini, TKI/W kesulitan untuk membeli tanah karena harga tanah yang tinggi.

Seperti telah diuraikan diatas, pemilikan lahan luas di semua desa penelitian tidak menimbulkan pola usaha tani skala luas. Petani pemilik lahan luas pada umumnya banyak menghabiskan waktu mereka untuk berbagai kegiatan non pertanian sehingga tidak tertarik untuk bertani sendiri. Mereka ada yang menduduki jabatan pada pemerintahan desa dan mengelola usaha perdagangan atau jasa di sektor hulu hilir non pertanian. Pemilikan tanah luas pada desa-desa di Jawa Barat dan Jawa Tengah banyak yang digarapkan kepada petani lain.

c. Penguasaan Sektor Non Pertanian

Sektor non pertanian pada desa-desa penelitian diminati oleh semua strata RTP, tetapi jenis keterlibatan dan tingkat penghasilan non pertanian tergantung pada berbagai faktor antara lain ketersediaan modal, tingkat pendidikan, dan gender. Buruh tani tak bertanah memiliki kesempatan lebih untuk menambah penghasilan dari sektor non pertanian dengan melakukan berbagai pekerjaan yang tersedia di desa, seperti menjadi buruh pabrik, buruh bangunan, buruh cuci, buruh pada industri makanan kecil dan kerajinan, serta buruh tambang pasir besi. Total pendapatan mereka dapat lebih tinggi dibandingkan dengan petani yang mengelola lahan sempit.

Penguasaan sektor non pertanian oleh penguasa tanah luas sangat terlihat di beberapa desa di Sulawesi Selatan. Terdapat kecenderungan monopoli oleh penguasa lahan luas di desa Cempaka, Parangputih, dan Walian. Akumulasi modal pada sektor non pertanian padi dilakukan pada perkebunan, peternakan, perdagangan, dan jasa hulu hilir pertanian padi. Pemilik lahan luas di desa-desa Sulawesi Selatan juga merupakan tengkulak, pemilik penggilingan beras, pemilik toko saprodi, pemilik toko sembako, juragan tenun, pemilik traktor tangan, dan pemilik mesin panen *combine harvester*. Mesin panen tersebut disewakan kepada petani lainnya dan berdampak pada pengurangan kesempatan kerja buruh tani pada saat panen.

d. Penguasaan Lahan Kecil dan Buruh Tani Tak Bertanah

Petani sempit (*gurem*) dijumpai dalam jumlah yang besar di banyak desa penelitian. Di Jawa Barat, persentase petani penggarap murni dan buruh tani tak bertanah paling banyak (36 + 40 = 76%) di Cisari (Tabel 4). Hal ini terkait sebagian besar lahan sudah dikuasai oleh *absentee*. Sementara di Sulawesi Selatan, buruh tani tak bertanah sangat sedikit jumlahnya karena hampir semua memiliki kesempatan melakukan usaha tani sendiri.

Jumlah buruh tani di sebagian besar desa penelitian cenderung mengalami peningkatan. Penyebab terbesarnya karena penguasaan tanah luas mulai bergeser kepada beberapa orang saja. Bahkan, peningkatan jumlah ini tidak diimbangi dengan

kesempatan kerja di sektor pertanian. Di Wanakerta, kesempatan kerja buruh tani menjadi berkurang karena pemilik tanah mulai menerapkan cara baru dalam pengelolaan usaha tani mereka. Mereka lebih memilih menggunakan satu atau dua orang kepercayaan untuk mengelola keseluruhan proses produksi, selain panen. Sebaliknya, jumlah buruh tani tak bertanah di Cisari semakin menurun dari tahun ke tahun. Banyak generasi muda berpindah ke sektor non pertanian, sebagai buruh pabrik. Permintaan buruh tani banyak dipenuhi oleh buruh tani dari luar desa.

Pola ini berbeda dengan yang terjadi pada desa-desa di Indramayu karena pertanian masih menjadi sektor ekonomi utama. Sebagian besar anggota rumah tangga buruh tani tak bertanah di Karang dan Wanakerta ada yang bekerja sebagai TKI/TKW di luar negeri. Pendapatan dari TKI/TKW menyumbang akumulasi modal rumah tangga mereka di desa. Bahkan, terdapat rumah tangga buruh tani tak bertanah berhasil menyewa atau membeli tanah pertanian sehingga stratanya menjadi meningkat sebagai petani lahan sempit.

Penguasaan Tanah: Mekanisme, Hubungan Kerja, serta Akses berdasar Gender dan Generasi

a. Mekanisme dan Hubungan Kerja pada Penguasaan Tanah

1. Warisan

Seperti dapat diduga, penguasaan tanah berdasarkan hak waris cukup banyak ditemukan di semua desa penelitian. Biasanya hak waris atas tanah diturunkan kepada anak setelah orang tua meninggal. Pada saat orang tua sebagai pemilik tanah masih hidup, biasanya anak hanya membantu proses produksi.

Anak yang sudah menikah dianggap belum memiliki otoritas penuh terhadap produksi padi. Orang tua khawatir jika tanah yang diberikan akan dijual tanpa izin karena anak dianggap belum sepenuhnya mengerti pengelolaan usaha tani padi. Orang tua akan turut menentukan waktu tanam dan panen pada tanah yang masih menjadi miliknya, termasuk juga jenis komoditas yang akan ditanam. Tanaman non-padi dapat menjadi pilihan komoditas yang dianggap lebih menguntungkan.

2. Membeli

Mekanisme ini biasanya dilakukan oleh petani kaya yang memiliki penghasilan besar baik dari sektor pertanian (padi-nonpadi) maupun non pertanian, seperti PNS, TNI/POLRI, TKI/TKW, perdagangan, dan jasa hulu hilir pertanian padi.

Harga tanah di desa-desa penelitian tergantung pada beberapa kriteria. Kualitas pengairan dan lokasi merupakan aspek yang

mempengaruhi harga tanah. Pada 3-10 tahun terakhir terjadi peningkatan harga tanah yang cukup pesat pada beberapa desa, terutama di Jawa Barat dan Jawa Tengah.

Kenaikan Harga Tanah Pertanian

Kasus I

Seperti yang terjadi di Karang, Indramayu, harga tanah dalam 10 tahun terakhir mengalami peningkatan hingga 10 kali lipat. Pada tahun 2002 harga tanah berkisar antara Rp 5.000 - Rp 10.000/m², sedangkan pada akhir tahun 2013 harga tanah mencapai 100 ribu/m². Perubahan harga ini salah satunya dipengaruhi oleh pembangunan PLTU Pertamina dan pembangunan infrastruktur jalan di sekitar tanah pertanian.

Kasus II

Di Wetanan, Cilacap, peningkatan harga tanah dari tahun 2008-2013 meningkat 2 kali lipat. Tahun 2013 harga tanah berkisar antara 50 ribu hingga 100 ribu/m². Salah satu penyebabnya adalah maraknya pembelian tanah oleh warga dari luar desa.

3. Sewa

Petani yang memiliki modal (kaya) dapat memanfaatkan sistem sewa untuk mengakses tanah. Pemilik tanah mendapatkan uang sewa di awal tanpa menanggung resiko produksi. Jangka waktu sewa tanah yang berlaku pada umumnya 1-2 tahun. Harga sewa tanah yang tinggi mendorong petani pemilik lahan luas memilih menyewakan sebagian tanah dibandingkan harus mengelola seluruhnya. Semua biaya dan resiko produksi dialihkan kepada petani penyewa. Selain itu, uang yang diterima oleh pemilik tanah dapat digunakan sebagai modal usaha, untuk keberangkatan anak mereka menjadi TKI/TKW ke luar negeri, atau untuk mengatasi krisis keuangan rumah tangga. Sementara, petani penggarap dan buruh tani tak bertanah yang tidak memiliki cukup modal tetap tidak memiliki akses tanah melalui sistem sewa.

Di Sidosari, tanah kemakmuran dan *bengkok*¹⁷ desa disewakan kepada petani tak bertanah dan petani lahan sempit yang berasal dari dalam desa. Hal ini sebagai salah satu strategi Pemdes untuk mempertahankan lahan milik desa agar tidak dibeli oleh pemodal-pemodal di luar desa. Selain itu, lelang tanah

dilakukan sebagai upaya distribusi tanah kepada petani lahan sempit dan atau petani tak bertanah.

Strategi Mempertahankan Lahan Milik Desa

Harga sewa tanah kemakmuran dan *bengkok* di Sidosari bervariasi tergantung pada tingkat kesuburan dan lokasi tanah, mulai dari satu juta hingga 15 juta/ha per tahun. Sawah *bengkok* ini dapat dikelola oleh setiap warga (KK) desa dengan cara undian lelang. Warga yang mendapatkan nomor undian kemudian menyelesaikan administrasi dan pembayaran kepada Pemerintah Desa. Pembayaran sewa dapat juga dilakukan berkala selama 3 bulan dari tanggal penetapan undian. Dengan demikian, tanah kemakmuran memiliki fungsi sosial.

4. Gadai

Sistem gadai pada umumnya menggunakan periode tahunan selama 1-3 tahun. Harga gadai sangat bervariasi tergantung kesepakatan antara pemilik tanah dan penggadai. Pemilik tanah tidak memiliki hak atas tanahnya selama masa gadai. Tanah gadai dapat disewakan atau dikelola secara bagi hasil kepada petani lain oleh penggadai selama masa gadai.

Tidak ada bunga dalam pengembalian uang pinjaman. Hasil panen sepenuhnya menjadi hak penggadai dan dianggap sebagai bunga pinjaman bagi penggadai. Namun, di Jawa Tengah sudah mulai menerapkan sistem bunga sebesar 20% dari total pinjaman. Selain itu, sistem gadai tanah ada yang menggunakan perhitungan harga beras.

5. Bagi Hasil

Bagi hasil merupakan sistem penguasaan tanah yang paling banyak terjadi di semua desa penelitian. Hubungan pemilik-penggarap merupakan bentuk hubungan kerja agraris yang dominan setelah hubungan buruh tani dengan petani majikan. Mekanisme peralihan surplus melalui hubungan bagi hasil terjadi di sebagian besar desa penelitian dan jauh lebih penting dibandingkan sewa atau gadai. Dalam sistem ini, penggarap sering menanggung resiko produksi yang lebih besar daripada pemilik tanah.

Terdapat dua sistem bagi hasil yang biasa diterapkan, yaitu bagi dua (*maro*) dan bagi tiga (*mertelu*). *Maro* lebih banyak diterapkan dibandingkan dengan *mertelu*. *Maro* merupakan bagi hasil dimana pemilik tanah mendapatkan separuh dari hasil panen yang sudah dikurangi dengan biaya produksi dan upah bawon. Pemilik tanah akan menanggung separuh total biaya pupuk dan pestisida.

¹⁷ Bengkok merupakan istilah yang digunakan untuk menyebut tanah kas milik desa.

Pada sistem *mertelu* hampir semua biaya produksi menjadi ditanggung penggarap. Penggarap menanggung biaya pengolahan lahan, tenaga kerja, pupuk, dan pestisida. Pemilik tanah hanya menanggung biaya benih dan biaya herbisida. Jika terjadi gagal panen, penggarap harus menanggung semua resiko produksi.

Seperti dilihat pada Tabel 4 di atas, di setiap desa penelitian terdapat proporsi signifikan petani penggarap yang tidak memiliki sendiri lahan mereka. Proporsi petani pemilik-penggarap juga menunjukkan jumlah yang besar. Di Walian, jumlah petani bukan pemilik melebihi jumlah petani pemilik dan juga melebihi jumlah buruh tani. Ini berarti pola hubungan pemilik-*peparo* mulai menunjukkan hubungan yang dominan dalam struktur agraris desa, dengan berbagai implikasi negatif untuk *social efficiency*. Pemilikan tanah luas pada gilirannya menimbulkan perluasan sistem pertanian skala kecil atas dasar *share-cropping*.

b. Akses Tanah Berdasarkan Generasi dan Gender

Salah satu akses tanah oleh generasi muda adalah dengan cara warisan. Orangtua akan membagi waris tanah sesuai dengan jumlah anak dalam rumah tangga. Namun, warisan di beberapa desa di Jawa Tengah mempunyai cara bagi waris yang berbeda.¹⁸ Anak laki-laki akan mendapatkan warisan tanah yang lebih luas. Salah satu anak perempuan akan mendapatkan warisan berupa rumah. Sementara, anak perempuan lainnya mendapatkan warisan tanah yang lebih sempit.

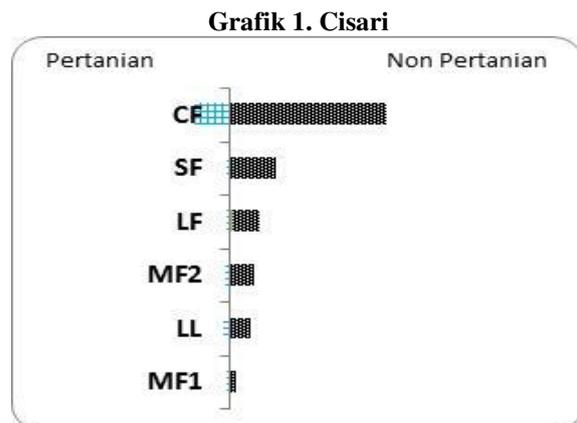
Keterbatasan akses tanah oleh generasi muda pada rumah tangga Petani Sempit menyebabkan mereka beralih ke sektor non pertanian baik di dalam maupun di luar desa. Akan tetapi, keputusan generasi muda untuk bertani atau tidak, bermigrasi atau tidak, dsb bukan selalu sebagai keputusan mereka seumur hidup. Banyak pemuda perempuan maupun laki-laki melakukan migrasi dan tidak jarang memiliki cita-cita menabung hingga mampu membeli tanah pertanian dan kembali ke desa.¹⁹

Hubungan Timbal-Balik antara Ketimpangan di Sektor Pertanian dan Non Pertanian

Hubungan antara luas tanah dengan akumulasi pendapatan pada RTP sudah mulai mengalami perubahan jika dibandingkan dengan 'pola klasik'. Dalam pola klasik seperti pada penelitian Wiradi dan White (1989) sebelumnya, pendapatan non pertanian cenderung berbanding lurus dengan penguasaan tanah. Saat ini total pendapatan RTP tidak selalu ditentukan oleh luas penguasaan tanah. Berdasarkan perincian total pendapatan RTP antara sektor pertanian dan non pertanian, dapat dilihat pola struktur agraris.

Berikut adalah grafik total pendapatan pertanian dan non pertanian berdasarkan strata penguasaan tanah pada masing-masing desa. Desa Cisari (Grafik 1. dibawah) memiliki pola struktur agraris (pertanian dan non pertanian) yang berbeda dengan desa lainnya. Pada saat penelitian berlangsung, pendapatan sektor pertanian pada semua strata RTP di Cisari sangat rendah karena serangan hama penggerek batang yang tidak bisa dihindari selama 2 tahun terakhir.

Grafik Total Pendapatan Rumah Tangga Petani Cisari, menurut strata penguasaan lahan.²⁰



Sumber: Olahan data survey rumah tangga petani, 2013

Keterangan:
 Petani Modal Kuat (CF),
 Petani Luas (LF),
 Petani Menengah I (MF1),
 Petani Menengah II (MF2),
 Petani Sempit (SF), dan
 Buruh Tani tak Bertanah (LL).²¹

¹⁸ Pembagian warisan disesuaikan dengan 'hukum Islam' dimana laki-laki mendapatkan bagian yang lebih besar.

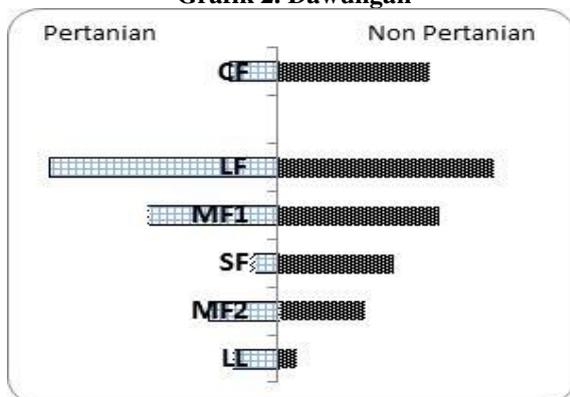
¹⁹ Analisis dan pembahasan lebih rinci tentang generasi muda perdesaan, akses tanah mereka serta preferensi kerja, dapat dibaca dalam artikel "Menguak Realitas Generasi Muda Sektor Pertanian di Perdesaan" dalam edisi JAS ini (Herawati dan Nugraha, 2015).

²⁰ Grafik menunjukkan total pendapatan dalam kondisi gagal panen. Urutan total pendapatan berdasarkan strata pada kondisi normal (tanpa serangan hama) adalah CF, LF, SF, MF2, LL, dan MF1.

Buruh tani tak bertanah di Cisari mempunyai total pendapatan yang lebih tinggi dibandingkan dengan Petani Menengah I. Mereka memiliki lebih banyak waktu untuk melakukan pekerjaan lain di luar pertanian. Pekerjaan di sektor non pertanian yang paling dominan di desa ini adalah buruh pabrik. Hampir semua warga desa (termasuk generasi muda) bekerja sebagai buruh pabrik. Upah sebagai buruh pabrik berkisar antara 2 juta hingga 4 juta rupiah sebulan. Ada juga yang bekerja sebagai buruh bangunan dengan upah yang lebih tinggi dari buruh tani, yaitu 90 ribu hingga 100 ribu rupiah per hari. Upah buruh tani di Cisari berkisar 30 ribu hingga 60 ribu rupiah per hari.

Petani Sempit di Cisari juga memiliki keberagaman sumber pendapatan non pertanian. Mereka bekerja sebagai buruh pabrik, pedagang, dan pekerjaan serabutan. Pendapatan mereka lebih tinggi dibandingkan Petani Luas, dikarenakan mereka tidak memiliki keberagaman sumber pendapatan. Mereka lebih banyak mengandalkan pada usaha tani luas atau sebagai PNS. Sementara Petani Modal Kuat di Cisari memiliki pendapatan yang paling besar dibandingkan strata lain. Petani Pemilik Modal di desa ini mengelola usaha tani yang luas, tengkulak gabah, dan pemilik pabrik batu bata dengan 10 orang tenaga kerja.

Grafik 2. Dawungan

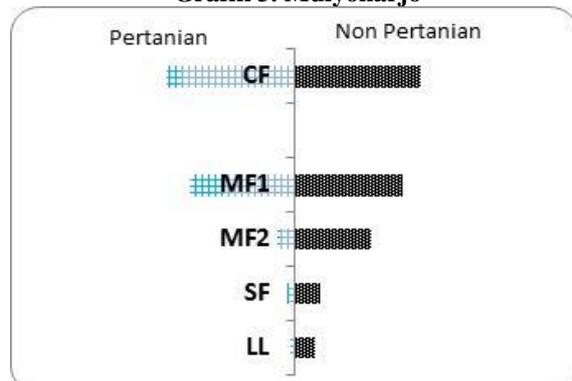


Sumber: Olahan data survey rumah tangga petani, 2013

Pola struktur agraris di Dawungan dan Mulyoharjo mendekati pola struktur agraris 'klasik'. Sektor pertanian masih menjadi sumber pendapatan yang utama bagi warga desa di Dawungan. Buruh tani tak bertanah (LL) sangat bergantung pada sektor pertanian karena keterbatasan modal yang mereka miliki. Banyak generasi muda laki-laki dan perempuan dari strata Petani Sempit (SF) di

Dawungan yang bekerja sebagai TKI/TKW sehingga pendapatan mempengaruhi total pendapatan rumah tangga. Kiriman dari para TKI/TKW membuat total pendapatan mereka lebih tinggi dibandingkan dengan MF2. Petani Modal Kuat di Dawungan memiliki total pendapatan yang lebih rendah dibandingkan dengan Petani Luas dan Petani Menengah. CF di Dawungan adalah seorang tengkulak yang membeli gabah dari petani-petani di desa. Pendapatannya menurun karena dalam satu tahun terakhir terjadi gagal panen di desa sehingga mempengaruhi total pendapatan sektor pertaniannya.

Grafik 3. Mulyoharjo

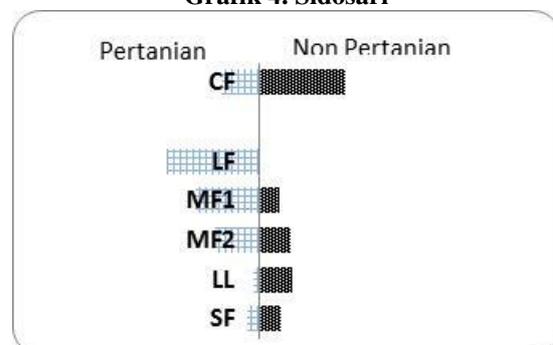


Sumber: Olahan data survey rumah tangga petani, 2013

Sementara di Mulyoharjo, CF merupakan ketua Poktan yang menguasai usaha tani luas tidak melakukan akumulasi pada sektor non pertanian karena usianya sudah tua. Buruh tani tak bertanah di desa ini pada umumnya juga bekerja sebagai buruh serabutan. Di sektor pertanian, mereka sangat tergantung dari banyaknya permintaan kerja para pengelola usaha tani.

Struktur agraris di Sidosari menunjukkan pola yang lebih mirip dengan pola struktur agraris di Taiwan, seperti terlihat pada grafik di bawah.

Grafik 4. Sidosari

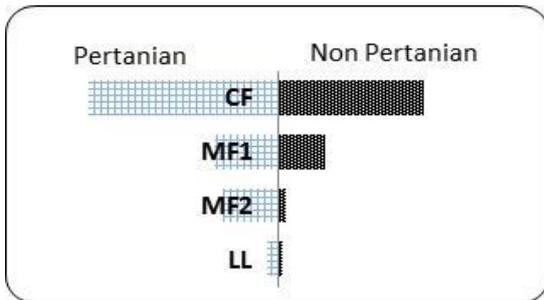


Sumber: Olahan data survey rumah tangga petani, 20

Struktur penguasaan lahan di Sidosari, Kebumen memiliki sifat yang berbeda dengan desa-desa penelitian lainnya. Pendapatan Petani Modal Kuat di sektor non pertanian lebih besar

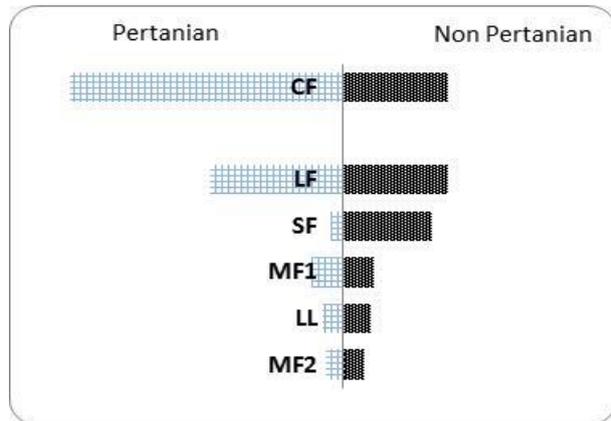
²¹ Keterangan ini berlaku untuk semua grafik total pendapatan rumah tangga petani dalam paper ini.

Grafik 5. Cempaka



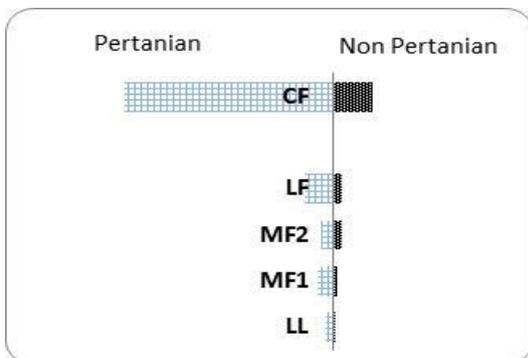
Sumber: Olahan data survey rumah tangga petani, 2013

Grafik 7. Parangputih



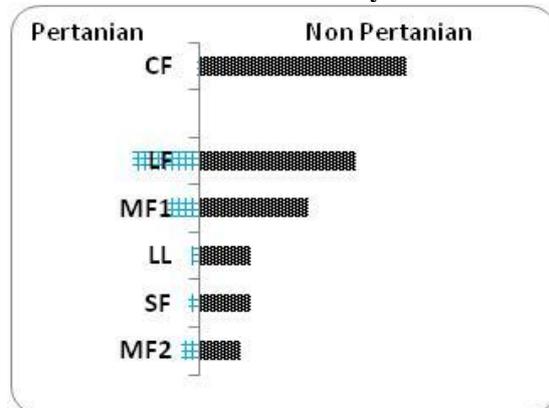
Sumber: Olahan data survey rumah tangga petani, 2013

Grafik 6. Walian



Sumber: Olahan data survey rumah tangga petani, 2013

Grafik 8. Sarimulyo



Sumber: Olahan data survey rumah tangga petani, 2013

dibandingkan dengan sektor pertanian. Petani Sedang I dan II mempunyai berbagai sumber pendapatan di sektor non pertanian. Akumulasi modal dari sektor non pertanian digunakan untuk menyewa dan membeli tanah. Kebanyakan dari mereka lebih fokus mengerjakan kegiatan di sektor non pertanian sebagai PNS, buruh bangunan, dan pengrajin caping sehingga lebih memilih menggunakan buruh tani harian untuk mengerjakan tahapan proses produksi.

Total pendapatan buruh tani tak bertanah di Sidosari justru lebih besar dibandingkan dengan petani pemilik lahan kecil. Mereka mengerjakan lebih banyak pekerjaan serabutan di sektor non pertanian. Pendapatan di sektor pertanian sangat rendah dibandingkan strata yang lain karena mereka hanya mengerjakan beberapa tahapan kerja sesuai permintaan. Sedangkan Petani Sempit banyak yang mengelola usaha tani dengan menyewa tanah. Mereka memanfaatkan tanah sewa untuk ditanami kacang hijau. Mereka juga bekerja sebagai buruh tani pada saat musim tanam dan panen.

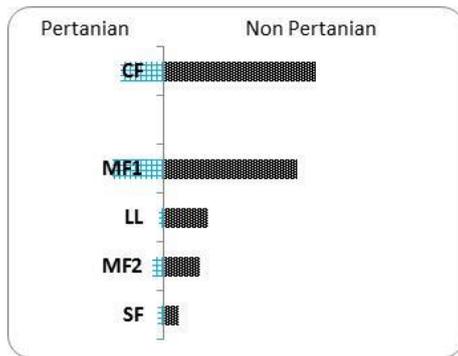
Selain pola-pola struktur agraris di atas, terdapat tiga desa di Sulawesi Selatan yaitu Cempaka, Walian, dan Parangputih yang

menunjukkan monopoli pendapatan oleh Petani Pemilik Modal (lihat Grafik 5 s/d 7). Pola relasi total pendapatan sektor pertanian dan non pertanian pada sebagian besar desa di Sulawesi Selatan yaitu Cempaka, Parangputih, dan Walian menunjukkan monopoli oleh petani modal kuat di desa. Mereka berasal dari keluarga petani kaya pemilik tanah luas, para datuk keturunan bangsawan, para PNS, dan pemilik combine harvester. Petani sempit dan buruh tani tak bertanah banyak yang bekerja menjadi buruh tani dan karyawan *combine harvester* pada Petani Modal Kuat.

Desa-desanya lain dalam penelitian ini memiliki pola grafik total pendapatan RTP yang beragam. Desa tersebut adalah Sarimulyo dan Wetanan di Jawa Tengah, Wanakarta dan Karang di Jawa Tengah, dan Gadingan di Sulawesi Selatan. Grafik di bawah menunjukkan masing-masing pola yang terjadi pada kelima desa tersebut.

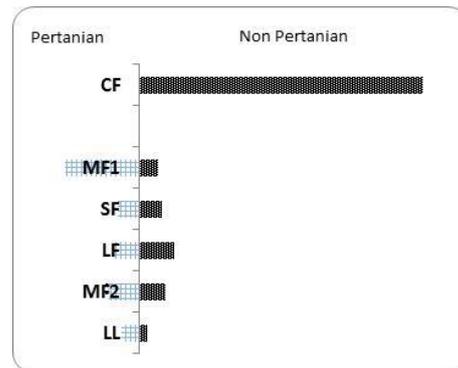
Pendapatan sektor pertanian pada strata Petani Modal Kuat di Sarimulyo sangat kecil karena dikelola di atas tanah sempit dan hanya bertujuan untuk mencukupi kebutuhan pangan rumah tangga. Petani Modal Kuat ini lebih mengutamakan sumber penghasilan dari sektor jasa pertanian padi, sebagai

Grafik 9. Wetanan



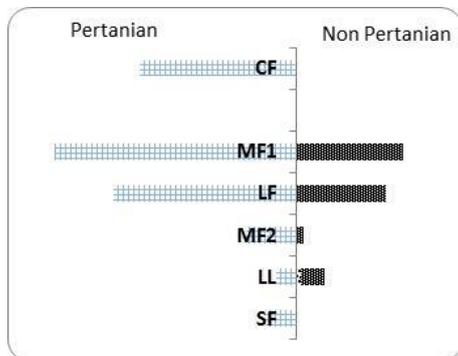
Sumber: Olahan data survey rumah tangga petani, 2013

Grafik 11. Karang



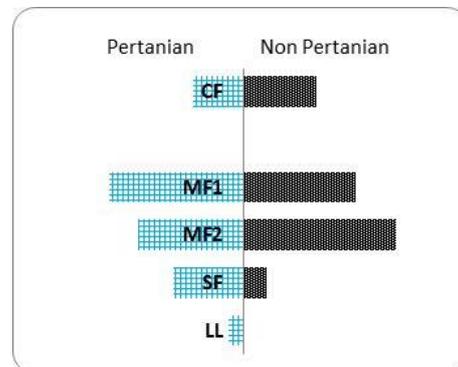
Sumber: Olahan data survey rumah tangga petani, 2013

Grafik 10. Wanakerta



Sumber: Olahan data survey rumah tangga petani, 2013.

Grafik 12. Gadingan



Sumber: olahan data survey rumah tangga petani, 2013.

tengkulak. Pada strata Petani Luas masih banyak yang mengandalkan penghasilan pada sektor pertanian padi. Pendapatan yang diperoleh dari sektor pertanian padi sebagian digunakan untuk membiayai anak mereka berangkat menjadi TKI/TKW ke luar negeri.

Anggota RTP buruh tani tak bertanah di Sarimulyo banyak juga yang menjadi TKI/TKW. Buruh tani tak bertanah ini memiliki beragam pekerjaan di sektor non pertanian yang dapat dilakukan di luar musim sibuk pertanian padi. Mereka menjadi penyadap nira kelapa, buruh bangunan, dan pemulung. Total pendapatan mereka lebih tinggi dibandingkan strata Petani Sempit dan Petani Menengah 2 yang rata-rata usia mereka sudah tua sehingga sudah tidak produktif. Pola relasi pendapatan pertanian dan non pertanian di Wetanan terlihat seperti Grafik 9.

Petani Pemilik Modal Kuat di Wetanan mempunyai pendapatan dari sektor pertanian dan non pertanian yang tinggi. Pada sektor non pertanian, petani strata ini menguasai penggilingan padi di desa. Buruh tani tak bertanah di desa ini memiliki total pendapatan yang lebih tinggi dibandingkan Petani Sempit dan Petani Menengah. Hal ini dikarenakan banyak anggota RTP buruh tani yang

bekerja sebagai TKI/TKW di Korea. Buruh tani ini lebih banyak memiliki waktu luang untuk bekerja di sektor non pertanian karena tidak mengelola usaha tani sendiri. Pekerjaan mereka antara lain menjadi penambang pasir besi dengan pendapatan mencapai Rp 100 ribu dalam satu hari bekerja.

Di Desa Wanakerta, pola relasi pendapatan dalam masing-masing RTP digambarkan dalam Grafik 10.²² Total pendapatan RTP di Wanakerta yang paling tinggi adalah pada strata Petani Menengah I. Pendapatan Petani Menengah I pada sektor pertanian padi cukup tinggi karena produktivitas tanah yang baik. Petani pada strata ini memiliki perhatian yang baik terhadap usaha tani mereka karena kebanyakan mereka mengelola usaha tani di atas tanah sewaan. Harga sewa tanah yang

²² Total pendapatan pada strata petani CF tidak menunjukkan total pendapatan sebenarnya. Terdapat sumber pendapatan di sektor nonpertanian yang tidak sempat ter gali oleh peneliti.

tinggi memaksa mereka melakukan berbagai cara untuk memaksimalkan produktivitas tanahnya. Pekerjaan di sektor non pertanian dalam strata ini antara lain memiliki usaha produksi batu bata. Skala produksi batu bata yang dikelola tidak besar namun menjadi sumber pendapatan yang stabil bagi RTP pada strata ini.

Pemilik Modal di Karang tidak mengelola usaha tani padi maupun non padi. Total pendapatannya yang besar seluruhnya berasal dari usaha penggilingan padi dan menjadi tengkulak. Hampir semua petani di desa ini menjual dan menggiling padi kepadanya. Total pendapatan Pemilik Modal sangat jauh berbeda dengan buruh tani tak bertanah di Karang. Pendapatan buruh tani tak bertanah baik dari sektor pertanian dan sektor non pertanian sama rendahnya. Pekerjaan di sektor non pertanian di desa ini sangat terbatas. Buruh tani hanya bekerja sesuai permintaan Petani Luas atau Menengah di desa dan jumlahnya tidak menentu..

Pada strata Petani Sempit banyak memiliki anak baik laki-laki maupun perempuan yang bekerja sebagai TKI/TKW di luar negeri. Mereka yang bekerja menjadi TKI/TKW mengirimkan uang kepada keluarga di desa sehingga mempengaruhi total pendapatan rumah tangga Petani Sempit. Uang yang dikirimkan kepada keluarga di desa jumlahnya cukup banyak, yaitu sekitar 1 juta hingga 2 juta per bulan. Total pendapatan rumah tangga Petani Sempit yang menerima kiriman dapat lebih tinggi daripada Petani Sedang. Grafik 12 menunjukkan pola relasi pendapatan RTP di Desa Gadingan:

Pola relasi pendapatan dari sektor pertanian padi dan non pertanian padi di Gadingan memiliki sedikit kemiripan dengan 'pola klasik' hanya saja penguasaan tanah di desa ini relatif merata. Buruh tani tak bertanah sangat jarang ditemukan dan mengelola usaha tani pada tanah yang sempit. Buruh tani akan banyak terlibat pada saat panen tiba. Upah sebagai buruh panen hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan pokok rumah tangga.

KESIMPULAN

Secara umum, temuan lapangan pada penelitian ini sesuai dengan data BPS tahun 1983-2003 yang menunjukkan penurunan jumlah petani penggarap murni dan meningkatnya jumlah buruh tani tak bertanah. Rata-rata penguasaan tanah di seluruh desa berada pada sebagian kecil petani saja. Distribusi tanah yang tidak merata di beberapa desa sudah mengkhawatirkan dari segi efisiensi sosial. Investasi akumulasi tanah mengarah kepada akumulasi modal bagi pemilik tanah luas yang 'hanya duduk manis' tidak melakukan proses produksi. Terjadi peralihan hasil dari petani penggarap yang melakukan proses produksi kepada pemilik tanah luas.

Gejala pemilikan dan penguasaan tanah oleh *absentee* mulai signifikan dan mengarah kepada

polarisasi sehingga mengakibatkan pola usaha tani skala kecil merata namun ketimpangan distribusi masih tetap ada. Sementara penguasaan tanah di hampir semua desa berada pada petani yang berasal dari keturunan petani pemilik tanah luas (tuan tanah). Namun, keadaan ini mulai bergeser karena orang kaya baru di desa telah berhasil menguasai tanah melalui akumulasi modal non pertanian.

Sistem bagi hasil merupakan sistem penguasaan tanah yang paling banyak ditemukan pada desa-desa penelitian. Hubungan kerja antara pemilik tanah dengan penggarap merupakan hubungan kerja agraris yang dominan disamping hubungan kerja buruh tani dengan petani majikan. Di kebanyakan desa penelitian, hubungan bagi hasil merupakan hubungan agraris dan mekanisme peralihan surplus yang lebih penting dibandingkan sewa atau gadai.

Akses tanah oleh perempuan di desa masih sangat terbatas. Bagi waris berupa tanah lebih banyak diberikan kepada laki-laki. Mayoritas akses tanah oleh generasi muda laki-laki akan diperoleh pada saat orang tua mereka telah meninggal (warisan). Selama menunggu warisan tanah, generasi muda akan memilih pekerjaan pada sektor non pertanian baik di dalam maupun luar desa.

Akumulasi modal RTP tidak selalu ditentukan oleh luas penguasaan tanah. Pilihan pekerjaan di sektor non pertanian turut menentukan total pendapatan rumah tangga. Terdapat kecenderungan monopoli pendapatan pada desa yang terjadi ketimpangan distribusi tanah yang tajam.

DAFTAR PUSTAKA

- Adinugraha, Yogaprasta dan Rina Herawati. 2015. Menguak Realitas Orang Muda di Sektor Pertanian Perdesaan. *Jurnal Analisis Sosial* Volume 19 Nomor 1 Edisi Agustus 2015. Bandung: AKATIGA.
- Bachriadi, Dianto dan Gunawan Wiradi. 2011. *Enam Dekade Ketimpangan: Masalah Penguasaan Tanah di Indonesia*. Bandung: ARC. Bina Desa dan KPA.
- Bernstein. H. 2010. *Class Dynamics of Agrarian Change*. Halifax: Fernwood Publishing; VA: Kumarian Press.
- BPS. 2003. *Sensus Pertanian 2003: Angka Propinsi Hasil Pendaftaran Rumah Tangga (Angka Sementara)*. Jakarta: BPS.
- BPS. 2013. *Sensus Pertanian 2003: Angka Propinsi Hasil Pendaftaran Rumah Tangga (Angka Sementara)*. Jakarta: BPS.
- de Koninck, R.J. Rigg & P. Vandergeest. 2012. 'A half century of agrarian transformations in Southeast Asia, 1960-2010'. in J. Rigg & P. Vandergeest eds. *Revisiting Rural Places: Pathways to Poverty and Prosperity in Southeast Asia*. Singapore: NUS Press. pp. 25-37.
- Herlinawati, dan Charina Chazali. 2015. Sistem Pertanian Padi Skala Kecil Indonesia dalam Perspektif Efisiensi Sosial. *Jurnal Analisis Sosial* Volume 19 Nomor 1 Edisi Agustus 2015. Bandung: AKATIGA.
- Lipton, M. 2009. *Land Reform in Developing Countries: Property Rights and Property Wrongs*. New York: Routledge.
- Peluso, N.L. dan J.C. Ribot (2003) 'A theory of access'. *Rural Sociology* 68 (2): 153-181.
- Rigg, J. And P. Vandergeest (eds.). 2012. *Revisiting Rural Places. Pathways to Poverty and Prosperity in Southeast Asia*. Singapore: NUS Press.
- van der Ploeg, J.D. 2013. *The Art of Peasant Farming: a Chayanovian Manifesto*. Halifax: Fernwood Press.
- White, B. 1989. 'Problems in the empirical analysis of agrarian differentiation'. in G. Hart, A. Turton and B. White (eds). *Agrarian Transformations: Lokal Processes and the State in Southeast Asia*. Berkeley: University of California Press. pp. 15-30.
- White, B. dan Gunawan Wiradi. 1989. 'Agrarian and non-agrarian bases of inequality in nine Javanese villages' G. Hart, A. Turton and B. White (eds) *Agrarian Transformations: Lokal Processes and the State in Southeast Asia*. Berkeley: University of California Press. pp. 266-302. Diterbitkan kembali dalam Gunawan Wiradi et al. (2009) *Ranah Studi Agraria: Penguasaan Tanah dan Hubungan Agraris*. Yogyakarta: STPN. pp. 296-344.

MENGUAK REALITAS ORANG MUDA DI SEKTOR PERTANIAN PERDESAAN

UNMASKING THE REALITY OF YOUTH IN AGRICULTURE

Yogaprasta A. Nugraha¹
Rina Herawati²

Yayasan AKATIGA
Jalan Tubagus Ismail II No. 2, Bandung 40134
E-mail: yogaprasta_adinugraha@yahoo.com & rina_bip97@yahoo.com

Abstrak

Penelitian ini dilakukan untuk mengidentifikasi dan menganalisis keterlibatan orang muda di sektor pertanian di 12 desa penelitian, serta faktor – faktor yang mendorong atau menarik orang muda untuk tetap bertahan di sektor pertanian (pangan), meninggalkan sektor pertanian, atau meninggalkan sementara sektor pertanian untuk kemudian kembali lagi. Penelitian yang dilakukan dengan metode deskriptif mengkombinasikan inti pemikiran dari kajian agraria dan kajian tentang orang muda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa orang muda di desa penelitian cenderung tidak tertarik menjadikan pertanian sebagai pekerjaan utama di masa yang akan datang. Jika pun orang muda tertarik untuk bekerja di bidang pertanian, mereka hanya menjadikan pertanian sebagai pekerjaan sampingan bukan sebagai pekerjaan utama. Walaupun minat orang muda di sektor pertanian relatif menurun, jumlah petani kecil dan buruh tani kemungkinan besar masih stabil ke depan. Terdapat berbagai faktor yang mempengaruhi keterlibatan orang muda dalam bidang pertanian. Melihat struktur agraris di desa-desa penelitian, kebanyakan orang muda di desa tidak punya prospek yang realistis untuk “bertani”.

Kata Kunci: Pertanian kecil skala, Orang muda desa, Reproduksi sosial, Ketenagakerjaan, Indonesia.

Abstract

It is widely assumed that young people in rural areas are no longer attracted to work in the agricultural sector, especially small scale agriculture. On the other hand, small scale agriculture in Indonesia is still the nation's biggest absorber of labour. In the future, young people's abandonment of agriculture could be a serious threat for social reproduction in the agricultural sector and rural society. Based on that concern, this study analyses young men and women's preference and involvement in farming, and factors that influence it. The research was carried out in 12 villages in 3 provinces with high rice production (West Java, Central Java, and South Sulawesi). This research found that on the one hand, rural youth are not attracted to work in agriculture, but in fact many are still involved in agriculture. Their involvement in farming, generally, is only as family labour and wage worker. For young people who are interested to become farmers, it is almost impossible to get access to farm land while still young. This is one reason why young people decide to migrate. But the decision 'to farm or not to farm' is not necessarily a decision for life; many of today's farmers have a history of migration, and returned when they had accumulated savings and/or when land became available. For these reasons, the authors do not feel that there will be any serious problem of regeneration of the small-farm sector in the future. One kind of farm work that is attractive for young men and women is rice harvesting. But now rice harvesting is threatened by the introduction of combine harvester technology. This technology can be operated only by 6-7 persons, while manual rice harvesting needs about 30 labourers per hectare. There are many factors that influence young people's preference and involvement in agriculture, namely: access to land, the presence and quality of bukan-pertanian occupation, young people's image of agriculture and rural life, and educational level.

Key Words: Small scale agriculture, Rural youth, Social reproduction, Employment, Indonesia

¹ Peneliti Lepas Pusat Analisis Sosial AKATIGA

² Peneliti Lepas Pusat Analisis Sosial AKATIGA

PENDAHULUAN

Sektor pertanian masih merupakan penyerap utama tenaga kerja muda di Indonesia (32% dari seluruh angkatan kerja muda yang bekerja, 53% dari seluruh angkatan kerja muda perdesaan yang bekerja).³ Meskipun sektor pertanian merupakan sektor yang menyerap tenaga kerja paling tinggi terdapat anggapan bahwa "orang muda perdesaan tidak mau bertani". Masalah berkurangnya partisipasi orang muda perdesaan di sektor pertanian sudah cukup lama menjadi perhatian peneliti dan para pengambil kebijakan. Penelitian-penelitian mengenai partisipasi orang muda perdesaan di sektor pertanian sudah dilakukan setidaknya selama tiga dekade terakhir. Alasan orang muda tidak lagi tertarik/memilih kerja sektor pertanian, menurut White (2012) bisa terjadi karena banyak faktor, diantaranya (1) sistem pendidikan yang menanamkan ide bahwa bertani itu bukan profesi yang menarik, (2) pengabaian kronis dari pemerintah terhadap pertanian skala kecil dan infrastruktur perdesaan di banyak wilayah dan (3) terbatasnya akses orang muda terhadap lahan yang disebabkan oleh pencaplokan lahan pertanian oleh korporasi, konsentrasi kepemilikan tanah melalui proses diferensiasi, dan/atau orang petani tua yang belum mau mengalokasikan tanah untuk dikelola oleh orang muda.⁴

Melihat bahwa pengetahuan dan pengertian mengenai masalah orang muda di sektor pertanian tersebut masih sangat terbatas, maka penelitian AKATIGA di 12 desa penghasil padi terpilih (di Provinsi Jawa Tengah, Provinsi Jawa Barat dan Provinsi Sulawesi Selatan) hendak menjawab pertanyaan-pertanyaan penelitian berikut:

1. Bagaimana keterlibatan dan preferensi orang muda di 12 desa penelitian ini di sektor pertanian pangan?
2. Apa saja faktor-faktor yang mendorong atau menahan orang muda untuk tetap bertahan di sektor pertanian, meninggalkan sektor pertanian, atau meninggalkan sementara sektor pertanian untuk kemudian kembali lagi?

Hingga saat ini, sektor pertanian Indonesia masih merupakan sektor penyedia lapangan kerja yang paling besar dan komoditas padi masih merupakan komoditas yang strategis. Di sisi lain, sebagaimana telah diuraikan di atas, ada kekhawatiran mengenai orang muda yang tidak tertarik lagi untuk bekerja di sektor pertanian sehingga kedepannya ditakutkan dapat menjadi hambatan untuk reproduksi sosial sektor pertanian berdasarkan usaha tani skala kecil.

Memikirkan keinginan/keengganan orang muda perdesaan untuk 'bertani' dalam masyarakat desa yang sifatnya berdiferensiasi, maka kita perlu

membedakan konsep bertani itu sendiri, yaitu: (a) bertani sebagai petani pemilik, (b) bertani sebagai petani bukan-pemilik (mis. petani pamaro), dan (c) 'bertani' sebagai buruh tani tak bertanah (yang sebenarnya bukan 'bertani').

Berdasarkan permasalahan yang telah dijelaskan pada bagian sebelumnya, maka penelitian ini bertujuan untuk:

1. Mengidentifikasi dan menganalisis keterlibatan orang muda di sektor pertanian di 12 desa penelitian.
2. Mengidentifikasi dan menganalisis faktor – faktor yang mendorong atau menarik orang muda untuk tetap bertahan di sektor pertanian (pangan), meninggalkan sektor pertanian, atau meninggalkan sementara sektor pertanian untuk kemudian kembali lagi.

Penelitian ini berusaha untuk mengkombinasikan inti pemikiran dari kajian agraria dan kajian tentang orang muda. Kajian agraria membantu penelitian ini untuk melihat hambatan – hambatan struktural yang dihadapi oleh orang muda dan posisi sub-ordinat orang muda dalam mengakses sumber daya tanah dan kesempatan kerja. Latar belakang penguasaan lahan orang tua (struktur agraria) dianggap dapat menjelaskan pola keterlibatan orang muda di sektor pertanian. Sementara itu kajian orang muda digunakan untuk memahami dinamika hubungan dan peralihan sumber daya antar generasi, pola perilaku generasi muda, budaya generasi muda dan preferensi generasi muda.

METODE PENELITIAN

Lokasi dan waktu penelitian

Studi ini merupakan bagian dari penelitian AKATIGA dengan tema utama Studi Kemandirian Pangan. Penelitian ini dilakukan di tiga provinsi yaitu Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Sulawesi Selatan. Penelitian ini memilih ketiga provinsi tersebut dengan pertimbangan bahwa ketiga provinsi itu merupakan provinsi penghasil beras yang besar di Indonesia.

Teknik pengumpulan data

Teknik pengumpulan data yang digunakan pada penelitian ini adalah wawancara mendalam kepada orang muda yang berasal dari rumah tangga petani dengan strata *Capital Farm*, *Large Farm*, *Middle Farm 1*, *Middle Farm 2*, *Small Farm*, dan *Landless*⁵, diskusi kelompok terfokus (*Focus Group Discussion*). Berbagai teknik pengumpulan data digunakan untuk saling melengkapi informasi, melakukan konfirmasi (verifikasi data) dan triangulasi. Terdapat beberapa tantangan yang

³ BPS (2013, Hal. 41)

⁴ White (2012).

⁵ Keterangan mengenai luasan lahan masing – masing strata penguasaan tanah dapat dilihat pada bagian pendahuluan Jurnal Analisis Sosial

ditemui ketika penggalian data lapangan. Salah satu kendala yang dihadapi adalah sulitnya menemukan pemuda (perempuan) yang mudah untuk diajak berbicara karena kebanyakan pemuda agak tertutup ketika diwawancara, terutama jika diwawancara oleh laki – laki. Kendala lain yang dihadapi adalah terdapatnya pihak lain (pemandu) yang sering ikut wawancara bahkan dibeberepa pengalaman kepala dusun mengintervensi wawancara, sehingga proses wawancara menjadi tidak optimal dan responden muda enggan mengungkapkan persepsi dan pendapatnya. Untuk mengatasi masalah ini, peneliti membuat janji bertemu responden kembali untuk melaksanakan wawancara.

HASIL PENELITIAN

Karakteristik Desa Penelitian

1. Ketersediaan lapangan kerja bukan-pertanian

Terkait ketersediaan lapangan kerja lain selain pertanian padi yang menjadi sumber pendapatan rumah tani, gambaran 12 desa penelitian ini dapat dilihat pada Lampiran Tabel 1.

Lapangan kerja bukan-pertanian padi ada yang bersifat permanen tetapi ada juga yang bersifat musiman. Selain itu, terdapat pekerjaan yang sebenarnya bersifat permanen, namun hubungan kerja antara buruh dengan pengusahanya bersifat kontrak dalam jangka waktu tertentu seperti buruh industri menengah besar yang ada di Desa Cisari atau buruh sawit di Malaysia. Tabel 2 di bawah ini memberikan gambaran mengenai jenis-jenis pekerjaan bukan-pertanian padi dan penghasilan yang dihasilkan.

Tabel 2. Berbagai Jenis Pekerjaan Bukan-Pertanian Padi dan Pendapatan yang Dihasilkan

Pekerjaan	Pendapatan	Lokasi*
Buruh Pabrik	1.6 juta – 4 Juta /Bulan	D+L
Buruh Sawit di Malaysia	2 Juta – 3 Juta /Bulan	L
Buruh Bangunan	Tidak tentu, perhari 50 ribu – 100 ribu	D+L
Pegawai Fotokopi	300 ribu/Bulan	L
Penjual Baju/Sarung	1.5 – 2 Juta/Bulan	D+L
Buruh Migran ke Korea	10 Juta – 20 Juta/Bulan	L
Buruh Penjemur Gabah di Penggilingan	4 Juta/2 Bulan	D
Buruh Penggilingan	3 Juta /5 Bulan	D
Buruh tenun	(max.) 240 ribu/bulan	D

Keterangan: * D = Dalam Desa; L=Luar Desa
Sumber: Data Primer

2. Keterlibatan dan Preferensi Generasi Muda di Sektor Pertanian (Padi)

a. Keterlibatan orang muda di sektor pertanian

Secara umum studi ini menemukan orang muda memang cenderung tidak tertarik untuk bekerja di bidang pertanian. Namun hal ini bukan berarti orang muda sepenuhnya meninggalkan pekerjaan di bidang pertanian. Pada studi ini masih ditemukan tiga bentuk keterlibatan orang muda di sawah yaitu: (1) sebatas membantu orang tua mereka di sawah; (2) secara mandiri mengelola sawah sebagai petani pemilik; dan (3) bekerja sebagai buruh tani.

b. Orang muda membantu orang tua di sawah

Orang muda membantu orang tua sebagai pekerja keluarga (family labour)

Bentuk keterlibatan orang muda yang pertama adalah membantu orang tua dalam mengelola sawah. Sebagian besar orang muda ini dapat dikategorikan sebagai pekerja keluarga yang tidak mendapatkan upah (*family labour*). Dalam kegiatan usaha tani skala kecil, sebagian tenaga kerja pertanian berasal dari keluarga yang umumnya tidak dinilai dengan uang. Orang muda menganggap keterlibatan dalam membantu orang tua sudah merupakan tanggung jawab seorang anak dalam keluarga.

Di Sulawesi Selatan dijumpai orang muda yang berasal dari rumah tangga petani pemilik dan penggarap (3 ha) dan masih sering terlibat membantu ayahnya di sawah tanpa mendapatkan upah. Orang muda tersebut bersedia membantu ayahnya di sawah karena sudah tanggung jawab anak dalam keluarga. Selain itu, orang muda tersebut tidak merasa keberatan tidak dibayar karena mengakui bahwa selama ini yang membiayai biaya sekolahnya adalah orang tuanya.

Orang muda yang membantu orang tua di sawah pada umumnya belum memiliki kesempatan untuk mengambil keputusan yang berkaitan dengan tahapan produksi pertanian. Orang tua merupakan tokoh utama yang berperan sebagai pemegang keputusan produksi seperti penentuan masa tanam, penentuan bibit/benih yang akan ditanam, pembelian pupuk, penggunaan pestisida dan penentuan masa panen. Orang tua belum percaya untuk memberikan orang muda kebebasan untuk mengambil keputusan pada tahapan produksi. Orang tua berpendapat bahwa orang muda (kebanyakan laki-laki) akan mulai diperbolehkan untuk mengambil keputusan secara mandiri setelah menikah dan sudah punya pengalaman bertani. Orang muda yang sebatas membantu

orang tua mereka di sawah pada umumnya tidak mendapatkan bayaran atas bantuan, uang hasil panen masuk ke orang tua.

Orang muda membantu orang tua dan terima upah (intra-family wage labour)

Penelitian ini juga menemukan orang muda yang membantu orang tua di sawah dan mendapatkan bayaran. Ini menunjukkan kelirunya asumsi bahwa hubungan upah-mengupah tidak ditemukan antara anggota suatu keluarga.⁶ Terdapat orang muda yang mendapatkan upah karena membantu orang tua di sawah. Orang muda yang mendapatkan upah dari kegiatan membantu orang tua di sawah pada umumnya adalah orang muda yang sudah menikah atau berkeluarga. Seperti yang ditemukan di salah satu desa penelitian, terdapat orang muda yang mendapatkan bayaran Rp 500 ribu dari orang tuanya ketika sudah selesai musim panen. Menurut orang muda tersebut, uang yang didapat untuk memenuhi kebutuhan istri dan kedua anaknya, jika kurang, orang muda tersebut masih minta kepada orang tuanya. Di Jawa Barat, orang muda meminta upah terlebih dahulu sebelum membantu orang tua mereka di sawah. *“Maunya ada iming-imingnya dulu, nanti mau dikasih apa, harus ada imbalannya Bu..”* Imbalan yang sering mereka minta adalah rokok, uang, atau pulsa.

c. Orang muda bekerja sebagai buruh tani

Selain mereka yang memperoleh hasil bayaran karena membantu orang tuanya, penelitian ini menemukan juga orang muda yang bekerja sebagai buruh tani untuk orang lain (bukan orang tua sendiri). Banyak orang muda bekerja sebagai buruh terutama sebagai buruh panen. Buruh panen masih banyak digemari oleh orang muda terutama di Sulawesi Selatan. Keterlibatan orang muda perempuan dan laki – laki juga diakui oleh Kepala Dinas Pertanian Wajo, bahwa orang muda banyak terlibat dalam kegiatan panen. Orang muda yang bekerja sebagai buruh panen memperoleh bayaran berupa uang sebesar Rp 35.000 –

50.000 per hari. Sementara itu terdapat juga orang muda yang memperoleh bayaran berupa gabah, besaran gabah yang diperoleh buruh panen sangat beragam. Di Desa Gadingan, dalam satu hari buruh panen memperoleh upah panen sebesar 20 Kg gabah per hari. Sementara itu Jawa Tengah bayarannya adalah 8:1 artinya setiap 8 kg gabah yang dipanen maka orang muda (buruh panen) memperoleh 1 kg gabah sebagai bayarannya. Tingkat upah ini pada umumnya (jauh) lebih tinggi dari upah pekerjaan bukan-pertanian untuk desa yang sama (untuk pemuda dan pemudi yang tidak memiliki modal). Misalnya buruh tenun di Parangputih pendapatan maksimalnya hanya Rp 20.000 – Rp 60.000/minggu. Orang muda di Sulawesi Selatan mengakui bahwa mereka masih tertarik untuk ikut dalam kegiatan panen karena selain dapat memperoleh uang secara langsung, pada tahap panen pemuda dan pemudi saling bertemu, bahkan bisa mencari pasangan (jodoh).

Orang muda yang rutin mengikuti kegiatan panen selama musim panen pada umumnya sudah tidak bersekolah. Orang muda yang masih sekolah hanya bisa mengikuti kegiatan panen saat hari libur sekolah. Namun terdapat juga pengecualian, misalnya pemudi H di Parangputih, Sulawesi Selatan, H mengakui bahwa sudah mengikuti panen semenjak duduk di bangku Sekolah Dasar (SD). H berani untuk minta izin atau bahkan ”nekat” bolos sekolah untuk ikut panen agar mendapatkan uang cepat. Uang hasil panen diberikan kepada ibunya untuk membayar sekolah dan uang jajan pemudi H tersebut.

Terdapat paradoks yang muncul berkaitan dengan perubahan teknologi dan teknik pertanian padi selama satu generasi terakhir. Perubahan teknologi dan teknik pertanian yang bersifat hemat tenaga kerja cenderung mengurangi kesempatan kerja buruh tani di sawah. Misalnya, di semua desa penelitian kemunculan traktor sudah lama menggantikan membajak dengan kerbau/sapi, atau memacul; sedangkan akhir-akhir ini di beberapa desa penelitian tander pindah diganti oleh Alat Tanam Benih Langsung (Atabela) atau hambur langsung; menyiangi diganti oleh herbisida; merontokkan dengan kaki diganti oleh *power thresher*⁷; menumbuk padi diganti oleh penggilingan/*huller*. Hal ini menunjukkan bahwa hanya tinggal proses panen saja yang dapat menyediakan banyak kesempatan kerja untuk orang-orang di desa, namun kemunculan *combine harvester* di dua desa penelitian (di Sulawesi Selatan) memunculkan kekhawatiran

⁶ Penelitian tentang pekerja anak di Indonesia juga menemukan kebiasaan anak mengharapkan bayaran jika membantu orang tua di usaha-usaha non-farm (Tjandraningsih & White 1998). Lihat juga penelitian Li di wilayah Lauje, Sulawesi Tengah yang mencatat pola otonomi ekonomi anggota-anggota rumahtangga petani sebelum *boom* kakao, di mana masing-masing anggota rumah tangga, tua dan muda, memiliki hasil pertaniannya sendiri dan transaksi upah dalam keluarga menjadi lazim (Li 2014, Bab 2).

⁷ *Power thresher* merupakan alat perontok padi yang sudah menggunakan mesin sederhana.

bahwa nanti kedepannya kesempatan kerja pada tahapan panen akan hilang dan tergantikan oleh *combine harvester*.⁸ Kemunculan teknologi ini sangat mengkhawatirkan tenaga kerja muda pertanian, karena tahapan panen adalah tahapan yang paling banyak menyerap tenaga kerja pertanian (dapat mencapai 30 orang lelaki dan perempuan buruh panen), sedangkan teknologi *combine harvester* hanya membutuhkan 5-7 orang pekerja lelaki untuk areal yang sama.

Dalam hal membantu orang tua di sawah, terdapat perbedaan antara orang muda yang masih bersekolah dengan orang muda yang sudah tidak sekolah. Seperti dapat diduga, orang muda yang masih duduk di bangku sekolah lebih jarang ikut membantu orang tua mereka di sawah. Jikapun ikut membantu, orang muda yang bersekolah hanya bisa ikut membantu orang tua di sawah ketika mereka sedang libur sekolah atau sudah pulang sekolah. Orang tua memang tidak akan mengajak (meminta bantuan) anak mereka ketika mereka sedang bersekolah. Salah satu petani yang anaknya masih bersekolah, mengatakan bahwa yang terpenting bagi seorang anak adalah sekolah dulu, nanti jika memang sedang libur maka anak baru diminta untuk membantu orang tua mereka. Sementara itu orang muda yang sudah tidak bersekolah bisa lebih fleksibel waktu untuk membantu orang tua mereka. Kapanpun orang tua mereka membutuhkan bantuan maka orang muda akan diminta bantuannya.

d. Keterlibatan Orang muda dan pengaruh struktur agraria

Orang muda yang berasal dari strata rumah tangga petani pemilik relatif luas

Orang muda yang berasal dari rumah tangga petani dengan kepemilikan lahan yang relatif luas cenderung tidak ikut terlibat dalam kegiatan pertanian. Hal itu disebabkan orang muda yang berasal dari rumah tangga petani lahan luas memiliki aktivitas yang tidak memungkinkan orang muda tersebut bekerja di sawah, aktivitas mereka seperti kuliah di luar desa, Makassar, atau bekerja sebagai dosen di luar kota. Seperti orang muda yang berasal dari petani bermodal di Kelurahan Parangputih dan Kelurahan Walian. Di Parangputih terdapat pemuda F anak seorang petani dengan luasan lahan 8 Ha, dirinya sedang berkuliah di Universitas Negeri Makassar mengambil jurusan budidaya pertanian. Pemuda F mengatakan bahwa masih berminat untuk bekerja di bidang pertanian tetapi bukan

sebagai petani namun lebih sebagai ahli di bidang pertanian seperti dosen atau Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Kementerian Pertanian. Demikian juga dengan R, seorang orang muda laki-laki yang berasal dari desa Walian dengan latar belakang orang tua adalah pemilik tanah sawah seluas 21 Ha. Orang muda R, mahasiswa dari Universitas Negeri Makassar dengan program studi Ilmu Olahraga, mengakui tidak tertarik untuk bekerja di sawah karena bekerja di bidang pertanian itu sangat berat karena keluar rumah harus pagi hari sementara itu kembali lagi baru sore hari, bahkan menurut penuturan informan, petani terkadang harus kembali lagi ke sawah pada malam hari untuk mengurus air yang mengalir sawahnya. R juga menjelaskan juga jika bekerja di bidang pertanian dapat menyebabkan kaki hancur dan pecah-pecah karena panas di sawah. R tetap tertarik untuk menjadi "petani pemilik sawah" yang menggarap sawahnya kepada petani lain. Jadi, yang dimaksudkan sebenarnya adalah bukan menjadi petani melainkan menjadi tuan tanah. Di Desa Walian istilah petani yang menggarap sawah miliknya kepada petani lain yang tidak memiliki sawah atau sawah kecil lebih dikenal dengan istilah petani *remote*.

Orang muda yang berasal dari rumah tangga pemilik kecil dan pemilik-penggarap

Berbeda dengan orang muda yang berasal dari rumah tangga petani pemilik luas, orang muda yang berasal dari rumah tangga pemilik kecil dan pemilik-penggarap ikut membantu dan dilibatkan oleh orang tua mereka di sawah, dengan dasar pertimbangan sebagai pihak yang nanti kedepannya akan menggantikan orang tua mereka yang petani. Selain pertimbangan regenerasi, terdapat pertimbangan lain yang menyebabkan orang muda dilibatkan oleh orang tua mereka untuk ikut membantu orang tua mereka yaitu untuk menghemat biaya produksi. Menghemat biaya tenaga kerja adalah pertimbangan penting untuk petani kecil, yang umumnya mempraktikkan *labour-driven intensification* dan bertujuan bukan untuk memaksimalkan keuntungan dari modal melainkan memaksimalkan penghasilan dari tenaga kerja mereka sendiri.⁹ Menurut penuturan petani, semisal pada wilayah Cempaka, Sulawesi Selatan, pada tahapan panen upah buruh panen sebesar Rp 40.000 – Rp 50.000, maka pada musim panen membutuhkan 20 orang pemanen sehingga rumah tangga petani harus mengeluarkan sekitar Rp 1.000.000. Sementara itu jika menggunakan/ meminta bantuan orang muda maka rumah tangga petani dapat menghemat

⁸ Mesin perontok padi dengan ukuran besar dan hanya dioperasikan oleh 5-7 orang

⁹ Van der Ploeg (2013: 70)

atau mengurangi biaya produksi. Selain itu pak Sah, petani pemilik di desa Sarimulyo yang menguasai lahan 0.42 Ha, mengatakan bahwa

hasil tenaga kerja tersebut hanya 50 persennya jatuh ke tangan petani.

Tabel 4. Keterlibatan Orang muda di 12 Desa Penelitian dalam Tahapan Produksi Menurut Jenis Kelamin

Tahapan Produksi	Provinsi Penelitian		
	Jawa Barat	Jawa Tengah	Sulawesi Selatan
Pengolahan lahan dengan Traktor/cangkul	L	L	L
Penanaman	L	L/P	L/P
Pemupukan	-	-	-
Penyiangan	P	-	-
Penyemprotan Pestisida	-	-	-
Panen	L/P	L/P	L/P
Menjemur Padi	-	-	L/P

Keterangan: L = Orang muda; P = Pemuda

semua proses pertanian dikelola sendiri dan keluarga untuk menghemat biaya tenaga kerja, bahkan istrinya turut ikut mengelola sawah, bahkan bertanggung jawab langsung untuk pengelolaan sawah warisan yang dikuasainya.

Keterlibatan orang muda yang berasal dari rumah tangga petani penggarap

Orang muda yang berasal dari rumah tangga petani penggarap murni cenderung tidak mau terlibat untuk membantu orang tua dalam kegiatan pertanian karena mereka merasa tidak memiliki tanah pertanian sehingga nanti ke depannya mereka tetap tidak akan memiliki tanah. Selain itu orang muda yang berasal dari wilayah di mana tingkat petani penggarapnya tinggi mengatakan bahwa jika hanya bekerja sebagai petani penggarap maka tidak akan pernah memperoleh banyak keuntungan, karena hasil panennya akan dibagi dua dengan pemilik tanah.

Orang muda yang berasal dari rumah tangga petani penggarap tidak selalu dilibatkan oleh orang tua mereka karena orang tua mereka tidak memiliki sawah sehingga nanti ke depannya tidak ada sawah yang akan mereka turunkan (warisan) kepada anaknya. Tetapi, pada penelitian ini ditemukan juga orang muda yang berasal dari rumah tangga petani penggarap yang tetap membantu orang tua mereka di sawah, pertimbangan orang tua mereka tetap melibatkan orang muda adalah untuk menghemat biaya produksi. Melalui pelibatan anak sebagai tenaga kerja dalam rumah tangga maka rumah tangga petani tidak perlu mengeluarkan biaya lebih. Menghemat biaya tenaga kerja memang lebih penting lagi untuk petani penggarap (pamaro), mengingat bahwa seluruh biaya tenaga kerja dibebankan ke dia (tidak dibagi dengan pemilik) sedangkan

Keterlibatan Orang muda dalam Tahapan – Tahapan Produksi

Pada umumnya, orang muda yang terlibat di sawah tidak terlibat pada keseluruhan proses produksi. Pemuda hanya terlibat pada pengolahan lahan (mencangkul, traktor – khusus lelaki), dan panen (lelaki dan perempuan). Sementara itu, beberapa kegiatan produksi masih dilakukan oleh orang tua mereka sendiri dengan pertimbangan orang muda belum memiliki banyak keahlian terkait dengan tahapan tersebut. Seperti yang ditemukan di Desa Cempaka, orang muda yang membantu orang tua dalam kegiatan pengolahan tanah dengan traktor akan tetapi belum ”diizinkan” oleh orang tuanya untuk melakukan proses hambur langsung¹⁰ karena orang tua beranggapan bahwa proses hambur langsung tidak hanya sebatas menaburkan benih; petani juga harus juga memiliki pengelihatian yang tajam agar benih yang hamburkan tidak tumpang tindih dan terlalu rapat jarak tanamnya.

Pada penelitian ini orang muda yang membantu orang tua di sawah lebih didominasi oleh Pemuda dibandingkan pemuda. Pada studi ini ditemukan pemuda jarang terlibat dalam pertanian dibandingkan dengan orang muda. Pemuda menganggap bekerja di bidang pertanian padi itu membutuhkan fisik yang kuat karena kondisi di sawah sangat panas dan berat. Terdapat satu kasus pemuda bernama pemuda H¹¹ yang mengalami beberapa kali pingsan ketika sedang membantu panen orang tuanya. H menuturkan bahwa dia sering mengalami rasa nyeri di dada dan pingsan karena teriknya matahari ketika sedang memanen padi di sawah.

¹⁰ Hambur langsung adalah proses penanaman benih yang langsung disebar tanpa disemai dan tidak memiliki jarak tanam.

¹¹ Pemuda yang berasal dari Parangputih, Wajo, Sulawesi Selatan. Dirinya sempat ikut membantu panen tetapi sudah tidak terlibat dalam kegiatan panen lagi

Kesempatan Orang muda untuk Mengakses Lahan Pertanian

1. Orang muda tanpa akses kepemilikan tanah

Akses terhadap tanah merupakan salah satu faktor yang dianggap berpengaruh terhadap ketertarikan orang muda untuk tetap bekerja di bidang pertanian. Di salah satu desa penelitian terdapat pemuda yang ketika ditanya “apakah bekerja di pertanian itu menjanjikan?”, pemuda tersebut langsung tanya, “maksudnya untuk yang punya tanah atau yang tidak punya?”, dan pemuda menjawab jika punya sawah maka akan menjanjikan sementara jika tidak memiliki sawah maka bekerja sebagai petani tidak akan menjanjikan. Di beberapa wilayah yang tingkat kepemilikan sawahnya masih merata belum terpolarisasi dengan luasan yang relatif luas, orang masih berminat untuk tetap terjun menjadi petani.

Di Desa Cisari (Karawang) di mana sebagian besar tanah sawah dimiliki oleh orang yang berasal dari luar, orang muda mengatakan tidak tertarik untuk bekerja di bidang pertanian dengan alasan utama tidak adanya lahan bagi mereka.

“Ga semua orang di sini punya lahan yang bisa dijadikan lahan untuk pertanian. Untuk menggarap pertanian juga ga ada”

Orang muda (terutama laki-laki) tidak mau bekerja di bidang pertanian karena jika mereka menjadi petani maka mereka hanya akan menjadi petani penggarap tanah orang lain dengan sistem bagi hasil. Keengganan untuk menjadi petani penggarap juga diutarakan oleh orang muda dari desa Parangputih, dirinya melihat bahwa petani yang hanya menggarap sawah tidak akan memiliki masa depan karena hanya menerima separuh hasil panennya, sementara separuh hasilnya lagi masuk kepada pemilik tanah. Lebih lanjut orang muda tersebut menjelaskan bahwa

“Bekerja di sawah itu setengah mati karena berat, apalagi jika menjadi petani penggarap yang menggarap sawah orang lain bangun harus pagi (subuh) karena malu jika ketahuan telat oleh pemilik sawah. Berbeda dengan petani kalo memiliki sawah sendiri maka jika sedang malas tidak perlu pergi ke sawah atau berangkat agak siang” (orang muda lelaki, Parangputih, bekerja sebagai penjual pakaian)

Orang muda juga mengakui jika menjadi petani penggarap maka hasil panennya akan di bagi kepada pemilik lahan sehingga uang yang diperoleh akan lebih sedikit yang diterima padahal seluruh tahapan produksi dikerjakan oleh petani penggarap. Realitas yang lebih menyakitkan menjadi petani penggarap adalah ketika mengalami gagal panen

maka seluruh kerugian ditanggung oleh petani penggarap karena hal itu merupakan resiko orang yang tidak memiliki tanah.

2. Orang muda menunggu untuk bisa mengakses tanah

Orang muda yang orang tuanya memiliki tanah sawah tidak serta merta dapat langsung memperoleh sawah milik orang tua mereka. Orang tua cenderung menghibahkan sawah miliknya ketika anak mereka sudah menikah, orang tua sudah lelah, atau mewariskannya saat orang tua sudah wafat. Pada penelitian ini orang muda yang orang tua mereka merupakan pemilik sawah dihadapkan pada kenyataan bahwa mereka harus menunggu untuk dapat mendapatkan sawah dari orang tua. Di salah satu desa penelitian, orang tua sedikit takut untuk cepat-cepat menghibahkan lahan sawah milik mereka karena takut orang muda akan menjual lahan tersebut untuk membeli kebutuhan lain.

Orang muda yang masih menunggu warisan orang tua hanya ikut membantu orang tua mereka terlebih dahulu di sawah, atau bermigrasi dulu keluar desa bahkan keluar negeri untuk bekerja bukan-pertanian. Seperti yang ditemukan di Desa Gadingan, terdapat orang muda ketika masih menunggu sawah milik orang tuanya dirinya memilih untuk bermigrasi ke Malaysia untuk menjadi buruh sawit terlebih dahulu untuk sekedar mencari pengalaman dan kemudian kembali lagi ke desa. Orang muda memilih untuk tetap tinggal di desa karena keluarga mereka sebagian besar tinggal dekat desa, dan bagi yang memiliki sawah mereka khawatir nanti siapa yang mengurus sawah.

Pada penelitian ini (meskipun jarang) ditemukan pula orang muda yang sudah mandiri mengelola lahan sawah (tidak hanya sebatas membantu). Di Parangputih, terdapat orang muda A yang belum menikah tetapi sudah secara mandiri dapat mengelola sawah warisan orang tuanya karena orang tua sudah wafat semenjak A masih duduk di bangku sekolah. Selain itu, terdapat juga orang muda yang sudah menikah belum dapat mengelola sawah secara mandiri, hal itu disebabkan orang muda tersebut masih tinggal bersama dengan orang tua dalam satu rumah tangga sehingga hasil panen dan keputusan yang berkaitan dengan pertanian masih dipegang oleh orang tua.

Orang muda yang berasal dari kategori penguasaan sempit umumnya akan memperoleh akses untuk mengelola sawah setelah orang tuanya meninggal atau fisik orang tua sudah tidak kuat untuk bertani. Orang muda yang berasal dari rumah tangga yang memiliki lahan sawah yang relatif luas akan lebih mudah menerima terimah hibah sebagian sawahnya untuk dikelola pada saat sudah menikah, namun pada kenyataannya meski orang muda yang berasal keluarga petani bermodal yang memiliki sawah relatif luas mereka tidak membantu orang tua mereka di sawah mereka cenderung memiliki

aktivitas (baik perkuliahan/pekerjaan) di luar desa, sehingga sawah-sawah milik orang tua dikelola oleh orang lain. Sementara itu orang muda yang berasal dari rumah tangga yang tidak memiliki sawah luas cenderung akan bersama-sama dengan orang tua mereka mengolah sawah yang ada.

Dalam kasus orang muda yang masih ikut bertani secara bersama-sama, hasil panennya akan masuk terlebih dahulu kepada orang tua, setelah itu orang tua baru akan memberikan kepada anak mereka jika anak mereka meminta. Bagi orang muda yang sudah tidak tinggal bersama orang tua mereka dan orang tuanya sudah tidak ikut membantu di sawah, pendapatan dari hasil pertanian akan dimasukkan kepada orang muda dengan sistem bagi hasil (biasanya bagian orang muda lebih besar dari pada bagian orang tua). Orang muda yang sudah menikah belum memiliki otoritas penuh terhadap penguasaan tanah tersebut. Orang muda mendapatkan hak penuh atas tanah warisannya setelah orang tuanya wafat dan proses pembagian hak waris selesai.

3. Orang muda menabung untuk membeli sawah

Orang muda yang berasal dari petani bukan pemilik atau pemilik tanah sempit, memang cenderung untuk memilih pekerjaan selain di bidang pertanian karena mereka beranggapan bahwa mereka jika menjadi petani hanya akan menjadi petani penggarap atau buruh tani. Namun, pada penelitian ini di temukan orang muda (baik orang muda dan pemuda) yang berasal dari Indramayu, Wetanan, dan Gadingan yang memilih strategi bekerja dahulu di sektor bukan-pertanian untuk kemudian membeli sawah di desa. Salah satu contohnya pengakuan seorang pemuda di desa Wetanan, Jawa Tengah. Keinginan pemuda tersebut adalah untuk memiliki tanah pertanian, tetapi belum berkeinginan untuk menggarap sawah tersebut sendiri. Pemuda tersebut menyadari bahwa ayahnya hanya penggarap sawah milik desa dengan sistem sewa, sehingga tidak mungkin dirinya mendapat tanah warisan. Satu-satunya jalan untuk memperoleh tanah sawah adalah dengan cara membeli, padahal saat ini harga tanah sudah semakin tinggi. Pemuda tersebut mencontohkan kakak perempuannya yang saat ini mampu mengelola sawah secara mandiri setelah membeli sawah. Kakak perempuannya bisa membeli sawah setelah menikah, karena suaminya sekarang bekerja di Malaysia dengan rencana kemudian kembali lagi ke desa dan membeli lagi sawah di desa. Selain itu di Indramayu, Jawa Barat, ditemukan juga pemuda yang bekerja sebagai buruh migran di luar negeri dan rutin mengirimkan uang kepada suaminya di desa sehingga suaminya dapat membeli sebidang sawah di desa untuk kemudian bertani. Selain itu, masih di Indramayu, terdapat dua kasus orang muda yang bekerja terlebih dahulu di sektor bukan-pertanian untuk kemudian menabung dan membeli

sawah di desa untuk menjadi petani (kasus 1 dan 2 di bawah).

Di Desa Gadingan Sulawesi Selatan, orang muda sudah biasa bermigrasi untuk kemudian membeli tanah di desa karena di desa tersebut tanah menjadi salah satu persyaratan pernikahan, yaitu sebagai emas kawin (mahar). Orang muda yang berasal dari keluarga bukan pemilik lahan akan bekerja dahulu sebagai buruh kelapa sawit di Malaysia atau Kalimantan.

Preferensi Orang muda terhadap Pekerjaan Pertanian

Pada bagian sebelumnya, tulisan ini telah menjelaskan keterlibatan orang muda dalam kegiatan pertanian seperti membantu orang tua dalam kegiatan pertanian dan juga bekerja sebagai buruh panen. Namun, jika dilihat preferensi orang muda, secara umum orang muda tidak memiliki preferensi untuk bekerja di bidang pertanian, mereka cenderung untuk memilih bekerja di sektor bukan-pertanian.

Keengganan untuk bertani ini dapat berdasarkan beberapa unsur kontekstual. *Pertama*, orang muda yang berasal dari wilayah dengan *absentee* tinggi dan alih fungsi lahan, cenderung tidak tertarik untuk bekerja sebagai petani karena mereka melihat bahwa tidak terdapat tempat untuk bertani dan jikapun ada sawah maka sawah tersebut milik orang luar sehingga orang muda hanya dapat bekerja sebagai petani penggarap. Misalnya di Desa Cisari, orang muda mengakui bahwa ketidakikutsertaan mereka dalam bidang pertanian padi adalah tidak adanya lahan bagi mereka. Sebagian besar lahan di Cisari adalah milik orang luar desa Cisari. Selain masalah tanah, orang muda dari wilayah tersebut menyatakan gengsi jika harus bekerja jadi petani di sawah. Malas dengan kotornya sawah. Gengsi ini menjadi alasan yang banyak disampaikan peserta diskusi. Alasan mereka adalah lebih karena anggapan teman-teman sepermainan (*peer group*) mereka terhadap pertanian itu sendiri. Kerja di pabrik dianggap lebih bergengsi dibandingkan menjadi petani.

“Itu anak-anak suka bilang, ah lu mah kerjanya di pertanian...ga kayak gue kerjanya di pabrik.”

Kedua, orang muda yang berasal dari wilayah di mana kepemilikan tanah masih menyebar rata masih menunjukkan minat untuk bekerja di bidang pertanian meski diakui hanya sebagai pilihan terakhir dan lebih baik dari pada menganggur. Orang muda masih mau terlibat pada berapa tahapan produksi, dan melihat bahwa pekerjaan di bidang pertanian memang masih menjanjikan jika memang memiliki sawah sendiri.

Ketiga, pemuda secara umum tidak tertarik untuk bekerja di bidang pertanian. Pemuda menganggap bahwa bekerja di bidang pertanian

padi itu membutuhkan fisik yang kuat. Namun terdapat pemuda di Desa Gadingan masih terlibat karena banyak perempuan yang terlibat dalam kegiatan tanam dan panen sehingga pemuda tidak malu untuk turun lapang.

Keempat, orang muda yang memiliki pendidikan tinggi dan berlatar belakang orang tua petani pemilik mengakui masih mau untuk tetap memiliki sawah tetapi tidak sebagai petani yang turun ke sawah, mereka tertarik untuk menjadi pemilik lahan yang memperkerjakan petani-petani lain yang tidak memiliki lahan atau lahan kecil. Orang muda yang sekolah dan kuliah memiliki preferensi untuk tidak bekerja di bidang pertanian. Mereka memiliki keinginan untuk bekerja di sektor bukan-pertanian seperti menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS). Menurut mereka lebih menjanjikan dari segi penghasilan, selain itu orang muda (terutama pemuda) beranggapan bahwa meski mereka bekerja sebagai PNS mereka masih memiliki waktu untuk dapat mengelola lahan pertanian milik mereka sendiri. Sementara itu orang muda di Desa Cempaka, Sulawesi Selatan mengatakan lebih tertarik untuk bekerja sebagai peternak sapi potong, karena menurut mereka lebih menguntungkan jika beternak sapi potong dan lebih cepat dalam menghasilkan uang yang lebih besar jika di bandingkan dengan bekerja di bidang pertanian.

Pola-Pola Migrasi

Ketersediaan peluang kerja lain yang menjadi sumber-sumber pendapatan tersebut, selain mempengaruhi pendapatan rumah tangga tani, juga berpengaruh pada pola-pola mobilitas anggota rumah tangga tani di desa. Beberapa pola mobilitas yang ditemukan di desa-desa penelitian dijelaskan dibawah ini.

Jenis-jenis petani berdasarkan pola migrasi: migrasi muda bukan berarti tidak bertani waktu tua

Fenomena ketidaktertarikan dan tidak terlibatnya atau keluarnya orang muda dari sektor pertanian harus dipahami bukan merupakan pilihan seumur hidup. Pada penelitian ini ditemukan banyak petani dewasa-tua ketika mereka masih muda mereka sempat bermigrasi atau tidak bekerja di bidang pertanian namun pada akhirnya di akhir waktu mereka kembali lagi untuk bertani. Di Desa Gadingan misalnya ditemukan lebih dari 18 dari 30 sampel rumah tangga (60 persen) yang mengatakan bahwa mereka pernah bekerja terlebih dahulu di sektor bukan-pertanian dan baru kemudian memilih untuk bekerja di sektor pertanian. Pada penelitian ini ditemukan beberapa “riwayat migrasi” petani sebelum pada akhirnya mereka memilih untuk bekerja di sektor pertanian. Pola-pola tersebut antara lain:

1. Orang desa yang sejak muda sudah bertani;

2. Orang desa yang sempat bekerja di sektor bukan-pertanian baik di dalam desa/luar kota setelah kembali ke desa untuk bekerja di sektor pertanian;
3. Orang desa yang bekerja serabutan baik di dalam desa maupun luar desa namun pada saat-saat tertentu mereka bekerja di tahapan-tahapan produksi pertanian seperti tanam dan panen;
4. Orang kota bekerja di sektor bukan-pertanian, baru ketika sudah pensiun memilih menjadi petani pemilik di desa.

a. Orang desa yang sejak muda sudah bertani.

Terdapat petani tua yang memang sejak dahulu mereka sudah bertani. Mereka bertani pada umumnya karena sejak muda sudah dilibatkan orang tua mereka di sawah. Mereka sudah sejak muda mendapatkan bagian tanah dari orang tua mereka kemudian mereka garap secara sendiri sejak muda sampai tua. Seperti yang ditemukan di Desa Walian, petani tersebut mulai bertani semenjak tahun 1985 pada saat itu informan masih ikut menggarap sawah milik orang tua sampai dengan tahun 1987 baru pada saat itu informan mulai menjadi pemilik.

b. Orang desa yang sempat bekerja di sektor bukan-pertanian baik di dalam desa/luar kota setelah kembali ke desa untuk bekerja di sektor pertanian.

Di beberapa wilayah penelitian ditemukan petani ketika masih muda mereka keluar desa (ada yang ke kota, ke luar propinsi dan keluar negeri) untuk bekerja di sektor bukan-pertanian. Di Desa Gadingan ditemukan petani ketika muda bermigrasi ke Malaysia untuk bekerja sebagai buruh kelapa sawit. Namun dua tahun belakang ini mereka kembali lagi ke desa untuk bekerja sebagai petani. Sewaktu muda petani tersebut pergi ke Malaysia karena tidak memiliki pekerjaan, jikapun hendak bertani mereka belum dapat menguasai sawah karena pada saat itu sawah masih dikuasai sepenuhnya oleh orang tuanya. Setelah sekitar 15 tahun bekerja di Malaysia akhirnya petani tersebut memutuskan untuk kembali ke desanya dan membeli sebidang sawah, saat ini petani tersebut menggarap sawah miliknya sendiri dan sebagian milik orang tuanya. Selain itu, terdapat pula contoh petani yang saat muda bermigrasi ke luar kota untuk bekerja sebagai penyuluh swasta di perkebunan kelapa kemudian ketika memasuki masa pensiun orang desa tersebut memilih untuk kembali ke desa untuk menjadi petani pemilik lahan di desa.

c. Orang desa yang bekerja serabutan baik di dalam desa maupun luar desa namun pada saat-saat tertentu mereka bekerja di tahapan-tahapan produksi pertanian seperti tanam dan panen.

Petani yang terkategori pada kelompok ini merupakan petani yang bekerja sebagai buruh tani. Pada saat tertentu mereka bekerja di sektor bukan-pertanian seperti tukang bangunan, buruh tebu, buruh aren, dan tukang cuci. Pada saat-saat tertentu seperti musim tanam dan musim panen mereka bekerja sebagai buruh tani musiman. Seperti buruh tani yang ditemukan di Desa Cempaka, Ibu Da, buruh cuci di Cempaka, sejak tinggal di Cempaka bekerja sebagai buruh panen jika musim panen tiba. Ibu Da bekerja di dua tempat sebagai seorang buruh cuci dengan penghasilan sebulan Rp 300.000. Karena di dua tempat masing-masing memberi Rp 150.000 setiap 10 kali cuci. Ketika menjadi buruh panen pada musim panen menjadikan Ibu Da kadang tidak berangkat mencuci di tempat orang. Ibu Da panen hanya dalam desa saja, tidak pernah keluar desa.

d. Orang kota bekerja di sektor bukan-pertanian ketika sudah pensiun memilih menjadi petani pemilik di desa.

Pada penelitian lain di wilayah Cianjur ditemukan petani yang berasal dari kota. Petani tersebut, pensiunan dari sebuah perusahaan tambang di Jakarta, mengatakan bahwa lima tahun sebelum pensiun dirinya sudah mempersiapkan untuk membeli lahan, jadi ketika sudah pensiun dirinya sudah memiliki pengetahuan mengenai cara mengelola lahan pertanian. Dirinya fokus di pertanian hortikultura dan budidaya jamur.¹²

Refleksi Kebijakan Ketenagakerjaan Orang muda di Perdesaan

1. Pengangguran orang muda sebagai permasalahan struktural

Pengangguran orang muda perdesaan dilihat sebagai permasalahan struktural, di mana investasi yang terjadi dewasa ini cenderung tidak menciptakan peluang kerja bagi orang muda desa karena merupakan investasi *labour-displacing* yang cenderung mendorong peningkatan pengangguran. Misalnya investasi pada teknologi mekanisasi pertanian sebagai salah satu strategi yang dipilih untuk meningkatkan produktivitas pertanian dan/atau menghemat ongkos produksi, namun di satu sisi memberikan kontribusi terhadap berkurangnya tenaga kerja muda di sektor pertanian. Misalnya masuknya teknologi Alat Tanam Benih Langsung (Atabela) mulai menggantikan buruh tanam di desa.

¹² Mulyandari (2011)

Selain Atabela, teknologi yang sekarang ini tengah gencar diperkenalkan kepada petani adalah *combine harvester* atau mesin perontok padi otomatis.

a. Apa yang membuat pertanian tidak menarik dan tidak dapat diakses oleh orang muda perdesaan

Kebanyakan orang muda melihat pertanian sebagai pekerjaan yang tidak menarik atau sebagai pekerjaan pilihan terakhir. Bagi sebagian orang muda yang berasal dari wilayah dengan tanah pertanian banyak dikuasai oleh orang luar (*absentee*), pertanian dianggap kurang menarik karena jikapun menjadi petani maka hanya akan menjadi petani penggarap sehingga tidak memberikan harapan. Sementara itu untuk wilayah di mana tanah pertanian relatif tersebar, orang muda tetap melihat pertanian sebagai pekerjaan yang masih menarik tetapi hanya sebagai pekerjaan pilihan terakhir dan atau pekerjaan sampingan. Kendala terbesar yang membuat orang muda masih berpikir dua kali untuk bekerja di bidang pertanian adalah kepemilikan tanah untuk bertani. Orang muda butuh waktu yang relatif lama untuk dapat mengakses lahan milik orang tua mereka (dalam arti menggarap secara mandiri), mereka harus menunggu sampai orang tua mereka sudah merasa lelah atau secara fisik sudah tidak kuat lagi, atau mendapatkan warisan pada saat orang tua mereka sudah wafat.

b. Orang muda (laki - laki and perempuan) dan akses terhadap pertanian

Tidak terdapat rintangan formal bagi pemuda untuk menjadi petani; namun pada kenyataannya pemuda cenderung untuk memilih bekerja di sektor bukan-pertanian. Selain itu, pembentukan kelompok tani yang diinisiasi oleh pemerintah juga menjadi ironi tersendiri. Kelompok tani yang seharusnya menyentuh seluruh masyarakat pertanian baik laki-laki maupun perempuan, pada kenyataannya cenderung bias gender. Bias gender yang dimaksud di sini adalah lebih banyak laki-laki yang menjadi anggota kelompok tani dibandingkan dengan perempuan. Walaupun ada kelompok tani perempuan (Kelompok Wanita Tani) mereka lebih fokus kepada pertanian pekarangan bukan pertanian padi.

KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan yang telah dijelaskan pada bagian-bagian sebelumnya, maka kesimpulan dari penelitian ini antara lain sebagai berikut: *Pertama*, orang muda di desa penelitian cenderung tidak tertarik menjadikan pertanian

sebagai pekerjaan utama di masa yang akan datang. Jika pun orang muda tertarik untuk bekerja di bidang pertanian, mereka hanya menjadikan pertanian sebagai pekerjaan sampingan bukan sebagai pekerjaan utama. Pada dasarnya orang muda di 12 desa masih terlibat di pekerjaan pertanian. Namun keterlibatan orang muda di pekerjaan pertanian bukan sebagai pengambil keputusan dalam manajemen usaha tani, tetapi lebih sebagai buruh tani, baik sebagai pekerja keluarga (*family labour*) maupun buruh upahan (*wage labour*). Keterlibatan orang muda umumnya tidak terjadi di semua tahapan produksi. Orang muda-laki lebih banyak terlibat (dalam tahapan produksi) daripada pemudi.

Kedua, walaupun orang muda minatnya relatif menurun di sektor pertanian, jumlah petani kecil dan buruh tani kemungkinan besar masih stabil ke depan. Mereka hidup dengan kerja di pertanian dan juga di bukan-pertanian. Pola migrasi orang muda perdesaan adalah pola lama dan seringkali bersifat sementara. Walaupun dukungan bagi pertanian skala kecil minim, banyak orang muda yang bermigrasi tetap kembali ke desa untuk bertani setelah menikah atau sesudah menabung membeli tanah. Pertanian masih merupakan peredam *shock* ekonomi yang penting bagi banyak rakyat Indonesia. Rumah tangga pertanian mensiasati pendapatannya dengan hidup dengan lebih dari satu alternatif pekerjaan sekaligus: pertanian dan bukan-pertanian. Penelitian ini mendukung kesimpulan bahwa reproduksi sosial di sektor pertanian berdasarkan usaha tani kecil tetap terjadi, penyediaan tenaga kerja untuk sektor pertanian tetap dijamin reproduksi sosialnya (jumlah buruh tani dan petani kecil masih relatif stabil ke depan).

Ketiga, terdapat berbagai faktor yang mempengaruhi keterlibatan orang muda dalam bidang pertanian yaitu akses terhadap tanah, ada tidaknya peluang pekerjaan bukan-pertanian-padi baik di dalam desa atau luar desa, pola-pola yang umum untuk mengakses pekerjaan di sektor pertanian (padi) berdasarkan gender maupun sebagai akibat dari masuknya teknologi atau perubahan sistem produksi usaha tani padi serta tingkat pendidikan orang muda. Pada penelitian itu juga ditemukan orang muda yang masih tertarik untuk berinvestasi untuk membeli/memiliki lahan pertanian tetapi hanya sebagai pemilik lahan (yang menggarap pada orang lain) dan bukan sebagai penggarap.

Keempat, melihat struktur agraris di desa-desa penelitian, kebanyakan orang muda di desa tidak punya prospek yang realistis untuk “bertani” (dalam arti: mengakses usaha tani untuk mereka kelola sendiri). Mereka yang orang tuanya punya tanah, mungkin harus menunggu berpuluh-puluh tahun sebelum menerima tanah warisan; sedangkan mereka yang orang tuanya tidak bertani hanya berkesempatan menjadi petani pamaro atau buruh tani, kecuali mereka bisa mencari uang di luar sektor

pertanian dan menabung, untuk nantinya membeli atau menyewa sebidang tanah. Kondisi infrastruktur pertanian yang tidak memadai juga memiliki implikasi terhadap rendahnya produktivitas sawah, yang berdampak terhadap keengganan orang muda untuk terlibat dalam pertanian karena secara ekonomi tidak menjanjikan.

Rekomendasi

Rekomendasi yang dapat disampaikan melalui tulisan ini antara lain: *Pertama*, studi ini menemukan bahwa akses orang muda terhadap tanah merupakan faktor penting untuk meningkatkan peluang orang muda bekerja di bidang pertanian. Berdasarkan temuan tersebut maka terdapat beberapa usulan strategi yang dapat dilakukan untuk meningkatkan akses orang muda untuk mendapatkan tanah.

- a. Menciptakan suatu pasar (tempat pertemuan) antara orang-orang yang mau menyewakan tanahnya sehingga pemerintah dapat memberikan subsidi kepada orang muda yang memang memiliki niat untuk menyewa tanah untuk dapat menyewa lahan milik orang lain dengan harga yang relatif lebih terjangkau.
- b. Desa menggunakan tanah milik desa sebagai ‘bank tanah’ untuk dapat memberikan kesempatan kepada orang muda untuk dapat mengaksesnya dengan cara diberikan subsidi dalam bentuk pinjaman lunak. Dalam kaitan ini, desa bisa juga menambah luas tanah milik desa dengan cara membeli dari warga yang ingin menjual tanahnya.
- c. Menggunakan kembali tanah yang terbengkalai sebagai tanah yang dapat diakses oleh (calon) petani muda

Kedua, kita harus beralih kepada alam pemikiran bahwa baik laki-laki maupun perempuan dapat menjadi petani dalam arti memiliki usaha tani dan manajemen usaha taninya. Jangan hanya laki-laki saja yang menjadi sasaran utama sistem pendukung untuk petani kecil.

DAFTAR PUSTAKA

- BPS. 2013. *Laporan Bulanan Data Sosial Ekonomi, Edisi 40: September 2013*. Jakarta: Biro Pusat Statistik.
- Li, Tania M. 2014. *Land's End: Capitalist Relations on an Indigenous Frontier*. Durham: Duke University Press.
- Mulyandari, R. 2011. *Cyber Extension Sebagai Media Komunikasi dalam Pemberdayaan Petani Sayuran*. Disertasi. Bogor: Institut Pertanian Bogor.
- Tjandraningsih, I. dan B. White. 1998. *Child Workers in Indonesia*. Bandung: AKATIGA.
- Van der Ploeg, J.-D. 2013. *The Art of Peasant Farming: a Chayanovian Manifesto*. Halifax: Fernwood Press

White, B. 2012. Agriculture and The Generation Problem: Rural Youth, Employment and the Future of Farming. *IDS Bulletin*, 43 (6), pp. 9-19.

**Tabel 1. Karakteristik Desa
Berdasarkan Ketersediaan Lapangan Kerja Bukan-pertanian Padi**

Desa	Pertanian Non Padi	Bukan-pertanian dalam/Sekitar Desa	Bukan-pertanian Luar Desa/Luar kota	Bukan-pertanian Luar negeri
Cibalong Sari (Karawang)	Pertanian sayuran oleh sebagian kecil petani (L).	Buruh bangunan (L), dagang, jual beli rongsokan, industri menengah dan besar (L+P). Buruh cuci atau pembantu rumah tangga (P), buruh pabrik bata (L)	Industri menengah besar (P + L)	Buruh migran ke negara-negara Timur Tengah sebagai pembantu rumah tangga (P).
Dawungan (Karawang)	-	Pedagang (warung hingga grosir sembako), PNS (L+P), pengrajin bilik (P), industri garmen rumahan (P)	Buruh bangunan (L)	Buruh migran ke Timur Tengah, Taiwan, Malaysia, Hongkong, buruh migran terutama adalah perempuan sebagai pembantu rumah tangga
Karang (Indramayu)	Budidaya jamur merang, sarang walet, ternak domba (L)	Perdagangan (L+P), konstruksi (L), toko sembako (L+P), pekerja bangunan (L), berjualan makanan kecil (P), jasa pemotongan kayu (L),	Industri (L +P)	Buruh migran (P), ke Arab, HK, Taiwan, Singapura, sebagai pembantu rumah tangga. Buruh migran laki-laki umumnya menjadi buruh pabrik.
Wanakerta (Indramayu)	Pertanian palawija, sayuran, bawang (L+P)	Pedagang, industri kecil (L+P)	Industri tekstil (P)	Buruh migran perempuan menjadi PRT, pengurus bayi/jompo, sedangkan buruh migran laki-laki di pabrik. Tujuan utama Hongkong
Sidosari (Kebumen)	Peternakan sapi, pertanian kacang hijau. (L)	Kerajinan anyaman bambu (caping dan tenong) (L+P), pembuatan genting (L+P), pembuatan bata merah (L+P), perdagangan (L+P),	PNS (L+P), pedagang (L), pegawai swasta (L+P), buruh industri pengolahan, buruh bangunan (L)	Baik laki-laki maupun perempuan, ada yang menjadi buruh migran dengan tujuan Malaysia, Hongkong dan Singapura.
Mulyoharjo (Kebumen)	Pertanian sayuran: kangkung, kacang kedelai, kacang hijau, Perdagangan kelapa, mencari kroto, ternak ayam lokal	Buruh pembuat lanting (perempuan), penyewaan pohon kelapa, membuat gula kelapa, membuat keripik pisang, membuat kurungan ayam (L)	Buruh bangunan (L) penjaga toko (P), pedagang pakaian informal di Bandung dan Jakarta	-
Wetanan (Cilacap)	Ternak itik, kambing, sapi	Sebagai petugas keamanan dalam penggalian pasir besi, pembuat batu bata, pemandu surfing, pengelola karaoke (L)	PNS atau guru (P)	Buruh migran untuk ke Hongkong, Taiwan dan Korea sebagai buruh industri.
Sarimulyo (Cilacap)	Ternak Itik (L)	Tambang pasir, perikanan, buruh bangunan perusahaan kayu, maupun	Perdagangan (L+P), buruh industri kayu (L), perkebunan sawit, tambang batu bara	Buruh migran ke Hongkong atau Malaysia

		batu bata. (L)	(di Kalimantan), buruh bangunan di Jakarta/Bandung (L), pembantu rumah tangga (P)	
Cempaka (Bone)	Ternak sapi, pertanian palawija, tebu, jati putih, tanaman coklat (L)	-	Buruh perkebunan sawit di Kalimantan	Tidak ada data
Gadingan (Bone)	Ternak sapi, pisang, bambu dan kelapa (L+P)	Jasa pengolahan lahan dengan hand traktor (L)	Buruh perkebunan sawit di Kalimantan	Buruh migran ke Malaysia
Parangputih (Wajo)	Perkebunan coklat, pisang, jeruk, jambu mete, perikanan danau tempe, (L)	Tenun (P), sopir angkot, konstruksi, dagang (L)	Penjual sarung (Polman dan Kolaka). Berdagang buah (Samarinda) dan mencari emas (Bombana)	Tidak ada data
Walian (Wajo)	Pertanian Sayuran: tanam kangkung, pisang, ternak unggas (L)	Nelayan/cari ikan di danau Lapong Pakka (L)	Penjaga toko di Makasar (P)	Tidak ada data

Sumber: Data Primer

SISTEM PERTANIAN PADI SKALA KECIL INDONESIA DALAM PERSPEKTIF EFISIENSI SOSIAL

INDONESIAN SMALL SCALE RICE FARMING SYSTEM IN THE PERSPECTIVE OF SOCIAL EFFICIENCY

**Herlina Wati¹
Charina Chazali²**

Yayasan AKATIGA
Jalan Tubagus Ismail II No. 2, Bandung 40134
E-mail: herlin_na86@yahoo.com & charinachazali@gmail.com

Abstrak

Laporan ini merangkum beberapa temuan dari penelitian yang dilakukan AKATIGA tentang swasembada pangan yang berkaitan dengan perubahan dalam sistem pertanian padi skala kecil di 12 desa penghasil beras. Pertanian skala kecil dalam penelitian ini diteliti dalam kaitannya dengan kerangka efisiensi sosial, yang fokus pada pemerataan sumber daya dan menilai kebijakan dan hasilnya dalam kaitan dengan kontribusi terhadap tujuan-tujuan pembangunan masyarakat. Penelitian ini menemukan bahwa banyak asumsi umum yang dibuat oleh penelitian dan kebijakan masyarakat pertanian saat ini di Indonesia perlu diteliti. Ini termasuk hubungan antara ukuran lahan dan produktivitas, ketimpangan struktur agraria yang ada, dan dampak teknologi pertanian di lapangan kerja dan distribusi pendapatan. Salah satu penyebab keprihatinan adalah tingginya konsentrasi kepemilikan dan penguasaan tanah di desa-desa penghasil beras. Kepemilikan tanah skala besar tidak menghasilkan pertanian skala besar tetapi peningkatan jumlah saham-penyewa dan sewa-penyewa. Bahkan pertanian sangat kecil dapat menghasilkan hasil yang tinggi, dan ada beberapa indikasi bahwa dalam sektor 'rakyat', imbal hasil pertanian yang lebih kecil lebih tinggi dari pada pertanian yang lebih besar. Status kepemilikan tanah tidak muncul secara signifikan mempengaruhi hasil secara signifikan. Kendala yang paling umum untuk produktivitas adalah gangguan hama (di semua desa, tetapi kebanyakan dari semua di desa-desa yang telah ditinggalkan penanaman disinkronkan), dan di beberapa desa banjir kronis. Petani sangat tergantung pada input eksternal dan umumnya pada aktor lokal yang kuat untuk mendapatkan mereka, sering dalam hubungan hutang. Berbagai teknologi baru dan praktis (mesin Atabela, penanaman langsung, dan menggabungkan pemanen) tidak meningkatkan produktivitas per hektar tetapi mengurangi peluang kerja di tanam dan panen, yang tetap sumber pendapatan penting bagi yang tidak memiliki tanah dan dekat-tak bertanah, terutama perempuan.

Kata kunci: pertanian skala kecil, efisiensi sosial, reproduksi sosial, pertanian padi, pekerjaan Pedesaan, Indonesia

Abstract

This report summarises some of the findings of AKATIGA's study on food self-sufficiency relating to changes in small-scale rice farming systems in 12 rice-producing villages. Small-scale farming in this study is examined in relation to the social efficiency framework, which focuses on the equitable distribution of resources and assesses policies and their outcomes in relation to their contribution to society's developmental goals. This study found that many common assumptions made by today's agricultural research and policy community in Indonesia need to be scrutinized. These include the relationship between farm size and productivity, the inequality of the existing agrarian structure, and the impact of agricultural technology on employment and income distribution. One cause for concern is the high degree of concentration of ownership and control of land in rice-producing villages. Large-scale land ownership does not generate large-scale farms but an increase in the number of share-tenants and lease-tenants. Even very small farms can produce high yields, and there is some indication that within the 'smallholder' sector, yields on smaller farms are higher than on larger farms. Land tenure status does not appear to significantly affect yields. The most common constraint to productivity is pest damage (in all villages, but most of all in those villages that have abandoned synchronised planting), and in some villages chronic flooding. Farmers are highly dependent on external inputs and generally on powerful local actors to obtain them, often in debt relationships. Various new technologies and practices (Atabela transplanting machines, direct planting, and combine harvesters) do not increase

¹ Peneliti di AKATIGA, Pusat Analisis Sosial.

² Peneliti di AKATIGA, Pusat Analisis Sosial.

per hectare productivity but reduce labour opportunities in transplanting and harvesting, which remain important sources of income for the landless and near-landless, particularly women.

Keywords: *Small-scale agriculture, Social efficiency, Social reproduction, Rice farming, Rural employment, Indonesia*

PENDAHULUAN

Seperti yang telah dijelaskan di bagian awal³, beras merupakan komoditi yang penting bagi penyediaan pangan di Indonesia. Oleh karena itu, penelitian Kemandirian Pangan AKATIGA menunjukkan kenyataan di lapangan bahwa beberapa asumsi yang dipakai pemangku kebijakan dan publik terkait pertanian skala kecil perlu dicermati, misalnya kecenderungan untuk mengubah pertanian ke arah pertanian korporat (skala besar). Tulisan ini menunjukkan bahwa pertanian skala kecil (beras) masih unggul dibandingkan pertanian skala besar, baik dari produktivitas dan masih menjadi unggulan dalam mengatasi persoalan kemiskinan lokal.

Studi ini menerapkan kerangka efisiensi sosial dalam membahas hasil penelitian AKATIGA di dua belas desa terpilih di tiga propinsi penghasil beras (Jawa Barat, Jawa Tengah, Sulawesi Selatan) di tahun 2013. Untuk penelitian ini, penulis menggunakan konsep efisiensi sosial. Efisiensi sosial dipilih sebagai kerangka berfikir dan alat analitis untuk menilai perubahan-perubahan yang terjadi karena mengarahkan kebijakan menuju kondisi dimana distribusi dan penggunaan sumber daya di dalam suatu masyarakat mencapai titik yang optimal. Konsep 'efisiensi' di sini bukanlah merujuk pada produktivitas tenaga kerja atau keuntungan usaha, tetapi pada sumbangan sumber daya yang ada terhadap pencapaian tujuan pembangunan untuk masyarakat. Dari hal tersebut, mengingat bahwa pertanian padi skala kecil berperan ganda (a.l. sebagai penyedia utama pangan dan sekaligus sumber penghasilan dan peluang kerja bagi orang banyak), kita perlu mengembangkan sistem pertanian yang paling baik dalam menggunakan sumber daya seperti tenaga kerja dan seberapa banyak pendapatan yang masuk untuk orang miskin. Hal-hal ini sangat relevan sebagai tujuan analisis kebijakan.⁴

Kriteria yang tepat untuk menilai efisiensi sosial (dan bobot relatif yang kita berikan kepada masing-masing kriteria) dapat disesuaikan dengan kondisi, masalah, dan kebutuhan masyarakat, serta periode tertentu dalam pembangunan. Sebagai contoh, jika kita melihat kondisi Indonesia saat ini (ketika beras dan makanan lainnya kini diimpor dalam jumlah besar, harga pangan tidak stabil dan tidak dapat diprediksi, terjadi ketimpangan distribusi

pendapatan, pengangguran dan pekerjaan dengan imbalan yang tidak layak, serta masalah lingkungan menjadi serius), kita bisa mengatakan bahwa jenis dan bentuk sistem pertanian yang dinilai paling efisien dari segi sosial dan ekonomi akan memenuhi persyaratan sebagai berikut: (1) mendukung peningkatan produksi, (2) memaksimalkan penyerapan tenaga kerja dan penyediaan mata pencaharian, (3) mendukung distribusi pendapatan yang lebih baik, dan (4) mendukung keberlanjutan lingkungan.⁵ Sektor pertanian sebenarnya bisa menghidupi banyak orang dengan menyerap tenaga kerja dan membagi keuntungan yang lebih baik kepada lebih banyak orang.

Salah satu perdebatan yang telah berlangsung lama dalam studi pertanian dan studi agraria adalah menyangkut hubungan antara ukuran lahan dan hasil panen.⁶ Hubungan terbalik (*inverse relationship*) yang sering dijumpai antara luas lahan usaha tani dan hasil per hektar menunjukkan bahwa semakin besar luas usaha tani, hasil per hektar semakin kecil. Isu ini penting untuk diangkat karena terdapat anggapan umum yang mengatakan bahwa semakin besar luas usaha tani, maka hasilnya juga akan semakin besar. Anggapan umum ini (yang sering menjadi asumsi kaum teknokrat) jelas mengandung implikasi terhadap kebijakan pembangunan pedesaan. Akan tetapi, belum terdapat konsensus tentang apa yang menyebabkan hubungan terbalik antara luas usaha tani dan hasil panen.⁷

Selain itu, terdapat perdebatan antara pengaruh teknologi terhadap peluang kerja dan penyebaran penghasilan. Misalnya adalah Sen (1999)⁸ yang berpendapat bahwa pilihan teknologi dalam pertanian sangat penting untuk alokasi sumber daya dan tenaga kerja karena dibanyak negara-negara berkembang, yang sebagian besar penduduknya bekerja di sektor pertanian. Penggunaan teknologi tepat guna, diperlukan untuk negara yang memiliki kelebihan tenaga kerja (tenaga kerja yang berlimpah) dibandingkan faktor produksi lainnya.

Keadaan tersebut mengindikasikan bahwa pertanian skala kecil lebih padat karya daripada pertanian skala besar, sehingga fungsi dari pertanian skala kecil tidak hanya fokus pada penyediaan pangan akan tetapi juga merupakan penyedia lapangan kerja. Lebih lanjut lagi, mekanisasi pertanian yang tidak tepat guna dapat menciptakan

³ Lihat tulisan pengantar dari Ben White yang berjudul Meneliti Masalah Petani dan Pangan pada Tingkat Lokal: Pengantar Studi Kemandirian Pangan AKATIGA.

⁴ Berry, 2011 : 641

⁵ White, 2013

⁶ Unal, 2008.

⁷ ibid, p.2

⁸ ibid, p.3

ketimpangan kelas di pedesaan dan berkurangnya pilihan pekerjaan yang bisa mendukung penghidupan orang miskin. Kondisi ini serupa dengan kondisi di Indonesia.

Terdapat anggapan umum yang masih dipegang oleh banyak orang kota dan pejabat pemerintahan, bahwa masyarakat desa kebanyakan terdiri dari rumah tangga tani relatif homogen dan rata-rata memiliki sebidang tanah. Hal ini merupakan salah satu mitos yang menghambat pembangunan di bidang pertanian padi. Artikel 'Tanah untuk Penggarap? Penguasaan Tanah Pertanian dan Struktur Agraris di Beberapa Desa Penghasil Padi' berdasarkan penelitian di dua belas desa yang sama, Harahap dan Ambarwati menunjukkan bahwa pada umumnya, struktur kepemilikan dan penguasaan sawah pada dua belas desa penelitian cenderung tidak merata dan di beberapa desa mendekati polarisasi. Sepuluh desa dari dua belas desa penelitian, jumlah Rumah Tangga Petani (RTP) yang tidak memiliki tanah garapannya justru melebihi jumlah petani pemilik.⁹

Berdasarkan gambaran di atas, pertanyaan penelitian yang penulis ajukan dalam tulisan ini adalah:

1. Bagaimana hubungan antara luas usaha tani dan hasil panen di dua belas desa penelitian?
2. Bagaimana praktik bertani dan teknologi yang ada saat ini dapat mempengaruhi penyerapan tenaga kerja pertanian dan distribusi pendapatan?
3. Bagaimana pola pengupahan buruh tani dan seberapa pentingnya upah buruh tani bagi golongan tak bertanah dan petani kecil?

METODE PENELITIAN

Penelitian studi ini mencakup dua belas desa yang tersebar di enam kabupaten dan tiga provinsi di Indonesia. Pemilihan lokasi didasarkan pada karakteristik khusus dari setiap lokasi sebagai lumbung padi nasional maupun lokal di daerahnya masing-masing. Penelitian ini menggunakan beberapa teknik pengambilan data seperti survey 30 rumah tangga pertanian di setiap desa penelitian, FGD, dan wawancara mendalam pada informan kunci di desa penelitian.¹⁰

HASIL DAN PEMBAHASAN

Tulisan ini terdiri dari lima bagian, pertama pendahuluan yang akan mengantarkan pembaca pada konsep efisiensi sosial dan juga fokus dari tulisan ini. Bagian kedua membahas temuan dari dua belas desa

penelitian terkait dengan produktivitas dan hubungannya dengan luas usaha tani, ditambah dengan hal-hal yang menjadi faktor penurunan hasil panen. Bagian ketiga adalah pembahasan mengenai teknologi dan praktik bertani yang mengancam efisiensi sosial seperti penyerapan tenaga kerja dan distribusi pendapatan yang lebih merata. Bagian keempat adalah gambaran dari serapan tenaga pertanian padi skala kecil kerja dalam setiap tahapan. Bagian terakhir mencoba merangkum seluruh argumen dari tulisan ini.

Luas Usaha Tani, Hasil Panen dan Produktivitas

Sistem pertanian padi berdasarkan usaha tani skala-kecil mampu meraih tingkat produksi/ha yang jauh lebih tinggi dari pertanian padi industrial skala-besar (*rice estate*).¹¹ Menurut pengakuan petani di dua belas desa penelitian, sawah irigasi memiliki produktivitas terendah 5 ton/ha dan tertinggi mencapai 9,8 ton/ha. Produktivitas pada sawah irigasi biasanya berkisar antara 5-9 ton/ha pada musim kemarau dan 5,7- 9,8 ton/ha pada musim penghujan. Sementara untuk sawah bukan-irigasi berkisar antara 3-6 ton/ha.

Akan tetapi, melihat hambatan-hambatan yang masih dihadapi oleh petani kecil, tingkat produksi usaha tani skala kecil secara potensial sebenarnya bisa jauh lebih tinggi lagi. Usaha tani padi yang sempit pun (sampai di bawah 0.25 ha) bisa mencapai produktivitas (per ha) yang tidak kalah dengan usaha tani padi yang lebih luas, bahkan terdapat indikasi lebih tinggi.

Survey dengan sampel 30 petani di masing-masing desa memperlihatkan bahwa hasil panen musim hujan 2012-2013 dan musim kemarau 2013, umumnya berada di bawah hasil biasa (lihat Lampiran Grafik 3.1 dan Grafik 3.2). Di beberapa desa, hasil per hektar pada musim kemarau 2013 dan musim penghujan 2012-2013 jatuh di bawah 5,0 ton (gabah kering panen). Bahkan ada hasil panen di beberapa desa yang jauh di bawah 5,0 ton, misalnya Cisari, Dawungan, Gadingan, dan Sidosari (irigasi) dan Cempaka (sawah bukan-irigasi). Menurut pengakuan petani di desa penelitian, sebagian besar penurunan hasil panen dan gagal panen disebabkan oleh serangan hama.

1. Hubungan antara Luas Usaha Tani dan Produktivitas

Hasil pengolahan data produktivitas menurut luas usaha tani di dua belas desa (Grafik 3.1, 3.2 dan 3.3)¹² menunjukkan bahwa pada umumnya

⁹ Ambarwati dan Harahap, 2015.

¹⁰ Lihat tulisan pengantar dari Ben White yang berjudul Meneliti Masalah Petani dan Pangan pada Tingkat Lokal: Pengantar Studi Kemandirian Pangan AKATIGA.

¹¹ Di Ketapang hasil baru mencapai 2 ton/ha, sumber informasi diperoleh dari <http://www.investor.co.id/agribusiness/dahlan-iskan-food-estate-ketapang-belum-maksimal/71535>.

¹² Kecilnya sampel petani di masing-masing desa penelitian tidak memungkinkan analisis lebih rinci (misalnya dengan 4 atau 5 kategori luas usaha tani) karena banyak sel yang isinya terlalu kecil. Maka

luasan tanah di bawah 0,5 ha memiliki produktivitas yang lebih tinggi dibandingkan dengan luasan tanah di atas 0,5 ha, kecuali di Cisari, Sarimulyo dan Walian¹³.

Hasil pengolahan data keseluruhan dua belas desa penelitian yang dibagi ke dalam empat kategori luas lahan yang diusahakan, yaitu > 2 ha, 1-2 ha, 0,25-0,99 ha, dan < 0,25 ha menunjukkan hasil yang bervariasi.¹⁴ Luas tanah di bawah 0,25 ha menunjukkan produktivitas yang relatif lebih tinggi jika dibandingkan dengan tanah yang lebih luas.

Hal ini menunjukkan bahwa luas tanah yang sempit, bahkan di bawah 0,25 ha produktivitasnya tidak kalah dengan luas tanah yang lebih luas. Untuk semua golongan tanah di bawah 2 ha, luas usaha tani dan produktivitas/ha berbanding balik, sedangkan hanya luas usaha tani 2 ha ke atas yang bisa mendekati tingkat produktivitas usaha tani sempit. Hasil pengolahan data menggunakan sampel yang lebih besar (data IFLS) pun menunjukkan pola yang sama¹⁵.

Menerangkan hubungan perbandingan antara luas usaha tani dan produktivitas adalah hal yang cukup rumit dan masih diperdebatkan. Di dua belas desa penelitian ini, hal ini disebabkan antara lain semakin kecil luasan tanah maka semakin mudah untuk mengurus dan mengontrolnya. Selain itu, pekerjaan pada setiap tahapan banyak dilakukan oleh petani sendiri dan petani lebih fokus untuk mengurus sawahnya sendiri.

Pengolahan data produktivitas menurut status penguasaan tanah, menunjukkan hasil yang bervariasi.¹⁶ Data ini mendukung kesimpulan bahwa status penguasaan tidak banyak berpengaruh terhadap produktivitas; tidak ada indikasi bahwa status petani penggarap bagi-hasil (pemaro) memiliki dampak negatif terhadap produktivitas. Nampaknya intensitas petani dalam mengelola tanah, tidak bergantung pada hak kepemilikan tanah.¹⁷

2. Hambatan yang Dihadapi Petani untuk Meningkatkan Hasil Produksi

Seperti yang sudah disebutkan di atas, petani menghadapi banyak hambatan dalam mengelola sawah untuk mencapai produktivitas normal atau bahkan meningkatkan produktivitas lebih tinggi dari hasil normal. Produktivitas rata-rata dua belas desa penelitian, cenderung tinggi pada desa yang memiliki pengorganisasian sistem produksi pertanian padi yang baik (seperti pola tanam

untuk keperluan ini, petani sampel dibagi ke dalam dua kategori besar saja, yaitu yang di bawah dan yang di atas 0,5 ha.

¹³ Di 9 dari 12 desa penelitian, produktivitas sawah dengan luas < 0,5 ha memiliki produktivitas yang lebih tinggi dibandingkan > 0,5 ha

¹⁴ Lihat Grafik 3.3

¹⁵ Lihat Grafik 3.3 A

¹⁶ Lihat Grafik 3.4, 3.5 dan 3.6

¹⁷ Peluso dan Ribot, 2003: 153-4

serempak, ketersediaan air yang memadai, dll). Sedangkan faktor lainnya adalah kepedulian dan intensitas petani dalam mengelola tanah. Akan tetapi, penelitian ini juga menemukan hambatan-hambatan yang mengurangi produktivitas misalnya ditemukan penurunan sistem tanam serempak di sebagian besar desa penelitian, kualitas dan kuantitas pengairan, serta serangan hama dan penyakit tanaman.

Masalah pengairan yang dihadapi oleh petani-petani di desa penelitian antara lain adalah infrastruktur pengairan dan kualitas air yang tidak memadai. Hal ini paling dirasakan oleh petani sawah tadah hujan karena sangat bergantung kepada hujan yang saat ini semakin tidak dapat diprediksi, sehingga petani hanya mampu panen satu kali dalam satu tahun. Sebagian petani tadah hujan yang memiliki uang lebih, mengupayakan untuk mengairi sawahnya dengan cara menggunakan pompa air yang dimiliki secara individu atau menyewa pompa sehingga menambah biaya produksi. Air yang mereka ambil berasal dari sungai dan danau terdekat, sampai menyedot air dari irigasi.¹⁸

Masalah lain terkait pengairan adalah pengaturan pintu air irigasi yang berdampak pada proses penanaman. Pada wilayah yang kondisinya diatur dengan ketat, terdapat kesepakatan lisan antarpengatur air di masing-masing desa melalui pembagian jadwal bergilir. Meskipun begitu, masih sering terdapat pemilik lahan dari desa lain yang mencuri air dengan cara membuat saluran baru untuk membelokkan aliran air atau dengan memasukan pipa ke dalam tanah untuk menyedot air ke lahan mereka.

Selama periode 2012-2013, terdapat tiga desa penelitian yang mengalami penurunan hasil panen atau gagal panen karena banjir. Permasalahan banjir disebabkan tidak tersedianya jalur pembuangan air yang mampu mengatur pasokan air dalam waktu yang singkat dan dalam jumlah yang besar. Kondisi itu sering membuat petani merugi karena terlambat menanam sehingga terserang hama di musim selanjutnya.

Di desa penelitian di Sulawesi Selatan, gagal panen sangat berdampak pada tanggungan resiko petani penggarap karena seluruh biaya produksi yang telah keluar ditanggung oleh penggarap. Pemilik tanah tidak mau menanggung sebagian biaya produksi jika tidak ada hasil yang dibagi pula. Hal tersebut merupakan resiko sebagai penggarap sebagai pihak yang tidak memiliki tanah.

Penelitian ini juga menunjukkan bahwa praktik bertani di lokasi penelitian masih jauh dari praktik yang terpadu dan ini menyebabkan serangan hama menjadi hambatan utama pertanian padi.

¹⁸ Petani di beberapa desa penelitian mengaku menyedot air dari irigasi meskipun dilarang oleh Dinas Pertanian. Terkadang kepolisian setempat melakukan razia pompa, jika ada yang tertangkap menyedot air dari irigasi, maka pompanya akan ditahan sementara, namun tetap akan dikembalikan setelah mendapatkan teguran.

Serangan hama selain merupakan faktor yang paling banyak menurunkan hasil panen dan meningkatkan biaya produksi, juga berpengaruh terhadap keberlanjutan tanah karena cara penanggulangan yang dilakukan petani dengan menggunakan pestisida kimia cukup besar, sehingga dapat mengancam keberlangsungan tanah.¹⁹

Untuk mengatasi hama, petani-petani sangat tergantung pada pengetahuan yang diberikan oleh penjual Sarana Produksi Padi (Saprodi) atau Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL) yang seringkali didampingi oleh agen yang melakukan promosi pemberantas hama kimia. Sistem penyuluhan mempengaruhi perilaku petani. Misalnya, ketika melakukan penyuluhan, PPL di salah satu desa penelitian, yang seharusnya aktif mendukung praktik pertanian berkelanjutan, sering kali menyempatkan sesi promosi merek pemberantas hama tertentu sehingga petani tertarik untuk mencobanya.

Petani di desa-desa di Jawa Tengah masih ada yang melakukan pola tanam serempak, atau mengurangi pestisida kimia dan beralih untuk *mengoplos*, misalnya menggunakan lotion anti nyamuk, pemutih pakaian, minyak oli, sampai menggunakan tegangan listrik untuk membasmi hama tikus maupun hama lainnya, yang justru dapat membunuh binatang lain yang menjadi musuh alami hama. Untuk melawan hama tikus atau babi, masih terdapat praktik berburu hama bersama di dua belas desa penelitian, meskipun tidak dilakukan secara rutin dan diorganisir dengan baik.

Penelitian ini menemukan penurunan praktik tanam serempak di delapan di antara dua belas desa penelitian. Hanya di Wanakerta, Wetanan, Sidosari, dan Mulyoharjo petani masih menggunakan sistem tanam serempak, dan mengikuti pengorganisasian irigasi yang baik sehingga petani harus mengikuti waktu tanam yang serempak dalam satu hamparan. Kualitas dan kuantitas air yang baik dan merata di setiap hamparan juga mendukung tanam serempak di desa-desa tersebut. Sedangkan desa-desa penelitian Sulawesi Selatan memiliki kebiasaan Tudang Sipulung (duduk bersama) yang merupakan musyawarah antarpetani dengan Dinas Pertanian untuk saling bertukar pikiran terkait jadwal tanam atau bibit yang akan ditanam, dan lainnya. Menanam serentak masih bisa berjalan hanya di sebagian kecil sawah irigasi Gadingan, Parangputih, dan Walian karena adanya jadwal pembukaan pintu air.

Memperbaiki kondisi dan hal-hal yang mendukung tanam serempak sangatlah penting untuk mendukung produktivitas pertanian padi skala kecil yang lebih tinggi. Sebagai contoh, dari empat desa

yang masih menggunakan sistem tanam serempak di atas dengan pengorganisasian irigasi yang baik, tiga desa memiliki produktivitas lebih tinggi diantara desa penelitian lainnya. Desa-desa yang masih menerapkan tanam serempak, memiliki produktivitas antara 5-6 ton/ha sedangkan desa-desa yang tidak memiliki tanam serempak memiliki produktivitas antara 2-5 ton/ha (lihat Grafik 3.1 dan 3.2). Sedangkan Sidosari mengalami serangan tikus luar biasa sehingga mengalami penurunan panen dari hasil normal.²⁰

Teknologi dan Praktik Bertani

Berbagai inovasi teknologi dan teknik bertanam padi yang mulai berkembang akhir-akhir ini, tidak berfungsi meningkatkan hasil (malah di antaranya ada yang menurunkan hasil), dan juga melemahkan efisiensi sosial sektor pertanian padi dengan cara (a) mengurangi kesempatan kerja buruh tani, (b) mengalihkan sebagian nilai tambah dari golongan buruh tani yg berjumlah banyak ke kelompok petani tanah luas yang jumlahnya sedikit dibandingkan dengan buruh tani (hambur langsung, alat tanam benih langsung (Atabela), penggunaan herbisida, *combine harvester*).

1. Teknologi dan Teknik dalam Produksi Padi

Di desa penelitian menemukan berbagai perubahan penggunaan teknologi dan inovasi dalam tahapan bertani yang memiliki dampak terhadap efisiensi sosial, misalnya teknologi yang tidak tepat guna yang digunakan untuk menghemat waktu dan biaya, namun mengurangi serapan tenaga kerja di pertanian. Kasus perubahan teknologi dan inovasi pada tahun-tahun terakhir lebih banyak ditemukan di desa-desa penelitian di Sulawesi Selatan. Di bawah akan menjelaskan latar belakang kemunculan teknologi dan inovasi tersebut dan pengaruhnya terhadap efisiensi sosial.

Pada tahapan penanaman, seluruh desa penelitian kecuali yang ada di Sulawesi Selatan, masih menggunakan sistem tanam pindah yang menyerap tenaga kerja baik laki-laki dan perempuan yang mayoritas berumur di atas 30 tahun. Sedangkan, desa penelitian di Sulawesi Selatan menggunakan 3 sistem tanam, yaitu tanam pindah, hambur langsung, dan Atabela. Praktik tanam pindah hanya ditemukan di sebagian sawah irigasi dan pompanisasi yang ada di Gadingan (Bone) dan Parangputih (Wajo), meskipun tetap terdapat petani yang menggunakan praktik hambur langsung di tanah irigasinya.

Hambur langsung dilakukan pertama kali oleh petani-petani Bone sejak 6 tahun yang lalu. Hambur langsung merupakan proses penanaman benih yang langsung disebar tanpa disemai dan tidak menggunakan jarak tanam, sehingga tidak beraturan. Hambur langsung menjadi salah satu ancaman bagi

¹⁹ Lihat Press Release IPB (2014) dan artikel James Fox (2014). Kedua tulisan tersebut menunjukkan keseriusan ancaman serangan hama wereng di Jawa dan kurangnya pengetahuan petani mengenai penggunaan pestisida yang justru memperparah serangan wereng.

²⁰ Lihat Tabel 3, Tabel 4, Tabel 5, dan Tabel 6 di lampiran untuk melihat biaya penggunaan pestisida.

Tabel 1. Perbandingan Biaya, Tenaga Kerja, dan Waktu Kerja Pada Tahapan Penanaman di Dua Belas Desa Penelitian (Per Ha)

Praktik Penanaman	Biaya	Tenaga Kerja	Waktu Kerja
Tanam pindah	Rp. 500.000 - 1.000.000 (rata-rata per hektar untuk pengeluaran biaya upah buruh harian atau borongan)	8-30 buruh laki-laki dan perempuan per hektar	1-3 hari per hektar (jika tanah semakin luas, maka pemilik sawah akan menambah pekerja)
Hambur langsung	Rp. 0 (dapat dilakukan sendiri)	1 orang (biasanya laki-laki)	2-3 jam/ha
Atabela	Rp. 150.000 - 200.000 (biaya sewa)	1 - 3 buruh laki-laki	1 hari

Sumber: Olahan wawancara mendalam dan survey rumah tangga, 2013

Dinas Pertanian Sulawesi Selatan. Isu utama dari hambur langsung adalah petani tidak menggunakan jarak tanam yang ideal sehingga sinar matahari sulit masuk dan menurunkan produktivitas. Selain itu, karena kerapatan padi, petani sulit untuk memantau hama dan memutuskan menggunakan pestisida dan herbisida lebih banyak. Alasan munculnya hambur langsung adalah (1) mayoritas sawah tadah hujan memiliki produktivitas yang rendah, sehingga agar tidak terlalu rugi, petani mengurangi biaya produksi dan menghemat tenaga serta waktu (lihat Tabel 1. Perbandingan Biaya, Tenaga Kerja, dan Waktu Kerja pada Tahapan Penanaman di Dua Belas Desa Penelitian). Selain itu, (2) adanya pekerjaan bukan-pertanian padi yang menyerap waktu dan tenaga seperti peternak sapi, penebas tebu, pengolah tebu, supir, dan lainnya, membuat petani memilih menghambur benihnya saja. (3) Penguasaan mayoritas sawah di desa penelitian di Sulawesi Selatan lebih luas daripada di Jawa sehingga semakin luas sawah yang dikuasai, maka biaya tanamnya lebih tinggi.

Sudah satu tahun ini, Dinas Pertanian Wajo memperkenalkan Atabela (Alat Tanam Benih Langsung) untuk mengurangi hambur langsung. Pengenalan Atabela bertujuan agar petani bisa menghemat biaya penanaman namun tetap menggunakan jarak tanam. Dengan Atabela, petani memang bisa mengurangi biaya penanaman, namun menggantikan kesempatan kerja bagi buruh.

Dari Tabel 1 di atas dapat dilihat bahwa biaya tanam tertinggi adalah menggunakan tanam pindah, yaitu Rp. 500.000-1.000.000/ha dan pemilik tanah luas memiliki strategi untuk menambah buruh tanam agar tidak memakan waktu lama. Sistem tanam pindah menyerap tenaga kerja yang tinggi, baik laki-laki maupun perempuan, yaitu 30-50 buruh per ha. Sedangkan biaya, serapan tenaga kerja, dan waktu yang paling sedikit dikeluarkan petani adalah dengan menggunakan hambur langsung. Hambur langsung dapat dilakukan sendiri (biasanya dilakukan oleh laki-laki tanpa ada uang sewa). Kemudian, dengan Atabela petani harus membayar sewa sekitar Rp. 150.000-200.000/Ha, dengan 1-3 buruh laki-laki. Oleh karena itu, dengan tanam pindah masih ada kesempatan besar bagi buruh (laki-

laki dan perempuan) untuk bekerja, sedangkan dengan hambur langsung dan Atabela, kesempatan bekerja untuk buruh menurun, terutama untuk buruh perempuan.

Selain itu, saat ini penggunaan herbisida makin menggantikan tenaga penyiangan di lokasi penelitian di Sulawesi Selatan. Namun di desa-desa penelitian di Jawa Tengah dan Jawa Barat, petani masih menggunakan tenaga buruh untuk menyiangi tanaman yang bisa menyerap 5-10 buruh/ha, baik laki-laki dan perempuan. Petani di desa-desa penelitian di Sulawesi Selatan mayoritas sudah menggunakan herbisida yang hanya dilakukan oleh satu orang saja, baik laki-laki dan perempuan.

2. *Combine Harvester*: Teknologi Tidak Tepat Guna

Penggunaan *combine harvester* pada tahapan panen menggantikan banyak kesempatan kerja bagi buruh panen dan mengakibatkan semakin terpusatnya arus akumulasi modal kepada petani yang memiliki mesin tersebut, sehingga mengancam pemerataan keuntungan.

Di seluruh desa penelitian di Jawa Barat dan Jawa Tengah, Cempaka dan Gadingan di Sulawesi Selatan petani masih menggunakan *power thresher* untuk merontokkan padi. *Power thresher* masih menyerap buruh panen yang banyak, yaitu 20-30 orang/Ha (laki-laki dan perempuan, baik tua dan muda) dan operator mesin 2-4 orang (laki-laki dan perempuan). Akan tetapi, penggunaan *power thresher* khususnya di Cisari sampai saat ini masih bersaing dengan merontokkan padi secara tradisional/*gebot* karena padi tidak cepat rusak, pecah-pecah, dan dapat disimpan lebih lama.

Saat ini di Parangputih dan Walian, *combine harvester* mulai masuk selama 2-3 tahun terakhir. Banyak *combine harvester* yang merupakan milik individu dengan cara kredit ke perusahaan penjual mesin dengan harga bervariasi dari Rp. 250.000.000 hingga Rp. 400.000.000 per mesin, meskipun di Sarimulyo, petani mendapatkan bantuan *combine harvester* dari Kementerian Pertanian. Sebagian besar pemilik *combine harvester* adalah petani kaya dan memiliki tanah luas.

Combine harvester banyak digunakan untuk sawah yang luasnya besar, tidak banyak pematang sawah, dan tidak tergenang. Dengan *combine harvester*, arus nilai lebih dari petani yang sebelumnya masuk ke buruh panen yang banyak (dalam bentuk upah panen dan merontokkan) beralih masuk ke pemilik *combine harvester* yang jumlahnya sedikit, yaitu tidak sampai 10 orang di setiap desa penelitian. Salah satu alasan orang membeli *combine harvester* adalah agar pemiliknya dapat memanen sawah lebih luas setiap musimnya, karena dengan *power thresher* masih terbatas.²¹ Alasan lainnya adalah karena upah buruh panen dalam setiap 2 tahun terakhir naik, yaitu tahun ini mencapai Rp. 40.000-50.000/hari (baik untuk laki-laki dan perempuan dewasa, sedangkan untuk anak-anak sekitar Rp. 30.000/hari). Alasan terakhir adalah petani lebih sedikit kehilangan padi dengan *combine harvester* dibandingkan dengan menggunakan *gebot* atau *power thresher*. Meskipun begitu, kualitas padi paling buruk dengan menggunakan *combine harvester*, karena lebih lembab dan padi tidak tahan lama. *Combine harvester* hanya membutuhkan maksimal 7 orang pekerja yang seluruhnya adalah laki-laki, dengan kemampuan panen 4 ha dalam 1 hari, sedangkan panen secara manual dengan buruh panen dan *power thresher* akan memperkerjakan 30-120 orang²² untuk luas yang sama.

Penggunaan *combine harvester* dinilai sebagai bentuk efisiensi yaitu panen bisa lebih cepat dan murah. Bantuan *combine harvester* diklaim pemerintah dalam mendukung peningkatan produktivitas. Akan tetapi, penelitian ini menunjukkan bahwa memberikan bantuan *combine harvester* tanpa melihat kriteria desa dan sistem pertanian yang ada di desa, maka akan menghambat efisiensi sosial. Hal ini dikarenakan penggunaan *combine harvester* justru mengurangi serapan tenaga kerja. Padahal, upah panen menjadi sumber penghasilan yang signifikan bagi orang tak bertanah, petani sempit, baik laki-laki dan perempuan sehingga distribusi keuntungan bisa lebih merata. Kemudian, penggunaan *combine harvester* akan mendukung terjadinya polarisasi keuntungan. Penelitian ini menunjukkan bahwa inovasi teknologi penting untuk sektor pertanian padi, namun jangan sampai justru memperkecil kesempatan kerja dan menggantikan buruh panen.

3. Petani Pintar, Eksperimen, dan Keberlanjutan

Salah satu karakteristik dari masyarakat petani kecil adalah kebiasaan petani untuk selalu bereksperimen dalam usaha meningkatkan hasilnya

²¹ *Combine harvester* mampu bekerja di tanah 4 ha/hari, sedangkan *power thresher* hanya mampu bekerja 1,5 ha/harinya.

²² Dengan perhitungan menggunakan 30 orang/ha. Jika panen dilakukan dalam waktu bersamaan, petani cenderung menambah buruh agar panen cepat selesai.

dengan mengatasi faktor-faktor penghambat.²³ Di beberapa lokasi penelitian ini menemukan petani-petani pintar yang berani bereksperimen dengan tujuan menghemat biaya produksi, mencegah atau membasmi hama, serta meningkatkan produktivitas. Petani pintar ini mendapatkan pengetahuan dari hasil percobaan sendiri maupun mendapatkan intervensi dari pihak lain seperti pemerintah, LSM, dan universitas. Namun sayangnya, praktik bertani ramah lingkungan yang berkelanjutan masih dilakukan secara individual dan belum menyebar secara kolektif. Pada tahun-tahun mendatang, sistem pertanian pangan di Indonesia (seperti pada negara-negara lain) mau tidak mau harus makin beralih ke pola yang lebih berkelanjutan dan ramah lingkungan. Perlu ada penelitian lebih lanjut dan rumusan solusi yang tepat terkait pertanian padi yang ramah lingkungan.

Salah satu contoh keberadaan petani pintar ada di Karang Layung dan Wanakerta, yang merupakan alumni Sekolah Lapang Pengendalian Hama Terpadu (SLPHT). Program ini berusaha menanam kebiasaan petani untuk mencatat ongkos produksi, serangan hama, hasil panen, dan lainnya. Dengan pencatatan ini, petani bisa lebih bereksperimen (*on farm research*) dan mengembangkan kemampuannya untuk menyilangkan padi dengan proses seleksi. Sedangkan di Wanakerta terdapat inovasi petani bersama secara institusional, yaitu koperasi mandiri. Koperasi mandiri di Wanakerta memberikan dampak yaitu sebagian warga mampu bekerja sama menghimpun modal tanpa bantuan pemerintah.

Petani-petani pintar ini akhirnya memiliki kemampuan lebih dalam mengelola sawah menggunakan inovasi dan teknologi yang ada. Mereka dapat meningkatkan jejaringnya dengan pihak luar yang mampu membantu kegiatan bertani dibandingkan kebanyakan petani di wilayahnya. Kelompok petani ini bisa mengakses bantuan-bantuan pertanian yang selalu masuk melalui mereka.

Meskipun begitu, praktik-praktik baik seperti di Karang Layung dan Wanakerta belum menyebar dengan luas. Petani pintar di Karang Layung dan Wanakerta relatif sedikit, misalnya dari 30 anggota Poktan, hanya 2 orang yang benar-benar menerapkan pengendalian hama terpadu. Mereka merupakan petani yang aktif dalam mengakses program pertanian yang ada di desa sampai tingkat kecamatan. Mereka juga merupakan petani yang meluangkan waktu lebih banyak untuk pertanian daripada petani lainnya.

Petani lain, baik di dua desa ini maupun desa lain (meskipun juga mendapatkan intervensi serupa), tidak mengikuti anjuran untuk mengurangi bahan kimia, karena menyiapkan pupuk alami menyita waktu dan tenaga terhadap sawahnya.

²³ Van der Ploeg, 2013: 96.

Petani-petani tersebut juga melakukan kegiatan lain untuk menambah penghasilan. Hal ini perlu menjadi catatan bagi para pengambil kebijakan, bahwa petani tidaklah melakukan pekerjaan tunggal bertani dan memiliki banyak waktu kosong, namun memiliki lebih dari satu pekerjaan, sehingga intervensi yang melibatkan petani perlu mempertimbangkan hal ini.

Selain berasal dari intervensi pihak luar seperti universitas dan LSM, ada pula petani pintar di desa lainnya yang mencoba praktik baru secara individual. Misalnya petani di Dawungan mencoba bibit baru yang lebih tahan hama, atau kepala desa dan ketua Gapoktan Gadingan yang mencoba menggunakan predator alami untuk mengurangi hama, menggunakan pupuk dari kotoran sapi dan daun kering, meskipun tidak rutin. Mereka mencoba praktik yang baru karena memiliki kedekatan dengan PPL dan Dinas Pertanian sehingga memiliki akses lebih banyak dalam mendapatkan informasi. Perlu diterapkan aktivitas yang membangkitkan petani untuk melakukan riset di tanah mereka sendiri dan bertukar-pengalaman antarpetani agar pengetahuan tidak hanya muncul dari arah pemerintah dan pihak lain.

4. *System of Rice Intensification (SRI)*²⁴ dan *Sistem Legowo*²⁵

Penerapan SRI dan Legowo bertujuan untuk meningkatkan sistem produksi padi yang lebih berkelanjutan. Penerapan SRI dan Legowo ditemukan di desa-desa penelitian, namun tidak menyebar secara luas. Dengan menerapkan SRI, ketua Gapoktan dan ketua Poktan di beberapa desa penelitian yang bersedia menyediakan tanahnya untuk praktik-praktik tersebut mendapatkan keuntungan dengan mendapatkan bantuan traktor tangan.

Belum menyebarnya praktik-praktik seperti SRI dan sistem legowo dikarenakan ketidakyakinan petani akan hasilnya karena resiko kegagalan teknik ini ditanggung oleh si petani. Hanya mereka yang tanahnya dijadikan percontohan yang bisa mendapatkan bantuan biaya produksi dalam menerapkan SRI dan sistem legowo (ketua Gapoktan, ketua Poktan, dan hanya petani yang aktif). Bahkan,

salah satu petani di Cempaka hanya berani merelakan setengah dari tanah percobaan untuk ditanami padi dengan teknik SRI karena takut jika harus menanggung kegagalan. Kegagalan yang dialami petani di Cisari, Dawungan, Sarimulyo, dan Gadingan (legowo), antara lain disebabkan aliran air yang tidak stabil, cuaca yang tidak menentu, serangan hama yang tinggi). Ketika penerapan SRI dan legowo belum terintegrasi di desa dan didukung dengan infrastruktur pertanian yang baik, maka pertanian skala kecil tetap jauh dari pertanian yang berkelanjutan.

Alasan lainnya tidak meluasnya SRI adalah ketidakmerataan informasi mengenai pentingnya teknik ini untuk kelanjutan lingkungan dan produktivitas sawah serta keahlian teknis. Hal tersebut berdampak pada penerapan hanya dilakukan segelintir petani aktif (misalnya ketua Gapoktan dan Poktan), dengan alasan utama bukan keyakinan akan tekniknya melainkan untuk mendapatkan bantuan dari pemerintah.

Institusi Pertanian

Penelitian ini menemukan bahwa organisasi yang seharusnya melayani petani kecil, banyak yang tidak berfungsi dan cenderung dimanfaatkan oleh segelintir orang untuk kepentingan mereka. Di beberapa desa penelitian ditemukan bahwa akses terhadap subsidi dan bantuan pertanian padi lebih banyak mengarah pada elit desa yang aktif dalam Poktan dan Gapoktan. Misalnya, di salah satu desa penelitian di Sulawesi Selatan, Pengembangan Usaha Agribisnis Pertanian (PUAP) yang bisa menjadi dana bergulir untuk petani kecil dalam memenuhi biaya produksi pertanian, telah menjadi sumber akumulasi bisnis bagi Ketua Gapoktan.

Contoh lainnya yang ditemukan di desa penelitian adalah distribusi dari pupuk bersubsidi yang diberikan oleh petani tidak mendapatkan kontrol dari Petugas Penyuluh Lapangan. Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK) merupakan acuan pembagian pupuk bersubsidi dan banyak di desa penelitian, RDKK di desa penelitian Jawa Tengah dan Jawa Barat tidak terlalu berpengaruh karena hanya dibicarakan antara PPL dan ketua Gapoktan, bahkan ada yang hanya mengganti tahun dari RDKK tersebut. Padahal, pupuk bersubsidi merupakan salah satu bantuan dari pemerintah yang diterima hampir seluruh petani.

Di beberapa desa penelitian ditemukan hubungan ketergantungan petani dengan sumber daya eksternal untuk melakukan reproduksi sosial, dan hubungan pertukarannya cenderung tidak menguntungkan bagi petani kecil. Sebagai contoh, sebagian petani sempit dan petani tidak bertani di desa penelitian di Jawa Tengah tergantung dengan tengkulak padi/tukang tempur untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari atau membeli input pertanian. Petani bisa membayar hutang untuk sewa tanah dan biaya pompa dengan uang dengan bunga 10-20%

²⁴ Prinsip dasar metode SRI adalah bertani secara ramah lingkungan, rendah asupan luar, menerapkan kearifan lokal, membatasi penggunaan bahan kimia baik pestisida maupun pupuk. Metode SRI merupakan paket budidaya padi yang komponen-komponen utamanya telah mempertimbangkan beberapa hal seperti penghematan input, karena jarak tanam yang lebih lebar dari jarak normal, bersih lingkungan karena tidak menggunakan pestisida kimia tetapi menggunakan pestisida nabati seperti pupuk kandang dan kompos (Makarim dan Ikhwan, 2013).

²⁵ Sistem tanam jajar legowo adalah pola bertani yang berselang-seling antara dua atau lebih (biasanya dua atau empat) baris tanaman padi dan satu baris kosong (Abdulrachman, dkk, 2013)

atau menjual gabah kepada tukang tempur dengan harga yang biasanya lebih murah daripada harga gabah di pasaran. Contoh lainnya ada di desa penelitian di Sulawesi Selatan, yaitu petani penggarap yang diharuskan membeli sarana produksi dan pestisida kepada orang-orang kaya penjual sarana produksi, dan lebih diutamakan berhutang sampai waktu panen. Hal ini dilakukan agar petani bisa terus menjual gabah kepadanya dan memberikan bunga terhadap sarana produksi yang dibeli petani kepadanya. Rantai hutang mengakibatkan menyempitnya ruang pilihan bagi petani untuk memilih menjual padinya kepada pihak yang lebih menguntungkan petani.

Selain itu, secara keseluruhan di desa penelitian, petani tidak memiliki wadah institusional atau pengorganisasian yang membantu petani dalam mengatasi masalah-masalahnya dan memperjuangkan hak-haknya. Sebagai contoh, di salah satu desa penelitian di Jawa Barat, sudah hampir 2 tahun ini petani menjual padinya kepada calo, yang biasanya adalah memegang posisi penting seperti kepala dusun, bisa mendapatkan uang dengan memberikan informasi daerah yang akan panen. Calo menggunakan kekuatan premanisme kepada petani yang terlihat menjual langsung kepada tengkulak, yaitu dengan membuat keributan seperti memarahi petani. Petani segan menjual langsung ke tengkulak karena seorang petani yang berani menjual langsung, kemudian kehilangan traktor tangannya dan terdapat rasa takut mereka akan mengalami hal yang sama.

Dari gambaran di atas dapat terlihat bahwa ketergantungan dalam bentuk hutang, rasa takut petani terhadap penguasa hulu hilir pertanian, sering kali merugikan petani kecil sehingga perlu adanya perubahan institusional yang mendukung kesejahteraan petani.

Penggunaan Tenaga Kerja, Perekrutan, dan Sistem Pengupahan

1. Penggunaan Tenaga Kerja

Pada umumnya di dua belas desa penelitian, jika ketersediaan tenaga kerja lokal tidak mencukupi permintaan, kekurangan buruh dapat diatasi dengan sistem buruh tani dari luar desa yang berpindah-pindah mengikuti musim. Tahap penanaman di desa-desa penelitian di Jawa Barat dan Jawa Tengah menyerap tenaga kerja 20-30 orang per ha dengan waktu tanam antara 0,5 bulan - 1 bulan. Sementara di desa penelitian di Sulawesi Selatan, penggunaan buruh tander lebih sedikit karena adanya hambur langsung dan Atabela, yaitu membutuhkan hanya 1-2 orang laki-laki.

Tahapan panen untuk desa-desa penelitian di Jawa Barat dan Jawa Tengah masih menyerap tenaga kerja yang tinggi. Pada saat panen, banyak warga yang bekerja pada sektor bukan-pertanian padi turun ke sawah-tua dan muda, lelaki dan perempuan-untuk ikut panen. Tahapan panen juga menjadi kesempatan bagi penggarap dengan luasan lahan

kecil untuk ikut menjadi buruh panen demi mendapatkan tambahan penghasilan.

Keberadaan teknologi seperti mesin perontok (*power thresher*) meningkatkan hasil panen bagi penggarap sawah. Bagi buruh tani, keberadaan mesin perontok juga menguntungkan karena buruh tani dapat bekerja lebih cepat diwaktu panen sehingga bisa bekerja di sawah milik orang lain atau bekerja di sektor bukan-pertanian padi. Bagi buruh yang sudah tua, keberadaan mesin perontok sangat membantu pekerjaan karena menjadi tidak terlalu memakan tenaga. Pada tahapan panen di desa-desa penelitian Sulawesi Selatan, yang masih menggunakan mesin perontok dapat menyerap tenaga kerja 20-30 orang/ha, baik laki-laki dan perempuan. Sementara itu, jika menggunakan *combine harvester* tenaga kerja hanya berjumlah 6-7 orang/ha dan hanya buruh laki-laki.

Pada tahapan seperti mencangkul, memupuk, dan menyemprot, rata-rata petani kecil akan mengelola sawahnya sendiri untuk menghemat biaya produksi. Sedangkan petani besar masih menggunakan buruh bayaran pada setiap tahapan pertanian padi. Penggunaan tenaga kerja pada tahapan ini tidak terlalu banyak, yaitu 1-3 orang saja tergantung dengan luasan lahan dan biasanya dikerjakan dalam waktu 1-3 hari.

2. Sistem Pengupahan

Terdapat tiga jenis pengupahan buruh tani pada dua belas desa penelitian, yaitu pengupahan harian, borongan, dan bagi hasil dari panen. Pada upah harian, terdapat dua jenis waktu bekerja yaitu setengah hari (jam 7 pagi- 12 siang), dan harian penuh (jam 7 pagi-4/5 sore). Pada desa-desa penelitian di Jawa Barat dan Jawa Tengah, upah tanam dan panen bervariasi. Hal itu dikarenakan sistem pengupahan pada tahapan tanam adalah sistem borongan, sedangkan pada tahapan panen berdasarkan bagi hasil panen. Semakin sedikit yang ikut menanam, maka upah yang diterima semakin besar. Sedangkan semakin banyak buruh yang ikut menanam, maka semakin kecil upah yang diterima per luasan lahan yang dikerjakan.

Upah pada sistem tanam sangat tergantung pada banyaknya buruh yang bekerja karena pada umumnya biaya borongan tanam akan dibagikan secara merata kepada buruh berdasarkan luasan lahan tertentu yang dikerjakan. Kisaran rata-rata pendapatan buruh tanam di desa-desa di Jawa Barat adalah Rp 30.000-60.000/hari kecuali di Wanakerta, yaitu antara Rp 15.000- 25.000/hari. Keadaan tersebut terjadi karena di Wanakerta menggunakan sistem buruh ceblok-tanam, artinya buruh yang ikut panen adalah mereka yang ikut menanam. Perubahan ini terjadi seiring dengan maraknya sistem sewa di Wanakerta, sehingga para penyewa lahan berstrategi untuk menurunkan biaya produksi dengan mengurangi biaya tanam. Sedangkan pada desa-desa penelitian di Jawa Tengah, pendapatan dari tahapan

Tabel 2. Perbandingan Upah Buruh Panen dengan Upah Bukan-pertanian/Usaha Bermodal Relatif Kecil Per Hari Tahun 2012-2013 (dalam Ribuan Rupiah)

Pertanian Padi			Bukan-pertanian Padi		
Pekerjaan	Laki-Laki	Perempuan	Pekerjaan	Laki-Laki	Perempuan
Buruh panen	40-150	40 -150	Buruh bangunan	70-100	
			Buruh konveksi	50-100	
			Buruh tenun		1-8
			Kernet	60-70	
			Menjaga toko		10-20
			Pemilik warung makanan ringan		25

Sumber: Pengolahan Data Survei Rumah Tangga dan Wawancara Mendalam, 2013.

tanam yang diperoleh buruh antara Rp 25.000-30.000/hari.

Upah pada tahapan panen bergantung pada banyaknya (1) buruh yang bekerja dan (2) hasil produksi. Artinya semakin besar hasil panen, maka semakin besar juga bawon (gabah) yang diterima. Hal tersebut terjadi karena upah buruh pada kebanyakan desa penelitian didasarkan pada sistem bagi hasil. Jika produktivitas lahan tinggi (hasil panen besar), maka bagian yang akan diterima oleh buruh tani juga besar, sedangkan jika produktivitas lahan rendah (hasil panen kecil), maka upah buruh yang diterima juga kecil. Upah yang diperoleh buruh tani berupa gabah di 12 desa bervariasi dari 1:3 (untuk buruh panen dari keluarga) hingga 1:9 (untuk buruh tani di lahan yang dimiliki oleh orang luar desa).

Tahapan panen mengalami perubahan teknologi. Saat ini di dua belas desa penelitian, perontokan padi menjadi gabah yang sebelumnya dilakukan secara manual sudah digantikan dengan mesin perontok. Pada desa-desa penelitian di Jawa, penggunaan mesin perontok tidak mengurangi jumlah buruh panen. Pengurangan hanya terjadi pada jumlah bagi hasil dari panen, misalnya jika sebelumnya 1:5, namun saat ini menjadi 1:6 atau 1:7. Sedangkan di Sulawesi Selatan, produktivitas lahan pada umumnya tidak mempengaruhi pendapatan buruh tani karena buruh panen dibayar harian. Rata-rata buruh panen bisa mendapatkan upah antara Rp 50.000-150.000/hari (Jawa Barat dan Jawa Tengah) dan Rp 40.000-70.000/hari (Sulawesi Selatan). Upah yang diterima oleh buruh panen bisa berbentuk uang atau gabah kering panen.

Upah pada tahapan panen sangat penting bagi buruh, karena banyak buruh yang membayar hutang pada masa panen. Upah panen merupakan salah satu sarana distribusi pendapatan dari pemilik tanah luas kepada pemilik tanah kecil dan buruh tani. Upah buruh panen padi relatif lebih tinggi dibandingkan dengan beberapa upah buruh di sektor bukan-pertanian padi ataupun usaha bermodal kecil (misalnya warung makanan ringan), seperti dapat dilihat pada Tabel 2.

Pertanian padi masih memberikan kontribusi pendapatan yang signifikan untuk masyarakat miskin pada 12 desa penelitian,

khususnya tahapan panen. Sedangkan untuk petani, pada umumnya biaya panen merupakan biaya paling besar dari komponen tenaga kerja maupun biaya lainnya. Uraian di atas menunjukkan bahwa sektor pertanian padi masih menyediakan kesempatan kerja yang besar bagi masyarakat desa, terutama pada tahapan tanam dan panen. Sektor pertanian padi juga memberikan upah yang relatif bervariasi dengan sektor bukan-pertanian lainnya. Bahkan pada tahapan panen masih memberikan upah yang relatif lebih besar daripada pendapatan buruh di sektor bukan-pertanian padi, hanya saja waktu untuk bekerja pada sektor ini relatif singkat dan berkala.

KESIMPULAN

Pertanian skala kecil masih menjadi unggulan bagi kelangsungan penyediaan beras di Indonesia. Hal ini dikarenakan pertanian skala kecil mendukung efisiensi sosial dengan beberapa kriteria seperti mendukung peningkatan produksi, memaksimalkan penyerapan tenaga kerja dan penyediaan mata pencaharian, mendukung distribusi pendapatan yang lebih baik, dan mendukung keberlanjutan lingkungan. Usaha tani padi yang sempit (sampai di bawah 0.25 ha) ternyata bisa mencapai produktivitas (per ha) yang tidak kalah dengan usaha tani yang lebih luas (justru ada indikasi sering lebih tinggi). Hal ini menunjukkan bahwa produktivitas tidak banyak dipengaruhi oleh status kepemilikan.

Penelitian ini juga menunjukkan bahwa sistem pertanian skala kecil masih jauh dari praktik yang berkelanjutan dan terpadu, dan ini butuh solusi yang tepat dan terintegrasi dengan institusi pertanian yang ada di desa. Hambatan yang paling sering dialami petani untuk meningkatkan produktivitas adalah serangan hama. Untuk mengatasi hama, petani-petani (1) sangat tergantung dengan pengetahuan yang diberikan oleh penjual saprodi atau PPL yang seringkali didampingi oleh agen yang melakukan promosi pemberantas hama kimia, dan (2) melakukan banyak percobaan individual, baik secara alami atau mengoplos. Penggunaan pembasmi hama kimia mencapai tingkat yang mengkhawatirkan (selain menjadi beban biaya produksi signifikan).

Kemudian, penulis setuju bahwa inovasi teknologi sangat penting pada sektor pertanian padi, namun teknologi baru yang menyebar pada saat ini justru tidak sejalan dengan efisiensi sosial sebagai tujuan pembangunan karena (a) memperkecil kesempatan kerja bertani, (b) mengalihkan sebagian nilai lebih dari golongan buruh tani yg berjumlah banyak ke golongan petani (yang cenderung lebih kaya) yang berjumlah sedikit [contohnya Atabela, hambur langsung, herbisida, *combine harvester*]. Khususnya untuk perempuan dari kalangan petani sempit/tidak bertanah, panen padi merupakan kesempatan kerja di desa yang menawarkan upah yang relatif tinggi (lebih tinggi dari beberapa upah buruh dari sektor bukan pertanian), sehingga prospek masuknya teknologi yang tidak tepat guna ini merupakan ancaman yang sebaiknya dihindari dengan langkah-langkah kebijakan. Penggunaan *combine harvester* tanpa melihat kriteria desa dan sistem pertanian yang ada di desa, maka akan menghambat efisiensi sosial (mengurangi kesempatan kerja dan mendukung distribusi keuntungan yang terpolarisasi kepada mereka yang menguasai alat produksi).

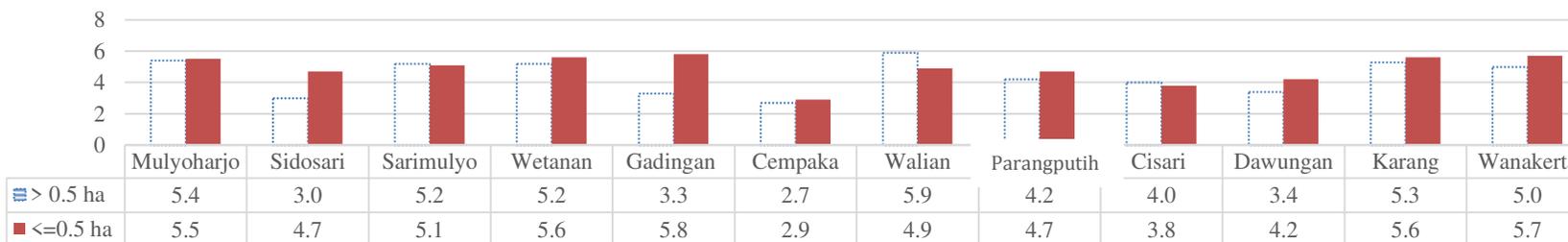
Selain itu, organisasi yang seharusnya melayani petani kecil, banyak yang tidak berfungsi dan cenderung dimanfaatkan oleh segelintir orang untuk kepentingan mereka. Selain itu, petani tidak memiliki wadah institusional atau pengorganisasian yang membantu petani dalam mengatasi masalah-masalahnya dan memperjuangkan hak-haknya.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdulrachman, Sarlan, dkk. 2013. *Sistem Tanam Legowo*. Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian Kementerian Pertanian.
- Berry, Albert. 2011. Review Essay: The Case for Redistributive Land Reform in Developing Countries. *Development and Change* 42 (2): 637-648.
- Fox, James. 2014. *Fast Breeding Insect Devastates Java's Rice*. <<http://www.eastasiaforum.org/2014/03/05/fast-breeding-insect-devastates-javas-rice/>>. (5 Juni 2014).
- Ambarwati, Aprilia dan Harahap, R.A. 2014. Penguasaan Tanah Pertanian dan Struktur Agraris di Beberapa Desa Penghasil Padi. *Laporan Studi Ketahanan Pangan*. Bandung: Akatiga.
- IPB. 2014. *Jawa Krisis Pangan Jika Kita Tidak Mampu Mengelola Serangan Wereng Secara Benar*. Press Release Bogor, 13 Januari 2014.
- Makarim, Abdul Karim dan Ikhwan. 2013. *System of Rice Intensification (SRI) dan Peluang Peningkatan Produksi Padi Nasional*. Disajikan pada seminar Puslitbang Tanaman Pangan, Bogor 11 April 2013.
- Ribot, Jesse and Nancy Lee Peluso. 2003. *A Theory of Access*. *Rural Sociology*: 68 (2).
- Unal, Fatma. Ul. 2008. *Small Is Beautiful: Evidence of an Inverse Relationship between Farm Size and Yield in Turkey*. The Levy Economics Institute.
- Van der Ploeg, J.-D. (2013) *The Art of Peasant Farming: a Chayanovian Manifesto*. Halifax: Fernwood Press.
- White, Ben. 2013. Does Indonesia Need Corporate Farms? Reflections Conmodernization, Efficiency, and The Social Function of Land. *Journal of Rural Indonesia* 1.

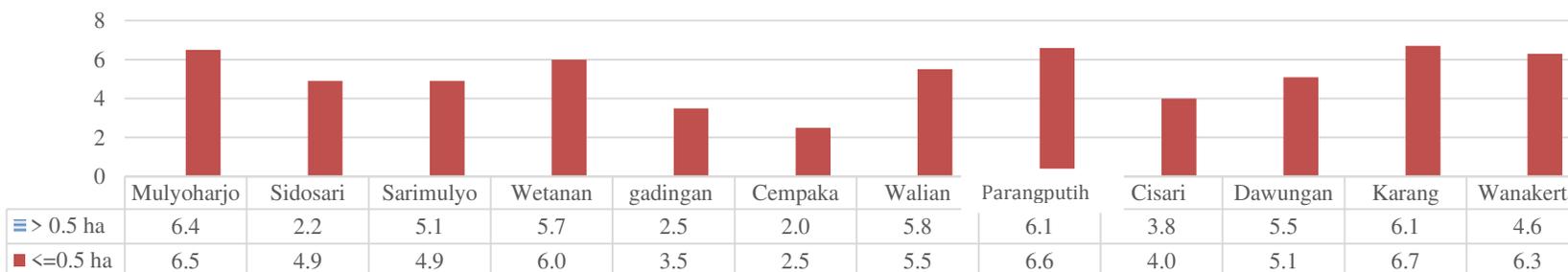
LAMPIRAN

Grafik 1. Produktivitas Hasil Panen (Ton Gabah/Ha) Menurut Luas Lahan yang Diusahakan di 12 Desa Penelitian, Musim Kemarau 2013



Sumber : Pengolahan Survei Rumah tangga

Grafik 2. Produktivitas Hasil Panen (Ton Gabah/Ha) menurut Luas Lahan yang Diusahakan di 12 Desa Penelitian, Musim Penghujan 2012-13

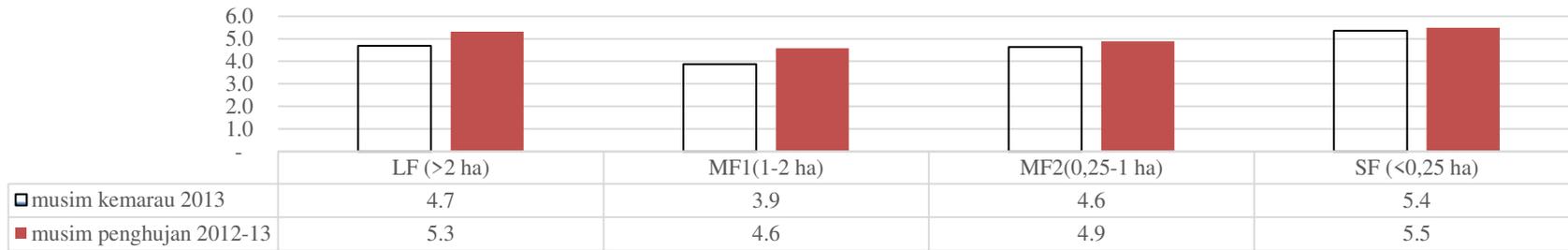


Sumber : Pengolahan Survei Rumah Tangga

Catatan : Dalam penelitian ini terdapat desa dimana jumlah responden kurang dari 5 rumah tangga usaha tani yaitu

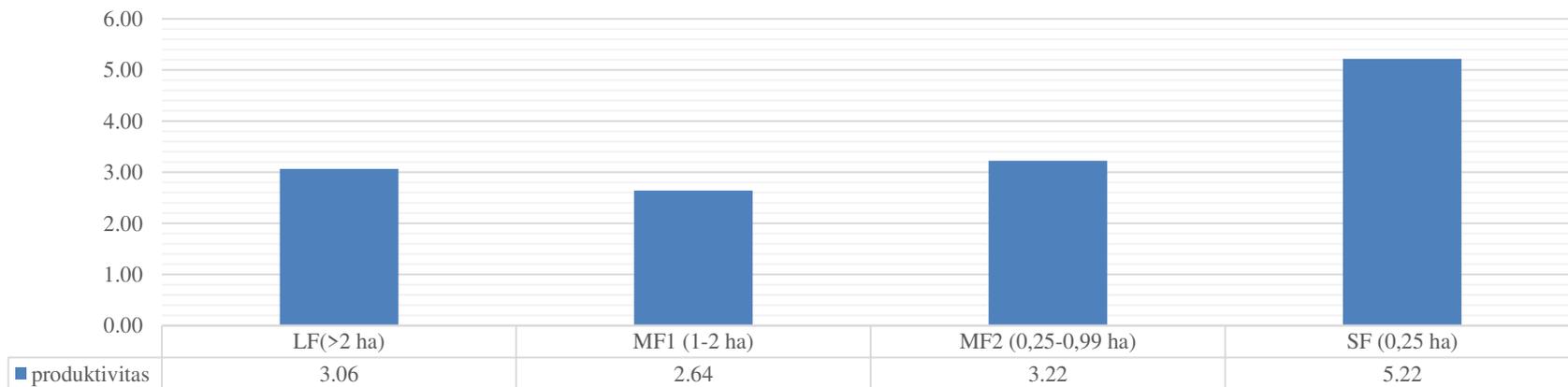
- > 0, 5 ha yaitu Mulyoharjo dan Walian
- <=0,5 ha yaitu Dawungan dan Wanakerta

Grafik 3. Produktivitas Hasil Panen (Ton Gabah/Ha) menurut Luas Lahan yang Diusahakan di Seluruh Desa Penelitian, Musim Kemarau 2013 dan Musim Penghujan 2012-13



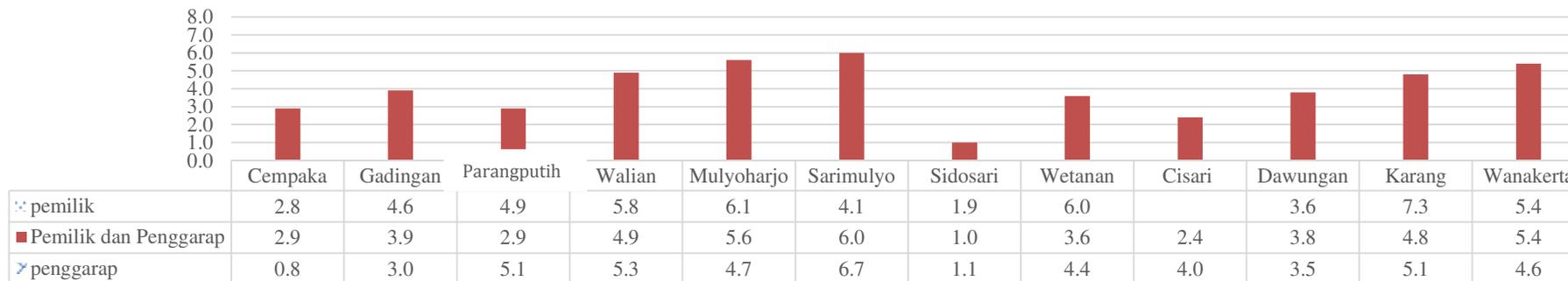
Sumber : Pengolahan Survei Rumah tangga

Grafik 4. Produktivitas Hasil Panen (Ton Gabah/Ha) Menurut Luasan Lahan yang Diusahakan/Ditanami Berdasarkan Data IFLS Tahun 2007



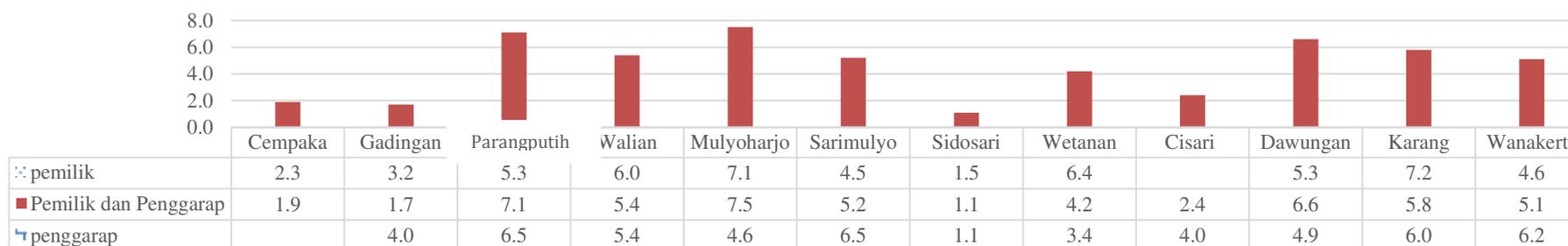
Sumber: Pengolahan data IFLS 2007

Grafik 5. Produktivitas Hasil Panen (Ton/Ha) Menurut Status Penguasaan Lahan di 12 Desa Penelitian, Musim Kemarau 2013



Sumber : Pengolahan Data Survei Rumah Tangga

Grafik 6. Produktivitas Hasil Panen (Ton/Ha) Menurut Status Penguasaan Lahan di 12 Desa Penelitian, Musim Penghujan 2012-2013

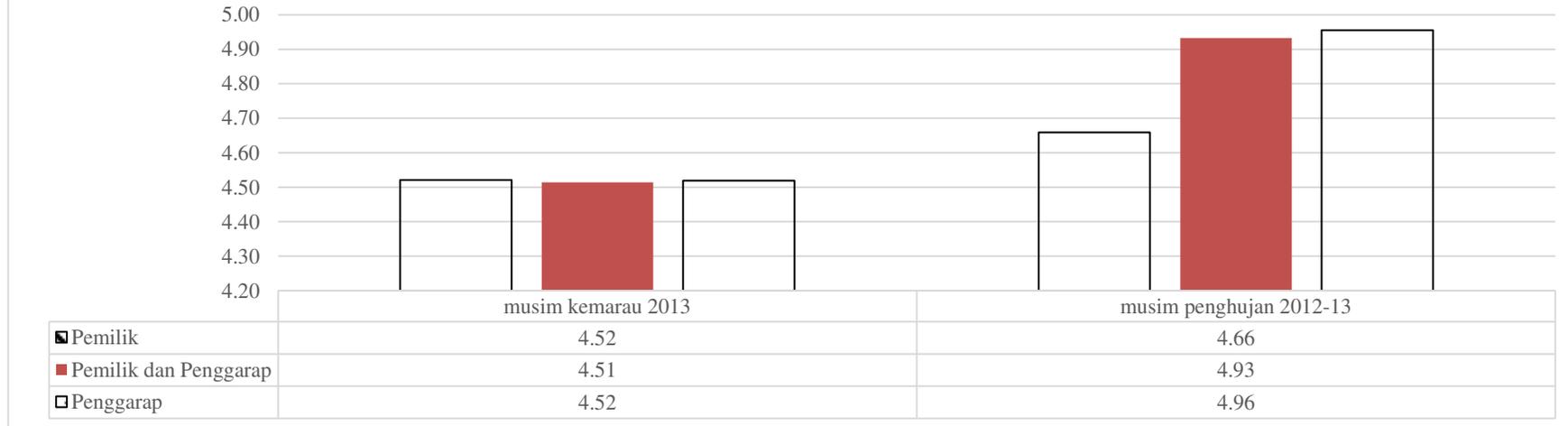


Sumber: Pengolahan Data Survei Rumah Tangga

Catatan: Dalam penelitian ini terdapat desa dimana jumlah responden kurang dari 5 rumah tangga usaha tani yaitu

- Pemilik dan penggarap yaitu Sidosari, Wetanan, Kedaung, Karang
- Penggarap yaitu Cempaka, Gadingan, Mulyoharjo, Sarimulyo, Sidosari, Dawungan, dan Wanakerta

Grafik 7. Produktivitas Hasil Panen (Ton/Ha) Menurut Status Penguasaan Lahan di Seluruh Desa Penelitian, Musim Kemarau 2013 dan Musim Penghujan 2012-13



Sumber : Pengolahan Data Survei Rumah tangga

Tabel 3. Rata-Rata Biaya Pestisida Pada 12 Desa Penelitian Musim Kemarau 2013 (dalam Jutaan Rupiah)

Strata Petani	Mulyoharjo	Sarimulyo	Wetanan	Sidosari	Cempaka	Gadingan	Parangputih	Walian	Cisari	Dawungan	Wanakerta	Karang
> 2 ha	n.a	0.39	n.a	0.02	0.07	n.a	0.34	0.15	1.20	1.85	0.47	2.38
1-2 ha	0.37	0.13	0.30	0.09	0.29	0.30	0.27	0.38	0.59	1.58	1.11	1.68
0,25-0,99 ha	0.11	0.30	0.40	0.14	0.30	0.23	0.38	0.17	0.67	0.96	0.81	1.10
<0,25	0.04	0.33	0.08	0.21	n.a	0.68	0.58	n.a	0.81	0.95	1.18	2.40
Rata-rata	0.17	0.29	0.26	0.11	0.22	0.40	0.39	0.23	0.82	1.34	0.89	1.89

Sumber: Pengolahan Survei Rumah tangga

**Tabel 4. Rata-Rata Biaya Pestisida pada 12 Desa Penelitian Musim Penghujan 2012-2013
(dalam Jutaan Rupiah)**

Strata Petani	Mulyoharjo	Sarimulyo	Wetanan	Sidosari	Cempaka	Gadingan	Parangputih	Walian	Cisari	Dawungan	Wanakerta	Karang
> 2 ha	n.a	0.39	n.a	0.14	0.07	n.a	0.34	0.22	1.48	1.85	0.51	1.26
1-2 ha	0.28	0.10	0.26	0.06	0.29	0.08	0.28	0.36	0.59	1.36	0.91	1.09
0,25-0,99 ha	0.25	0.27	0.39	0.08	0.21	0.14	0.37	0.17	0.64	1.61	1.14	0.81
<0,25	0.41	0.28	0.07	0.17	n.a	0.64	0.58	n.a	0.75	0.93	1.89	1.79
Rata-rata	0.31	0.26	0.24	0.11	0.19	0.29	0.39	0.25	0.86	1.44	1.11	1.24

Sumber: Pengolahan Data Survei Rumah tangga

Tabel 5. Persentase Penggunaan Biaya Pestisida terhadap Total Biaya Produksi pada 12 Desa Penelitian Musim Kemarau 2013

Strata Petani	Mulyoharjo	Sarimulyo	Wetanan	Sidosari	Cempaka	Gadingan	Parangputih	Walian	Cisari	Dawungan	Wanakerta	Karang
> 2 ha		5.6		0.6	6.4		7.7	4.9	19.3	22.1	7.3	23.2
1-2 ha	13.7	2.4	4.5	2.0	12.7	6.8	6.7	8.6	10.4	21.7	10.6	18.6
0,25-0,99 ha	11.0	5.6	13.6	3.2	7.6	3.8	12.5	3.4	8.4	11.4	6.8	11.9
<0,25	11.8	4.4	5.0	2.0		6.9	7.4		10.5	26.2	12.0	24.3
Rata-rata	12.2	4.5	7.7	1.9	8.9	5.9	8.6	5.6	12.2	20.4	9.2	19.5

Sumber : Pengolahan Survei Rumah Tangga

Tabel 6. Persentase Penggunaan Biaya Pestisida terhadap Total Biaya Produksi pada 12 Desa Penelitian Musim Penghujan 2012-2013

Strata Petani	Mulyoharjo	Sarimulyo	Wetanan	Sidosari	Cempaka	Gadingan	Parangputih	Walian	Cisari	Dawungan	Wanakerta	Karang
> 2 ha		6.0		3.5	7.9		5.1	6.3	23.0	18.6	7.8	11.3
1-2 ha	13.1	1.9	3.8	1.4	11.9	3.0	5.5	8.5	9.3	15.9	9.7	11.2
0,25-0,99 ha	11.2	5.4	10.5	1.6	4.9	2.9	14.4	3.2	9.4	16.1	9.0	7.4
<0,25	14.7	4.4	5.4	1.4		9.2	6.9		10.3	21.2	16.4	13.3
Rata-rata	13.0	4.5	6.6	2.0	8.2	5.0	8.0	6.0	13.0	18.0	10.7	10.8

Sumber: Pengolahan Survei Rumah Tangga

KEBUN PANGAN SKALA LUAS DI KETAPANG: MENGAMBAR ANGAN-ANGAN TENTANG SURPLUS PRODUKSI

LARGE-SCALE FOOD FARMING IN KETAPANG: DESCRIBES THE WISHFUL THINKING OF SURPLUS PRODUCTION

**Laksmi A. Savitri
Khidir M. Prawirosusanto¹**

Fakultas Antropologi, Universitas Gajah Mada
Jalan Sosio-Humaniora, Bulaksumur, Yogyakarta 55281
E-mail: laksmi.adriani@gmail.com & marsanto.iid@gmail.com

Abstrak

Artikel ini mendiskusikan persoalan mana yang lebih relevan bagi Indonesia, antara kebun pangan skala luas berbasis korporasi atau pertanian skala kecil berbasis petani kecil, dalam menjawab masalah ketersediaan pangan nasional. Anggapan bahwa perusahaan kebun pangan skala luas sebagai satu model pertanian modern mampu menjawab berbagai persoalan dan juga perdebatan di sektor pertanian mulai dari masalah tanah, tenaga kerja, dan terutama masalah produksi pangan pada kenyataannya belum pernah terbukti. Melalui kasus Ketapang Food Estate, kami menunjukkan bahwa secara empiris perusahaan kebun pangan skala luas berbasis korporasi justru memunculkan sejumlah kegagalan produksi yang disertai dengan sebundel persoalan lainnya. Oleh sebab itu, angan-angan tentang capaian surplus produksi pangan dari penyelenggaraan kebun pangan skala luas di Indonesia harus ditinjau kembali.

Kata kunci: Ketahanan pangan, Lahan tidur, Tenaga kerja pendatang, Kegagalan produksi

Abstract

This article discusses issues which are more relevant for Indonesia, between the large-scale food farm based corporations or small-scale agriculture based on small farmers, in responding to issues of national food availability. Assuming that the mastery of large-scale food farming as a model of modern agriculture able to answer a variety of issues and debates in the agricultural sector from the problems of land, labor, and especially the problem of food production in fact has never been proven. Through case Ketapang Food Estate, we show that empirically wide-scale food farming based on corporation in fact gave rise to a number of production failures are accompanied with a bundle of other issues. Therefore, wishful thinking about the achievement of surplus food production on a wide-scale food farming in Indonesia should be revisited.

Key Words: Food estate, Idle land, Migrant labour, Production failure

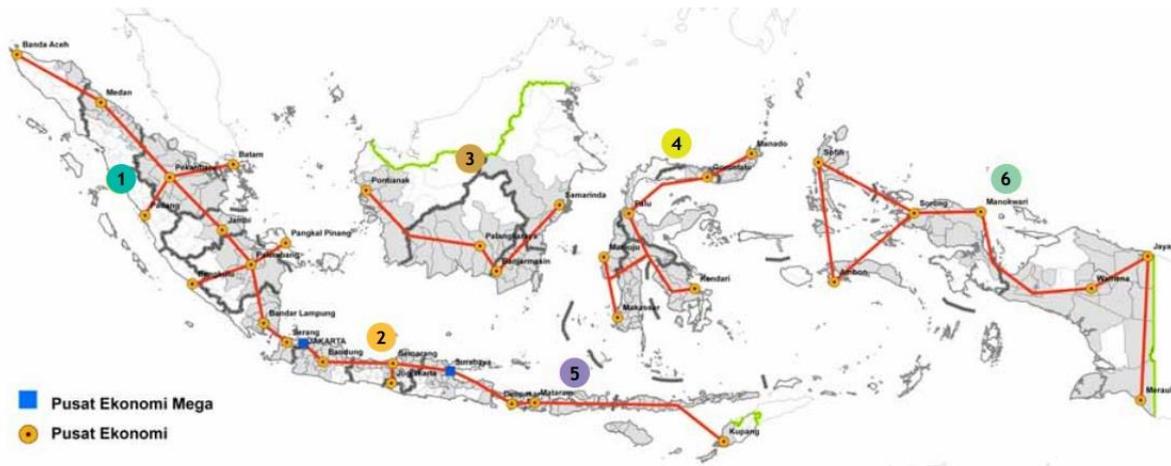
PENDAHULUAN

Teka-teki soal perlu-tidaknya pertanian skala luas berbasis korporasi di Indonesia tampaknya belum bisa terpecahkan. Ada angan-angan, dengan menerapkan pertanian skala luas berbasis korporasi kita mampu menjadi negara dengan produksi beras (dan tanaman pangan lainnya) melimpah sehingga cukup untuk mengatasi persoalan pangan dalam negeri. Penerapan pertanian skala besar tidak merupakan wujud dari modernisasi pertanian, di mana modernisasi pertanian kerap dimaknai sebagai peralihan dari pertanian skala kecil berbasis rumah tangga, ketidakefisienan produksi pertanian, dan penggunaan peralatan tradisional (manual) oleh

petani kecil menuju ke pertanian skala luas berbasis korporasi dengan efisiensi pada ongkos produksi dengan penggunaan peralatan canggih (mekanisasi).

Persoalannya kemudian apakah tepat jika gagasan modernisasi pertanian tersebut dimaknai demikian? Jikalau kita sependapat dengan gagasan White, tampaknya kekeliruan terjadi sejak kita memahami konsep ‘modernisasi’. White (2013) berargumentasi bahwa penerjemahan seperti itu adalah kesalahpahaman atas makna dan pentingnya ide tentang ‘modernisasi’ yang disampaikan oleh Profesor Koentjaraningrat—bapak Antropologi di Indonesia. Sebab, bagi White modernisasi harus dipahami sebagai suatu upaya untuk, “... *bringing our lives in tune with the demands of the present era,*

¹ Laksmi Adriani Savitri adalah pengajar di Jurusan Antropologi Budaya, Fakultas Ilmu Budaya-Universitas Gajah Mada dan Khidir Marsanto Prawirosusanto adalah asisten pengajar pada institusi yang sama.



Sumber: Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian (2011:46).

- 1) Koridor Ekonomi Sumatera; (2) Koridor Ekonomi Jawa; (3) Koridor Ekonomi Kalimantan; (4) Koridor Ekonomi Sulawesi; (5) Koridor Ekonomi Bali – Nusa Tenggara; (6) Koridor Ekonomi Papua – Maluku.

Gambar 1. Koridor Ekonomi Indonesia dalam MP3EI

which counter the trends towards growing inequalities in wealth and income.”² Melalui kaca mata White ini, pertanian modern mesti dilihat sebagai pertanian yang laiknya mengacu pada peran besar para petani kecil untuk menyediakan lapangan pekerjaan dibandingkan dengan relatif kecilnya kemampuan korporasi pertanian/perkebunan untuk menyediakan pekerjaan dan membangun komitmen serius kepada masa depan pertanian yang berkelanjutan. Namun dalam kenyataannya, pemerintah Indonesia tergelincir dalam memahami ide pertanian modern tersebut, karena mereka melihat modernisasi pertanian lebih berlaku sebagai upaya untuk menumbuhkan investasi di bidang pertanian skala luas. Sayangnya, penumbuhan investasi di bidang pertanian skala luas dipandang sebagai satu-satunya opsi untuk mengatasi berbagai persoalan pertanian, utamanya dalam hal pangan.

Seolah ingin sekali mengayuh dayung dua pulau terlampaui, manakala terjadi krisis pangan dunia pada 2007–2008, di mana harga pangan dunia melambung begitu tinggi, pemerintah Indonesia menangkap situasi ini sebagai sebuah peluang ekonomi untuk menjawab dua persoalan sekaligus: yaitu menciptakan (1) ketahanan pangan nasional dan (2) ekspor pangan dalam tujuan menyeimbangkan neraca perdagangan. Dengan asumsi bahwa tanah untuk tanaman pangan baru masih melimpah di Indonesia dan adanya kebutuhan negara pada investasi di bidang pangan, pemerintah mendorong suatu kebijakan ekonomi yang mampu ‘mengubah krisis menjadi peluang’. Oleh karenanya, di tahun 2008 pemerintah Indonesia mengklaim perlu mengusung tercapainya kedaulatan pangan

dalam kapasitas negara yang mampu mencukupi kebutuhan pangan nasional dan selanjutnya juga mampu menyumbang ketersediaan pangan dunia.³ Tiga tahun berselang, gagasan ini diwujudkan dalam sebuah dokumen Master Plan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI) 2011-2025, yang digawangi oleh Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.

Secara eksplisit, pesan utama MP3EI ialah ‘melego Indonesia’ untuk berbagai kegiatan penanaman modal di dalam negeri. MP3EI juga menempatkan sektor pangan dan sumber daya alam sebagai sektor utama yang perlu dikembangkan. Sebagaimana tertera di sana, “... dalam kerangka MP3EI, Indonesia perlu memosisikan dirinya sebagai basis ketahanan pangan dunia, pusat pengolahan produk pertanian, perkebunan, perikanan, dan sumber daya mineral serta pusat mobilitas logistik global”.⁴

Untuk mencapai sejumlah target tersebut, MP3EI menetapkan tiga cara. Pertama, merancang enam koridor ekonomi sebagai strategi untuk membukakan jalan bagi investasi di bidang usaha baru. Kedua, membangun konektivitas nasional atau pembangunan infrastruktur yang memungkinkan basis sumber daya nasional terhubung dengan berbagai pusat pasar internasional, dan satu hal penting dalam mewujudkan konektivitas nasional ini ialah pemberlakuan ‘*debottlenecking*’, yaitu komitmen pemerintah untuk menyederhanakan urusan birokrasi dan memberikan pelbagai kemudahan prosedur bagi aktivitas penanaman

² White, 2013.

³ Ito et al., 2014.

⁴ Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian (2011:16).

investasi. Selama ini, penghambat utama aktivitas penanaman investasi di Indonesia adalah sejumlah aturan birokrasi yang berbelit dengan ongkos yang tidak murah. Ketiga, memberi dukungan penuh kepada kegiatan penelitian dan beasiswa untuk menyiapkan sumber daya manusia yang bisa mendukung percepatan pembangunan ekonomi nasional. Ketiga strategi ini, dalam istilah David Harvey, adalah ‘fiksasi spasial-temporal’ dari akumulasi kapital, di mana ruang dan waktu dimampatkan melalui penyediaan infrastruktur baru, termasuk pengembangan sumber daya manusia dan kebijakan yang ditujukan bagi ‘produksi ekonomi ruang’ (*a production of space economy*).⁵

Berangkat dari pemahaman tersebut, tulisan ini mencoba melihat pengembangan sektor pangan yang pernah ditetapkan MP3EI melalui kasus pembangunan kebun pangan skala luas di Kabupaten Ketapang. Persoalan mengemuka, salah satunya, mengapa dalam mewujudkan salah satu tujuan MP3EI di sektor pangan pemerintah Kabupaten Ketapang menghadapi berbagai kendala? Di manakah letak persoalannya? Dalam penyediaan lahan misalnya, kendati mereka yang di atas kertas punya wilayah terluas di Kalimantan Barat mengklaim memiliki potensi lahan pertanian seluas 886.959 ha, mereka hanya berani menargetkan penyediaan 100.000 ha sebagai Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B).⁶ Proyek kebun pangan skala luas dalam tiga tahun terakhir yang baru digarap hanya sekitar 100 ha, inipun dengan sejumlah catatan. Selain itu, bahwa optimisme pemerintah dengan dibukanya lahan pertanian (dalam konteks penciptaan lapangan pekerjaan) baru secara otomatis memberi efek pertumbuhan ekonomi, dan dengan sendirinya dapat menekan angka kemiskinan, ternyata tidak semudah membalikkan telapak tangan.

Uraian di bawah menerangkan mengapa pembukaan lahan untuk kebun pangan skala luas tidak secara otomatis diikuti dengan terjawabnya berbagai masalah peningkatan produksi pertanian, ketenagakerjaan, dan sebagainya. Sebaliknya, justru berbagai kontradiksi muncul dari proyek kebun pangan skala luas di Ketapang (*Ketapang Food Estate*, selanjutnya disingkat KFE) ini. Dalam tujuan inilah, artikel ini juga akan mengurai teka-teki yang belum terjawab di atas: apakah untuk mencapai kedaulatan pangan di Indonesia kita memerlukan pertanian dengan model kebun pangan skala luas berbasis perusahaan dan dalam prasyarat seperti apa pilihan tersebut mungkin untuk diambil.

PEMBAHASAN

MP3EI dan *Food Estate*

Dalam dokumen MP3EI, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono memberi sambutan dengan mengatakan bahwa:

“Dengan bahasa terang saya sampaikan bahwa misi besar kita 5 tahun mendatang (2010 – 2015) adalah melakukan “*debottlenecking*”, percepatan dan perluasan pembangunan ekonomi nasional. Jika tiga pekerjaan utama itu dapat kita laksanakan, maka ekonomi akan tumbuh makin tinggi, lapangan pekerjaan akan makin tercipta dan kemiskinan akan makin dapat kita kurangi.”⁷

Khusus mengenai investasi lahan, upaya ‘*debottlenecking*’ merupakan ruh utama dalam segala upaya pencapaian tujuan MP3EI. Sebab, tanpa regulasi yang cukup jelas dan tepat untuk usaha peralihan lahan secara legal dan bisa diterima semua pihak, implementasi rencana induk ini boleh jadi akan gagal mencapai targetnya dalam menciptakan iklim kondusif bagi para investor untuk menanamkan modalnya di Indonesia.⁸ Percepatan ekonomi yang diharapkan berjalan melalui strategi koridor ekonomi dan konektivitas, terutama ‘*debottlenecking*’, diterapkan pula di sektor pangan melalui konsep ‘kebud pangan’ (*food estate*). Kementerian Pertanian menerangkan tentang konsep kebun pangan ini di dalam *grand design* Merauke Integrated Food and Energy Estate (MIFEE):

“[kebud pangan merupakan] kegiatan pertanian skala luas, modern dengan konsep pertanian sebagai sistem industrial yang berbasis iptek, modal, organisasi dan manajemen modern serta mengedepankan kearifan lokal (*local wisdom*) di bidang pengelolaan lingkungan dan teknik budidaya pertanian.”⁹

Sebagai terminologi baru dalam kebijakan, istilah *food estate* pertama kali digunakan pada perayaan Panen Raya Nasional tahun 2006 di Merauke, yang juga dihadiri oleh Presiden SBY ketika itu.¹⁰ Konsep ini masuk dalam nomenklatur kebijakan ketika digunakan secara resmi oleh Kementerian Pertanian untuk merancang MIFEE sebagai pewujudan dari Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional yang mendudukkan Merauke di Provinsi Papua sebagai pusat produksi pangan nasional. Ini sejalan dengan MP3EI yang menempatkan pendirian kebun pangan sebagai satu tema baru pengembangan Papua, sementara dalam koridor ekonomi wilayah Kalimantan, sektor pangan sesungguhnya bukan menjadi salah satu bagian dari

⁵ Harvey (2001, 2003).

⁶ Bappeda Kabupaten Ketapang (2014).

⁷ Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian (2011:8).

⁸ Ito et al. (2014).

⁹ Kementerian Pertanian (2010:21)

¹⁰ Ito et al (2014:11).

sektor pengembangannya.¹¹ Kendati tidak pernah ditetapkan sebagai bagian dari tema koridor ekonomi Kalimantan, pengembangan kebun pangan di Kalimantan Barat lebih merupakan reaksi pemerintah atas kegagalan MIFEE di Papua.

Sebagaimana dijelaskan di atas, kebun pangan sendiri merupakan hasil instruksi presiden kepada dua kementerian: yaitu Kementerian Pertanian dan Kementerian BUMN, untuk meningkatkan produksi padi nasional. Berdasarkan kebijakan itulah MIFEE diluncurkan pada 2010 oleh Kementerian Pertanian. Setahun berselang, ketika MIFEE dianggap gagal,¹² presiden lantas menginstruksikan Kementerian BUMN untuk memacu peningkatan produksi beras¹³, yang diikuti dengan peluncuran Gerakan Peningkatan Produksi Pangan berbasis Korporasi (GP3K). Kementerian ini pula yang menggabungkan tujuh perusahaan negara yang terlibat di sektor agribisnis untuk menjadi satu grup perusahaan yang dikenal sebagai Korporasi Peduli Pangan. Kendati mereka telah mencoba menjalankan beberapa lokasi produksi pangan, hanya satu yang masih beroperasi hingga hari ini, yaitu kebun pangan di Ketapang.

Perlu dipahami juga bahwa apa yang ditentukan dalam MP3EI dan yang diarahkan dalam kebijakan di sektor pangan dari tingkat nasional sampai ke tingkat lokal ternyata tidak bisa sejalan. Sebab, pangan kerap kali dipakai sebagai '*strategic or political commodity*', yang mencakup gagasan mengenai 'ketahanan' di berbagai tingkat, mulai dari ketahanan ekonomi rumah tangga sampai ihwal keamanan politik nasional. Oleh sebab itu, perwujudan rencana MP3EI untuk menempatkan pangan sebagai tema utama pembangunan ekonomi tampaknya memunculkan beragam penafisan, kontradiksi, 'keterputusan', dan perubahan yang cukup kompleks. Salah satu faktornya ialah banyak aktor yang terlibat di dalamnya dengan berbagai macam agendanya masing-masing. Hal inilah yang memungkinkan apa yang sudah dirancang MP3EI terpelintir ketika diterjemahkan, dipahami, diterapkan, dan direspon di tingkat lokal. Pengalaman penerapan kebun pangan di Ketapang menunjukkan bukti konkret (empiris) terjadinya pelbagai distorsi di tataran perencanaan dan penerapannya.

Ketapang *Food Estate*: Usaha Besar dengan Hasil Kecil

¹¹ MP3EI menerangkan bahwa dalam tema pembangunan masing-masing koridor ekonomi dalam percepatan dan perluasan pembangunan ekonomi Kalimantan didaulat sebagai pusat produksi dan pengolahan hasil tambang dan lumbung energi nasional. Lihat Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian (2011:47).

¹² Lihat Savitri (2013) untuk penjelasan lebih lanjut.

¹³ Inpres RI No. 5 Th 2011 tentang Pengamanan Produksi Beras Nasional dalam Menghadapi Kondisi Iklim Ekstrim

Pertarungan dalam perebutan tampuk kekuasaan di Ketapang antara mereka yang memiliki latar belakang etnis Dayak dengan yang beretnis Melayu merupakan bagian dari sejarah panjang¹⁴, dan ini menjadi salah satu konteks munculnya gagasan tentang program kebun pangan skala luas di kabupaten ini pada 2010. Ialah Sofyan Muhamad¹⁵, mantan Bupati Ketapang dan orang Melayu, yang semasa ia menjabat dikenal sebagai bupati yang terlampau banyak memberikan izin kepada perusahaan kelapa sawit. Tahun 2008, ketegangan tercipta antara orang Dayak dan sejumlah komunitas lokal dengan perusahaan perkebunan kelapa sawit akibat ekspansi usaha perkebunan ini yang begitu massif.¹⁶ Di Ketapang, luas perkebunan kelapa sawit hampir mencapai 850,000 ha, atau nyaris seperempat dari keseluruhan luas wilayah kabupaten ini. Angka ini fantastis, karena menunjukkan bahwa perkebunan kelapa sawit terluas di seluruh Provinsi Kalimantan Barat berada di Kabupaten Ketapang. Ketika Martinus Henrik¹⁷, yang orang Dayak, menjabat sebagai bupati pada 2010, berdasarkan instruksi Gubernur Kalbar tahun 2008, ia lantas menghentikan semua penerbitan izin lokasi kepada perusahaan kelapa sawit di wilayah Ketapang.

Larangan ini sekaligus membuka ruang bagi perwujudan mimpi sang bupati untuk mengembangkan sektor pangan di daerah kekuasaannya. Dukungan dari pemerintah nasional untuk menjalankan misi ini baru datang beberapa tahun kemudian ketika Kementerian BUMN menunjuk Ketapang sebagai lokasi *food estate* persis setelah kegagalan mereka di Kalimantan Timur dan Papua. Aktor penting yang menangkap kesempatan ini ialah Mahmud Syahbudin¹⁸, Kepala Bappeda Kabupaten Ketapang, yang dalam perjalanannya ia sempat melakoni jabatan sebagai pelaksana tugas pada jabatan Sekretaris Daerah (Sekda) selama kurang dari setahun (2013-2014). Sebagai orang kepercayaan Bupati, ia segera memanfaatkan peluang ini untuk mengaku bahwa konsep mengenai pertanian padi skala luas atau 'kebun pangan skala besar' adalah konsep yang dilahirkan oleh Kabupaten Ketapang, bukan berasal dari kementerian tertentu. Syahbudin membuktikan klaim tersebut dari keluarnya Peraturan Bupati No.17/2013

¹⁴ Lihat Tasanaldi (2012)

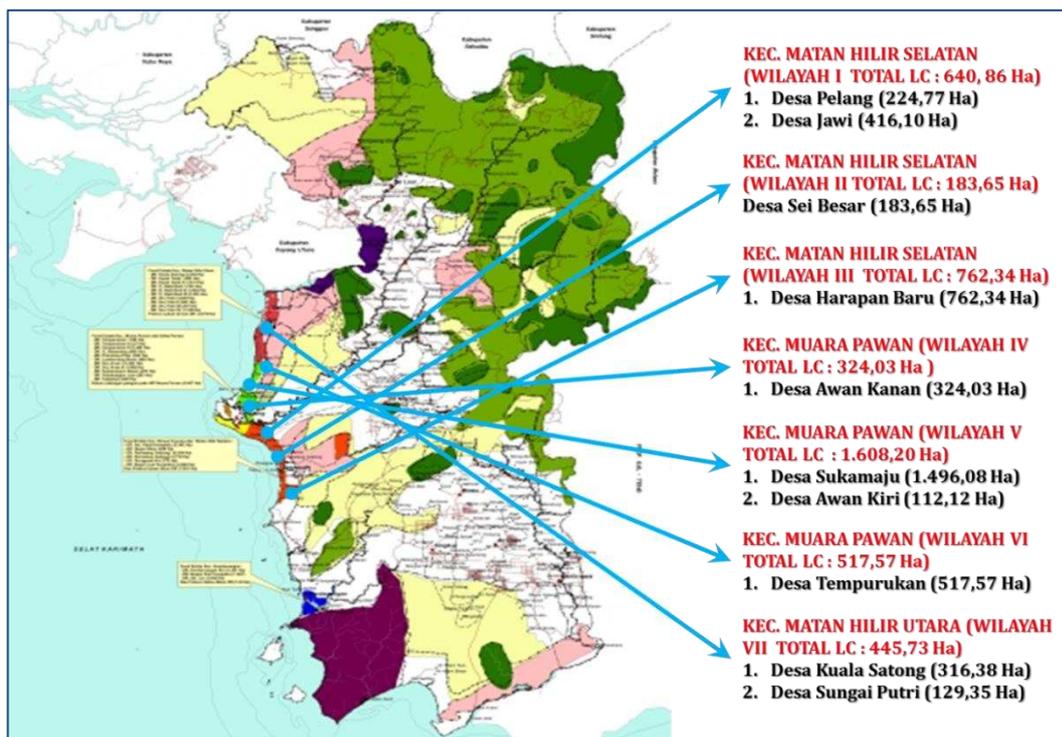
¹⁵ Pseudonym

¹⁶ Wawancara dengan staf Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Ketapang 19 Juni 2015 dan kutipan berita kasus mantan anggota MPR RI, Budiono Tan, pemilik PT Benua Indah Grup, perusahaan perkebunan kelapa sawit yang menggelapkan 1.535 sertifikat milik petani ("Polada kalbar tangkap mantan anggota MPR RI", diunduh pada 10 Februari 2015, dari:

<http://www.siarjustisia.com/news/view/1841/polda-kalbar-tangkap-mantan-anggota-mrp-ri>)

¹⁷ Pseudonym

¹⁸ Pseudonym



Gambar 2. Lokasi Ketapang Food Estate

tentang Ketahanan Pangan Daerah yang memperluas cakupan kawasan untuk produksi beras dari perkebunan pangan dari sekedar ‘milik’ kementerian menjadi berbagai ragam model ‘program investasi kebun pangan’, yang secara keseluruhan mencakup luasan lahan sebesar 100.000 ha (lihat Lampiran Tabel 1). Ada program investasi yang disebut sebagai pola kemitraan dengan masyarakat, yang mencakup: proyek PT. PIHC untuk penanaman padi dan jagung, dua DEM Area (demonstrasi area) yang dikelola oleh Dinas Pertanian untuk tanaman padi dan jagung, dan Lapas Ketapang untuk tanaman ubi kayu dan sayur-sayuran, pola inti-plasma kebun pangan untuk komoditi ubi kayu, ditambah dengan pola kemitraan dengan perusahaan swasta dan masyarakat yang meminta komitmen dari para pemegang konsesi HGU untuk menyerahkan minimal 300 ha lahan mereka untuk kebun pangan.

Keseluruhan luas kawasan Kebun Pangan di Ketapang meliputi tujuh kecamatan dan sepuluh desa di dalam kecamatan tersebut, sebagaimana ditunjukkan pada Gambar 2. Dari sepuluh desa tersebut, Desa Sukamaju merupakan desa dengan wilayah lahan untuk kebun pangan terluas, yaitu sekitar 1.496,08 ha. Diikuti oleh empat desa di Kecamatan Matan Hilir Selatan yang luas lahannya mencapai 1.586,85 ha. Perusahaan BUMN beroperasi di Desa Sukamaju dan sebagian masuk ke dalam wilayah Kecamatan Matan Hilir Selatan.

Gambar tersebut belum termasuk area kebun pangan di dalam kawasan perkebunan kelapa sawit dan kawasan hutan. Dari total luas lahan yang dialokasikan, terdapat sekitar 8.225 ha luasan

kawasan hutan yang disetujui oleh Kementerian Kehutanan untuk dikonversi menjadi kebun pangan.¹⁹ Luasan tersebut diperoleh dari persetujuan atas total luas 138.448 ha atau 55% dari keseluruhan luas hutan produksi konversi di Kabupaten Ketapang yang diajukan oleh bupati kepada Menteri Kehutanan agar memungkinkan untuk dikonversi menjadi kebun pangan.²⁰ Dengan demikian, sesungguhnya ambisi untuk melepaskan kawasan hutan lebih dari tiga kali lipat dari luas lahan yang direncanakan dan dipublikasikan dalam rancangan program kebun pangan; yaitu 38.700 ha (lihat Lampiran, Tabel 4).

Tanah, Tenaga Kerja, dan Produksi

Pada 2012, Menteri BUMN menunjuk PT. Sang Hyang Sri (SHS) untuk menyiapkan lahan bagi *food estate* dengan tujuan untuk mewujudkan surplus beras 10 juta ton, seperti dicanangkan oleh Presiden SBY. Angka 100.000 ha pada mulanya ialah target yang dibayangkan akan dikelola seluruhnya oleh perusahaan BUMN. Namun, sejak 2012-2013, kemajuan pekerjaan pembukaan lahan sampai dengan penanaman dinilai sangat lambat oleh Menteri BUMN saat itu. Ditambah dengan kemelut

¹⁹ Pemberian izin terhadap 8.225 hektar tanah hutan ini berdasarkan atas surat keputusan Menteri Kehutanan S.20/Menhut-VIII/2013, tertanggal 15 Januari 2013.

²⁰ Dua surat permohonan izin yang ditandatangani Bupati Ketapang kepada Menteri Kehutanan yaitu surat No.:050/0481/Bappeda-B, tertanggal 11 Maret 2013 dan surat No.: 520.51/0785/Bappeda-B, tertanggal 24 April 2013.

Tabel 1. Luas lokasi Kebun Pangan Ketapang (31 Agustus 2013)

No	Lokasi	Pembersihan lahan (hektar)	Land Levelling (hektar)	Luas tanam (hektar)
I	Kec. Muara Pawan	2.181,75	784,95	0
1	Desa Sungai Awan Kanan	324,03	233,68	0
2	Desa Sungai Awan Kiri	112,12	0	0
3	Desa Sukamaju	1.427,10	551,27	100
4	Desa Tempurukan	318,50	0	0
II	Kec. Matan Hilir Utara	334,56	0	0
1	Desa Kuala Satong	258,50	0	0
2	Desa Sungai Puteri	76,06	0	0
III	Kec. Matan Hilir Selatan	1.579,72	1.178,49	0
1	Desa Pelang	224,77	205,34	0
2	Desa Jawi	416,10	396,88	0
3	Desa Sungai Besar	183,65	169,13	0
4	Desa Harapan Baru	755,20	407,14	0
	Jumlah	4.096,03	1.963,44	100

Sumber: PT. PIHC

yang terjadi di dalam PT. SHS,²¹ maka Menteri BUMN pada 30 Agustus 2013 menunjuk PT. PIHC untuk menggantikan PT. SHS meneruskan pekerjaan penggarapan kebun pangan. Ketika ditinggalkan oleh PT. SHS, sudah lebih dari 4.000 ha tanah dibuka dan ditanami di tiga kecamatan dari target awal tujuh kecamatan (Tabel 1).

Akan tetapi, kegagalan panen terjadi di semua lokasi, karena pembukaan lahan sawah yang telah mengupas lapisan tanah subur di bagian atas menyebabkan kenaikan kadar pirit dan meningkatkan keasaman tanah. Selain itu, pembukaan lahan menyebabkan hilangnya habitat dan makanan dari banyak hewan dan serangga yang mengakibatkan tingginya serangan mereka pada tanaman padi. Kegagalan PT. SHS ini menyebabkan PT. PIHC mengambil sikap lebih hati-hati untuk meneruskan proyek kebun pangan. Pada akhirnya, mereka memutuskan untuk hanya berkonsentrasi pada lahan 100 ha di Desa Sukamaju, Kecamatan Muara Pawan, dengan status 'uji coba'.

Sementara itu, di sisi pemerintah kabupaten, kegagalan BUMN untuk mengerjakan keseluruhan target, dilihat sebagai peluang untuk menggarap proyek-proyek investasi baru. Kesepakatan berhasil mereka dapatkan dari 13 perusahaan perkebunan sawit, dan dua perusahaan komoditi tanaman pangan yang masih dalam proses pengajuan izin lokasi. Namun demikian, sampai dengan Desember 2014, luas lahan yang dikelola dan sudah menghasilkan pada praktiknya hanya mencakup 100 ha yang digarap oleh PT. PIHC untuk satu musim tanam padi dan satu musim tanam jagung, ditambah DEM Area

Dinas Pertanian di Kecamatan Muara Pawan seluas 4 ha dan DEM area yang dikelola Lapas Ketapang 0,8 ha atau hanya sekitar 0,1% (104,8 ha) dari total 100.000 ha yang ditargetkan semula.

Kendala terbesar, menurut pandangan Kepala Bappeda, ialah proses pelepasan tanah dalam kawasan hutan. Proses ini harus disetujui oleh Kementerian Kehutanan²² dan disahkan melalui penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah, baik di provinsi maupun kabupaten. Masalahnya, sampai dengan hari ini masih terjadi perubahan-perubahan keputusan dari Kementerian Kehutanan²³ tentang perubahan luas kawasan hutan yang menyebabkan bukan hanya RTRW Kabupaten Ketapang, tetapi juga RTRW Provinsi Kalimantan Barat yang harus diacu oleh RTRW kabupaten, masih dalam proses penetapan.

Namun sesungguhnya, bukan hanya persoalan proses penyediaan tanah di atas kertas saja yang menjadi kendala, tetapi praktik pelaksanaan kebun pangan yang disebut sebagai 'pola kemitraan dengan masyarakat' dan dikelola BUMN terus dilanda persoalan. Tanah yang dalam bayangan sebagian pihak sudah berada di tangan PT. PIHC, karena didasari oleh perjanjian penyerahan tanah dan keikutsertaan dalam proyek Kebun Pangan BUMN, bagi sekelompok petani pemilik ikatan tersebut tidak lagi berlaku jika tanah mereka tidak segera digarap dan membuahkan hasil nyata.

Kondisi-kondisi tersebut menggambarkan bahwa model pertanian tanaman pangan yang dikelola dalam bentuk kebun pangan skala luas

²¹ Wawancara dengan staf PT PIHC pada 19 Desember 2014 yang menyebutkan kasus korupsi mantan Direktur PT SHS.

²² Sekarang menjadi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK)

²³ Perubahan dari SK No. 259/KPTS-II/2000 ke SK No. 936/Menhut-II/2013 ke SK terbaru No. 733 tahun 2014

memiliki kompleksitas persoalan dalam hal penyediaan tanah, tenaga kerja, dan produksi. Kuasa atas tanah merupakan arena kuasa multi-aras, pihak-pihak yang meluncurkan klaim dan berkontestasi: pemerintah, perusahaan dan warga desa, akan selalu mencoba mendapatkan legitimasi atas penguasaan tanah tersebut, sehingga legitimasi adalah sebuah proses yang melibatkan beragam praktik dan narasi.²⁴ Dilema legitimasi atas tanah ini akan diulas melalui kasus proyek kebun pangan BUMN di Desa Sukamaju.

'Lahan Tidur' di Kebun Pangan BUMN

Salah satu lokasi program Kebun Pangan BUMN yang terletak di Desa Sukamaju mencakup luasan lahan 1.427,10 ha. Dalam paparannya kepada berbagai pihak, PT. SHS menyatakan bahwa mereka akan menjalankan bentuk pertanian yang mereka sebut sebagai '*non-capitalist farming*'. Alasannya, PT. SHS tidak akan mengakuisisi tanah dari para pemilik, melainkan akan menawarkan sistem bagi hasil 60-40, yaitu 60% untuk perusahaan dan 40% untuk pemilik lahan. Lebih dari itu, perusahaan menjanjikan akan membantu pengurusan status tanah yang belum memiliki Surat Keterangan Tanah (SKT) untuk mendapatkannya, dan bagi yang sudah memiliki SKT akan diuruskan sertifikatnya.²⁵ Janji ini berhasil meyakinkan sekitar 300 orang warga pemilik tanah di Desa Sukamaju untuk menyatakan bersedia ikut dalam program dan menyerahkan tanahnya untuk digarap oleh perusahaan sehingga diperoleh lebih kurang 1.400 ha tanah yang tersedia untuk perusahaan.

Kesediaan warga melepas tanahnya tidak terlepas dari peran Kepala Desa Sukamaju untuk meyakinkan warganya agar memanfaatkan proyek ini demi mendapatkan keuntungan dari 'lahan tidur' mereka. Petani pemilik lahan, kepala desa, dan warga Desa Sukamaju pada umumnya menggunakan istilah lahan tidur untuk menunjuk pada tanah hutan yang dibuka oleh warga tapi kemudian selama bertahun-tahun tidak digarap sebagai lahan pertanian. Pada 2006 Kepala Desa (kala itu belum menjabat sebagai kepala desa) dan hampir semua petani laki-laki di Sukamaju beramai-ramai membuka hutan di sekitar kampung. Para pembuka lahan, sekelompok 20 orang dan dikepalai oleh sang tokoh yang kemudian menjadi kepala desa, membagi jatah penguasaan tanah seluas dua hektar untuk tiap orang. Lalu pembuka lahan berikutnya, yang meneladani tindakan para pendahulu mereka, hanya dibolehkan oleh para pendahulu ini untuk membuka lahan satu hektar saja per orang.

Akan tetapi, disadari kemudian bahwa lahan ini ternyata sulit untuk langsung digarap. Masalah

banjir tak bisa teratasi oleh petani karena memerlukan penanganan pintu air dan saluran yang tidak murah biayanya. Kondisi ini menyebabkan petani untuk membiarkan lahan mereka 'tidur' dan menyiapkannya sebagai cadangan buat anak cucu atau keperluan di masa depan. Alasan lain mengapa lahan ini tidak digarap adalah karena mereka sendiri kesulitan mendapat tenaga kerja untuk memperluas lahan tanam dari sawah dan kebun yang luas lahan rata-rata per petani mencapai satu sampai tiga hektar. Oleh sebab itu, sejumlah lahan yang diserahkan kepada perusahaan BUMN memang bukan lahan produksi aktual sehingga dalam perhitungan petani akan sangat menguntungkan jika lahan yang menganggur itu bisa memiliki status jelas dan digarap oleh pihak lain tanpa harus mengeluarkan ongkos produksi.

Kendati begitu, tetap ada petani yang pada awalnya enggan untuk menyerahkan lahan. Kebanyakan dari kelompok ini adalah mereka yang memiliki ternak sapi dan menggunakan tanahnya untuk padang penggembalaan. Kendala ini diatasi oleh sang kepala desa dengan cara menjanjikan akan dibangun kandang komunal, yaitu kandang bersama bagi para peternak sapi. Kepala Desa berani menjanjikan kandang komunal ini atas petunjuk dan jaminan Kepala Bappeda untuk pengadaannya. Janji ini berhasil meyakinkan para pemilik ternak untuk akhirnya mau menyerahkan tanah.

Selain itu, Kepala Desa juga berhasil mengatasi maraknya masalah sengketa lahan yang diakibatkan oleh SKT yang tumpang tindih. Banyak SKT yang dikeluarkan oleh kepala desa pendahulunya tidak mengindahkan pemeriksaan lokasi tanah sehingga menyebabkan banyak kasus sengketa tanah. Ia berinisiatif untuk membentuk tim pengukuran tanah yang bertugas memperjelas luas dan lokasi penguasaan tanah di desa. Untuk bisa ikut serta dalam proyek memang diperlukan tanah yang bebas sengketa, dan dengan alasan ini Kepala Desa memastikan pembuatan peta potensi desa yang menunjukkan status penguasaan tanah di Sukamaju. Berdasarkan peta inilah kepala desa mengajukan diri kepada Bappeda agar lahan di desanya masuk dalam proyek *food estate*.

Para pemilik lahan yang setuju kemudian diminta menandatangani surat pernyataan yang ternyata tak seorang pun kini menyimpannya. Kepala Desa pun berkelit dengan mengatakan bahwa ia tak memiliki arsip karena sudah diserahkan kepada PT. SHS. Sementara, PT. PIHC mengatakan bahwa mereka tidak pernah menerima arsip itu dari PT. SHS sampai sekarang. Akhirnya, perjanjian ini tidak pernah terlacak lagi jejaknya, kecuali ingatan bahwa tanah petani diserahkan untuk dikelola perusahaan dan akan mendapat bagi hasil selama 20 tahun. Memang pada gilirannya bagi hasil tersebut ditunaikan oleh perusahaan terhadap petani pemilik tanah yang lokasinya dijadikan lahan uji coba. Kepala Desa, contohnya, memiliki dua petak lahan

²⁴ Sikor dan Lund (2009)

²⁵ Wawancara dengan Pak Asmara di lokasi kebunnya di Desa Sukamaju pada 26 Juni 2014. Ia adalah petani pemilik tanah yang membatalkan kesertaannya dalam proyek karena lebih percaya menggarap tanah sendiri.

yang masuk dalam 100 ha uji coba dan sudah dua kali ditanami, sekali dengan tanaman padi lalu disambung dengan tanaman jagung dan ia sudah menerima bagi hasil.

Uji coba yang hanya dilakukan di tanah seluas 100 ha dan sudah dua kali panen serta melaksanakan bagi hasil tersebut menyebabkan kegelisahan para pemilik tanah yang lahannya tidak masuk dalam plot 100 ha ini. Seorang ketua kelompok tani yang memiliki lahan 1,5 hektar di lokasi perusahaan mengeluh, "... yang dapat [keuntungan] itu yang perutnya gendut-gendut [para elite desa dan pemerintah daerah], yang perut kurus seperti *saye ni* mana ...", begitu katanya. Petani pemilik warung yang sudah menyerahkan enam hektar tanah pun mengeluh kalau lahannya sampai sekarang tidak digubris sama sekali oleh perusahaan. Kepala Desa pun kewalahan menahan sebelas orang yang sudah menyatakan akan 'menarik' lahannya dari perjanjian kerjasama dengan perusahaan.

Kegagalan perusahaan untuk merealisasikan janji bagi hasil adalah sebuah praktik yang menggugurkan legitimasi penguasaan tanah yang telah diperoleh perusahaan, kendati legitimasi itu didapat melalui perjanjian bagi hasil yang tidak bisa dibuktikan keberadaan suratnya. Situasi lain yang memperkuat upaya petani pemilik tanah menarik diri dari perjanjian dengan perusahaan adalah maraknya penjualan tanah di lokasi dan di sekitar lokasi KFE. Di berbagai tempat, kita dapat menjumpai papan pengumuman dari kayu yang menawarkan 'tanah dijual' disertai nomor telepon yang bisa dihubungi. Ternyata harga tanah di wilayah ini sudah mencapai 50 juta rupiah per hektar. Kehadiran *food estate* tampaknya telah menghasilkan komodifikasi tanah yang semakin meluas. Jika sebelumnya 'lahan tidur' tidak bernilai tukar, maka kini lahan tidur berubah menjadi komoditi yang menawarkan nilai tukar menggairkan.

Buruh Migran: Proses Rekrutmen dan Kontrol

Kebutuhan pekerja di kebun pangan seluas 100 ha ini cukup besar. Bisa kita hitung bersama dari realisasi biaya produksi tahun 2014 (Tabel 5 di Lampiran) bahwa total jumlah tenaga kerja per hektar berkisar antara 40-60 orang untuk sekali penanaman. Untuk pemanenan bisa mencapai 200-250 orang, menurut penjelasan staf PT PIHC. Jika diasumsikan 100 ha ini dikerjakan serentak, maka tenaga kerja untuk kebun pangan ini setidaknya memerlukan 4.000 orang pada saat tanam dan puluhan ribu orang pada saat panen. Namun, untuk kebutuhan tenaga kerja ini PT. PIHC mengeluhkan sulit mendapatkan pekerja.

Saat pertama kali mendatangi lokasi BUMN di bulan Februari 2014, tanam padi pertama baru dimulai. Kami berkenalan dengan sekelompok pekerja yang terdiri dari lima orang berasal dari

Cianjur, Jawa Barat. Kang Teja²⁶ bersama keempat kawannya adalah transmigran yang datang ke Ketapang tahun 2010 dan ditempatkan di lokasi transmigrasi Desa Sei Besar, sekitar 40 km dari lokasi kebun pangan. Ia datang sebagai *kepala rombongan*²⁷ untuk bekerja di kebun pangan dengan sistem kerja dan upah borongan. Katanya, kabar tentang lowongan kerja borongan di kebun pangan ini ia dengar sebagai kabar dari mulut ke mulut di antara kawan sesama transmigran yang biasa bekerja sebagai buruh. Meskipun belum tahu persis apa yang akan dikerjakan dan berapa upah yang akan diterima, dengan mengendarai tiga motor, rombongan 'buruh trans' ini berusaha mengejar kesempatan bekerja. Begitulah yang sudah mereka lakukan selama beberapa tahun terakhir setiba di Ketapang: 'mengais-kais kesempatan kerja buruh'.

Mereka mengeluh tidak bisa berharap pada tanah pembagian dua hektar jatah mereka di lokasi trans, karena kondisi tanahnya yang bergambut dan hanya bisa ditanami nanas dan tanaman keras lainnya. Tidak mungkin dengan kondisi lahan seperti itu mereka bersawah atau berharap menanam yang lain untuk kebutuhan sehari-hari. Oleh sebab itu, untuk mendapatkan uang, mereka harus mencari pekerjaan di perkebunan sawit, tambang bauksit yang dibuka di kabupaten sebelah, atau merantau sampai ke Kota Pontianak untuk menjadi kuli bangunan. Mereka merasa lebih nyaman bekerja seperti itu di Jawa, karena tipikal pengusaha di sini 'bermodal dengkul' dan suka berhutang. Akibatnya, pernah satu kali ketika bekerja sebagai kuli bangunan di Pontianak, upah mereka tidak dibayarkan, dan karenanya mereka harus berjalan kaki dan menumpang truk untuk pulang ke Ketapang, dan baru sampai setelah dua hari perjalanan untuk jarak yang seharusnya bisa ditempuh dalam lima jam saja dengan bis.

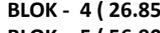
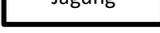
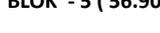
Kondisi yang serba tak pasti dalam memperoleh sejumlah uang di setiap harinya, membuat mereka mengejar kerja upahan ke mana pun. Inilah yang menyebabkan mereka menerima pekerjaan di kebun pangan, meskipun terdapat ketidakjelasan dalam jenis pekerjaan dan upah yang akan diterima di mana untuk urusan upah, mandor yang akan menegosiasikannya dengan pihak pekerja. Kecepatan kerja sangat berarti untuk perolehan keuntungan bagi para pekerja borongan. Terik matahari di garis khatulistiwa memang luar biasa, sebab itu Kang Surya²⁸ menyatakan bahwa mereka hanya sanggup bekerja dari pukul 6-9 pagi, dan disambung lagi pukul 4 sore sampai malam. Mereka ini bisa bekerja sampai pukul 10 malam, tergantung pada beban target penyelesaian pekerjaan. Jika terlampaui lamban mereka bekerja, maka akibatnya

²⁶ Pseudonym

²⁷ Istilah untuk orang yang membawa orang lain bekerja borongan di kebun pangan

²⁸ Pseudonym



Padi		: BLOK - 1 (36,195 HA)	Jagung		: BLOK - 1 (32,417 HA)		: BLOK - 4 (26,854)
		: BLOK - 2 (29,750 HA)			: BLOK - 2 (36,846 HA)		: BLOK - 5 (56,907)
					: BLOK - 3 (47,219 HA)		

Gambar 3. Trial plots of KFE in Sukamaju vilage

jumlah upah yang didapat dan harus dibagi di antara mereka akan semakin kecil dibandingkan dengan jumlah upah harian, dan bagi mereka itu artinya merugi. Mandor PT. PIHC, yang juga penduduk Sukamaju dan biasanya merupakan kerabat dari kepala desa, memberi mereka terpal berwarna biru sebagai tempat bernaung dari hujan dan panas selama bekerja di lokasi. Kelompok Kang Teja sengaja memasang terpal tidak jauh dari sungai, karena air dan kebutuhan MCK hanya bisa didapat dari situ. Setengah karung beras juga diberikan oleh sang mandor sebagai bahan makanan pekerja. Tak pernah mereka sangka, bahwa terpal dan beras pemberian ini dihitung sebagai utang sebesar Rp 500.000, dan untuk pengembaliannya akan dipotong dari upah mereka.

Setelah mereka hitung, terutama karena terkejut pada upah yang akan dipotong, Kang Teja sebagai kepala rombongan akan mengajukan kepada mandor untuk mendapat upah Rp 1.200.000 per ha untuk kerja penyiangan. Setelah kerja seluas 1,4 hektar, ternyata besaran upah tersebut tidak disetujui oleh mandor dan mereka hanya dibayar Rp 1.000.000 per ha (lihat Tabel 5 di Lampiran). Kang Teja dan kawan-kawan tidak senang dengan keputusan tersebut dan memilih untuk meninggalkan lokasi. Kalau diteruskan mereka merasa rugi, karena tidak mencapai target pendapatan setara dengan Rp 70.000 per hari. Akhirnya, mereka hanya membawa pulang uang Rp 500.000, itupun masih dipotong oleh mandor dan harus dibagi berlima. Akan tetapi, beberapa hari kemudian ketika kami mengunjungi rumah Kang Teja, ia bercerita kalau ia sudah bekerja sebagai ‘buruh pancang’ di kebun sawit milik Tauke kenalannya dengan membawa dua teman lain. Cerita

ini menyadarkan kami bahwa buruh memiliki posisi tawar yang tinggi di pasar tenaga kerja di wilayah ini. Menurut Kang Surya, orang trans memang disukai sebagai pekerja karena etos kerjanya lebih rajin daripada ‘orang lokal’. Di samping itu, ‘orang lokal’ dianggap masih melakukan cara tanam padi yang terbelakang: lahan tidak diratakan, pengairan tidak diusahakan, jarak tanam asal-asalan, begitu tutur Kang Surya.²⁹

Enam bulan setelah pertemuan dengan Kang Teja, kami bertemu dengan Mas Darno di sebuah pondok pekerja yang dibangun di lokasi Kebun Pangan BUMN. Mas Darno dan keluarganya yang terdiri dari isteri, anak, ibunya, tiga adiknya, ditambah dengan istri dan anak dari adik tertuanya, sudah setahun tinggal di pondok itu. Mereka adalah pekerja-pekerja pertama yang tinggal di pondok-pondok pekerja yang dibangun oleh pemerintah kabupaten di lokasi kebun pangan. Sesungguhnya, di Kalimantan Barat, mereka bermukim di satu desa bentukan pemerintah khusus untuk para transmigran bernama Desa Paket IV. Dengan luas dan kondisi tanah seadanya, mereka bertani menanam padi lokal. Hasil dari bertani di tempat baru ini awalnya cukup baik, tapi setelah dihantam hama tiga kali musim tanam, mereka ambruk tak lagi punya modal untuk bertani. Oleh sebab itu, mereka harus mencari mata pencaharian lain, sekalipun jauh dari rumah.

Satu ketika, Kepala Desa Paket yang asalnya dari Sukamaju kedatangan Kepala Desa Sukamaju yang sedang mencari pekerja untuk kebun pangan milik perusahaan BUMN. Gayung

²⁹ Lihat uraian White (2013) mengenai stereotype kepada petani kecil.

bersambut, kondisi warga Desa Paket IV yang sedang dirundung hama serta-merta menerima tawaran itu dengan gembira. Satu desa hampir kosong, karena kebanyakan petaninya membutuhkan kerja upahan untuk memperoleh penghasilan yang sebelumnya bisa dicukupi dari bertani di desa sendiri. Mas Darno termasuk salah satu keluarga yang paling awal menangkap kesempatan tersebut dan bertahan sampai setahun kemudian, meskipun harus tinggal di pondokan yang terbuat dari kayu berukuran tidak lebih dari 25 meter persegi untuk dihuni dua keluarga. Mandi dan cuci dilakukan di saluran depan pondok yang berair coklat, karena gambut dan kadang-kadang menjadi hijau berlumut tercampur pupuk dan pestisida.

Mas Darno dan ketiga adiknya bekerja sebagai penebar pupuk dan kapur dengan dibayar borongan per ha sebesar Rp 200.000. Ibu Mas Darno awalnya bergabung dengan anak-anaknya sebagai pekerja borongan, tapi karena usia dan tenaga yang terbatas, ia mengambil pekerjaan sebagai buruh harian lepas dengan upah Rp 60.000 untuk enam hari kerja. Buruh harian bekerja selama enam hari seminggu dan menerima pembayaran di setiap Sabtu. Sedangkan buruh borongan menerima upah setiap minggu di hari Rabu jika target kerja tercapai. Kalau tidak, maka pembayaran mereka baru akan diterima di minggu berikutnya. Mas Darno dan adik-adiknya dalam seminggu rata-rata bisa menyelesaikan sepuluh hektar, sehingga pendapatan mereka bisa mencapai Rp 2.000.000 per minggu yang dibagi berempat.

Mandor 'nomor satu' (mandor kepala) memiliki posisi yang sangat menentukan dalam proses penerimaan buruh harian. Pak Erman, yang menduduki posisi ini, adalah kakak dari kepala desa Sukamaju. Setiap pencari kerja harus menghadapnya untuk bisa diterima sebagai buruh harian atau tidak. Sementara untuk buruh borongan, kepala rombongan yang membawa anak buah dan biasanya sang anak buah ini harus membayar kepada kepala rombongan agar bisa terlibat. Khusus untuk pekerja dari Desa Paket IV, kepala rombongnya merupakan kerabat Kepala Desa Sukamaju.

Di lokasi PT. PIHC, ada lima orang mandor dan tiga orang di antaranya merupakan kerabat kepala desa. Setiap mandor bertanggungjawab atas blok tertentu dan bisa berpindah-pindah (bertukar) lokasi. Kendati terdapat beberapa mandor, Mas Darno dan adik-adiknya merasa sangat jarang diawasi. Satu hari mandor paling hanya sekali datang ke lokasi kerja mereka, atau bahkan bisa tidak datang sama sekali. Mandor pasti hadir ketika ada pengiriman kapur atau pupuk di lokasi yang harus mereka kerjakan. Hubungan pekerja dan mandor sepertinya sangat cair, dan lebih didasarkan pada hubungan yang dirasakan saling menguntungkan ketimbang menitikberatkan pada kontrol dan disiplin kerja. Salah satu mandor memiliki kios di pasar, dan ia mengizinkan para pekerja untuk berhutang barang

kebutuhan sehari-hari di kiosnya, sampai jatuh tempo penerimaan upah para pekerja itu. Kita melihat di situ bahwa alasan sulit mendapatkan pekerja, memungkinkan perusahaan mengupayakan untuk mempertahankan buruh dengan cara persuasif, bukan melalui tindakan represif.

Produksi dan Bagi Hasil: Angan-Angan Mekanisasi

Mekanisasi yang idealnya dilakukan pada pertanian skala besar seperti kebun pangan ini, sama sekali tidak terlihat diterapkan. Hampir semua pekerjaan dilakukan secara manual (dengan tenaga manusia), kecuali pengolahan tanah yang menggunakan traktor. Oleh sebab itu, tenaga kerja menjadi faktor penentu dalam keberhasilan atau kegagalan proyek kebun pangan. Keluhan utama staf PT. PIHC adalah kualitas pekerja yang tidak sesuai harapan, karena sebagian besar pekerja lebih sering bekerja di perkebunan sawit, maka praktik penebaran pupuk pun mengikuti cara penebaran untuk kepala sawit, yaitu 'lempar spot'. Metode seperti ini tidak tepat untuk diterapkan pada tanaman padi, karena teknik seharusnya adalah 'lempar sebar'.

Masalah lebih besar timbul manakala mempekerjakan tenaga lokal. Kebiasaan para petani Melayu adalah menanam padi jenis lokal yang usia panennya panjang sampai enam bulan sehingga mereka hanya panen satu kali setahun. Jenis padi yang berumur panjang, bertangkai keras, dan berukuran tinggi seperti padi yang biasa ditanam warga, tidak mengharuskan petani bekerja cepat dan kontinyu. Proses tanam bisa bertahap dilakukan sampai sebulan. Begitu pula dengan panen yang tidak dikerjakan serentak dan masih menggunakan ani-ani. Dengan kebiasaan kerja yang dibentuk oleh budidaya padi lokal dan jauh berbeda dengan tuntutan kerja padi unggul yang sangat intensif, pekerja lokal dianggap 'lambat dan malas'. Tentu saja, kelangkaan tenaga kerja tidak memungkinkan PT. PIHC untuk banyak memilih. Akhirnya, pekerja di perusahaan BUMN ini berasal dari semua jender dan beragam tingkatan umur. Hanya untuk pekerjaan-pekerjaan berat saja perusahaan baru akan meminta calo khusus untuk mencari pekerja laki-laki yang masih muda dan kuat.

Faktor tenaga kerja dikombinasikan dengan perubahan keseimbangan ekosistem akibat pembukaan hutan yang menyebabkan serbuan tikus ke lahan padi, mengakibatkan rendahnya tingkat panen di hampir semua varietas padi yang diujicobakan (Tabel 2). Angka panen tertinggi masih di bawah lima ton per hektar, yaitu angka yang dijadikan target produksi.

Sementara itu, dalam Tabel 3. di bawah menunjukkan bahwa dari angka realisasi anggaran untuk produksi, biaya yang dibutuhkan untuk produksi padi per hektar sebesar Rp 19.889.100,-. Hampir 40 persen dari biaya tersebut, atau yang terbesar, merupakan biaya untuk membayar tenaga

Tabel 2. Hasil Produksi Padi Percobaan Dengan Luas Tanam 100 Hektar

Perlakuan	Bobot Gabah Kering Panen per Ha (Ton)				
	Cibogo	Dendang	Inpari-16	Situbagendit	Siak Raya
a. Tanpa Pupuk Mikro & Dolomit	3,67	4,40	4,11	3,87	3,95
b. 5 kg Zn/Ha	4,03	4,69	3,27	3,09	3,17
c. 2 kg B/Ha	3,79	4,68	3,67	3,42	3,40
d. 2.000 kg Dolomit/Ha	3,60	4,23	3,57	3,29	4,00
e. 5 kg Zn/Ha + 2 kg B/Ha	4,05	4,44	3,26	3,24	2,97
f. 2 kg B/Ha + 2.000 kg Dolomit/Ha	3,58	4,38	2,77	2,95	4,13
g. 5 kg Zn/Ha + 2.000 kg Dolomit/Ha	3,66	4,48	3,13	3,41	3,77

Sumber: PT PIHC, 2014

Tabel 3. Analisis Potensi Kerugian PT Pupuk Indonesia (dalam Rp)

Keterangan		PT PIHC	Petani
Biaya budidaya per ha (ongkos produksi)		19.889.100	-
Hasil Panen GKG (Rp4.000 x 4.000 kg)		16.000.000	-
Persentase Bagi Hasil	Berdasarkan perjanjian petani dengan PT SHS (60% – 40%)	6.400.000	9.600.000
	Realisasi (80% – 20%)	3.200.000	12.800.000
Besaran Kerugian PT PIHC	Berdasarkan perjanjian petani dengan PT SHS (60% – 40%)	(-) 10.289.100	-
	Realisasi (80% – 20%)	(-) 7.089.100	-

Sumber: PT. PIHC dan hasil wawancara

kerja. Sementara itu, dengan hasil rata-rata 4 ton per hektar pendapatan perusahaan belum dipotong bagi hasil tidak mencapai Rp 6.000.000, sehingga tanpa bagi hasil pun PT. PIHC merugi sekitar Rp 13 juta per hektar. Oleh sebab itu, perusahaan kemudian meminta persetujuan para petani pemilik tanah untuk menurunkan ongkos bagi hasil tersebut dari proporsi 60-40 menjadi 80-20 (80% untuk perusahaan dan 20% untuk petani) sehingga potensi kerugian 10 juta rupiah per hektar dapat ditekan menjadi 7 juta rupiah per hektarnya. Persetujuan ini sebetulnya tidak mengherankan mengingat di antara para pemilik tanah di lahan uji coba ini salah satunya adalah kepala desa dan bupati.

Ibarat jauh panggung dari api, rencana capaian produksi padi yang diangankan oleh pemerintah tampaknya tidak bisa terpenuhi oleh perusahaan pengelola kebun pangan skala luas.

Selain masalah kualitas lahan yang tersedia, faktor penyediaan tenaga kerja dan kualitas mereka yang tidak sesuai ekspektasi serta mekanisasi pertanian yang tidak diterapkan di sana merupakan beberapa hal yang menjadi penyebab kegagalan hasil produksi kebun pangan.

PENUTUP

Kontradiksi Klaim dan Realitas KFE

Dalam kasus di Kabupaten Ketapang, kami mencoba menunjukkan anggapan bahwa pengembangan kebun pangan skala luas atau pertanian modern berbasis korporasi sebagai jalan satu-satunya mencapai produksi pertanian dalam jumlah besar, yang memungkinkan surplus produksi dan memenuhi kebutuhan pangan nasional sebagaimana diangankan oleh MP3EI dan beberapa kebijakan turunannya, bukan pilihan yang dianjurkan. Hal ini dibuktikan dengan munculnya beragam persoalan yang cukup pelik pada tiga soal: tanah/lahan, tenaga kerja, dan produksi.

Melanjutkan gagasan White di awal tulisan tentang modernisasi dalam produksi pertanian, ada hubungan negatif antara, “*farm size and output per hectare: the smaller the size of the farm, the greater its productivity per hectare ... the real problem may not lie in the size of large farms as such, but more in their industrial and capitalist nature.*”³⁰ Jadi sama sekali bukan sebuah kepastian bahwa dengan modal luas lahan akan sejalan dengan hasil yang didapat darinya, karena relasi kapitalistik yang diterapkan justru menjadi bumerang bagi ekstraksi surplus itu sendiri. Secara historis, sudah dibuktikan bahwa

³⁰ White (2013)

usaha untuk menerapkan kontrol pada buruh perkebunan sulit dilakukan dan sangat problematik. Inilah kontradiksi internal dari sistem kapitalis yang tidak bisa dihindari.

Konsep *'industrial and capitalist nature'* itulah yang kemudian juga perlu dicermati lebih jauh, bahwa sebetulnya, *"livelihoods in much of the world are shaped by capitalist relations ...,"* kata Tania Li, karena hubungan ini menimbulkan bentuk-bentuk baru kemiskinan dan juga pemiskinan struktural, dan sebab pertalian ini menekan orang-orang yang berada di dalamnya berada pada situasi terhimpit dari segala sisi.³¹ Kita dapat memahami dari beberapa pengalaman kelompok dan keluarga buruh KFE di atas bagaimana bentuk-bentuk hubungan semacam itu menjadi begitu nyata dalam keseharian. Rata-rata pekerja di perusahaan pemerintah pengelola kebun pangan di Ketapang merupakan transmigran yang gagal bertani atau gagal memenuhi ketercukupan ekonomi rumah tangganya di tempat asal. Ini yang membuat mereka berusaha mencari mata pencaharian upahan untuk mendapatkan penghasilan yang relatif tetap. Sebagaimana Marx mengatakan, bahwa *"landless workers are not free to choose how to spend their time. Their lives are governed by a 'dull compulsion' as they must sell their labor every day in order to survive."*³² Beberapa kisah keluarga buruh trans di atas merupakan satu bukti kecil kenestapaan dari pertalian kapitalistis seperti itu.

Hal lain yang perlu ditekankan adalah bahwa tidak terbukti anggapan pemerintah soal tenaga kerja akan secara otomatis tersedia setelah dibukanya kebun pangan. Pasar tenaga kerja yang mengatur mekanisme penyediaan buruh pada akhirnya memang menyerap mereka yang disebut sebagai petani tak bertanah dan gurem (bertanah tapi seperti tak bertanah), tetapi dalam kondisi persaingan yang ketat dengan sistem agraria kapitalistik lainnya (perkebunan sawit dan pertambangan). Selain itu, mereka juga membayangkan bahwa kebutuhan akan tenaga kerja dapat disubstitusi dengan mekanisasi (modernisasi pertanian dalam perspektif pemerintah). Padahal, instansi pemerintah yang menjadi *'leading sector'* kebun pangan memiliki kewenangan terbatas untuk mengatur instansi lainnya yang menyebabkan pengadaan mekanisasi untuk aktivitas produksi pertanian oleh Dinas Pertanian kabupaten ini hanya ditujukan kepada kelompok petani skala kecil (*rural smallholder*) atau pertanian non industri, bukan ditujukan untuk pertanian skala besar yang berorientasi pada industri. Dengan demikian, proyek kebun pangan skala luas berbasis korporasi bukanlah jalan keluar untuk mencapai surplus produksi pangan di Indonesia, karena implementasi atas modernisasi pertanian dalam model seperti ini hanya

menunjukkan sebuah kesia-siaan belaka: usaha besar demi hasil yang tak nyata.

DAFTAR PUSTAKA

- Bappeda Kabupaten Ketapang. 2014. Kebijakan Pangan, Implementasi dan Tantangannya di Kabupaten Ketapang Provinsi Kalimantan Barat. Presentasi dalam *Diskusi Ketahanan Pangan* di Fakultas Ilmu Politik, UGM Yogyakarta, November. Kabupaten Ketapang: Bappeda Kabupaten Ketapang, Provinsi Kalimantan Barat.
- Harvey, David. 2001. *Spaces of Capital: Toward a Critical Geography*. New York: Routledge.
- Harvey, David. 2003. Accumulation by Dispossession, dalam David Harvey *The New Imperialism*, hlm. 137 – 182. New York: Oxford University Press.
- Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2011 tentang Pengamanan Produksi Beras Nasional dalam Menghadapi Kondisi Iklim Ekstrem
- Ito, Takeshi, Noer Fauzi Rachman & Laksmi A. Savitri. 2014. Power to Make Land Dispossession Acceptable: A Policy Discourse Analysis of The Merauke Integrated Food And Energy Estate (MIFEE), Papua, Indonesia¹, *The Journal of Peasant Studies*, DOI: <<http://dx.doi.org/10.1080/03066150.2013.873029>>.
- Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. 2011. *Master Plan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia 2011-2025*. Jakarta: Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.
- Kementerian Pertanian. 2010. Grand Design Pengembangan Pangan dan Energi Skala Luas (Merauke Food Estate)
- Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan Nomor 259/KPTS-II/2000 Tanggal 23 Agustus 2000 tentang Penunjukkan Kawasan Hutan di Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Barat Seluas ± 9.178.760 Hektar.
- Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 733 tahun 2014 tentang Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan Menjadi Bukan Kawasan Hutan di Kalimantan Barat
- Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK. 936/Menhut-II/2013 tentang Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan Menjadi Bukan Kawasan Hutan Seluas ± 554.137 hektar, Perubahan Fungsi Kawasan Hutan Seluas ± 352.772 Hektar, dan Penunjukkan Kawasan Bukan Kawasan Hutan Menjadi Kawasan Hutan Seluas ± 52.386 Hektar di Provinsi Kalimantan Barat.
- Li, Tania Murray. 2014. *Land's End: Capitalist Relations on an Indigenous Frontier*. Durham: Duke University Press.
- Polda Kalbar Tangkap Mantan Anggota MPR RI. <<http://www.siarjustisia.com/news/view/1841/>>

³¹ Li (2014:5-7).

³² Marx, Capital Vol.1, dalam Li (2014:7).

- polda-kalbar-tangkap-mantan-anggota-mrp-ri>. (10 Februari 2015)
- Savitri, Laksmi Adriani. 2013. Land Control and Ideological Struggle: Competing Articulations of “The Owner of Land”. *Journal of Rural Indonesia*, 1(1), 35-54. Diunduh dari <<http://ejournal.skpm.ipb.ac.id/index.php/rural-indonesia/article/view/36>>.
- Sikor dan Lund. 2009. Access and Property: A Question of Power and Authority, *Development and Change* 40(1): 1–22.
- Tasanaldi. 2012. *Regime Change and Ethnic Politics in Indonesia: Dayak politics of West Kalimantan*. Leiden: KITLV Press.
- Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.
- White, Benjamin. 2013. Does Indonesia Need Corporate Farms? Reflections on Modernization, Efficiency, and The Social Function of Land. *Journal of Rural Indonesia*, 1(1), 1-14. Diunduh dari <<http://ejournal.skpm.ipb.ac.id/index.php/rural-indonesia/article/view/35>>.

LAMPIRAN

Tabel 4. Program Kebun Pangan di Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat

No	Jenis Lahan	Alokasi Lahan (ha)	Jenis-jenis Lahan Yang Digunakan Untuk Program Investasi
1.	Lahan Tidur/Tanah Terlantar pada Area Penggunaan Lain (APL)	41.300	<p>Pola Kemitraan dengan masyarakat di Lahan Tidur/Tanah Terlantar:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pembangunan Kebun Pangan Skala Besar oleh BUMN Peduli Pangan (7.000 Ha) di Kecamatan Muara Pawan, Matan Hilir Utara, Benua Kayong dan Matan Hilir Selatan. <ol style="list-style-type: none"> a) PT. Pupuk Indonesia s/d Bulan Februari seluas 115 Ha di Desa Sukamaju, Kecamatan Muara Pawan. b) Pembangunan Kebun Pangan (Food Estate) Sinergi TNI-AD, BUMN Peduli Pangan dan Pemerintah Kabupaten Ketapang seluas 100 Ha di Desa Kuala Satong, Kecamatan Matan Hilir Utara. 2. DEM Area Pertanian Percontohan Terpadu Sinergi antara SKPD Pemerintah Kabupaten Ketapang (4 Ha) di Desa Sungai Awan Kanan Kecamatan Muara Pawan. 3. DEM Area Pertanian Percontohan Terpadu Sinergi antara TNI-AD dan Pemerintah Kabupaten Ketapang (6 Ha) di Desa Kuala Satong Kecamatan Matan Hilir Utara. 4. Percontohan Langsung dari Pejabat Daerah, Pimpinan Instansi, Camat, Kepala Desa dan Lurah (\pm100 Ha). 5. Cetak Sawah Kementerian Pertanian/APBN (700 Ha). 6. Cetak Sawah Dinas Pertanian/APBD (250 Ha).
2.	Lahan Pertanian, yang diklasifikasi sebagai kawasan Hutan Produksi untuk Konversi (HPK)	36.000	Model nucleus-plasma yang ditangani oleh perusahaan BUMN dan swasta: PT. Asia Mukti Lestari 3,800 Ha (<i>cassava</i> /ubi kayu)
3.	Lahan Pertanian, yang diklasifikasi sebagai kawasan Hutan Produksi untuk pinjam-pakai.	2.700	
4.	Lahan Pertanian, Areal Izin Usaha Perkebunan (IUP) (alokasi minimal 300 ha setiap konsesi)	20.000	<p>Pola Kemitraan antara pemerintah BUMN dan perusahaan swasta dengan masyarakat (daftar perkebunan perusahaan kelapa sawit yang setuju untuk mengalokasikan tanahnya untuk tanaman pangan) :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. PT. Swadaya Mukti Prakarsa: 1000 Ha 2. PT. Prana Indah Gemilang: 400 Ha 3. PT. Kayong Agro Lestari: 365 Ha 4. PT. Sinar Karya Mandiri: 300 Ha 5. PT. Ketapang Hutan Industri: 300 Ha 6. PT. Lestari Abadi Perkasa: 300 Ha 7. PT. Mentari Pratama: 300 Ha 8. PT. Mustika Agung Santosa: 300 Ha 9. PT. Fajar Borneo: 300 Ha 10. PT. Mitra Ketapang Abadi: 300 Ha 11. PT. Batu Mas Sejahtera: 300 Ha 12. PT. Agra Jaya Bhakti Tani: 300 Ha 13. PT. Sinar Makmur Sejahtera: 300 Ha
	Total	100.000	

Sumber: Bappeda Kabupaten Ketapang, 2014

Tabel 5. Realisasi Anggaran Biaya Budidaya Padi per Hektar tahun 2014

No	Kegiatan	Satuan	Volume	Harga satuan	Jumlah	Keterangan
1	Pengolahan lahan	Ha	1	2.200.000	2.200.000	2 org/unit traktor
2	Budidaya (tenaga kerja)					
	a. Persemaian	Ha	1	360.000	360.000	4-6 orang
	b. Pengapuran	Ha	1	150.000	150.000	2-4 orang
	c. Pupuk dasar	Ha	1	150.000	150.000	2-4 orang
	d. Penanaman	Ha	1	2.160.000	2.160.000	30-40 orang
	e. Pupuk susulan (2x)	Ha	1	150.000	300.000	2 orang
	f. Pengendalian HPT (4x)	Ha	1	150.000	600.000	Serangan HPT tinggi/4-8 org
	g. Penyiangan (2x)	Ha	1	1.000.000	2.000.000	Kondisi gulma tinggi/6-10 org
3	Benih, pupuk, pestisida					Pupuk subsidi
	a. Benih	Kg	30	8.000	240.000	
	b. NPK	Kg	400	2.300	920.000	Sesuai kondisi tanaman
	c. Urea	Kg	250	1.800	450.000	Sesuai kondisi tanaman
	d. Pupuk organik	Kg	1.000	500	500.000	
	e. Kaptan	Kg	2.000	500	1.000.000	
	f. Pupuk hayati	Kg	25	8.000	200.000	
	g. Pestisida	Paket	1	2.750.000	2.750.000	Serangan HPT tinggi
4	Biaya angkutan					
	a. Benih	kg	30	200	6.000	
	b. NPK	kg	400	200	80.000	
	c. Urea	kg	250	200	50.000	
	d. Pupuk organik	kg	1.000	200	200.000	
	e. Kaptan	kg	2.000	200	400.000	
	f. Pupuk hayati	kg	25	200	5.000	Asumsi serangan HPT tinggi
	g. Gabah hasil panen	kg	1.400	200	280.000	
5	Biaya sabit+rontok untuk panen	Ha	1	1.800.000	1.800.000	Diluar mesin perontok
6	Karung panen 100 kg	lembar	17	2.500	41.250	
7	BBM pompa air	liter	3	9.000	1.215.000	1 musim (128 hari) = 45 hari pump in
8	Lain-lain (alat pendukung budidaya)				1.831.850	Termasuk transport tenaga kerja
	Biaya budidaya per ha				19.889.100	
	Hasil panen	GKP	1.400	4.000	5.600.000	
	Bagi hasil 60-40 (realisasi: 80-40)					Berdasarkan perjanjian PT SHS
	a. PT PI				3.360.000	
	Realisasi				4.480.000	
	b. Petani				2.240.000	
	Realisasi				1.120.000	
	Laba rugi				-	
					16.529.100	
	Realisasi				-	
					13.160.100	

Sumber: PT. Pupuk Indonesia dan hasil wawancara

MITOS–MITOS DALAM PERTANIAN PADI DAN REKOMENDASI DARI PENELITIAN KEMANDIRIAN PANGAN AKATIGA

MYTHS IN RICE AGRICULTURE AND RECOMMENDATIONS FROM AKATIGA'S FOOD SELF-SUFFICIENCY RESEARCH

Isono Sadoko¹

Yayasan AKATIGA
Jalan Tubagus Ismail II No.2, Bandung 40134
E-mail: isadoko@gmail.com

Abstrak

Laporan ini merangkum beberapa temuan penelitian AKATIGA pada swasembada pangan yang berkaitan dengan semua mitos dalam penelitian pertanian dan masyarakat kebijakan saat ini. Ini termasuk upaya pemerintah untuk meningkatkan produksi padi yang berfokus pada promosi agribisnis beras di luar Jawa, fokus penciptaan lapangan kerja difokuskan pada sektor jasa perkotaan, gagasan lama bahwa desa adalah lingkungan yang harmonis dan homogen, saluran terbaik atau mekanisme untuk membantu petani, dan menggunakan mekanisasi pertanian berteknologi tinggi seperti cara untuk meningkatkan produktivitas. Artikel ini berpendapat bahwa pemerintah harus mengambil sisi dengan pertanian skala kecil, terutama di Jawa sebagai penghasil beras utama di Indonesia, dengan mendorong kesempatan kerja yang layak di sektor pertanian (termasuk pertanian padi), menggunakan penelitian yang berkaitan dengan kondisi daerah sebelum memperkenalkan teknologi pertanian, agar tidak mengurangi kesempatan kerja bagi petani miskin, meningkatkan produktivitas dan keberlanjutan melalui insentif bagi petani kecil, memanfaatkan Undang-Undang Desa untuk mendorong pemerintah desa untuk melakukan upaya nyata untuk membuat akses yang lebih luas mendarat bagi perempuan, pemuda yang ingin menjadi petani, dan orang-orang miskin yang tidak memiliki tanah, sampai mereka dapat mempersiapkan modal sendiri.

Kata kunci: Pertanian skala kecil, Efisiensi sosial, Kebijakan pertanian, Pertanian padi, Pembangunan desa, Indonesia

Abstract

This report summarizes some of the findings of AKATIGA's study on food self-sufficiency relating to all the myths in agricultural research and policy community nowadays. These include the government efforts on increasing rice production that focused on the promotion of rice agribusiness outside Java, the focus of employment creation focused on urban services sector, the old notion that village is a harmonious and homogeneous environment, the best channel or mechanism to help farmers, and using high tech agricultural mechanization as ways to improve productivity. This article argues that the government must be take side with the small-scale agriculture, especially in Java as a major rice producer in Indonesia, by encouraging decent employment opportunities in the agricultural sector (including rice farming), use research related to the condition of a region before introducing agricultural technologies, in order not to reduce employment opportunities for poor farmers, boost productivity and sustainability through incentives for small farmers, utilizing the Village Act (Undang-Undang Desa) to encourage village government to make real efforts to make wider access to land for women, youth who wants to be farmer, and the poor ones who do not have land, until they can prepare their own capital.

Keywords: *Small-scale agriculture, Social efficiency, Agricultural policy, Rice farming, Rural development, Indonesia*

¹ Peneliti Senior AKATIGA

PENDAHULUAN

Sebagai lembaga penelitian yang berorientasi mendorong perubahan, penelitian AKATIGA berupaya dapat membantu menciptakan perubahan yang lebih baik. Upaya tersebut dilakukan melalui dua strategi, yaitu mendorong perubahan kebijakan serta mendorong terjadinya urun rembuk dalam menciptakan wacana baru yang lebih produktif bagi rakyat miskin.

Penelitian kemandirian pangan yang dilaksanakan AKATIGA, seperti telah diulas dalam beberapa artikel sebelumnya juga bertujuan untuk mendorong perubahan.² Penelitian ini berakhir pada masa kampanye pemilihan presiden pada tahun 2014. Dalam kampanye tersebut, kedua kandidat Presiden Joko Widodo dan Prabowo Subianto mengangkat tema penting kemandirian pangan, utamanya adalah kemandirian padi. Kedua kandidat menunjukkan keberpihakan nyata kepada kelompok miskin dalam setiap usulan strategi pembangunan mereka.

Memanfaatkan peluang tersebut, AKATIGA berusaha memasukkan input dari hasil penelitian kemandirian pangan ini ke dalam visi misi calon presiden pada saat itu. Selanjutnya, usulan ini akan dipertajam sebagai masukan bagi kebijakan pertanian oleh Kementerian Pertanian, mungkin Kementerian Desa dan pemerintah-pemerintah kabupaten yang berminat.

Temuan menarik dari penelitian ini adalah adanya kenyataan-kenyataan yang sebenarnya sudah lama terlihat namun selalu tertutup oleh mitos-mitos yang menyesatkan. Sejumlah mitos tentang produksi dan produktivitas beras di Indonesia saat ini ternyata bertolak belakang dengan bukti-bukti yang dihasilkan dari berbagai penelitian, baik oleh AKATIGA maupun penelitian lain. Artikel ini bertujuan untuk mengulas mitos tentang pertanian padi di Indonesia berdasarkan penelitian yang dilakukan AKATIGA dan kenyataannya, serta implikasinya terhadap kebijakan pemerintah.

PEMBAHASAN

Mitos 1: Upaya Peningkatan Produksi Beras Harus Fokus pada Promosi Agribisnis Beras di Luar Jawa daripada Membantu Petani Kecil di Jawa

Seperti sudah diutarakan pada tulisan efisiensi pangan di jurnal ini, petani kecil Jawa saat ini menyumbang lebih dari 52% kebutuhan beras Indonesia. Sementara itu dari sisi serapan tenaga

kerja, pertanian kecil menyerap tenaga kerja 40.5% dari seluruh angkatan kerja pada 2013.³

Perencanaan Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI), yang akan memindahkan produksi beras keluar Jawa terutama ke Sulawesi, bagaikan mimpi di siang bolong. Jika ini terus dilaksanakan, Indonesia akan kehilangan produksi dan kesempatan kerja yang luar biasa besar dari Jawa. Kehilangan produksi ini yang tidak mungkin bisa digantikan dengan impor maupun produksi di daerah luar Jawa.

Impor sulit bisa menutupi produksi padi di Jawa karena tipisnya ketersediaan beras di pasar dunia. Kebutuhan tambahan dalam skala kecil (kurang dari 10% kebutuhan Indonesia) memang stok pasar dunia bisa menyediakan bagi Indonesia. Sementara, pasar dunia tidak mempunyai stok yang banyak jika Indonesia menginginkan import sebesar 60% dari konsumsinya. Terlebih lagi, sering terjadi negara penyedia beras lebih mementingkan mengamankan kebutuhan dalam negerinya dibandingkan menjual ke pasar dunia.

Selain jumlah produksinya yang jauh lebih kecil, produktivitas petani padi di luar Jawa juga masih lebih rendah dibandingkan dengan produktivitas petani-petani kecil di Jawa. Sebagai ilustrasi, pada tahun 2013, rata-rata petani kecil di Jawa bisa menghasilkan padi sebanyak 5,7 ton/ha sementara Sulawesi hanya bisa 4,8 Ton/ha⁴. Ide memindahkan produksi beras ke Sulawesi akan lebih banyak menemui tantangan kemampuan produksi dan produktivitasnya. Jika pemerintah ingin mencapai swasembada padi, seharusnya diiringi dengan mengembangkan pertanian skala kecil di Jawa karena sudah menjadi tumpuan dari produksi nasional selama ini.

Berbagai ide produksi beras skala besar, seperti agribisnis beras di Ketapang Kalimantan⁵ maupun ide-ide agribisnis beras lainnya, tidak ada yang menunjukkan peningkatan produksi dan produktivitas yang cukup besar yang layak dibandingkan dengan produksi beras petani kecil Jawa.⁶ Produktivitas Sang Hyang Sri di Kalimantan masih relatif kecil (sekitar 2 ton/ha⁷ dan produksinya juga masih sangat amat kecil. Selain itu, agribisnis Indonesia pada umumnya tidak menjanjikan kesempatan kerja yang memadai dibandingkan pertanian kecil beras. Pendapatan para buruh sawit di

² Ambarwati dan Harahap, *Tanah untuk Penggarap? Penguasaan Tanah dan Struktur Agraris di Beberapa Desa Penghasil Padi*; Herawati dan Adinugraha, *Menguak Realitas Orang Muda Sektor Pertaniandi Perdesaan*; Herlinawati dan Chazali, *Sistem Pertanian Padi Indonesia dalam Perspektif Efisiensi Sosial*.

³ BPS (2013, Hal. 41)

⁴ Pengolahan data produktivitas yang bersumber <http://aplikasi.pertanian.go.id/bdsp/newlok.asp>

⁵ Kebun Pangan Skala Luas Di Ketapang: Menggambar Angan-Angan Tentang Surplus Produksi (Laksmi A. Savitri & Khidir M. Prawirosusanto, 2015)

⁶ Lihat tulisan Savitri dan Prawirosusanto, 2015

⁷ Diambil dari <http://id.beritasatu.com/agribusiness/dahlan-iskan-food-estate-ketapang-belum-maksimal/71535>

pertanian besar di desa penelitian di Lampung⁸, misalnya hanya Rp 45.000–Rp 56.000/hari, sementara pendapatan buruh pertanian padi yang bekerja ganda selain pada tahapan panen bisa mencapai Rp. 50.000-150.000/hari.⁹ Petani kecil padi di Jawa, walaupun masih memerlukan bantuan untuk bisa lebih sejahtera dan lebih produktif, saat ini memiliki produktivitas dibanding skala internasional cukup baik, lebih baik atau setidaknya sama baiknya dengan produktivitas petani yang lebih besar (teori skala ekonomi bahwa makin besar suatu produksi maka akan semakin efisien tidak berlaku pada pertanian beras di Indonesia maupun beberapa kasus di dunia seperti Turki dll. FAO sendiri melihat masa depan pertanian dunia adalah pada pertanian kecil).¹⁰

Mitos 2: Penciptaan Tenaga Kerja Sebaiknya Difokuskan pada Sektor Jasa Perkotaan, dan Bukan pada Upaya Mendorong Kesempatan Kerja Layak di Sektor Pertanian, Termasuk Pertanian Beras.

Kecendrungan membesarnya sektor jasa dan mengecilnya sektor pertanian tidak bisa dipungkiri, namun perlu dipahami bahwa meningkatnya sektor jasa kecil tidak dibarengi dengan produktivitas tinggi atau pendapatan yang memadai. Di Indonesia, maraknya sektor jasa skala kecil tidak terampil bukan merupakan gambaran peningkatan produktivitas dari sektor riil (misalnya industri manufaktur) ke tersier (jasa) namun sebagai gambaran ketiadaan kesempatan kerja dan investasi yang memadai di sektor riil. Umumnya sektor ini berkembang karena memberikan jasa dengan upah murah sehingga menciptakan masalah lain seperti beban sampah, kepadatan penduduk, dan kemacetan di perkotaan. Sektor jasa di Indonesia, sebagaimana halnya sektor informal perkotaan di dunia, tumbuh karena kegagalan sektor riil untuk berkembang. Selain itu juga disebabkan oleh maraknya bisnis spekulasi yang menciptakan *bubble economics*.¹¹

Sektor jasa seperti ini secara rata-rata tidak mampu memberikan pendapatan memadai bagi pekerjaannya maupun pengusaha kecilnya. Sebagai ilustrasi, lihat tulisan Sistem Pertanian Padi Indonesia dalam Perspektif Efisiensi Sosial yang melihat perbandingan upah buruh panen dengan upah sektor non pertanian/usaha bermodal relatif kecil per hari di desa penelitian.¹² Hal ini tidak berarti pengembangan sektor jasa perlu dihambat,

namun investasi publik seharusnya berimbang dengan upaya mendorong kesempatan kerja pertanian kecil yang baik. Dalam artikel Sistem Pertanian Padi Indonesia dalam Perspektif Efisiensi Sosial¹³, kesempatan kerja pertanian masih perlu didorong mengingat upah panen saat ini masih memberikan *net income* lebih baik daripada pekerja sejenis di sektor jasa perkotaan; dengan pengecualian beberapa sektor yang sedang naik karena spekulasi properti (seperti tukang bangunan), jasa keuangan (seperti perantara jual beli motor) dan sektor terkait IT (seperti penjual pulsa *handphone* dan perbaikan *handphone*).

Selain itu, perlu disadari bahwa bagi pekerja kelas bawah, pilihan pekerjaan yang harus diambil adalah mempunyai pekerjaan ganda, begitu pula dengan petani.¹⁴ Dengan perspektif kesadaran ini, kondisi kesempatan kerja di sektor beras tidak buruk. *Mengungkap Realitas Orang Muda Sektor Pertanian Di Perdesaan*¹⁵ dan *Would I like to be a farmer?*¹⁶, menunjukkan bahwa kebanyakan orang muda tidak menjadikan pekerjaan di sektor pertanian sebagai pilihan utama pada waktu akan memulai kerja. Pilihan kembali ke pertanian terjadi ketika tidak ada pilihan yang lebih baik, pertimbangan berumah tangga, atau kemudian bisa menabung untuk membeli tanah. Meskipun secara proporsi menurun¹⁷, daya tampung pekerjaan di pertanian padi relatif stabil dan terus terisi.¹⁸ Hal ini dapat menjadi alasan penting bagi pemerintah untuk mendukung investasi pertanian padi skala kecil terutama di Jawa, dibandingkan dengan bermimpi kemungkinan lain yang tidak lebih baik bagi penyerapan tenaga kerja dan keamanan serta kemandirian pangan Indonesia.

Mitos 3: Desa Adalah Lingkungan Harmonis yang Homogen

Selama ini desa dianggap sebagai lingkungan yang harmonis dan homogen. Pada artikel *Tanah untuk Penggarap? Penguasaan Tanah dan Struktur Agraris di Beberapa Desa Penghasil Padi*¹⁹, telah terjadi stratifikasi penduduk desa berdasarkan kepemilikan tanah. Stratifikasi tersebut ditunjukkan mulai dari buruh tani tak bertanah

⁸ Dari hasil penelitian Teknologi dan Kesempatan Kerja Pertanian Pangan (*on going research*)

⁹ (Herlina Wati dan Charina Chazali, 2015).

¹⁰ Lihat *Small Is Beautiful: Evidence of an Inverse Relationship between Farm Size and Yield in Turkey* (Ünal, 2008) dan *Wake Up Before It Is Too Late, Make Agriculture Truly Sustainable Now For Food Security In A Changing Climate* (United Nation, 2013)

¹¹ Harga aset terlihat tidak masuk akal atau tidak konsisten terhadap nilai riil.

¹² (Herlina Wati dan Charina Chazali, 2015).

¹³ (Herlina Wati dan Charina Chazali, 2015).

¹⁴ *Portfolios of the Poor: How the World's Poor Live on \$2 a Day* (Daryl Collins, Jonathan Morduch, Stuart Rutherford & Orlanda Ruthven. Princeton University Press, Apr 20, 2009)

¹⁵ (Rina Herawati dan Yogaprasta, 2015).

¹⁶ Ditulis oleh AKATIGA dan Ben White dalam *Inside Indonesia* edisi 120: April-Juni 2015

¹⁷ Penurunan dilihat dari persentase kontribusi sektor pertanian terhadap total lapangan pekerjaan utama (BPS Data Trend Serapan Tenaga Kerja Indonesia 2004 – 2014)

¹⁸ BPS Data Trend Serapan Tenaga Kerja Indonesia 2004-2014

¹⁹ (Ambarwati dan Harahap, 2015).

sampai petani skala besar dengan tanah sampai 2 ha. Bahkan, terdapat *absentee* seperti yang terjadi di Karawang yang dimiliki pemilik pabrik di Karawang sampai lebih dari 35 ha di dalam desa.²⁰ Perbedaan kepemilikan ini tentunya menciptakan perbedaan kemampuan mengakumulasi modal seperti yang disampaikan pada tulisan White dan Wiradi (1989) bahwa akumulasi modal sepenuhnya berbanding lurus dengan luas tanah yang dimiliki. Saat ini, pola ini telah bergeser karena cara akumulasi modal lebih beragam dan berasal dari sektor non pertanian.²¹ Dalam pola ini, pendapatan dari pertanian padi lebih berperan sebagai pendapatan 'pengaman', namun tetap terlihat adanya ketimpangan pendapatan, aset dan kepemilikan tanah.

Stratifikasi juga tercermin dalam sistem tata pemerintahan (*governance*) yang ada. Berbagai kajian AKATIGA menunjukkan bahwa para elit desa lebih mampu memanfaatkan program bantuan yang turun ke desa, termasuk yang sudah dirancang untuk bisa lebih merata seperti Pembangunan Berbasis Masyarakat (PBM).²² Para elit lebih mampu memanfaatkan mekanisme proyek maupun organisasi petani yang biasa dipakai untuk menyalurkan bantuan untuk kepentingan mereka sendiri. Pada umumnya organisasi seperti Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) atau Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A) lebih menjadi wadah pengambil rente bagi para pengurusnya, daripada berfungsi sebagai organisasi asosiasi.

Gambaran mengenai petani sendiri juga tidak homogen. Strata terbawah petani adalah sebagian besar petani tanpa tanah dan sebagai *net buyer* beras. Penghasilan yang mereka peroleh dari sektor pertanian tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan pangan rumah tangga dalam setahun, sehingga masih membeli beras. Petani tanpa tanah mendapatkan akses ke tanah dengan cara sewa tanah, bagi hasil, atau menjadi buruh tani. Di sisi lain terdapat petani pemilik tanah skala besar mencapai atau lebih dari 2 ha dan *absentee* yang merupakan spekulasi pembeli tanah yang kemudian tanahnya digarap oleh orang lain.

Oleh sebab itu, dalam merancang suatu intervensi, perlu dilihat strata mana yang akan mendapatkan keuntungan dan siapa yang tidak teruntungkan atau bahkan terugikan. Ditambah lagi, dalam merancang mekanisme bantuan, perlu dilihat pola-pola hubungan yang terjadi di antara strata petani.

²⁰ Tanah tersebut pada awalnya digunakan sebagai kebun buah, namun perusahaan mengalami kerugian. Tanah kemudian digarap oleh petani sekitar dalam petak yang kecil-kecil dengan sistem sewa yang dibayar waktu panen.

²¹ Lihat Ambarwati dan Harahap, 2015

²² Lihat *The Marginalized and Vulnerable Groups Study in PNPM-Rural* (AKATIGA, 2010) dan *Evaluation Of PNPM Respek: Village Infrastructure And Institutional Capacity* (AKATIGA, 2011).

Mitos 4: Lembaga Desa adalah Saluran Terbaik untuk Membantu Petani, dan Mekanisasi Pertanian sebagai Cara untuk Meningkatkan Produktivitas

Gabungan antara mitos tentang homogenitas desa dan pertanian, serta keengganan menghadapi keanekaragaman di dalam program menyebabkan mayoritas program dibuat dengan asumsi bahwa bantuan bisa disebar melalui sistem estafet ke lembaga-lembaga di desa dengan baik. Kenyataannya, kebanyakan lembaga-lembaga yang ada hanya sebagai alat penangkap bantuan bukan sebagai wadah asosiasi.

Studi AKATIGA ini menunjukkan bahwa Gapoktan dan Poktan di kebanyakan desa penelitian hanya dimanfaatkan oleh pengurusnya untuk mendapatkan bantuan yang turun ke desa seperti mesin perontok, mesin panen, bibit, pupuk dan lain-lain. Sangat sedikit Gapoktan dan Poktan yang secara nyata membagikan bantuan bagi kebanyakan anggotanya apalagi untuk seluruh petani di desa. Pupuk bersubsidi merupakan salah satu bantuan dari pemerintah yang diterima hampir seluruh petani. Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK) menjadi acuan pembagian pupuk bersubsidi melalui Gapoktan dan toko saprodi yang ditunjuk oleh PPL dan Gapoktan. RDKK di desa penelitian Jawa Tengah dan Jawa Barat tidak terlalu berpengaruh karena tidak ada kontrol yang jelas oleh PPL terhadap kebutuhan pupuk subsidi. Petani bisa langsung membeli di banyak toko saprodi karena lingkup toko yang ditunjuk saling tumpang tindih satu dengan lainnya. Sedangkan di sebagian desa penelitian di Sulawesi Selatan, petani relatif kecil tetap mengakses pupuk dengan cara berhutang kepada tengkulak, petani luas, atau pemilik toko saprodi, dan dibayar pada saat panen.²³

Kemampuan pranata desa untuk mengatur bantuan yang datang dari pemerintah dan menyelesaikan persoalan yang dihadapi sebenarnya sangat beragam. Penelitian AKATIGA menunjukkan bahwa terdapat desa-desa dengan kemampuan berorganisasi, kemampuan institusi serta modal sosial di masyarakat yang masih sangat rendah. Misalnya kampung-kampung di pedalaman Papua adalah contoh dimana belum terjadi banyak stratifikasi pengorganisasian masyarakat dan secara sosial ekonomi masih dikuasai oleh kepala-kepala dari suku yang dominan didesa melalui hak monopoli penggunaan tanah.²⁴ Sebagian desa penelitian sudah memiliki kemampuan pengorganisasian yang lebih baik, namun belum didukung dengan modal sosial dan institusi yang bisa menjamin demokratisasi. Sementara, ada yang sebenarnya sudah cukup mampu berdemokrasi dan

²³ Herlinawati dan Chazali dalam *Sistem Pertanian Padi Indonesia dalam Perspektif Efisiensi Sosial* (2015)

²⁴ Lihat *Beneficiary Impact Assessment of PNPM/Respek In Papua/West Papua* (AKATIGA, 2014)

berorganisasi terutama pada program bantuan seperti sebagian desa penelitian di Jawa Tengah, namun tetap menghadapi kendala.²⁵

Sebagai contoh, salah satu PBM yang paling masif diterapkan di Indonesia, yaitu PNPM, bertujuan agar masyarakat biasa bisa melampaui dominasi kekuatan elit desa. PNPM memiliki sistem dimana bantuan bisa langsung sampai ke kelompok yang membutuhkan dan memberi kesempatan pada kelompok miskin untuk mengawal kepentingan mereka. Sayangnya pelaksanaannya tidak berhasil secara merata memenuhi harapan dari tujuan tersebut, salah satu penyebabnya adalah pada pelaksanaannya PNPM tenggelam dalam persyaratan-persyaratan administrasi.²⁶

Oleh sebab itu, upaya penyaluran bantuan sebaiknya didesain dengan mendorong pengorganisasian dari bawah dan organisasi ini punya kesempatan untuk mengakses bantuannya sendiri. Dalam mendorong peningkatan produktivitas pertanian akan lebih efektif bila pemerintah mendorong sistem insentif. Misalnya pembelian harga dasar Bulog yang berpihak pada petani kecil dan mekanisme Bulog responsif dengan kondisi pertanian skala kecil di Indonesia seperti yang sudah dijelaskan di atas. Daerah yang berhasil menunjukkan kenaikan produktivitas yang tinggi diberikan insentif, dipublikasikan, dan keberhasilannya didiseminasikan ke tempat lain. Daerah yang berhasil meningkatkan kesempatan kerja di sektor padi misalnya dengan penggunaan tanah cadangan desa (seperti tanah kemakmuran desa di Kebumen) bagi buruh tani miskin juga diberi insentif untuk diberi modal untuk memperluas tanah kemakmuran. Pertanian yang juga berhasil konsisten melakukan sistem pertanian dan pengendalian hama terpadu juga diberi insentif. Semua ini akan jauh lebih berhasil daripada hanya memberikan bantuan dalam bentuk subsidi bibit, pestisida dan pupuk kimia yang ada saat ini.

Mekanisasi Pertanian.

Sebagaimana di sektor lain, tidak semua teknologi menciptakan nilai lebih dan mampu meningkatkan produktivitas. Hal ini sangat tergantung pada tujuan dan kondisi dimana teknologi tersebut dipakai dan dilihat tingkat ketepatan penggunaannya. Apabila sebuah teknologi mencapai tujuan dan sesuai dengan kondisi, maka teknik atau teknologi itu dianggap tepat guna. Hal ini terlihat jelas dalam dunia informasi teknologi, teknologi yang tidak tepat guna walaupun canggih akan tersisih sementara meskipun tidak terlalu canggih tapi tepat guna bagi konsumen, maka akan

maju dan banyak digunakan. Sayangnya, di sektor pertanian dan sektor-sektor pembangunan lain, kemungkinan pengenalan mekanisasi yang salah dan tidak tepat guna dapat terus meluas karena dorongan pemerintah dan atau gabungan dengan dorongan modal kuat.

Fenomena *Combine Harvester*.

Di daerah penelitian Teknologi dan Kesempatan Kerja Pertanian Padi (Sulawesi Selatan, Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Lampung), pemerintah memperkenalkan teknologi baru sebagai penanganan paska panen berupa *combine harvester* yang harganya mencapai Rp 200.000.000-500.000.000. Mesin panen ini merupakan pemotong dan perontok padi yang dilengkapi dengan kipas agar hasil padi dapat langsung masuk ke dalam karung. Alat ini diklaim oleh pemerintah dapat mengurangi kehilangan hasil paska panen hingga 8-10%.²⁷

Temuan AKATIGA menunjukkan bahwa *combine harvester* memiliki efisiensi yang tidak sebanding dengan harga belinya. Di desa penelitian AKATIGA, *combine harvester* mengurangi ceceran hasil panen padi lebih banyak 5%-10% dan menghasilkan gabah yang lebih bersih dibandingkan dengan gabah yang dihasilkan mesin perontok biasa (*power thresher*).²⁸ Akan tetapi, di desa penelitian menunjukkan bahwa penggunaan *combine harvester* tidak menjadi penentu kualitas dan harga gabah yang lebih tinggi.

Hasil perhitungan AKATIGA menunjukkan bahwa pengurus Gapoktan di desa-desa penelitian yang menerima bantuan mesin panen ini atau pemilik secara pribadi, tidak akan untung dalam jangka panjang terutama jika ditambah banyak persaingan. Petani lahan besar tertarik menggunakan *combine harvester* karena selain harga sewa masih tersubsidi atau karena mereka bisa menggunakan *combine harvester* sebagai penguatan monopoli beras paska panen. Dengan kata lain, petani yang memiliki *combine harvester* hanya petani yang memiliki modal besar, tanah luas, atau mereka yang menentukan produksi paska panen, misalnya mereka yang juga menjadi tengkulak atau pemilik penggilingan padi di desa penelitian.

Di sisi lain, upaya menggunakan *combine harvester* ini merugikan banyak buruh tani dan petani skala kecil, karena terjadi kehilangan kesempatan kerja sebesar 30-50 orang/ha dalam satu kali panen di satu hamparan sawah. Tentunya secara *social cost benefit* terjadi kerugian yang nyata. *Combine harvester* yang banyak digunakan adalah mesin yang besar dan sulit dipakai untuk sawah yang

²⁵ *The Local Level Institutions Study 3* (AKATIGA, 2013)

²⁶ Lihat *The Marginalized and Vulnerable Groups Study in PNPM-Rural* (AKATIGA, 2010)

²⁷ Lihat <http://www.pertanian.go.id/ap_posts/detil/266/2015/03/09/16/00/42/Semangat%20Presiden%20kepada%20Petani%20untuk%20Tingkatkan%20Produksi>, (9 Juni 2015).

²⁸ Berdasarkan penelitian AKATIGA yang masih berjalan mengenai penggunaan *combine harvester* di delapan desa pada empat propinsi di Indonesia.

cenderung basah karena bisa tenggelam. *Combine harvester* juga harus digunakan pada hamparan sawah yang luas, sehingga sulit digunakan untuk sawah-sawah yang berpetak-petak terutama jika *combine harvester* harus melalui sawah-sawah milik orang lain.

Kemudian, BPS pada Sensus Pertanian 2013 memberi kesan terjadinya pengurangan rumah tangga pertanian sehingga fenomena tersebut dijadikan rasionalisasi atas didorongnya mekanisasi di sektor pertanian. Namun, pada faktanya penurunan jumlah rumah tangga usaha pertanian yang paling signifikan terjadi pada sektor hortikultura, peternakan, dan perikanan.²⁹ Selain itu, sejak dulu kebutuhan tenaga kerja dalam desa bisa diatasi dengan tenaga kerja dari luar desa sehingga hal ini bukan persoalan kekurangan tenaga kerja. Oleh karena itu, mekanisasi pada sektor pertanian padi tidak tepat diterapkan jika merujuk pada data yang ada.

Implikasi pada Kebijakan Beras

1. Bentuk subsidi yang cocok bagi pertanian padi

Saat ini subsidi pokok untuk pertanian diberikan pada bibit, pupuk, pemberantas hama, dan lainnya. Pada kenyataannya, kebanyakan subsidi ini hanya dinikmati oleh para penentu di Gapoktan dan tidak oleh mayoritas petani kecil, dan belum mendorong upaya penggunaan pengendalian tanam, pengairan dan hama terpadu secara masif. Bahkan di salah satu desa penelitian di Jawa Tengah, salah satu PPL mencari pendapatan sampingan dengan menjadi penyalur pestisida kimia.³⁰

Oleh sebab itu, untuk mendorong inisiatif sendiri dari bawah yang lebih sehat, subsidi difokuskan pada hasil panen seperti pembelian harga dasar beras yang memadai bagi petani skala kecil. Dalam mekanisme ini, Bulog akan melakukan operasi pasar bila harga beras lebih rendah dari harga normal input pertanian yang pada saat itu. Sebaiknya operasi pasar Bulog dilakukan langsung ke pintu-pintu petani, mirip dengan program pemerintah untuk Bantuan Langsung Tunai (BLT) atau PKH dimana yang diutamakan adalah petani miskin terlebih dahulu.

Subsidi lain bisa diarahkan untuk memberikan insentif pada peningkatan produktivitas maupun asuransi untuk daerah yang mengalami gagal panen yang merata akibat alam atau hama yang meluas, dengan menggunakan dana penanggulangan bencana. Asuransi diberikan kepada semua keluarga tani miskin baik yang memiliki tanah maupun yang menguasai tanah dengan sewa, gadai, bagi hasil, dan lainnya, agar lebih merata dan tidak terpaku pada

pemilikan tanah saja. Hal ini diperlukan agar pendapatan rata-rata petani bisa meningkat dan tidak terpuakul bencana gagal panen.

Insentif diberikan untuk gabungan Pemerintah Daerah (Pemda), desa, dan individu yang bisa meningkatkan produktivitas padinya, sesuai dengan peran masing-masing. Bila memiliki peran signifikan dalam meningkatkan produktivitas pertanian padi, pemerintah kabupaten bisa bersama individu petani mendapatkan insentif dan diminta untuk menyebarkan cara-cara mereka ke daerah lain.

2. Mendorong desa mempunyai bank tanah bagi petani perempuan, pemuda yang miskin dan tidak mempunyai tanah untuk menyiapkan modal sendiri

Undang-undang No 6/2014 tentang Desa mengamankan pengalokasian dana desa yang cukup besar (bisa sampai 1 milyar per desa). Desa-desanya di daerah pertanian padi setiap tahun dapat menyisakan 1/3 anggarannya untuk membeli tanah desa untuk tanah kemakmuran desa. Dana tersebut dapat digunakan sebagai sumber dana desa untuk memperluas tanah kas desa yang dikelola untuk kemakmuran petani generasi muda dan petani tanah sempit (mengikuti prinsip *collective ownership, individual use rights*).

Semangat seperti ini sudah dilaksanakan seperti di desa penelitian di Jawa Tengah. Tanah desa tersebut diperuntukkan bagi petani miskin, petani muda pemula, dan perempuan kepala keluarga yang tidak mempunyai tanah untuk bisa mengolah tanah desa dengan sistem bagi hasil yang memadai sehingga mereka bisa mempunyai pendapatan yang cukup baik dan bisa mengakumulasi modal.³¹ Setelah menikmati bantuan tersebut, mereka bisa mulai sedikit demi sedikit memiliki tanah sendiri. Hal ini bertujuan untuk menjamin pemerataan, menghilangkan spekulasi tanah, tanah tidak terjual pada pemilik *absentee*, dan membuka akses penggunaan tanah kepada kelompok miskin di desa, serta desa semakin lama mempunyai asset tanah pertanian bersama yang berkelanjutan.

Penelitian AKATIGA memperlihatkan gejala ketimpangan distribusi tanah di desa sehingga meminimalisir monopoli pendapatan oleh pemilik tanah luas. Oleh karena itu, perlu pengendalian ketimpangan distribusi tanah dengan cara *bottom up*, yaitu pemerintah desa dapat menerapkan Peraturan Agraria (pembatasan penguasaan tanah secara berlebihan, sesuai dengan keadaan setempat) pada tingkat lokal tanpa harus menunggu peraturan yang lebih bersifat nasional (contoh kasus desa Sidosari di Jawa Tengah).

Hal lain dapat dilakukan dengan menerapkan dengan baik pajak progresif bagi pemilik tanah luas sebagai cara untuk menahan

²⁹ Lihat Hasil Olahan Sensus Pertanian 2013.

³⁰ Handhiko dan Pithaloka dalam *Institusi Pertanian dan Kesejahteraan Petani dalam Konteks Efisiensi Sosial* (2014, unpublished paper)

³¹ Lihat Ambarwati dan Harahap, 2015.

ketimpangan distribusi tanah. Selain itu, pemerintah kabupaten sampai pemerintah desa bisa menciptakan suatu pasar (tempat pertemuan) antara orang - orang yang mau menyewakan tanahnya sehingga pemerintah dapat memberikan subsidi kepada orang muda yang memang memiliki niat untuk menyewa tanah untuk dapat menyewa tanah milik orang lain dengan harga yang relatif lebih terjangkau.

Mengingat bahwa akumulasi tanah merupakan investasi yang tidak produktif karena mengakibatkan peralihan surplus dan juga ketimpangan distribusi tanah, maka perlu dicari kebijakan yang melawan kecenderungan tanah sebagai objek spekulasi atau akumulasi yang berlebihan. Hal ini diperlukan sehingga harga tanah dapat dijangkau oleh masyarakat dari kelas bawah. Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) mengenai pembatasan pemilikan tanah oleh *absentee* bisa dijadikan dasar hukum selain menerapkan pajak tanah yang progresif.

3. Mendorong produktivitas dan keberlanjutan melalui insentif bagi petani kecil

Bila UU No 6/2014 tersebut sudah bisa dijalankan secara konsisten, maka desa dapat mempunyai dana sendiri yang cukup besar. Terdapat sejumlah masalah yang harus diselesaikan dalam penggunaan anggaran pusat maupun kabupaten, sebelum desa bisa benar-benar menikmati alokasi dana seperti yang dijanjikan oleh undang-undang. Pemerintah ingin mendistribusikannya ke desa dengan persyaratan-persyaratan tertentu sebagai bahan agar tidak disalahgunakan. Salah satu yang dapat dilakukan pemerintah adalah dapat memberikan syarat tegas bahwa setiap pemerintah desa (terutama desa sentra beras) melakukan upaya-upaya nyata dalam meningkatkan produktivitas dan distribusi pangan yang merata oleh pemerintah kabupaten dan desa. Contoh upaya nyata tersebut misalnya ditunjukkan oleh Kabupaten Kebumen. Di sini, desa di Kebumen menggunakan alokasi dana desa mereka untuk memperkuat infrastruktur pendukung pangan yang disinergikan dengan dana di kecamatan dan Dinas Pertanian.³² Meskipun upaya ini belum secara sistematis meningkatkan produktivitas total, namun manfaatnya sudah dirasakan petani beras secara nyata. Upaya-upaya seperti ini layak mendapat insentif untuk didahulukan mendapat hibah pusat untuk desa.

Insentif juga bisa digunakan untuk mendorong kombinasi antar pihak. Bila dana desa bisa digunakan secara bersama dengan efektif, maka kesempatan kerja di pertanian padi bisa menjadi kesempatan kerja yang layak dan mendorong

munculnya inisiatif bank tanah. Kebumen³³ memang belum berhasil meningkatkan produktivitasnya secara signifikan namun ini lebih disebabkan belum banyaknya informasi tentang alternatif manajemen pertanian baru yang baik dan adanya masalah serius tentang sumber pengairan, seperti banjir dimusim hujan, dan kekurangan air di musim kemarau. Di Kebumen, fenomena ini terjadi antara lain karena hutan-hutan milik Perhutani di Kabupaten sebelah utara tidak terjaga dengan baik. Insentif bagi adanya upaya sinergi positif bersama memang sangat dibutuhkan dan Pemerintah Kabupaten yang bisa menciptakan sinergi pada sistem pertaniannya akan mendapat insentif dana tambahan untuk melaksanakan upaya tersebut.

Selain itu, peningkatan produktivitas bisa dilakukan dengan cara memprioritaskan penyediaan air untuk pertanian, terutama untuk desa-desa penghasil padi dengan mengembangkan infrastruktur pertanian dan menjaga pasokan air di hulu, pasokan input pertanian yang cukup, dan juga menggalakan mekanisme kepastian harga gabah kepada petani yang panen secara serempak. Hal ini bertujuan untuk menggalakan kembali tanam serempak yang sudah menurun dan menyediakan asuransi bagi petani jika mengalami gagal panen.

4. Mendorong informasi, penyuluhan dan intervensi kebawah yang efektif.

Banyak bantuan pertanian yang tidak efektif, salah satunya adalah dikarenakan dana bantuan dilihat sebagai sesuatu yang dapat dikorupsi secara aman. Sebagai akibatnya, daya bantunya ketingkat petani kecil sangat rendah. Sistem penyuluhan juga terbelengkalai, tidak ada insentif untuk menjadi penyuluh yang baik dan tidak ada pembinaan kapasitas dan monitoring penyuluhan yang baik.³⁴

Pemerintah harus mendorong institusi-institusi bentukan masyarakat yang terbukti menjawab kebutuhan masyarakat, baik dalam bentuk pendanaan maupun dalam bentuk program. Lakukan penelitian yang lebih mendalam terhadap keberhasilan institusi-institusi bentukan masyarakat. Selain itu, pemerintah harus melakukan pengawasan terhadap institusi yang sudah dibentuk secara lebih komprehensif. Hal ini bisa dilakukan dengan menggunakan sistem audit yang tidak hanya bersandar pada data-data administratif, tetapi melakukan monitoring dan evaluasi siapa saja penerima manfaat dari bantuan dan bentuk fisik dari bantuan tersebut. Evaluasi bisa dilakukan dengan melakukan wawancara singkat terhadap pengurus Poktan maupun petani yang menerima bantuan. Akhirnya, pemerintah selanjutnya memberikan insentif berupa uang atau program kepada Poktan

³² *Promoting meaningful participation for poverty reduction: Developing and institutionalization of participation and M&E system in Kebumen and Surakarta, AKATIGA, 2010.*

³³ Ibid.

³⁴ Handhiko dan Pithaloka, 2014 (*unpublished paper*).

maupun Gapoktan yang memenuhi kriteria sistem audit diatas.

Mari kita bandingkan peran-peran penting Kementerian Pertanian dan institusi terkait lainnya dengan realita di lapangan:

1. Bibit

Apa yang ada saat ini:

Idealnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Sang Hyang Sri (SHS) menjadi penyedia bibit untuk seluruh Indonesia. Kenyataannya di desa penelitian, kebanyakan petani tidak mengandalkan bibit dari SHS karena hanya dinikmati oleh pengurus-pengurus Gapoktan dan mereka yang memiliki kedekatan dengan Ketua Gapoktan di desa penelitian. Pengadaan bibit yang diberikan jumlahnya terbatas, sehingga membuat pengurus Gapoktan dan Poktan di desa penelitian tidak membagikan bibit kepada petani dengan alasan jumlah yang sangat sedikit dan menghindari konflik jika dibagikan kepada petani dalam jumlah yang sangat kecil.³⁵

Apa yang seharusnya ada:

Peran pemerintah tidak perlu menjadi produsen utama (monopoli) bibit. Tetapi peran pemerintah sangat penting untuk menjadi pengatur kontrol kualitas dari penyedia bibit yang bisa didorong tumbuh berkembang di Indonesia, baik dalam bentuk kelompok tani kecil maupun usaha kecil dan menengah. Mengingat kemampuan kontrol pemerintah saat ini juga lemah, maka pemerintah bisa secara terbuka mendorong forum universitas dan lembaga lainnya untuk melakukan kontrol ini.

2. Irigasi.

Apa yang ada saat ini:

Di desa-desa penelitian di Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Sulawesi Selatan, persoalan pengairan dinilai petani sebagai tanggung jawab dinas di tingkat kabupaten karena saluran irigasi yang tidak berjalan sesuai fungsinya, baik karena rusak maupun beralih fungsi sebagai tempat pembuangan limbah rumah tangga maupun industri. Petani membayar iuran yang digunakan untuk melakukan pembukaan dan penutupan pintu air sesuai dengan kebutuhan desa. Mekanisme seperti ini membuat petani merasa adanya transaksi sehingga jika air dirasakan sulit diperoleh, maka petani menolak untuk membayar iuran.

Akan tetapi, di salah satu desa penelitian di Jawa Tengah, peran Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A) dalam mengatur air dirasakan sangat kuat dengan adanya dampingan dan dukungan dari pemerintah kabupaten melalui pemerintah desa, bahkan sudah terdapat komisi irigasi di tingkat kabupaten yang beranggotakan perkumpulan petani pemakai air, atau kelompok pengguna jaringan

irigasi. Dinas di kabupaten berperan dalam penentuan masa tanam serentak untuk meminimalisasi serangan hama. Lembaga pengairan di desa sudah melakukan koordinasi antar desa untuk pengaturan air di pintu-pintu air untuk menghindari terhambatnya pasokan air pada saat musim tanam. Peran ulu-ulu kemudian adalah menjaga agar tidak terjadi konflik dan pencurian air sehingga tidak ada petani yang dirugikan.³⁶

Apa yang seharusnya ada:

Perlu ada reformasi pada Dirjen Pengairan di Pekerjaan Umum (PU). P3A juga perlu didemokratisasi dan diberi kewenangan yang lebih kongkrit sehingga bisa mendisiplinkan anggota dan pengurus, karena sudah ada contoh baik di salah satu desa penelitian.

3. Praktik tanam yang baik dan pengawasan pembasmi hama

Apa yang ada saat ini:

Penelitian ini menemukan di mayoritas desa-desa penelitian terjadi penurunan praktik penanaman yang sejalan dengan pengendalian hama terpadu dibandingkan dengan masa puncak Revolusi Hijau dulu. Sudah terjadi penurunan koordinasi tanam maupun koordinasi pemanfaatan air. Daerah persawahan di desa penelitian di Jawa Barat menghadapi ancaman urbanisasi sehingga tidak mudah dikendalikan lingkungannya demi pengendalian yang terpadu.

Untuk mengatasi hama, petani di desa penelitian tergantung pada informasi yang diberikan oleh penjual saprodi dan PPL. Petani di mayoritas desa-desa penelitian mengalami peningkatan frekuensi penyemprotan dengan pembasmi hama kimia, dengan anggapan hasilnya lebih terlihat dengan cepat meskipun biaya produksi tinggi.

Apa yang seharusnya ada:

Upaya bersama petani perlu didorong kembali, tentunya tidak semudah dan tidak menggunakan cara seperti masa revolusi hijau namun lebih menitikberatkan pada program kerja sama dengan PPL, LSM atau ormas yang banyak diikuti di desa yang dapat menjadi percontohan awal selain daerah-daerah yang saat ini masih berhasil menjaga upaya bersama petaninya.

4. Mekanisasi Pertanian

Apa yang ada saat ini:

Mekanisasi yang efektif masih berjalan, namun pengenalan teknologi baru seperti *combine harvester* dilakukan tanpa mempelajari kondisi nyata di masyarakat sehingga tidak tepat guna. *Combine harvester* tidak tepat guna karena teknologi ini membutuhkan modal besar, sekaligus mengurangi kesempatan kerja bagi petani tidak bertanah dan

³⁵ Handhiko dan Pithaloka, 2014 (*unpublished paper*).

³⁶ Ibid.

petani kecil. *Combine harvester* juga memiliki banyak kelemahan secara teknis, seperti tidak bisa diaplikasikan ke petak-petak yang kecil dan mudah tenggelam di sawah yang cenderung basah atau banjir.

Apa yang seharusnya ada:

Perlu dipelajari kebutuhan di tingkat lokal dan pemuktahiran teknologi yang sudah ada saat ini seperti traktor dan mesin perontok agar hasilnya bisa lebih tepat guna dan sesuai dengan kondisi yang ada. Selain itu, pemerintah perlu mendorong lulusan teknik untuk lebih berorientasi mengembangkan teknologi yang benar-benar tepat guna di desa. Universitas dan program seperti Indonesia Mengajar perlu didorong agar para insinyur benar-benar menyelami kondisi di desa dan bisa melihat peluang di tingkat akar rumput. Sebagai pendorong, mereka yang bisa menciptakan keberhasilan praktis di akar rumput perlu diberi insentif.

PENUTUP

Banyak keputusan saat ini yang diambil pemerintah untuk pertanian padi tanpa mempelajari kepentingan para petani miskin dan kesempatan kerja layak bagi buruh tani. Pemikiran yang didorong oleh *status quo* dan kemudahan birokrasi. Hal ini juga ditunjang ketiadaan data dan pemantauan yang baik. Oleh karena itu, perlu dikembangkan kebijakan yang lebih peka dan didasari oleh data-data dari bawah dan menyadari keragaman Indonesia yang ada. Kebijakan untuk pertanian padi harus menyadari kondisi pranata di desa yang ada. Dimana tujuan akhir dari kebijakan tersebut adalah meningkatkan efisiensi sosial: yaitu meningkatkan produktivitas, memperluas kesempatan kerja layak, meratakan distribusi keuntungan yang lebih merata, dan pertanian yang berkelanjutan dan ramah lingkungan.

DAFTAR PUSTAKA

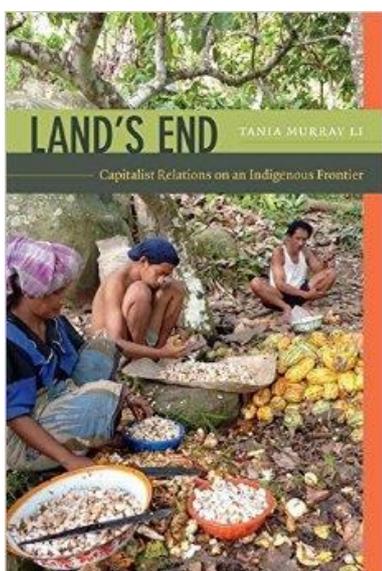
- <<http://aplikasi.pertanian.go.id/bdsp/newlok.asp>>.
<<http://id.beritasatu.com/agribusiness/dahlan-iskan-food-estate-ketapang-belum-maksimal/71535>>.
<http://www.pertanian.go.id/ap_posts/detil/266/2015/03/09/16/00/42/Semangat%20Presiden%20kepada%20Petani%20untuk%20Tingkatkan%20Produksi>. (9 Juni 2015).
- AKATIGA dan Ben White. 2015. Would I like to be a farmer? *Inside Indonesia* edisi 120: April-Juni 2015 pada <<http://www.insideindonesia.org/would-i-like-to-be-a-farmer-2>>.
- AKATIGA. 2010. *Promoting Meaningful Participation for Poverty Reduction: Developing and Institutionalization of Participation and M&E System in Kebumen and Surakarta* (Laporan). Bandung: AKATIGA.
- AKATIGA. 2010. *The Marginalized and Vulnerable Groups Study in PNPM-Rural* (Laporan). Bandung: AKATIGA.
- AKATIGA. 2011. *Evaluation Of PNPM Respek: Village Infrastructure And Institutional Capacity* (Laporan). Bandung: AKATIGA.
- AKATIGA. 2013. *The Local Level Institutions Study 3* (Laporan). Bandung: AKATIGA.
- AKATIGA. 2014. *Beneficiary Impact Assessment of PNPM/Respek In Papua/West Papua* (Laporan). Bandung: AKATIGA.
- AKATIGA. On going research. *Teknologi dan Kesempatan Kerja Pertanian Pangan* (Laporan). Bandung: AKATIGA
- Ambarwati, Aprilia dan R.A. Harahap. 2015. *Tanah untuk Penggarap? Penguasaan Tanah dan Struktur Agraris di Beberapa Desa Penghasil Padi*. Bandung: AKATIGA
- BPS (2013, Hal. 41)
- Collins, Daryl, Jonathan Morduch, Stuart Rutherford & Orlanda Ruthven. 2009. *Portfolios of the Poor: How the World's Poor Live on \$2 a Day*. Princeton University Press.
- Handhiko dan Pithaloka. 2014. *Institusi Pertanian dan Kesejahteraan Petani dalam Konteks Efisiensi Sosial*. Tidak dipublikasikan.
- Hasil Olahan Sensus Pertanian 2013
- Herawati, Rina dan Yogaprasta A. Nugraha. 2015. *Menguak Realitas Orang Muda Sektor Pertanian di Perdesaan*. Bandung: AKATIGA.
- Herlinawati dan Charina Chazali. 2015. *Sistem Pertanian Padi Indonesia dalam Perspektif Efisiensi Sosial*. Bandung: AKATIGA
- Persentase kontribusi sektor pertanian terhadap total lapangan pekerjaan utama (BPS Data Trend Serapan Tenaga Kerja Indonesia 2004 – 2014)
- Savitri, Laksmi A. dan Khidir M. Prawirosutanto. 2015. *Kebun Pangan Skala Luas di Ketapang: Menggambar Angan-Angan Tentang Surplus Produksi*. Bandung: AKATIGA
- Ünal. 2008. *Small Is Beautiful: Evidence of an Inverse Relationship between Farm Size and Yield in Turkey*. NY: The Levy Economics Institute.
- United Nation. 2013. *Wake Up Before It Is Too Late, Make Agriculture Truly Sustainable Now For Food Security In A Changing Climate*.

LAND'S END: CAPITALIST RELATIONS ON AN INDIGENOUS FRONTIER

Ben White¹

Institute of Social Studies
Kortenaerkade 12, 2518 AX Den Haag, Netherlands
E-mail: white@iss.nl

Kalau Anda ingin membaca karya etnografi yang sangat baik, yang menggunakan penelitian tingkat mikro untuk menyoroti masalah-masalah global mendasar, ditulis dengan gaya jernih dan memukau, bacalah buku ini.



Judul buku: *Land's End: Capitalist Relations on an Indigenous Frontier*
Pengarang: Tania Murray Li
Jumlah: xiv + 225 halaman
Penerbit: Duke University Press, Durham, NC and London, 2014. ISBN 978-0-8233-5705-6

Nama Tania Murray Li (Guru besar Antropologi pada Universitas Toronto) sudah tidak asing bagi peneliti dan pengamat perdesaan Indonesia. Dengan bukunya *Transforming The Indonesian Uplands* (1999; versi Indonesia 2002), *The Will to Improve* (2007), dan *Powers of Exclusion: Land Dilemmas in Southeast Asia* (Hall, Hirsch dan Li 2011) dan banyak artikel penting, Tania Li telah memberi sumbangan yang berpengaruh besar pada pengetahuan, pemikiran dan

perdebatan tentang proses transformasi daerah pedalaman Indonesia dan masalah-masalah agraria yang diakibatkan.

Dengan buku terbaru, *Land's End: Capitalist Relations on an Indigenous Frontier*, Tania Li mengulas secara mendetil proses pemunculan hubungan-hubungan kapitalis dalam masyarakat Lauje (salah satu masyarakat asli daerah pedalaman Sulawesi Tengah) selama kurun waktu 20 tahun sejak awalnya *boom* kakao di daerah tersebut. Mulai tahun 1990, Li berkali-kali mengunjungi daerah Lauje (yang dicapai dengan jalan kaki selama 10 jam) untuk mengamati perubahan-perubahan yang terjadi, sampai kunjungan terakhirnya pada tahun 2009.

Studi ini bukanlah “*village study*” (studi satu desa) seperti lazim dilakukan ahli antropologi. Li menyempatkan diri untuk singgah dan berpangkalan pada 11 lokasi, yang tersebar dari daerah dekat pantai sampai daerah “pengunungan dalam” (*inner hills*), dimana berbagai lokasi tersebut hanya dapat dijangkau dengan menanjak berjalan kaki selama 8-10 jam. Dengan demikian bukunya merupakan etnografi sebuah daerah, bukan sebuah desa, mirip dengan karya Robert Hefner tentang perubahan masyarakat Tengger di Jawa Timur (Hefner, 1990).

Pendekatan analitis yang diandalkan Tania Li dalam buku ini adalah pendekatan konjunktur (*analytic of conjuncture*).² Konjunktur dijelaskan sebagai “seperangkat unsur, proses dan hubungan yang mewujudkan kehidupan orang pada tempat dan waktu tertentu, serta tantangan-tantangan politik yang muncul pada tempat dan waktu tersebut” (halaman 4). Dalam pendekatan ini, banyak unsur material maupun sosial – di antaranya harga, tingkat bunga, cuaca, sifat tanaman, batas-batas sosial, unsur

¹ Professor Emeritus Sosiologi Perdesaan, International Institute of Social Studies (ISS), The Hague, Negeri Belanda.

² Baca penjelasan Li dalam bagian “*an analytic of conjuncture*”, hal 16-20.

institusi formal maupun adat, makna, keinginan, serta makhluk tak terlihat – semuanya dianggap ikut berbentrok atau bersekutu satu sama lain dalam konfigurasi tertentu yang pada gilirannya ikut menentukan pewujudannya ataupun penaklukkan rencana manusia. Konfigurasi konjunktural ini juga mengakibatkan kekuatan-kekuatan perubahan yang global dan abstrak yang diuraikan dalam teori-teori besar, akan ragam-akibat pada konjunktur yang berbeda. Li menggarisbawahi bahwa konjunktur adalah hal yang (sangat) rumit serta dinamis, tetapi bukan terbentuk secara sembarangan. Hal ini juga diakui oleh Lenin yang membedakan pola dasar diferensiasi agraris dengan bentuk-bentuk nyata yang muncul, dipengaruhi keadaan spesifik masing-masing lokasi dan waktu. Menurut Lenin dalam analisis diferensiasi agraris di Rusia: “*the main trends of differentiation are one thing: the forms it assumes, depending on the different local conditions, are another*”³. Pendekatan konjunktur konsisten dengan metode Marx yang memperhatikan ragam hubungan-hubungan yang membentuk pola nyata dalam sejarah. Pendekatan ini mendasari analisis pemikir-pemikir Marxism, feminis, dan *postcolonialist* yang memperluas kerangka Marxis klasik dengan memperhatikan proses, kontradiksi, kontestasi, *agency* dan perjuangan dalam proses akumulasi modal. Namun demikian, menurut kesan pembaca istilah ‘konjunktur’ terlalu sering digunakan dan kadang-kadang dengan makna yang tidak sepenuhnya jelas. Membaca buku ini kita akan menjumpai kata ‘*conjuncture*’ tidak kurang dari sekitar 70 kali, kadang-kadang dengan makna yang tidak lebih dari ‘lokasi dan waktu tertentu’ sehingga kekuatan konsep ini – yang dimaksudkan menjadi alat analitis yang terfokus dan tajam – bisa menjadi luntur.

Bab 1 (berdasarkan sumber-sumber sejarah dan sejarah lisan) menggambarkan proses pembentukan identitas yang membawa masyarakat pedalaman, kaum pedagang, dan penguasa ke dalam pola hubungan antargolongan tertentu selama sekitar dua abad sebelum tahun 1990. Hubungan inilah yang menempatkan orang Lauje sebagai kaum miskin dan terbelakang, yang pada gilirannya mendorong mereka untuk mencari jalan perbaikan keadaan mereka. Li menggarisbawahi bahwa biarpun terpencil, petani Lauje dari dulu menanam tanaman komersial di samping tanaman pangan/subsisten. Selama periode 1820-1970, tembakau menjadi *cash crop* utama, kemudian diganti dengan bawang merah dan bawang putih.

Bab 2 menelusuri lebih mendalam sistem hubungan kerja dan reproduksi sosial yang menandai masyarakat Lauje di daerah “pengunungan tengah”, sekitar awal tahun 1990an. Bab ini menguraikan berbagai aspek kehidupan masyarakat Lauje yang

sangat menarik, di antaranya gejala “otonomi tenaga kerja individu” di mana mereka menganggap setiap individu (perempuan, lelaki, dewasa maupun anak) merupakan pemilik dari tenaga kerjanya sendiri serta barang yang dihasilkan dengan tenaga kerja tersebut. Ini dilihat dalam kebiasaan masing-masing anggota keluarga (lelaki dan perempuan, dewasa dan anak) menanam tanamannya sendiri dan memiliki hasilnya, disertai terjadinya transaksi upah-mengupah di dalam keluarga (antara orang tua dan anak, antara saudara, antara suami dan isteri).

Pembaca yang berharap akan menemukan cerita nostalgis tentang betapa keindahan, kemurnian dan kemandirian sistem sosial-ekonomi pedesaan Lauje yang “asli” sebelum *boom* kakao, akan kecewa. Li menguraikan dengan tegas bahwa meskipun tiada petani yang kekurangan tanah (mereka berada pada *frontier* tanah yang terbuka dengan kemungkinan membuka tanah baru untuk bertani di atasnya), orang Lauje tidak pernah lepas dari kerawanan pangan, dengan risiko gagal panen yang tinggi, dikarenakan atau oleh kekeringan *El Niño* sekitar tiap 5 tahun atau oleh serangan burung, kera, dan babi hutan. Hal ini, bersamaan dengan hubungan mereka dengan pedagang hasil *cash crops*, membuat banyak orang Lauje berhutang pada orang pesisir. Sedikit sekali orang Lauje yang menguasai bahasa Indonesia, dan anak mereka hampir tidak ada yang sempat duduk dibangku SD. Dengan demikian masyarakat Lauje menjadi “termarginalisasi oleh rejim diskursif yang menempatkan mereka sebagai terbelakang” dan mulai melihat diri mereka sendiri dengan cara yang sama. Tidak mengherankan jika kesempatan untuk menanam kakao, pohon yang akan menghasilkan uang setiap tahun dengan input tenaga kerja yang tidak besar, disambut mereka dengan gembira, terdorong oleh tiga faktor utama: pengalaman stigmatisasi sosial, kerawanan pangan dan penghasilan, dan keinginan untuk bisa menikmati infrastruktur jalan dan sekolah seperti orang pesisir.

Bab 3 menggambarkan proses privatisasi tanah yang dimulai sekitar 1990, waktu orang Lauje pertama menanam kakao pada tanah komunal mereka. Li menelusuri munculnya pengertian tanah sebagai kesatuan ruang yang dibatasi dan yang boleh dimiliki individu, dan diperjual-belikan. Orang Lauje membiarkan tanah-tanah *ulat* mereka, satu per satu, dijadikan milik individu sehingga mereka disingkirkan dari tanah komunal mereka. Suatu hal yang masih belum sepenuhnya jelas adalah bagaimana persisnya mekanisme-mekanisme di mana tanah-tanah Lauje (yang merupakan tanah komunal menurut adat, dan kawasan hutan menurut pemerintah) menjadi milik pribadi dan diperjual-belikan.

Bab 4 menggambarkan dinamika perkembangannya hubungan-hubungan kapitalis di mana tanah, tenaga kerja dan modal mulai bergerak dalam putaran-putaran yang ditentukan oleh

³ Lenin (1976: 145).

persaingan dan keuntungan. Beberapa petani berhasil mengakumulasi kekayaan dan bertambah kaya tanah dan kaya modal, sedangkan banyak petani lain dalam waktu hanya 15 tahun kehilangan tanah mereka akibat kegagalan membayar hutang dari pembelian saprodi pertanian dan atau makanan (yang tidak lagi mereka mampu tanam, karena terpaksa memilih tanaman komersial bernilai tinggi di atas tanah mereka yang makin sempit). Pendeknya, golongan ini mengalami apa yang oleh Bernstein dijuluki “tekanan (atau jepitan) reproduksi sederhana” (*simple reproduction squeeze*).

Bab 5 melihat respons masyarakat Lauje terhadap ketidakmerataan yang semakin berakar, dan dinamika politik yang berkembang sebagai akibatnya. Pada umumnya diferensiasi kelas yang berkembang pesat tidak disertai bentrokan antara golongan tak bertanah/petani sempit dengan petani kaya, tuan tanah atau pelepas uang. Sedangkan pada iklim lebih demokratis setelah 1998, sempat terjadi mobilisasi kaum Lauje melawan “buaya” serakah yaitu pegawai korup yang mencuri dana yang diperuntukkan pengembangan infrastruktur jalan – tanda pertama lahirnya rasa kewargaan (*citizenship*).

Bab Kesimpulan, ditulis dengan gaya ekonomis dan jernih yang bagus sekali, membawa pembaca dalam hanya 7 halaman kembali pada isu-isu besar yang diangkat oleh studi lokal ini. Proses privatisasi kepemilikan, jauh dari memperluas kebebasan dan pilihan mereka (sebagaimana diprediksi oleh teori liberal) menjerat mereka dalam hubungan kapitalis di mana kompetisi dan keuntungan menentukan segala, dan mayoritas petani yang tanahnya semakin sempit tidak mampu lagi menghasilkan pangan, tetapi terpaksa menanam tanamam nilai tinggi.

Proses ini tidak berlangsung secara dramatis, dan memang cara hubungan kapitalis diam-diam berkembang di Lauje (tidak secara spektakuler seperti halnya *land grabs* besar-besaran untuk sawit) mungkin merupakan pola penetrasi hubungan kapitalis yang paling umum terjadi. Teori transisi agraris klasik, di mana kaum petani kecil yang digusur dari sektor pertanian dengan gampang bisa beralih profesi masuk sektor industri atau sektor ekonomi urban lainnya, tidak berlaku pada kebanyakan kasus peralihan ke pertanian kapitalis di dunia masa kini. Kenyataan pahit pertumbuhan ekonomi tanpa penyerapan tenaga kerja (*jobless growth*) di hampir seluruh dunia menjadi tantangan besar pada abad 21, untuk mengembangkan politik distribusi (mengutip kalimat terakhir *Land's End*) “demi jutaan manusia – tua dan muda, di perdesaan dan di perkotaan, utara dan selatan – yang berjuang untuk bertahan hidup dalam kondisi yang semakin rawan”.

DAFTAR PUSTAKA

- Hall, D., P. Hirsch dan T. Muray Li (2011) *Powers of Exclusion: Land Dilemmas in Southeast Asia*. Singapore: NUS Press.
- Hefner, Robert (1990) *The Political Economy of Mountain Java*. Berkeley: University of California Press.
- Lenin, V.I. (1976) *The Agrarian Question and the Critics of Marx*. Moscow: Progress Publishers.
- Li, Tania M. ed. (1999) *Transforming the Indonesian Uplands*. Amsterdam: Harwood Academic Publishers.
- Li, Tania M. ed. (2002) *Proses Transformasi Daerah Pedalaman di Indonesia*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Li, Tania M. (2007) *The Will to Improve: Governmentality, Development, and the Practice of Politics*. Durham, NC and London: Duke University Press.

MENGECAP SECANGKIR KOPI DAN SETANGKUP PENGETAHUAN DI PERPUSTAKAAN

Santi Cahya Pratiwi¹

Yayasan Akatiga

Jalan Tubagus Ismail II. No. 2, Bandung 40134

E-mail: santicahyapратиwi@gmail.com

Apa yang ada di pikiran anda jika mendengar kata perpustakaan? Banyak orang yang masih membayangkan bahwa perpustakaan adalah bangunan tua dengan cahaya redup dan barisan rak buku yang terbuat dari kayu yang berat. Sangat membosankan. Dalam arti tradisional, perpustakaan adalah sebuah koleksi buku dan majalah. Walaupun dapat diartikan sebagai koleksi pribadi perseorangan, namun perpustakaan lebih umum dikenal sebagai sebuah koleksi besar yang dibiayai dan dioperasikan oleh sebuah kota atau institusi, serta dimanfaatkan oleh masyarakat yang rata-rata tidak mampu membeli sekian banyak buku atas biaya sendiri. Tetapi, dengan koleksi dan penemuan media baru selain buku untuk menyimpan informasi, banyak perpustakaan kini juga merupakan tempat penyimpanan dan/atau akses ke map, cetak atau hasil seni lainnya, mikrofilm, mikrofiche, tape audio, CD, LP, tape video dan DVD. Selain itu, perpustakaan juga menyediakan fasilitas umum untuk mengakses gudang data CD-ROM dan internet.

Perpustakaan dapat juga diartikan sebagai kumpulan informasi yang bersifat ilmu pengetahuan, hiburan, rekreasi, dan ibadah yang merupakan kebutuhan hakiki manusia. Oleh karena itu perpustakaan modern telah didefinisikan kembali sebagai tempat untuk mengakses informasi dalam format apa pun, apakah informasi itu disimpan dalam gedung perpustakaan tersebut ataupun tidak. Dalam perpustakaan modern ini selain kumpulan buku tercetak, sebagian buku dan koleksinya ada dalam perpustakaan digital (dalam bentuk data yang bisa diakses lewat jaringan komputer)².

Perpustakaan adalah warisan kita. Semua pengetahuan umat manusia yang telah diperoleh tersimpan disana. Perpustakaan adalah salah satu golongan perintis peradaban. Mereka harus berkembang, dan melihat ke masa depan, tidak hanya masa lalu walaupun menyimpan semua pengetahuan masa lalu. Perpustakaan modern (dan bangunan futuristik bukan suatu keharusan untuk membuat perpustakaan modern) adalah perpustakaan yang bisa

membentuk cara kita belajar hal-hal dan menikmati buku di era digital. Perpustakaan modern harus bisa menawarkan akses kepada buku-buku dalam segala bentuk dan format.

Di jaman yang serba digital sekarang ini dan lebih banyak orang memilih membaca e-paper atau *e-book*, tapi ternyata masih besar harapan untuk sebuah perpustakaan diminati. Karena tak sedikit juga orang yang suka membaca dengan bentuk digital, seperti Yurivito seorang teman lama saya yang tetap menyukai bentuk buku untuk membaca dan menikmati sensasi aroma kertas yang khas. “Kalau *e-book* harus pakai perangkat yang dinyalakan dengan energi listrik, ketika sumber energi tidak ada, matilah perangkat itu, tapi buku tidak akan pernah mati,” ujar Yurivito.

Perpustakaan masih banyak diminati, terutama jika menyediakan buku-buku bersegmen khusus dan sulit dicari. Seperti AKATIGA yang memiliki perpustakaan dengan segmen buku khusus mengenai kajian sosial bertema buruh, agraria, kemiskinan dan tata kelola pemerintahan. Cukup banyak pengunjung yang mencari sumber referensi untuk bahan studi mereka, terutama buku-buku yang sudah lama tidak diterbitkan lagi atau buku-buku yang ditulis oleh peneliti AKATIGA. An-Nissa Yovani contohnya, mahasiswi jurusan antropologi salah satu perguruan tinggi di Bandung, merasa terbantu karena telah mendapatkan buku yang ia cari yaitu “*Identity and Labour Activism Of Ten Women Factory Workers in A Low Militancy Area the Ujung Berung of Bandung City, West java, Indonesia*” yang ditulis oleh Resmi Setia salah satu peneliti AKATIGA.

Membaca buku masih menjadi kegiatan favorit beberapa kalangan, walau kadang memang bisa menjadi hal yang membosankan dan mengundang rasa kantuk datang. Apalagi untuk buku-buku yang isinya berat untuk dicerna, kerja otak untuk memahami buku yang sedang dibaca pun harus ekstra, tak jarang rasa lelah merajalela mengusik kenikmatan membaca buku. Kopi yang mengandung zat *caffein* dipercaya dapat mengusir rasa kantuk dan bisa membuat kita lebih semangat untuk membaca kembali.

Rupanya budaya minum kopi saat ini semakin naik daun, seiring bertumbuhnya minat

¹ Staf perpustakaan dan komunikasi AKATIGA

² <http://id.wikipedia.org/wiki/Perpustakaan>

orang untuk minum kopi. Di Bandung pertumbuhan kedai kopi sangat signifikan. Banyak anak muda, khususnya yang masih sekolah dan kuliah, pergi ke kedai kopi untuk mengerjakan tugas-tugas mereka. Tak sedikit dari mereka juga datang ke kedai kopi untuk mengakses fasilitas internet yang disediakan melalui *wi-fi*.

Perpustakaan umum harus meniru kedai kopi. “Kegagalan untuk menyediakan internet dan komputer kualitas layanan gratis memperlihatkan perpustakaan sebagai tempat kuno dengan sedikit relevansi dalam masyarakat saat ini.”³ Saat saya masih kuliah, kebetulan saya mengambil jurusan ilmu perpustakaan, mencari sumber-sumber referensi dan informasi mengerjakan tugas adalah suatu keharusan. Karena kampus saya bukan di kota Bandung, jadi kegiatan berkunjung ke kota adalah saat yang dinanti-nanti karena bisa menemukan tempat yang lebih menarik untuk dijadikan tempat membaca dan *nongkrong*. Konsep perpustakaan pada saat itu masih terdengar sangat membosankan, ruangan penuh buku yang tertata di rak adalah pemandangan yang membuat *ngantuk* apalagi jika tempat tersebut harus diawasi ketat dengan penjaga perpustakaan yang galak. Hanya para “kutu buku” saja yang mau masuk ke perpustakaan. Padahal di perpustakaan kita bisa mendapatkan banyak sekali ilmu dan inspirasi. Memang pada saat kuliah, saya belajar bagaimana mengklasifikasikan buku, memberi nomor dan pengetahuan perpustakaan dasar. Tetapi untuk membuat perpustakaan tetap diminati harus mencari pengetahuan sendiri.

Tulisan saya ini akan mengantarkan anda untuk melihat perkembangan dan bermacam jenis perpustakaan berkonsep kedai kopi di Bandung Raya yang sudah saya kunjungi dari sekitar tahun 2008 hingga 2015, dan juga mendorong anda untuk mengunjungi perpustakaan terdekat di tempat anda tinggal. Tidak usah pergi jauh-jauh ke luar negeri, carilah perpustakaan di sekitar tempat tinggal anda, mungkin justru perpustakaan terdekatlah yang bisa menyambut anda dengan keajaiban buku-bukunya dan dilayani oleh pustakawan-pustakawan yang ramah.

Potluck Kitchen

Saya ingat, ada salah satu pionir *café & library* di Bandung adalah Potluck Kitchen yang dulunya bernama Potluck Coffee Bar & Library. Pada tahun 2003 Potluck dibuka dengan sasaran mahasiswa, apalagi posisinya dekat dengan kampus Universitas Padjadjaran yaitu di Jl. Jalan H. Wasid, No. 31, Bandung. Decil Christianto, sang pemilik Potluck mengatakan, Potluck adalah salah satu pelopor kafe dengan konsep perpustakaan. Dua tahun terakhir, Potluck sedikit mengalami perubahan. Mulai dari penggantian nama, jumlah makanan

diperbanyak dan renovasi untuk memperluas ruangan. “Kami sudah memperluas target. Dulu kan Potluck itu identik mahasiswa. Sekarang bisa dikunjungi keluarga,” ungkap Decil. Sebagai *gimmick*, Potluck memiliki berbagai agenda yang menarik untuk pelanggannya. Siapapun bisa membuat acara di sana, seperti peluncuran buku, pameran mainan hingga gelaran musik. “Kegiatan apa saja asalkan positif,” tegas Decil.⁴ Dengan selalu menciptakan inovasi-inovasi baru, Potluck masih bisa bertahan sampai sekarang dan masih menjadi tempat unggulan untuk sekedar minum kopi karena memang kopi disini juga enak, membaca buku atau mengerjakan tugas kelompok.



Sumber: thegourmetgirl.tumblr.com

Cokotetra

“Kecintaan kami terhadap minuman hangat dan buku mendorong kami untuk membuat sebuah warung kopi pada bulan November 2012 di Bandung. Nama kami adalah singkatan dari ‘Cokelat, Kopi, Teh, dan Sastra’ yang mencerminkan menu yang kami sediakan. Di warung kami, kami menyediakan kopi arabika terbaik dari Indonesia, daun teh berkualitas, dan coklat hangat terenak di Dago. Kami juga menyediakan perpustakaan kecil yang berisi banyak buku berkualitas dari penulis dalam dan luar negeri seperti Sapardi Djoko Damono, Joko Pinurbo, Langston Hughes, Chuck Palahniuk, dan banyak lagi.”⁵ Demikian pengantar yang terungkap pada *website* Cokotetra. Salah satu tempat favorit saya di sekitaran Dago. Kedai kopi dengan tambahan sentuhan perpustakaan mini ini sangat menarik untuk saya datangi, apalagi mereka menyediakan minuman-minuman hangat yang nikmat untuk teman membaca ataupun mengerjakan pekerjaan yang belum tuntas. Tempat yang begitu kecil tidak membuat Cokotetra tidak nyaman, malah semakin banyak penggemarnya. Keramahan pegawai Cokotetra kepada pengunjung juga menjadi salah satu tambahan kenyamanan berlama-lama disini.

³ <http://www.bbc.com/news/uk-politics-30529127>

⁴ <http://www.bennyramdani.com/2014/05/menikmati-menu-istimewa-di-potluck.html>

⁵ <http://cokotetra.tumblr.com/about>

Adimas, salah satu pemilik Cokotetra adalah salah satu lulusan ITB Bandung yang membuat banyak mahasiswa ITB dan lulusannya untuk datang ke tempatnya. Tak jarang saya berkenalan dengan beberapa mahasiswa ITB yang ingin mengerjakan tugas-tugas kuliahnya, atau sekedar *sharing* bersama teman-temannya. Dari berbagai tempat sejenis, Rian memilih Cokotetra untuk menyeruput minuman kesukaannya, yaitu *hot chocolate*. “Selain rasanya enak, harganya juga murah, tempatnya juga nyaman untuk mengerjakan pekerjaan kantor.” Ujar Rian seorang pengunjung setia Cokotetra. Karena saya pun sering berkunjung ke tempat ini, saya sering sekali bertemu dengan orang-orang yang sama. Sama-sama sering berkunjung ke Cokotetra, sama juga seperti Rian, minuman kesukaan saya di sini adalah *hot chocolate*. Yang paling saya suka di sini juga menyimpan koleksi buku favorit saya yaitu novel Dewi Lestari.



Sumber: fasyaulia.wordpress.com

Zoe Corner

Komik, adalah salah satu bacaan yang sangat digemari oleh segala usia dari anak-anak, remaja, bahkan dewasa. Di tahun 2000an komik sangat diminati, ada yang sampai menjadi kolektor komik, ada juga yang hanya bisa meminjam di taman bacaan saja. Situasi ini dimanfaatkan oleh Bonny Perkasa Halim yang menjadikan rumah kos-kosan menjadi taman bacaan komik.

Pada 2001 taman bacaan ini tampil dengan citra dan konsep baru. “Bangunan seluas 500 m² yang semula berfungsi sebagai tempat tinggal dan kos-kosan itu pun berubah menjadi taman bacaan yang terkesan nyaman. Ruang sebelah kiri

difungsikan sebagai tempat penyewaan film. Ruang tengah jadi tempat penyewaan dan toko buku. Di bagian luar sebelum masuk ke tempat penyewaan film, ada kafe. Sementara itu, di halaman depan tersedia sejumlah kursi dan meja untuk membaca sambil makan dan minum. Bagi yang senang membaca sambil tiduran atau lesehan, disediakan ruangan di lantai dua. Namanya pun diganti menjadi Zoe Corner, singkatan dari *Zone of Entertainment and Education*. Konsep yang diterapkan adalah *one stop edutainment*. Melalui konsep ini Bonny Perkasa Halim berharap Zoe dapat memenuhi kebutuhan membaca keluarga.



Sumber: kuliner.panduanwisata.id

Lebih dari itu Bonny ingin menjadikan Zoe sebagai bagian dari tempat wisata di Bandung.⁶ Lokasi Zoe yang terletak di Jl. Pager Gunung memang sangat strategis karena dekat dengan pusat kota, dan juga dekat dengan beberapa universitas di Bandung. Membuat pengunjung yang mayoritas mahasiswa dan kumpulan dari beberapa komunitas mudah mencapai tempat ini.

Selain ada koleksi komik, buku-buku, Zoe juga menyediakan penyewaan film. Dengan selalu menambahkan fasilitas sesuai dengan perkembangan jaman, Zoe tetap bertahan dan diminati hingga sekarang, kafe yang menjadi ‘pemadam’ ketika pengunjung kelaparan membuat tempat ini menjadi pilihan untuk melakukan berbagai kegiatan. Jam operasional Zoe dimulai pukul 07.30 sampai 21.00, cocok dengan jam efektif para mahasiswa ataupun orang kantoran yang membutuhkan tempat untuk rapat.

Kineruku

“Baca, dengar, tonton” merupakan *tagline* salah satu perpustakaan di kota Bandung yaitu Kineruku, yang mendeklarasikan dirinya sebagai rumah buku dan tempat berkomunitas. Salah satu perpustakaan kasual yang saya suka di Bandung ini.

⁶ <http://zoelibrary.blogspot.com/>

Selain bisa membaca koleksi-koleksi buku yang

seputar sastra, sosiologi, budaya, sejarah, arsitektur, seni, desain, dan filsafat, Kineruku juga menyediakan penyewaan film dan CD musik. Tapi buku adalah tema-tema utama koleksi Kineruku, yang dapat dibaca di tempat atau disewa. Lokasi yang berada di Jalan Hegarmanah dimana banyak terdapat rumah-rumah tua yang besar dan pohon-pohon rindang, membuat Kineruku menjadi salah satu tempat ternyaman untuk membaca buku dan mengerjakan tugas atau sekedar mencari inspirasi.

Tak sedikit pengunjung yang mengagap Kineruku adalah rumah kedua mereka. Pemilik Kineruku adalah sepasang suami istri yang sangat cinta kepada dunia buku, musik dan film. Mereka sangat ramah dan dekat kepada pengunjung, sering berbagi cerita tentang minat mereka, tak heran tempat ini sering sekali menjadi tempat berdiskusi mengenai sastra, musik atau film. Banyak sekali kegiatan yang sering diadakan di sini. Dari bedah buku, nonton film bareng sampai penampilan band-band musik.

Kineruku didirikan tanggal 29 Maret 2003 (pada awal berdiri bernama Rumah Buku). Ketika studi di Chicago, Amerika Serikat, salah satu pendiri Kineruku melihat betapa akses publik terhadap informasi di negeri maju sangat terfasilitasi, terlihat dari banyaknya perpustakaan kota, toko-toko buku, CD musik, dan rental film di setiap penjuru kota. Percaya pada pepatah *'knowledge is power'*, ia kemudian bermimpi untuk bisa membuka perpustakaan yang menyediakan itu semua di kota kelahirannya, Bandung.

Sepulangnya ke Indonesia, segera diwujudkanlah mimpinya tersebut di sebuah rumah kosong peninggalan kakeknya. Dengan semangat berbagi, Kineruku didirikan sebagai alternatif pusat referensi buku-musik-film dimana publik bisa mengaksesnya dengan mudah. Juga untuk mengubah anggapan sebagian kalangan bahwa perpustakaan adalah sesuatu yang angker dan kurang bersahabat. Karenanya Kineruku sengaja dirancang senyaman mungkin, dengan konsep seperti rumah.

Akhir tahun 2009 namanya sempat berubah menjadi Rumah Buku/Kineruku, dan mulai Januari 2012 hingga kini namanya resmi menjadi **Kineruku**.⁷ Saya sempat berkenalan dengan pemilik Kineruku karena pernah mengantar teman saya yang juga adalah teman pemilik Kineruku ini, Budi Warsito dan Ariani Darmawan, mereka sangat terbuka dan baik sekali melayani pengunjung. Tak jarang memberi referensi buku baru atau buku yang bagus untuk dibaca. Lebih menariknya lagi, selain menyewakan, Kineruku juga menjual buku dan menerima kerjasama titip-jual dengan penerbit-penerbit lokal dan nasional, meliputi buku, majalah, juga produk *stationary*; juga label-label rekaman meliputi CD album penuh, *single*, maupun EP.

⁷ <http://kineruku.com/about/>

Tersedia juga beberapa vinyl/piringan hitam/plat impor maupun lokal.



Sumber: www.flickr.com

Untuk bisa meminjam buku, CD musik atau film, kita harus mendaftar menjadi anggota dengan mengisi formulir keanggotaan dengan menyertakan fotokopi KTP, beserta 1 buah pas foto (ukuran 2x3 atau 4x6). Ada dua jenis keanggotaan di Kineruku, yaitu A dan B. Keanggotaan jenis A untuk meminjam buku-buku berlabel kuning, sedangkan B untuk buku-buku berlabel kuning dan biru. Deposito untuk keanggotaan A adalah Rp 45.000,00 dan keanggotaan B adalah Rp 95.000,00. Keanggotaan Kineruku bersifat seumur hidup. Ketika meminjam buku/musik/film koleksi Kineruku, anggota membayar ongkos sewa (rental) yang besarnya berbeda sesuai dengan *item* yang dipinjam (berkisar dari Rp 4.500,00 sampai Rp 25.000,00) tergantung jenis *item*. Untuk buku dan musik lama peminjaman adalah 2 minggu (14 hari). Untuk film, 3 hari. Satu anggota bisa meminjam maksimal 3 buah *item* (gabungan antara buku, musik, dan film). Saya termasuk anggota setia yang sering meminjam CD musik yang sudah sulit didapatkan di toko musik.

Karena tempat yang jauh dari keramaian dan tempat makan, Kineruku melengkapi dirinya dengan menyediakan menu-menu makanan dan minuman yang tidak bisa dilewatkan untuk dipesan. Menu yang menarik disini adalah Turkeys Coffee dengan harga yang sangat terjangkau. Ketertarikan Budi Warsito akan benda-benda kuno, membuatnya menyisipkan 1 toko kecil untuk menjual barang-barang antik *secondhand* yang diberi nama Garasi Opa. Tak sedikit pengunjung yang datang mengunjungi Garasi Opa untuk berburu barang antik, tapi juga berfoto-foto di dalamnya.

Little Wings

Berawal dari *iseng-iseng* browsing melalui jejaring sosial Instagram, saya melihat ada seseorang yang mengunggah foto di salah satu tempat unik, rumah dengan dihiasi rak-rak buku dengan desain yang begitu manis. Terlihat seperti perpustakaan, tetapi ternyata ada *cafe*-nya juga. Little Wings Book

Café, sebuah kedai kopi yang dibungkus dengan penampilan rumah mungil dan manis, menyediakan perpustakaan mini seperti rak buku di rumah sendiri. Sebuah kafe dan perpustakaan, yang didekorasi dengan barang-barang seni dan antik, menyediakan makanan ringan, akses internet gratis dan kenyamanan untuk urusan pekerjaan ataupun santai.⁸ Buku-buku yang ada di Little Wings ini lebih banyak novel, karya sastra dan desain arsitektur, bisa membuat tambah betah berlama-lama minum kopi disini.



Sumber: www.infobdg.com

Lokasinya yang terletak agak jauh dari pusat keramaian menjadikan tempat ini nyaman untuk berimajinasi. Mempunyai jendela besar dan banyak membuat sirkulasi udara Bandung yang sejuk juga mendukung untuk bersantai. Perpustakaan harus melepaskan *image* kuno mereka dan menjadi lebih seperti kedai kopi dengan wifi dan sofa yang nyaman.⁹ Little Wings menyuguhkan konsep perpustakaan dengan bentuk rumah mungil dan menyediakan *flat white coffee* yang nikmat. Rumah 3 lantai ini dipakai secara maksimal, dari lantai 1 satu terdapat sofa motif bunga-bunga yang nyaman dan 2 set meja tamu, juga rak buku yang berisi novel, buku-buku sosial dan ilmu sains ringan. Di lantai 2 ada dapur kecil yang disekat tirai untuk membuat pesanan-pesanan pengunjung, dihiasi jendela-jendela besar kemudian ada 5 set meja kursi yang terlihat antik cantik menghiasi ruangan seluas 4x6 meter tersebut. Di lantai 2 ini buku-buku yang dipajang lebih banyak mengenai arsitektur, dekorasi dan kerajinan tangan. Untuk peminat fotografi pasti akan tertarik dengan tempat ini, karena setiap sudutnya diatur secara maksimal dan sangat menarik untuk tertangkap kamera dan dipandang mata. Seperti

⁸ <https://littlewingsbdg.wordpress.com/about-2/>

⁹ <http://www.telegraph.co.uk/news/uknews/11299758/Thirsty-Go-to-a-library-not-a-coffee-shop.html>

teman saya, Daris yang sangat senang ketika saya ajak ke tempat ini pertama kali. Segala sudut rumah ini sangat menarik penglihatan, rasanya seperti di negeri dongeng.

Pustaka Tropis Wanadri

Salah satu pilihan tempat referensi mencari buku khusus pecinta alam. Perpustakaan yang awalnya didasari atas ide anggota Wanadri ini baru saja dibuka akhir 2014. Walaupun koleksi masih sedikit, tetapi sudah ada beberapa koleksi yang menarik bagi para pecinta alam yang ingin menambah pengetahuan mereka dan memberi asupan pemikiran untuk belajar lebih banyak tentang bertahan hidup. Pustaka Tropis membuka kesempatan untuk para anggotanya atau siapa saja yang ingin menyumbangkan bukunya untuk disimpan di perpustakaan kecil ini, karena akan lebih bermanfaat.



Sumber: www.facebook.com

Pengelola juga menyediakan sistem kerjasama kepemilikan buku, “Ada 2 bentuk donasi, yang pertama wali buku yaitu bisa menyumbangkan buku dan boleh dipinjam oleh anggota Pustrop Wanadri, tetapi jika pemilik buku tersebut membutuhkan bukunya bisa menarik kembali. Yang kedua bentuk donasi buku umum, yaitu menyumbangkan buku dan sepenuhnya memberikan izin kepada Pustrop untuk dikelola, buku tersebut akan menjadi hak milik Pustrop tidak bisa ditarik kembali,” tutur Reza yang adalah salah satu pengelola Pustaka Tropis Wanadri.

Keinginan pengelola Pustrop menjadikan tempat ini sebagai tempat berkomunitas juga ingin segera dijalankan, mengingat Wanadri adalah suatu organisasi yang sangat kuat dan memiliki banyak anggota. Warga Tropis¹⁰ sekarang mulai bisa menjadi member dari Pustaka Tropis Wanadri (PusTrop Wanadri). dengan menjadi anggota, Warga Tropis dapat meminjam koleksi buku, meminjam koleksi peta, membaca gratis atau memfotokopi laporan perjalanan Wanadri.¹¹ Setiap meminjam

¹⁰ Sebutan untuk anggota Pustaka Tropis Wanadri

¹¹ <https://www.facebook.com/pustakatropiswanadri>

mengembalikan akan dikenakan denda Rp 1.000/hari. Pustaka Tropis juga memberikan promosi-promosi menarik untuk meminjam buku. Misalnya setiap hari Selasa mereka memberi promosi gratis pinjam buku. Pada awal pembukaan, Pustaka Tropis memberikan promosi “Bawa 3 Teman, Gratis Pendaftaran.”

Pustaka Selasar

Bertempat di Galeri Selasar Sunaryo, Pustaka Selasar menjadi pelengkap dan penambah pengetahuan tentang seni. Dengan mengkhususkan tema buku-buku mengenai seni, tidak sedikit mahasiswa jurusan seni yang datang untuk mencari bahan referensi disini. Para pegiat dan penikmat seni pun sering berdatangan silih berganti. Di samping galeri, Selasar Sunaryo juga menyediakan tempat yang bisa digunakan untuk berbagai kegiatan selain pameran, seperti diskusi dan pertunjukan seni. Keindahan tempat dan kesejukan udara Dago Pakar menambah minat para pegiat seni untuk berkunjung ke Selasar Sunaryo, dilengkapi dengan Kopi Selasar yang menyajikan makanan, minuman untuk teman berdiskusi dan belajar. “Pustaka Selasar adalah fasilitas umum baru yang dibuka pada bulan September 2008, sebagai sub-divisi dari Departemen Dokumentasi.

Visi perpustakaan adalah untuk menjadi pusat data, penelitian dan dokumentasi untuk seni rupa di Indonesia, terbuka dan dapat diakses oleh masyarakat umum. Pustaka Selasar Collection saat ini terdiri 1.500 item tentang:

- Seni Rupa
- Fotografi
- Selasar Sunaryo Art Space katalog arsip.
- Teater dan sastra dalam bentuk buku, monograf, majalah, jurnal.
- kliping Media
- Foto-foto dan negatif, slide, film yang (DVD, VCD / VHS / MiniDVD)
- Poster, makalah dan transkrip diskusi wawancara dengan artis tentang teknik dan proses mereka.



Sumber: dikabeast.wordpress.com

Pustaka Selasar menyediakan sumber daya penting bagi masyarakat dengan menawarkan akses untuk seniman dan siswa, serta dengan hangat mengundang semua pecinta seni untuk menggunakan fasilitas baru. Sebagai organisasi *non profit*, perpustakaan menyambut dan mendorong semua sumbangan buku dan bahan. “Kami berharap untuk membangun hubungan internasional untuk memastikan koleksi tumbuh dan menawarkan *up-to-date*, informasi kelas kepada masyarakat.¹²” Karena Pustaka Selasar berada di galeri, maka jam operasionalnya pun mengikuti jam operasional galeri yaitu buka dari senin-minggu pukul 10.00-17.00 WIB dan tutup di hari libur nasional.

Reading Lights



Sumber: suciharlen.wordpress.com

Terletak tidak jauh dari kawasan kampus seperti Universitas Parahyangan dan ITB, Reading Lights adalah salah satu toko buku pilihan di Bandung. Berbeda dengan perpustakaan-perpustakaan yang sudah saya ceritakan sebelumnya, Reading Lights sebenarnya adalah sebuah toko buku. Semua koleksi bukunya adalah buku berbahasa asing seperti Jerman, Inggris dan Perancis. Sebagian besar memang bukan buku baru, namun dalam kondisi masih layak baca karena itu harganya sangat terjangkau. Sejak awal didirikan, Reading Lights memang ingin tampil berbeda dari toko buku pada umumnya. Toko buku didesain dengan suasana *homey* sehingga pengunjung merasa nyaman saat mencari buku atau membaca di ruang baca. Di sini tidak hanya bisa membeli buku, tapi juga bisa membacanya, gratis. Kalau mau, bisa juga memesan secangkir kopi atau minuman hangat untuk teman membaca buku. Reading Lights juga terbuka untuk kegiatan komunitas lain di luar penikmat baca dan buku yang disebut 'circle'. Ada 'circle' menulis, membatik, *backpacker* dan penikmat film. Pengunjung yang datang juga bisa bergabung dengan

¹² <http://www.selasarsunaryo.com/selasar-library.html>

'circle' ini sesuai dengan bidang yang diminati.¹³

Konsepnya tidak jauh berbeda dengan perpustakaan, hanya bedanya buku-buku yang dipajang disini untuk dijual bukan untuk dipinjamkan. Salah satu pilihan tempat untuk membaca buku sambil minum kopi yang diminati oleh mahasiswa Universitas Parahyangan karena letaknya sangat dekat dengan Jalan Ciumbeuleuit di mana universitas itu berada. Saat masih berkuliah di UNPAR, Ben, teman SMA saya, sering sekali mampir ke Reading Lights untuk mencari buku-buku berbahasa asing.

Banyaknya perpustakaan yang dikelola swasta tentunya menjadi saingan yang sangat berat bagi perpustakaan-perpustakaan pemerintah yang kurang mendapat perhatian khusus dari masyarakat, kesan yang sangat kaku masih tertanam dalam pikiran orang banyak tentang perpustakaan. Tetapi dengan melihat tren saat ini, rupanya pemerintah kota Bandung, sejalan dengan rencana mempercantik kota Bandung untuk KAA, saya melihat ada satu bangunan baru yang sedang dipersiapkan untuk menjadi perpustakaan, mendengar dari kabar-kabar burung yang beredar. Letaknya di dekat Mesjid Raya Alun-Alun Kota Bandung. Rencana atau usul Pemerintah Kota Bandung untuk merevitalisasi atau mengalihfungsikan pusat perdagangan Plaza Palaguna Nusantara di sisi timur Alun-alun Bandung menjadi gedung perpustakaan (Kompas, 29/3) merupakan rencana luar biasa cerdas yang patut diacungi jempol.

Di tengah kecenderungan untuk mengubah bangunan dan kawasan apa pun menjadi ruang komersial, usulan ini merupakan langkah berani yang menunjukkan semangat intelektual Kota Bandung di tengah konsumerisme yang merebak di mana-mana.¹⁴ Saat ini bangunan tersebut masih dalam tahap pengerjaan. Dan dari kabar yang terdengar dari seorang kawan saya, bangunan perpustakaan itu juga akan dilengkapi dengan kafe yang akan menyediakan minuman dan makanan untuk teman membaca buku. Warga Bandung pastinya sudah tidak sabar menunggunya.

Bisa dilihat dari bermacam-macam perpustakaan dibalut kedai kopi di kota Bandung ini, memang tempat seperti inilah sekarang yang diminati oleh warga Bandung, khususnya mahasiswa dan pegiat komunitas yang membutuhkan tempat berkumpul dan berkegiatan. Apalagi jika perpustakaanannya mempunyai segmen khusus, menyediakan bahan bacaan yang sulit ditemukan, dan menyediakan kopi nikmat, pasti banyak penggemarnya.

AKATIGA sebagai lembaga penelitian yang memiliki hasil-hasil penelitian dari tahun 1991,

¹³ <http://travel.kapanlagi.com/bandung/belanja/lain-lain/36756-reading-lights.html>

¹⁴ <http://nasional.kompas.com/read/2010/05/27/16383485/Perpustakaan.di.Alun-alun.Bandung>

menyediakan perpustakaan yang dibuka untuk

umum. Hasil-hasil penelitian AKATIGA yang bisa dijadikan referensi untuk para akademisi tentunya bisa dibaca. Tetapi karena perpustakaan AKATIGA jenisnya perpustakaan khusus, buku-bukunya tidak boleh dipinjam kepada umum, namun bisa dibaca di tempat atau difotokopi. Ada juga beberapa judul publikasi AKATIGA yang bisa dibeli oleh umum selama persediaannya masih ada.

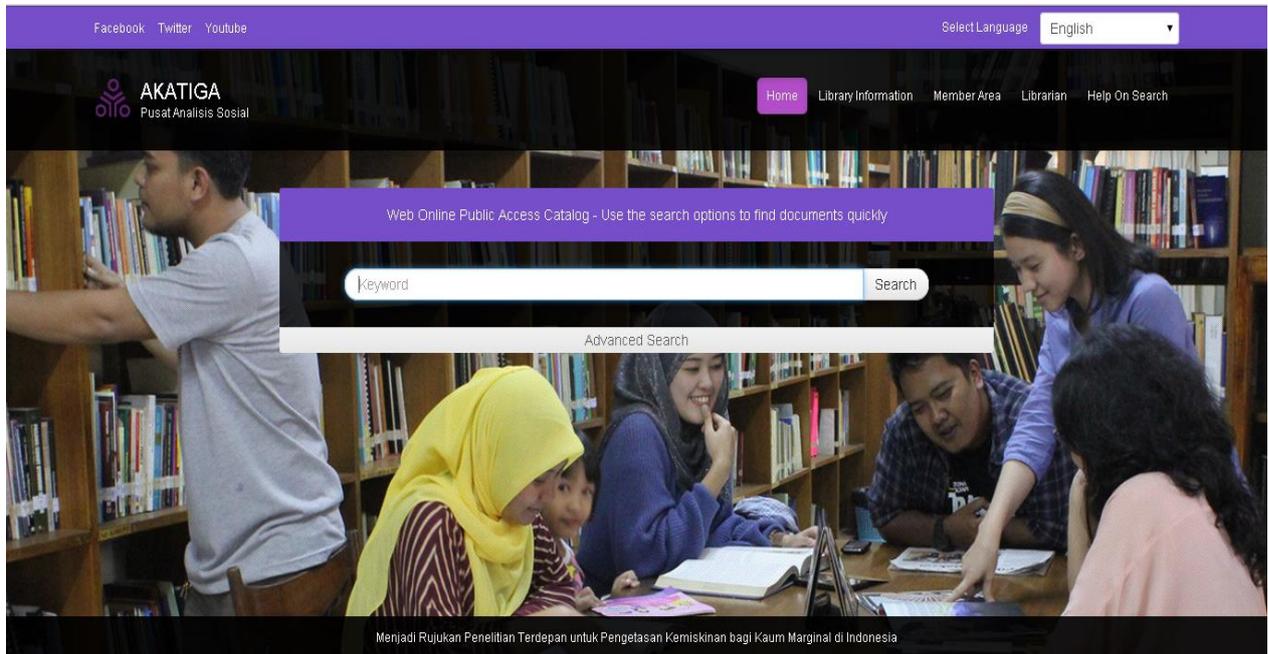
Sebagai pustakawan AKATIGA, saya melihat AKATIGA sangat diminati oleh pegiat isu sosial dan banyak juga yang datang berlama-lama di perpustakaan untuk mengerjakan pekerjaan mereka. Namun karena AKATIGA tidak komersil, maka kami tidak menyediakan penjualan kopi, namun jika ingin bawa kopi sendiri sangat ditunggu kedatangannya untuk bertukar pikiran dan informasi seputar penelitian ataupun isu-isu sosial. Peneliti kami pun sangat terbuka untuk berdiskusi. Mungkin kedepannya, AKATIGA akan berusaha menjadi salah satu tempat bernaung bagi para peneliti dan bisa mengikuti perkembangan jaman perpustakaan.

Di awal tahun 2015 ini AKATIGA sudah dengan bertahap memperbaharui dan menyempurnakan *website*, katalog *online* dan akan menyusul juga pembaharuan perpustakaan fisik AKATIGA, karena adanya beberapa masalah dalam pergantian staf, maka kami akan menata ulang dan menyajikan buku-buku pilihan perpustakaan AKATIGA dengan *database* yang lebih *uptodate*. Ada beberapa rencana perpustakaan AKATIGA yang akan datang, misalnya ingin membuat acara bedah buku dan nonton film bareng, yang rencana jangka panjangnya adalah perpustakaan AKATIGA ingin dijadikan ruang publik, untuk itu membutuhkan tempat yang lebih luas. Jika dapat terlaksana, kami ingin merenovasi ruang perpustakaan dan menyulapnya menjadi ruang publik yang bisa dipakai untuk berbagai kegiatan terkait perpustakaan.

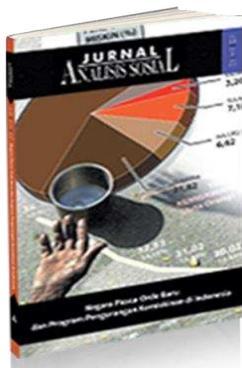
Perpustakaan AKATIGA juga akan lebih banyak mengikuti pameran buku atau membuka stand buku di acara-acara umum dan besar, seperti contohnya pada tanggal 8 Maret 2015, perpustakaan AKATIGA ikut meramaikan acara Senja Solidaristas yang digagas oleh One Billion Rising dalam rangka Hari Perempuan Internasional. Kami membuka stand buku kecil-kecilan dan bisa berinteraksi dengan pengunjung yang datang dan bisa memperkenalkan AKATIGA kepada masyarakat luas, supaya masyarakat yang memiliki ketertarikan dengan isu sosial dan membutuhkan hasil penelitian dapat berkunjung ke AKATIGA. Dan benar saja, ada salah satu pengunjung yang sedang mencari hasil-hasil penelitian mengenai kemiskinan dan perempuan. Peneliti muda ini bernama Imelda, dan ia sangat tertarik dengan isu-isu sosial mengakui baru mengetahui ada lembaga penelitian bernama AKATIGA. Maka dapat dikatakan AKATIGA masih harus terus memperkenalkan diri kepada lebih banyak masyarakat, karena ternyata masih banyak

peneliti pegiat isu sosial yang mencari bahan referensi.

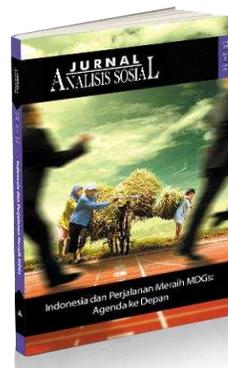
Perpustakaan AKATIGA juga melakukan pengadaan buku baru rutin dan selalu kami update melalui website perpustakaan AKATIGA. Buku baru yang sudah tersedia dan bisa dibaca di tempat, daftarnya dapat dilihat di <http://katalog.akatiga.org/>



PUBLIKASI AKATIGA



Jurnal Analisis Sosial Vol. 18 No. 2/Desember 2013



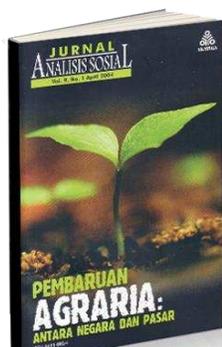
Jurnal Analisis Sosial Vol. 18 No. 1/Agustus 2013



Jurnal Analisis Sosial Vol. 11 No. 1/April 2006



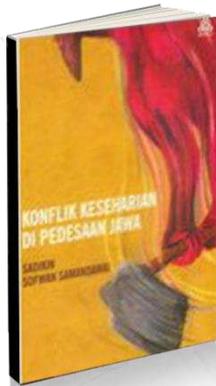
Jurnal Analisis Sosial Vol. 10 No. 2/Oktober 2005



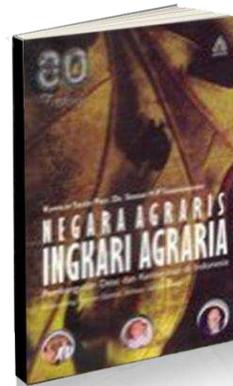
Jurnal Analisis Sosial Vol. 09 No. 1/April 2004



Jurnal Analisis Sosial Vol. 9 No. 3/Desember 2004



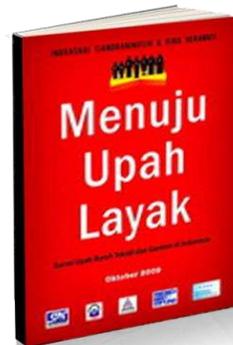
Konflik Keseharian di Pedesaan Jawa



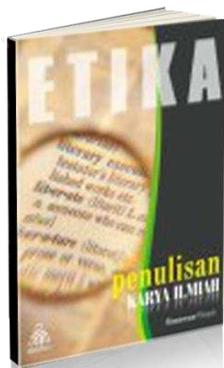
Negara Agraris Ingkari Agraria



Reforma Agraria



Menuju Upah Layak

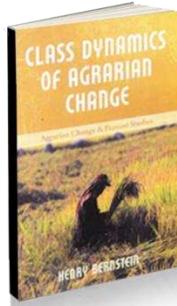


Etika Penulisan Karya Ilmiah



Kapitalisasi Dalam Penghidupan Pedesaan

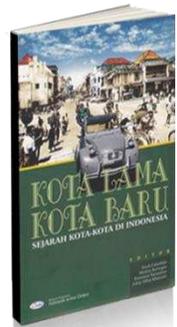
KOLEKSI PERPUSTAKAAN AKATIGA



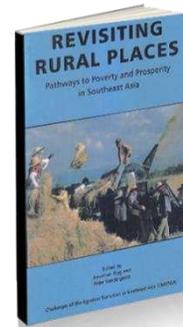
Class Dynamics of Agrarian Change



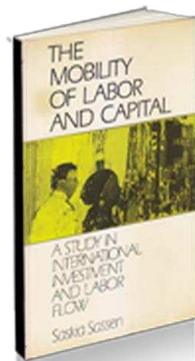
Peasants and The Art of Farming



Kota Lama Kota Baru



Revisiting Rural Places



The Mobility of Labor and Capital



Pekerja Migran Nonpermanen